LKPJ

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022



KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 tepat waktu sesuai amanah perundang-undangan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ. Hal ini senada dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 19 ayat (1) bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran.

Berdasarkan laporan hasil kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam LKPJ Tahun 2022 ini, telah banyak target kinerja yang tercapai walaupun masih terdapat beberapa capaian yang belum optimal. Harus disadari masih terdapat sejumlah persoalan yang harus dipecahkan, agar seluruh target kinerja dapat tercapai. Berkaitan dengan hal tersebut, masukan dan rekomendasi hasil pembahasan DPRD diharapkan menjadi pertimbangan yang penting dalam melakukan sejumlah perbaikan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur pada tahun – tahun selanjutnya

Demikian pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, semoga Laporan ini dapat memberi perbaikan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa akan datang yang pada akhirnya dapat mewujudkan kolaborasi dan harmonisasi bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malili, Maret 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

Drs. H. Budiman, M.Pd

DAFTAR ISI

		hal
HALAMAN JUDUL		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		v
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	DASAR HUKUM	1
	VISI DAN MISI KEPALA DAERAH	2
	DATA UMUM DAERAH	10
	1. Data geografis wilayah	
	2. Topografi	11
	3. Kependudukan	11
	4. Pertumbuhan Penduduk	11
	5. Kepadatan Penduduk	13
	6. Struktur Usia Penduduk	14
	7. ASN	15
	8. Jumlah PNS	15
	9. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	21
	10. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	24
	11. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	28
BAB II	**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**	**30**
BAB III	**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**	**116**
	3.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO	**116**
	3.2 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN -	119
	3.2.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	119
	a) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	119
	b) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	133
	c) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	157
	d) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	183
	e) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	192
	f) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	246
	3.2.2 URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	251
	a) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	251
	b) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	265
	c) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	273
	d) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	278
	e) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	286

f) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ---- 299
g) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa ---- 310
h) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ---- 330
i) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan ---- 344
j) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika ---- 357
k) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah ---- 359
l) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ---- 365
m) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga ---- 376
n) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian ---- 381
o) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik ---- 381
p) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan ---- 382
q) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan ---- 385
r) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan ---- 387
3.2.3 URUSAN PILIHAN ---- 395
a) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan ---- 395
b) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata ---- 410
c) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian ---- 421
d) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan ---- 436
e) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian ---- 443
f) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi ---- 446
3.2.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN ---- 449
a) Unsur Sekretariat Daerah ---- 449
b) Unsur Sekretariat DPRD ---- 476
3.2.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN ---- 500
a) Unsur Keuangan ---- 500
b) Unsur Perencanaan ---- 514
c) Unsur Penelitian dan Pengembangan ---- 528
d) Unsur Kepegawaian,Pendidikan,dan Pelatihan ---- 531
3.2.6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN ---- 545
a) Unsur Pengawasan ---- 545
3.2.7 UNSUR KEWILAYAHAN ---- 556
a) Unsur Kewilayahan ---- 556

3.3 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN ---- 660
3.4 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA ---- 662

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN ---- 667
4.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-PEMBANTUAN -- 667
4.2 HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN ---- 678

BAB V PENUTUP ---- 684

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan……..	5
Tabel 1.2	Capaian Indikator KInerja Utama…….……..……	7
Tabel 1.3	Luas Wilayah dan Persentase menurut Kecamatan Kabupaten Luwu Timur…….……	10
Tabel 1.4	Panjang Sungai Utama di Kabupaten Luwu Timur……	11
Tabel 1.5	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2020 – 2022……..	12
Tabel 1.6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Tahun 2020-2022…….….	13
Tabel 1.7	Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2020 **–** 2022……	13
Tabel 1.8	Struktur Usia Penduduk Tahun 2020-2022……	14
Tabel 1.9	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Luwu TimurTahun 2020-2022……	15
Tabel 1.10	Jumlah PNS Berdasarkan OPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2021……	16
Tabel 1.11	Jumlah PNS berdasarkan golongan, eselon, dan Pendidikan Tahun 2020 – 2022……	18
Tabel 1.12	Klasifikasi PNS Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2020-2022……	19
Tabel 1.13	Jumlah PPPK Berdasarkan Jabatan, Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2022……..	20
Tabel 1.14	Anggaran dan Realisasi Penerimaan PAD Tahun Anggaran 2022……	21
Tabel 1.15	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022……..	22
Tabel 1.16	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022…….	24
Tabel 1.17	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022……..	25
Tabel 1.18	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022……	26
Tabel 1.19	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak TerdugaTahun Anggaran 2022……...	27
Tabel 1.20	Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022……	27
Tabel 1.21	Anggaran dan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan T.A 2022…….	28
Tabel 2.1	Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022……..	31
Tabel 2.2	Perubahan Pendapatan pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022..	33
Tabel 2.3	Perubahan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022……	35
Tabel 2.4	Perubahan Pendapatan Transfer pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022……	37
Tabel 2.5	Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022……...	39
Tabel 2.6	Perubahan Pendapatan Perangkat Daerah pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022…….....	39
Tabel 2.7	Perubahan Belanja pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022……	42
Tabel 2.8	Perubahan Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022……	43
Tabel 2.9	Perubahan Belanja Modal Tahun Anggaran 2022……	45
Tabel 2.10	Perubahan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022……	46
Tabel 2.11	Perubahan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 ……	46

Tabel 2.12	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan……	47
Tabel 2.13	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Kesehatan……	49
Tabel 2.14	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo …….	52
Tabel 2.15	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang……	53
Tabel 2.16	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan……..	56
Tabel 2.17	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Satuan Polisi pamong Praja……	58
Tabel 2.18	Perubahan Program /Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik……	60
Tabel 2.19	Perubahan Anggaran Program/ Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana……	62
Tabel 2.20	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ……	63
Tabel 2.21	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak……..	65
Tabel 2.22	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup……...	68
Tabel 2.23	Perubahan Anggaran Program/ Kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.	71
Tabel 2.24	Perubahan Anggaran Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	73
Tabel 2.25	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana……...	75
Tabel 2.26	Perubahan Anggaran Program/ Kegiatan Dinas Perhubungan……..	76
Tabel 2.27	Perubahan Anggaran Program /Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian……..	79
Tabel 2.28	Perubahan Program/ Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu……	80
Tabel 2.29	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan……...	82
Tabel 2.30	Perubahan Anggaran Program / Kegiatan Dinas Perikanan……...	84
Tabel 2.31	Perubahan Anggaran/Kegiatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga……..	86
Tabel 2.32	Perubahan Anggaran Program /Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan…..	89
Tabel 2.33	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian……	92
Tabel 2.34	Perubahan Anggaran Program / Kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja……..	95
Tabel 2.35	Perubahan Anggaran Program / Kegiatan Sekretariat Daerah……	98
Tabel 2.36	Perubahan Anggaran Program / Kegiatan Sekretariat DPRD ……..……	101
Tabel 2.37	Perubahan Anggaran Program Kegiatan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangunan Daerah……	103
Tabel 2.38	Perubahan Anggaran Program dan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah……..	105
Tabel 2.39	Perubahan Anggaran Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur……...	107
Tabel 2.40	Perubahan Anggaran Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia……..	109
Tabel 2.41	Perubahan Anggaran Program / Kegiatan Inspektorat……	111
Tabel 2.42	Perubahan Rincian Anggaran Belanja Kecamatan Kecamatan Se Kabupaten Luwu	

	Timur Tahun Anggaran 2022……	113
Tabel 2.43	Perubahan Rincian Anggaran Belanja Puskesmas Puskesmas Se Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022……	114
Tabel 2.44	Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022……	115
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Makro Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022……..	118
Tabel 3.2	Pelaksanaan Wajib Urusan Dasar Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022……...	119
Tabel 3.3	Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan DasarKab. Luwu Timur Tahun 2022……..	251
Tabel 3.4	Urusan Pilihan Kab. Luwu Timur tahun 2022……..	395
Tabel 3.5	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun 2022……...	449
Tabel 3.6	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun 2022……	500
Tabel 3.7	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun 2022……	545
Tabel 3.8	Unsur Kewilayahan Kab. Luwu Timur Tahun 2022.....	556
Tabel 3.9	Kebijakan Strategis Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022……...	660
Tabel 3.10	Rekomendasi DPRD dan Tindak Lanjut Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022……	663
Tabel 4.1	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022……	668
Tabel 4.2	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022……	674
Tabel 4.3	Uraian Capaian Kinerja, Permasalahan Dan Solusi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Dan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022……	678

BAB I
PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tersebut didasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewan, kekhususan dan keragaman daerah dalam kerangka Negara Kasatuan Republik Indonesia.

Sesuai Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 71 ayat (2) diamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan Pasal (1) Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

LKPJ Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 disusun dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencanan Kerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, yang merupakan penjabaran tahunan dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. LKPJ Bupati Luwu Timur Akhir Tahun Anggaran 2022 adalah tolok ukur terhadap pencapaian kinerja pembangunan tahunan yang disusun bersama melalui serangkaian tahapan dan mekanisme berbasis Rencana Kerja Pembangunan yang menjadi pedoman, sebagai bahan penyusunan perencanaan dan penganggaran selanjutnya.

1. 1 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Luwu Timur Akhir Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No.7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di provinsi Sulawesi Selatan.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.
14. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;

1.2 Visi dan Misi

Visi adalah sebuah cita-cita luhur yang diharapkan sebagai arahan dan tujuan dari suatu entitas. Dalam suatu pemerintahan, visi diartikan sebagai cita-cita luhur yang menjadi arah dan tujuan utama yang hendak dicapai sebagai pengejawantahan kehendak rakyat. Visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 dibangun diatas kondisi, potensi, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan Kabupaten Luwu Timur yang akan dihadapi hingga tahun 2026.

Visi pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2016 adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 Tahap IV serta penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Perumusan visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 ini disamping mengacu pada RPJPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 Tahap IV, juga mengacu kepada Rencana Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur periode 2021 – 2026 adalah

“ **Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya**” .

Visi tersebut memiliki arti dan makna pada setiap pokok visi, yaitu:

Berkelanjutan : Mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Lebih Maju : Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.

Berlandas nilai agama dan budaya : mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk terus berbenah menjadi lebih maju hanya akan mewujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan untuk menjabarkan visi pembangunan tahun 2021-2026, maka telah dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan daerah, yang terdiri dari:

Misi 1. ***Meningkatkan Kesejahteraan dan Taraf Hidup Masyarakat Secara Menyeluruh*****.** dimaksudkan bahwa dalam kurun waktu 2021-2026 akan dilaksanakan upaya umum agar masyarakat Luwu Timur semakin meningkat kesejahteraan dan taraf hidupnya dengan ditandai oleh meningkatnya PDRB per kapita, menurunnya angka pengangguran, menurunnya rasio jumlah penduduk miskin, meningkatnya indeks pendidikan dan kesehatan, serta meningkatnya daya beli masyarakat

Misi 2. ***Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas.*** dimaksudkan sebagai upaya umum agar perekonomian Luwu Timur terus berkembang. Selain itu juga memiliki kapasitas daya saing yang berbasis pada pertanian olahan mendukung hilirisasi yang pada akhirnya meningkatkan nilai tambah, serta menguatkan struktur ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Perekonomian Luwu Timur tersebut diupayakan berkembang

dengan rantai pasok yang luas karena memiliki berbagai jaringan dalam konteks regional, nasional dan global.

Misi 3. ***Menyediakan Infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.*** dimaksudkan sebagai upaya umum dalam menyediakan infrastruktur wilayah pada berbagai sektor sehingga ketersediaanya lebih memadai dan terakses sampai pada daerah terisolasi. Misi ini juga mencakup upaya dalam menciptakan kondisi lingkungan yang lebih berkualitas dan responsif bencana. Misi ini termanifestasikan dalam bentuk meningkatnya indeks lingkungan hidup, terciptanya kepatuhan multipihak terhadap Rencana Tataruang dan Rencana Wilayah (RTRW), serta peningkatan pada Indeks Kepuasan Masyarakat atas ketersediaan infrastruktur wilayah.

Misi 4. ***Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik***. dimaksudkan bahwa dalam periode 2021-2026 tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Luwu Timur didorong untuk menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ini ditandai dengan upaya-upaya untuk terkelolanya pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif, serta pengembangan kerjasama yang fungsional dan produktif antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa serta dengan berbagai pihak. Misi ini juga mencakup upaya perluasan jangkauan dan intensitas layanan public serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

Misi 5. ***Mewujudkan keterntraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat.*** Misi ini mencakup upaya umum dalam menjamin ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat. Dalam misi ini, ketenteraman dan ketertiban ditempatkan sebagai prasyarat bagi berlangsungnya upaya pembangunan. Dalam konteks itu, mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat seperti mata uang dengan dua sisi yang tak terpisahkan dari pelaksanaan pembangunan

Misi 6. ***Menjamin Keberlangsungan Pembangunan yang Berbasis pada agama dan budaya.*** dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat memberi jaminan terhadap keberlangsungan pembangunan di masa depan. Misi ini mengasumsikan bahwa ketersediaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia lebih prospektif lagi bagi masa depan Luwu Timur ketika proses atau pelaksanaan pembangunan didasari dengan nilai-nilai agama dan budaya. Nilai-nilai agama dan budaya tersebut menjadi sangat penting artinya. Ini telah ditunjukkan oleh sejarah perkembangan Luwu Timur di masa lalu yang masyarakatnya hidup dan berkembang dengan keberagamaan yang kuat serta penghayatan dan praktik budaya yang tinggi. Nilai-nilai agama dan budaya ini juga relevan dalam konteks keberlanjutan pembangunan, karena dari keduanya para penyelenggara pembangunan dapat termotivasi untuk mengendalikan diri terhadap berbagai kemungkinan rusaknya tatanan keluarga, masyarakat, dan lingkungan fisik manusia.

Adapun hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan kabupaten Luwu Timur berdasarkan RPJMD kabupaten Luwu Timur 2021-2026. Sebagai berikut:

Tabel 1.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya			
1	Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (T1)	Meningkatnya Kualitas manusia yang berdaya saing (S1)	Mendorong kontribusi dunia usaha, kesadaran kritis kolektif, dan dukungan sarana/prasarana dalam meningkatkan derajat pendidikan dan literasi, lama hidup dan kesehatan, serta daya beli masyarakat. (St1)
		Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (S2)	Mengoptimalkan pemanfaatan dana dan koordinasi perangkat daerah dengan pemerintah desa dalam memperkuat ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi desa dalam kerangka pemenuhan SDGs Desa (St2)
		Meningkatnya Pemberdayaan Gender (S3)	Menguatkan Peran dan Kapasitas Perempuan dalam Pembangunan (St3
Misi 2 Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas (M2)			
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan (T2)	Meningkatnya realisasi investasi Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah (S4)	Memanfaatkan teknologi terkini dan spirit milenial dalam meningkatkan produktivitas komoditas unggulan dengan didukung oleh inovasi daerah dan prasarana/sarana perdagangan(St4)
		ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha	Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan perkembangan start-up UMKM berbasis digital yang didukung oleh iklim investasi dan persaingan usaha yang baik (St5)
Misi 3 Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)			
3	Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah secara berkelanjutan (T3)	Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S6)	Meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan dalam menjaga dan memelihara fungsi infrastruktur pekerjaan umum, perhubungan, pemukiman dan perumahan, serta sumberdaya air secara berkualitas diiringi

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
			dengan kepatuhan terhadap RTRW (St6)
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (S7)	Memperkuat sistem pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati berbasis kontribusi multi pemangku kepentingan diiringi dengan peningkatan kapasitas dalam adaptasi dan mitigasi terhadap risiko bencana dan perubahan iklim (St7)
Misi 4 Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4)			
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T4)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S8)	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan perbaikan tata kelola keungan daerah diiringi dengan peningkatan profesionalisme SDM aparatur berbasis jabatan fungsional (St8)
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S9)	Meningkatkan akurasi data, kesiapan sarana dan fasilitas, serta kesiapan SDM aparatur diiringi dengan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi serta standar operasional prosedur dalam pemenuhan SPM pelayanan dasar dan perbaikan kualitas pelayanan non SPM (St9)
Misi 5 Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat (M5)			
5	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketentraman (T5)	Terpeliharanya Rasa Aman dan damai dalam masyarakat	Menguatkan peran kelembagaan masyarakat secara bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban serta rasa aman dan damai dalam masyarakat (St10)
Misi 6 Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya (M6)			
6	Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah (T6)	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S11)	Memperkuat peran forum kerukunan umat beragama serta pembinaan mental-spiritual diiringi dengan penguatan modal keragaman etnik dan suku dalam pemajuan kebudayaan (St11)

Adapun capaian misi RPJMD 2021-2026 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel1.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Misi/Tujuan/Sas /Program Pembangun	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja tahun 2022	Capaian Kinerja tahun 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Visi: Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya					
1	Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M1)	**Tujuan-1:**				
		Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (T1)	1 Angka Kemiskinan	%	6,64	6,81
		Sasaran-1:				
		Meningkatnya Kualitas manusia yang berdaya saing (S1)	2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	73,80	73,92
		Sasaran-2:				
		Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (S2)	3 Indeks Desa Membangun (IDM)	Status Desa	Maju	10 desa status Mandiri (bertambah 3 desa) , dan 46 desa status Maju (bertambah 24 desa) lainnya berkembang
		Sasaran-3:				
		Meningkatnya Pemberdayaan Gender (S3)	4 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Nilai	89,94	106,54
2	Mengembangkan perekonomian daerah	**Tujuan-2:**				
		Meningkatkan pertumbuhan	5 Pertumbuhan Ekonomi	%	2,49-3,33	1,99

No	Misi/Tujuan/Sas /Program Pembangun	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Indikator		Satuan	Target Capaian Kinerja tahun 2022	Capaian Kinerja tahun 2022
	yang berdaya saing dan berjaringan luas (M2)	ekonomi daerah yang berkeadilan (T2)	6	Rasio Gini	Nilai	0.389	0,394
		Sasaran-4					
		Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah (S4)	7	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	%	1.83	- 1,84
		Sasaran-5:					
		ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha (S5)	8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3.3	4,48
3	Menyediaan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)	**Tujuan-3:**					
		Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah secara berkelanjutan (T3)	9	Indeks daya saing infrastruktur daerah	nilai	18,150 (Sedang)	Belum rilis
		Sasaran-6:					
		Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S6)	10	Indeks kepuasan layanan infrastruktur	Nilai	74,89	Belum rilis
		Sasaran-7:					
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (S7)	11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	Point	87,55	88,70
			12	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	202 (Tinggi)	176,14 (Tinggi)
4	Menciptakan	**Tujuan-4:**					

No	Misi/Tujuan/Sas /Program Pembangun	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Indikator		Satuan	Target Capaian Kinerja tahun 2022	Capaian Kinerja tahun 2022
	kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4)	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T4)	13	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Predikat	CC	Belum rilis
		Sasaran-8:					
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S8)	14	Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD)	Predikat	A (Baik)	Belum rilis
			15	Nilai SAKIP Daerah	Predikat	BB	Belum rilis
		Sasaran-9:					
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S9)	16	IKM Pelayanan SPM (Nilai)	Nilai	82,42	Belum rilis
			17	IKM Pelayanan Perijinan dan non Perijinan (Nilai)	Nilai	82,21	87,80
5	Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat (M5)	**Tujuan-5:**					
		Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketentraman (T5)	18	Angka Kriminalitas	Point	0,000643	0,000562
		Sasaran-10:					
		Terpeliharanya Rasa Aman dan damai dalam masyarakat	19	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	Nilai	76,72	64,88
6	Menjamin	**Tujuan-6:**					

No	Misi/Tujuan/Sas /Program Pembangun	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Indikator		Satuan	Target Capaian Kinerja tahun 2022	Capaian Kinerja tahun 2022
	keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya (M6)	Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah (T6)	20	Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	75,89	Belum rilis
			21	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	54.27	Belum rilis
		Sasaran-11:					
		Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S11)	22	Cakupan penerapan nilai Agama dalam masyarakat	%	95	57,82
			23	Cakupan penerapan nilai budaya dalam masyarakat	%	95	Belum rilis

1.3. Data Umum Daerah

1.3.1. Data Geografis Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.748,62 Km² atau sekitar 14,76 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. dan berada diketinggian 0–1.20 m di atas permukaan laut (dpl).

Kabupaten Luwu Timur secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan, 124 Desa dan 3 Kelurahan. Adapun 11 Kecamatan, yaitu Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, Mangkutana, dan Kalaena. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Towuti yang mencapai 2.079,89 km^2 atau sekitar 30,82 persen dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Malili merupakan ibu kota Kabupaten Luwu Timur terletak ±550 km sebelah utara kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan dapat dicapai dengan perjalanan darat (±12 jam) ataupun udara (Bandara Sorowako ±45 menit dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar). Adapun luas wilayah berdasarkan kecamatan sebagai berikut:

Tabel 1.3
Luas Wilayah dan Persentase menurut Kecamatan
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Luas Wilayah (Ha)	(%)
1	Burau	298,13	29.813,89	4,42
2	Wotu	146,81	14.681,61	2,18
3	Tomoni	251,52	25.152,21	3,73
4	Tomoni Timur	49,43	4.943,41	0,73
5	Angkona	293,96	29.396,53	4,36
6	Malili	746,93	74.693,21	11,07
7	Towuti	2.078,89	207.989,91	30,82
8	Nuha	756,71	75.671,60	11,21
9	Wasuponda	920,67	92.067,87	13,64
10	Mangkutana	1.119,59	111.959,07	16,59
11	Kalaena	84,93	8.493,48	1,26
Total		**6.748,62**	**674.862,99**	**100,00**

Sumber data : Dokumen Matek Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur 2022-2042 ,2022

Kemiringan lereng diatas 40% perlu ditetapkan sebagai kawasan lindung/konservasi untuk tujuan perlindungan terhadap areal yang ada dibawahnya dan tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pertanian terutama kegiatan ekstensifikasi pertanian. Terdapat 14 sungai yang mengalir di Wilayah Kabupaten Luwu Timur, 9 diantaranya adalah sungai utama. Sungai terpanjang adalah sungai Kalaena dengan panjang 85 Km. Sedangkan sungai terpendek adalah sungai Bambalu dengan panjang 15 Km. Panjang sungai utama Kabupaten Luwu Timur dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4
Panjang Sungai Utama di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

Nama Sungai	Daerah Aliran	Panjang Sungai (Km)
Larona	Kec. Nuha	60
Ussu	Kec.Wasuponda dan Malili	30
Cerekang	Kec. Wasponda dan Malili	50
Angkona	Kec. Angkona	48
Kalaena	Kec. Mangkutana, Tomoni dan Kalaena	85
Powosoi	Kec. Mangkutana, Tomoni, Wotu	18
Singgeni	Kec. Burau	24
Bambalu	Kec. Burau	15
Pongkeru	Kec. Malili	33,5

Sumber: Profil Kab Luwu Timur Tahun 2019

Selain itu, di Kabupaten Luwu Timur juga terdapat 5 danau. Kelima danau tersebut adalah Danau Matano (dengan luas 245,70 km^2) terletak di Kecamatan Nuha, Danau Mahalona (25 km^2), Danau Towuti (585 km^2), Danau Tapparang Masapi (2,43 km^2) dan Danau Lantoa (1,72 km^2) terletak di Kecamatan Towuti.

1.3.2 Topografi

Kabupaten Luwu Timur yang sebagian besar wilayahnya berada pada kawasan Pegunungan Verbeck merupakan daerah yang bertopografi pegunungan. Namun di beberapa tempat merupakan daerah dataran hingga rawa-rawa. Wilayah-wilayah yang bergunung adalah bagian utara dan barat sedangkan wilayah dataran adalah bagian selatan dan barat. Kondisi datar sampai landai terdapat pada semua wilayah kecamatan dengan yang terluas di Kecamatan Angkona, Burau, Wotu, Malili dan Mangkutana. Sedangkan kondisi bergelombang dan bergunung yang terluas di Kecamatan Nuha, Mangkutana dan Towuti.

Kabupaten Luwu Timur didominasi oleh wilayah pegunungan (422.306,86 Ha), hal ini menandakan bahwa sebagian besar wilayah ini berada pada ketinggian. Jika dilihat posisi wilayah ini dari permukaan laut, maka Kabupaten Luwu Timur dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu: 0 – 25 m, 25 – 100m, 100 – 500m, 500 – 1000m dan >1000m. Sebagian besar wilayah Kecamatan Nuha berada pada daerah pegunungan, sedangkan Angkona dan Wotu didominasi oleh daerah dataran. Sesuai dengan kondisi topografi, maka ketinggian juga menunjukkan bahwa Kecamatan Nuha dan Kecamatan Towuti didominasi oleh pegunungan berada pada ketinggian di atas 1000 mdpl.

1.3.3 Kependudukan

1.3.3.1 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dipengaruhi factor-faktor demograsfis yang meliputi migrasi, kelahiran dan kematian. Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan data semester II (bulan Desember) tahun 2022 pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 308.530 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, terdapat pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 1,16 % atau bertambah sebanyak 3.592 Jiwa.

Jumlah Penduduk per kecamatantahun 2020 s.d tahun 2022 dapat diliihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2020 - 2022

NO	Kecamatan	TAHUN		
		2020	2021	2022*
1	Burau	35.100	35.292	35.303
2	Wotu	33.732	33.925	34.171
3	Tomoni	26.773	26.930	27.346
4	Tomoni Timur	13.649	13.670	13.748
5	Angkona	25.303	25.432	25.556
6	Malili	43.421	44.096	45.178
7	Towuti	43.597	44.899	46.120
8	Nuha	23.755	23.962	24.356
9	Wasuponda	21.975	22.015	22,142
10	Mangkutana	22.437	22.363	22.351
11	Kalaena	12.297	12.345	12,259
LUWU TIMUR		**302.039**	**304.938**	**308.530**

*Sumber:Disdukcapil Kab. Luwu Timur, * Data Sementara Semester II Tahun 2022*

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 sebesar 308.530 jiwa terdiri dari penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 159.043 jiwa dan perempuan sebanyak 149.487 jiwa. Jika dibandingkan pada tahun 2021. Maka terdapat kenaikan jumlah penduduk laki-laki sebesar 1.676 jiwa atau bertumbuh 1.,05%. dan jumlah perempuan sebesar 1.916 jiwa (1,28%).

Jumlah Kepala Keluarga (KK) juga mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Dari sebelumnya pada tahun 2021 berjumlah 91.006 KK. naik menjadi 95.620 KK pada tahun 2022. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan KK dari tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Tahun 2020-2022

No	Tahun	Penduduk			Jumlah KK
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2020	155.726	146.313	302.039	89.380
2	2021	157.367	147.571	304.938	91.006
3	2022*	159.043	149.487	308.530	95.620

*Sumber: Disdukcapil Kab. Luwu Timur, * Data Sementara Semester II Tahun 2022*

1.3.3.2 Kepadatan Penduduk

Angka Kepadatan Penduduk merupakan perbandingan jumlah penduduk (jiwa) dengan luas wilayah (km^2). Dengan luas **6.944,88** km^2, Pada Tahun 2022 Kabupaten Luwu Timur didiami oleh penduduk sebanyak **308.530** jiwa dengan angka kepadatan penduduk **44,43** artinya setiap km^2 didiami **44** jiwa.

Kecamatan dengan Kepadatan Penduduk tertinggi berada di kecamatan Tomoni Timur yaitu 313,09 jiwa/km^2 dan terendah di Kecamatan Mangkutana 17,17 jiwa/km2 dan Wasuponda sebesar 17,80 jiwa/km2. Kepadatan penduduk per kecamatan tahun 2020-2022 dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.7
Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2020 – 2022

NO	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)**	2020 (jiwa/Km^2)	2021 (jiwa/Km^2)	2022* (Juni) (jiwa/Km^2)
1	Burau	256.23	137	138	137,78
2	Wotu	130.52	258	260	259,82
3	Tomoni	230.09	116	117	118,85
4	Tomoni Timur	43.91	311	313	313,09
5	Angkona	147.24	172	173	173,57
6	Malili	921.20	47	47	49,04
7	Towuti	1.820,48	24	24	25,33
8	Nuha	808.27	29	29	30,13
9	Wasuponda	1.244,00	18	18	17,80
10	Mangkutana	1.300,96	17	17	17,17
11	Kalaena	41.98	293	294	292,02
LUWU TIMUR		**6.944,88**	**43**	**44**	**44,43**

*Sumber: Disdukcapil Kab. Luwu Timur, * Data Sementara Semester II Tahun 2022*
*** Data Luas wilayah berdasarkan RTRW Tahun 2011*

1.3.3.3 Struktur Usia Penduduk

Karakteristik penduduk menurut kelompok umur dapat di lihat pada tabel di bawah ini . Pembagian penduduk pada kategori ini akan membantu menyusun perencanaan pemenuhan dasar bagi penduduk sesuai kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papa, pendidikan,kesehatan, pekerjaan atau yang lainnya.

Tabel 1.8

Struktur Usia Penduduk Tahun 2020-2022

No	Kelompok Usia	Tahun		
		2020	2021	2022*
1	0 – 4	26.226	26.006	26.750
2	5 – 9	29.869	29.675	29.611
3	10 – 14	30.423	30.479	30.120
4	15 – 19	28.471	26.424	24.989
5	20 – 24	27.425	28.431	29.253
6	25 – 29	23.386	24.561	25.221
7	30 – 34	22.342	22.400	22.655
8	35 – 39	24.027	24.301	23.430
9	40 – 44	23.047	23.468	24.102
10	45 – 49	19.128	19.824	20.412
11	50 – 54	14.404	15.432	16.817
12	55 – 59	10.212	10.800	11.049
13	60 – 64	8.285	8.113	8.564
14	65+	14.794	15.024	15.557

*sumber: Disdukcapil Kab. Luwu Timur, * Data Sementara Semester II Tahun 2022*

Dari tabel tersebut diatas diketahui bahwa penduduk usia muda (usia 0-14 tahun) berangsur-angsur memasuki usia produktif. Tahun 2020 penduduk usia muda sebesar 28.84% dari jumlah penduduk. Turun menjadi 28.25% pada tahun 2021. dan kemudian menurun menjadi 28,03% pada tahun 2022. Sementara itu penduduk dengan usia produktif di Kabupaten Luwu Timur (usia 15-64 tahun) juga bertambah. Pada tahun 2020 usia produktif sebesar 66.46% dari jumlah penduduk. naik menjadi 66.82% pada tahun 2021. Kemudian bertambah menjadi 66,93% pada tahun 2022.

Rasio ketergantungan merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan usia diatas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin besarnya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk non produktif. Rasio ketergantungan di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.9
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2020- 2022

Kelompok Umur	Tahun		
	2020	2021	2022*
0 - 14 tahun	86,518	86,160	86.481
15 - 64 tahun	200,727	203,754	206.492
65+	14,794	15,024	15.557
Jumlah penduduk Usia tidak Produktif	101,312	101,184	102.038
Rasio Ketergantungan	**50,47**	**49,65**	**49,41**

*Sumber: Disdukcapil Kab. Luwu Timur, *Data Sementara Semester II Tahun 2022*

Dari table di atas secara keseluruhan Kabupaten Luwu Timur di Tahun 2022 memiliki Rasio Ketergantungan sebesar 49,41, yang dapat diartikan setiap 100 penduduk Kabupaten Luwu Timur yang Produktif memiliki tanggungan sebanyak 49-50 jiwa penduduk yang belum produktif (usia 0-14 tahun) dan yang dianggap tidak produktif lagi (usia 65 tahun ke atas).

1.3.4. Aparatur Sipil Negera (ASN)

Merujuk pada Pasal (1) Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.

ASN Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2022 sebanyak 4.506 orang. Bertambah 458 orang jika dibandingkan dengan data ASN pada tahun 2021 yaitu sebanyak 4.048 orang.

1.3.4.1 Jumlah PNS

PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur ini tersebar di beberapa unit kerja/Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jumlah PNS Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2022 yang tersebar di beberapa OPD dapat dilhat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.10
Jumlah PNS Berdasarkan OPD Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2020 - 2021

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI		
		THN 2020	THN 2021	THN 2022
1	SEKRETARIAT DAERAH	78	81	82
2	SEKRETARIAT DPRD	25	22	21
3	INSPEKTORAT	46	44	45
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	56	50	56
5	DINAS KESEHATAN	58	69	73
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	87	85	87
7	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	23	19	18
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	44	40	39
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	0	9	14
10	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	23	20	19
11	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	26	27	25
12	DINAS PERIKANAN	27	30	24
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	26	22	25
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	20	20	18
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	21	17	16
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17	17	19
17	DINAS PERHUBUNGAN	24	27	28
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	19	21	21
19	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	22	22	23
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	18	21	19
21	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	24	23	21
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	24	30	28
23	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	196	193	196
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	24	26	26
25	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	44	34	27
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0	11	24
27	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	27	28	27

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI		
		THN 2020	THN 2021	THN 2022
	DAERAH			
28	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15	15	11
29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9	11	12
30	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO	213	223	228
31	KEC. BURAU	24	22	23
32	KEC. WOTU	23	22	21
33	KEC. TOMONI	18	19	17
34	KEC. MANGKUTANA	22	18	18
35	KEC. TOMONI TIMUR	16	15	15
36	KEC. KALAENA	14	16	17
37	KEC. ANGKONA	18	17	19
38	KEC. MALILI	17	16	14
39	KEC. WASUPONDA	16	16	16
40	KEC. NUHA	15	16	15
41	KEC. TOWUTI	25	27	25
42	KEL. MAGANI	8	7	8
43	KEL. MALILI	6	5	7
44	KEL. TOMONI	8	10	11
45	PUSKESMAS BURAU	56	43	40
46	PUSKESMAS WOTU	59	55	60
47	PUSKESMAS TOMONI	55	60	57
48	PUSKESMAS MANGKUTANA	57	58	57
49	PUSKESMAS TOMONI TIMUR	40	43	42
50	PUSKESMAS KALAENA	37	37	38
51	PUSKESMAS ANGKONA	47	41	40
52	PUSKESMAS LAKAWALI KEC. MALILI	24	29	37
53	PUSKESMAS MALILI	72	74	76
54	PUSKESMAS LAMPIA KEC. MALILI	36	35	33
55	PUSKESMAS WASUPONDA	44	47	48
56	PUSKESMAS PARUMPANAI KEC. WASUPONDA	12	17	19
57	PUSKESMAS NUHA	64	62	62

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI		
		THN 2020	THN 2021	THN 2022
58	PUSKESMAS WAWONDULA KEC. TOWUTI	51	53	55
59	PUSKESMAS TIMAMPU KEC. TOWUTI	32	31	32
60	PUSKESMAS MAHALONA KEC. TOWUTI	23	21	22
61	PUSKESMAS BANTILANG KEC. TOWUTI	21	21	24
62	PUSKESMAS BONE PUTE	0	24	33
63	TAMAN KANAK KANAK (TK)	48	47	47
64	SEKOLAH DASAR (SD)	1093	1095	1061
65	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)	550	559	530
	JUMLAH	**3887**	**3935**	**3911**

Sumber: BKPSDM Luwu Timur Tahun 2022

Sumberdaya manusia ASN Kabupaten Luwu Timur adalah salah faktor penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Distribusi ASN ke beberapa OPD Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan secara proporsional sehingga diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi organisasi.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berstatus aktif di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 sebanyak 3.911 Orang. Jumlah ini berkurang jika dibandingkan dengan jumlah PNS pada tahun 2021 yang disebabkan oleh berbagai factor antara purnabakti, mutase dan lain-lain. Jumlah PNS berdasarkan golongan, eselon dan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.11

Jumlah PNS berdasarkan golongan, eselon, dan pendidikan

Tahun 2020 – 2022

No	Berdasarkan	Uraian	Jenis Kelamin 2020		Total Tahun 2020	Jenis Kelamin 2021		Total Tahun 2021	Jenis Kelamin 2022		Total Tahun 2022
			L	P		L	P		L	P	
1	Golongan	I	2	7	3887	7	1	3935	7	0	3911
		II	224	271		261	234		202	180	
		III	1788	798		801	1815		827	1826	
		IV	418	379		372	444		378	491	
3	Eselon	II-A	1	0	528	1	0	375	1	0	398
		II-B	4	22		22	5		25	5	
		III-A	11	35		41	12		40	13	
		III-B	24	67		67	34		71	33	
		IV-A	173	145		67	91		73	99	
		IV-B	19	27		21	14		22	16	

No	Berdasarkan	Uraian	Jenis Kelamin 2020		Total Tahun 2020	Jenis Kelamin 2021		Total Tahun 2021	Jenis Kelamin 2022		Total Tahun 2022
			L	P		L	P		L	P	
		NON ESELON	2201	1158	3359	1222	2338	3560	1182	2331	3513
4	Pendidikan	SD	10	0	3887	9	0	3935	5	0	3911
		SLTP	3	10		11	2		6	1	
		SLTA	157	285		273	155		227	120	
		DI-DIII	538	150		147	554		138	538	
		S1	1684	941		930	1710		959	1756	
		S2	50	58		70	73		78	82	
		S3	1	0		1			1	0	
5	Fungsional	Ahli	1022	1025	2559	738	1524	2757	741	1652	2936
		Terampil	398	114		226	269		415	128	

Sumber: BKPSDM Luwu Timur Tahun 2022

Sesuai tabel diatas, pada tahun 2022 eselon (tingkatan jabatan struktural) II sebanyak 31 orang, eselon III sebanyak 157 orang, dan eselon IV sebanyak 210 orang, dan non eselon sebanyak 3.513 orang. PNS yang menduduki eselon pada tahun 2022 sebanyak 398 orang. Tenaga fungsional bertambah dari 2.757 orang pada tahun 2021 naik menjadi 2.936 orang atau sekitar 75,1% dari jumlah seluruh PNS di tahun 2022.

Klasifikasi PNS menurut usia berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur (BKPSDM) Kabupaten Luwu Timur tahun 2022, memperlihatkan bahwa usia 36 – 40 tahun merupakan usia yang paling banyak dari jumlah seluruh PNS yaitu mencapai 864 orang (22.1%). PNS dengan usia 20 – 25 sebanyak 362 orang (9,26%) merupakan PNS dengan usia yang paling sedikit. Klasifikasi PNS berdasarkan usia dan jenis kelamin tahun 2020 – 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.12

Klasifikasi PNS Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2020-2022

No	Usia	Tahun								
		2020			2021			2022		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	20 - 25	3	1	4	5	9	14	7	18	25
2	26 - 30	30	75	105	45	109	154	55	124	179
3	31 - 35	85	263	348	94	291	385	98	301	399
4	36 - 40	220	632	852	222	640	862	223	641	864
5	41 - 45	281	276	828	288	542	830	289	542	831
6	46 - 50	281	353	634	281	353	634	279	352	631
7	51 - 55	282	347	629	280	343	623	277	343	620

No	Usia	Tahun								
		2020			2021			2022		
		L	P	Jumlah	*L*	P	Jumlah	L	P	Jumlah
8	56 - 60	236	206	442	218	203	421	186	176	362
9	61 - 65	28	17	45	9	3	12	0	0	0
Jumlah Total				**3887**			**3935**			**3911**

Sumber: BKPSDM Luwu Timur Tahun 2022

Berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, usia pensiun PNS bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, fungsional ahli pertama dan pejabat fungsional keterampilan adalah berusia 58 tahun. usia 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya serta usia 65 tahun bagi pejabat fungsional ahli utama. Dari tabel 1.9 tersebut diatas, terdapat pengurangan jumlah pegawai pada tahun 2022 sebanyak 24 orang karena sudah masuk masa pensiun.

1.3.4.2 Jumlah PPPK

ASN Kabupaten Luwu Timur dengan status PPPK sampai dengan tahun 2022 berjumlah 595 orang. Bertambah 482 orang jika dibandingkan pada tahun 2021 yang berjumlah 113 orang. Jumlah PPPK berdasarkan kualifikasi jabatan, pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.13
Jumlah PPPK Berdasarkan Jabatan, Pendidikan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2022

No	Kualifikasi Jabatan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total		
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SLTP/ Se derajat		SD/ Se derajat				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L+P
Tahun 2021																
1	Kesehatan					1	1							1	1	2
2	Guru			22	85									22	85	107
3	Teknis			3					1					3	1	4
Jumlah		0	0	25	85	1	1	0	1	0	0	0	0	26	87	113
Tahun 2022																
1	Guru			93	389									93	389	482
Jumlah		0	0	93	389	0	0	0	0	0	0	0	0	93	389	482

Sumber: BKPSDM Kab. Luwu Timur Tahun 2022

Pada tahun 2021, pengangkatan PPPK dkhususkan menerima 3 jenis kualifikasi yaitu bidang kesehatan sebanyak 2 orang, guru sebanyak 107 orang dan teknis sebanyak 4 orang. Sementara pada tahun 2022 formasi penerimaan hanya

terbuka untuk kualifikasi guru sebanyak 482 orang.

1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menetapkan target Pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp **1,616,869,357,811**,00 dan terealisasi sebesar Rp1.732.654.721.069,29 atau 107,16% yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan daerah yang memiliki posisi strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, karena digunakan untuk membiayai belanja pembangunan daerah setiap tahunnya. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Adapun rincian PAD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.14
Anggaran dan Realisasi Penerimaan PAD Tahun Anggaran 2022

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**325,302,193,230**	**341.258.357.609,43**	**104,91**
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	189,380,000,000	202.810.479.953,20	107,09
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4,833,681,025	3,181,939,987,00	65,83
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	23,740,807,304	23,740,807,304	100,00
4.1.4	Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	107,347,704,901	111,525,130,365,23	103,89

Sumber : LRA BPKD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)

Dari tabel di atas terlihat bahwa total Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 sebesar Rp. 325,302,193,230,00 dengan realisasi sebesar Rp 341.258.357.609,43 atau 104,91% yang terdiri dari Pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah dari anggaran Rp.189,380,000,000 dengan realisasi sebesar Rp 202.810.479.953,20 atau 107,09%, realisasi pendapatan terbesar dari sektor pajak daerah diperoleh pada Bea perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB), Retribusi Daerah dari Anggaran Rp.4.833.681.025,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.181.939.987,00 atau 65,83%, Restribusi Daerah tidak tercapai optimal antara lain disebabkan oleh tidak tercapainya target Restribusi Jasa umum khususnya pada target restribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang dianggarkan sebesar Rp.23.740.807.304,00 terealisasi sebesar Rp.23.740.807.304,00 atau 100,00%, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dianggarkan sebesar Rp.107.347.704.901,00 terealisasi sebesar Rp 111,525,130,365,23 atau 103,89%,. Capaian realisasi yang lebih ini antara lain diperoleh dari pendapatan BLUD. Berdasarkan nilai realisasi tersebut diatas, maka kontribusi masing-masing jenis pendapatan terhadap total Penerimaan PAD yaitu, persentase tertinggi terdapat pada Pajak Daerah sebesar 59,43%, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 32,68%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 6,96% dan Hasil Retribusi Daerah sebesar 0,93% dari realisasi anggaran pendapatan asli daerah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan dana yang bersumber dari pendapatan ABPD Provinsi yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pendapatan Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Dana Transfer dalam APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.15

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 *)

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1,223,583,544,713.00**	**1,330,514,747,320,86**	**108,74**
4.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1,021,000,629,629.00**	**1,108,810,602,294,00**	**108,60**
4.2.1.01	Dana Perimbangan	917,997,542,629.00	1,005,807,515,,294,00	109,57
4.2.1.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	197,842,828,926.00	309,861,621,281,00	156,62

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4.2.1.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	502,553,133,000.00	501,023,438,250,00	99,70
4.2.1.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	92,572,224,703.00	91,880.968,418,00	99,25
4.2.1.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	125,029,356,000.00	103,167,208,345,00	82,51
4.2.1.01.05	Dana Desa	103,003,087,000.00	103,003,087,000.00	100,00
4.2.2	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**202.582.915.084**	**221,704,145,026,00**	**109,44**
4.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	187.835.890.084	206,876,727,007,00	**110,14**
4.2.2.02	Bantuan Keuangan	14,747,025,000.00	14,827,418,019,86	100,55

*Sumber : * LRA BPKD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)*

Dari tabel di atas Total Anggaran Dana Transfer Kabupaten Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1,223,583,544,713.00 dan terealisasi sebesar Rp1,330,514,747,320,86 atau 108,74%. Dana Transfer berupa Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dianggarkan sebesar Rp 197,842,828,926.00 terealisasi sebesar Rp 309,861,621,281,00 atau 156,62%, pelampauan target Dana Bagi Hasil diperoleh antara lain dari DBH Pajak Bumi dan Bangunan dan Dana Bagi Hasi Sumber Daya Alam (SDA). Sementara Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp 502,553,133,000.00 terealisasi sebesar Rp 501,023,438,250,00 atau 99,70%, dana alokasi khusus (DAK) Fisik dianggarkan sebesar Rp92,572,224,703.00 terealisasi sebesar Rp 91,880.968,418,00 atau 99,25%, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dianggarkan sebesar Rp125,029,356,000.00 terealisasi sebesar Rp103,167,208,345,00 atau 82,51% dan Dana Desa dianggarkan sebesar Rp103,003,087,000.00 terealisasi sebesar Rp 103,003,087,000.00 atau 100,00%.

Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp 202,582,915,084.00 dan terealisasi sebesar Rp 221,704,145,026,00 atau 109,44%, yang terdiri dari dana bagi hasil pajak daerah dianggarkan Rp 187,835,890,084.00 dan terealisasi sebesar Rp 206,876,727,007,00

atau 110,14 %. Pelampauan target pada pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor. dan bantuan keuangan dianggarkan sebesar Rp 14,747,025,000.00 terealisasi Rp 14,827,418,019,00 atau sebesar 100,55% yang antara lain merupakan pendapatan bantuan keuangan Umum dan Bantuan keuangan khusus dari provinsi Sulawesi Selatan.

3. Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan penerimaan dari hibah, dana darurat, dan/atau lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.16
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 *)

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah	**67,983,619,868.00**	**60,881,616,139,00**	**89,55**
	Pendapatan Hibah	**49,102,000,000.00**	42,436,704,251,00	86,43
	Lain Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	**18,881,619,868.00**	18,444,911,888,00	97,69

Sumber : LRA BPKD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)

Dari tabel di atas, penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp 67,983,619,868.00 terealisasi sebesar Rp60.881.616.139,00 atau 89,55% karena beberapa komponen penerimaan pendukungnya tak mencapai target yang ditetapkan. Pendapatan Hibah direncanakan sebesar Rp 49,102,000,000.00 terealisasi sebesar Rp 42.436.704.251,00 atau 86,43% dimana pendapatan hibah ini antara lain diperoleh dari Hibah listrik dan scrab PT.Vale Indonesia,Tbk. Dan Pendapatan Lain Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan ditargetkan sebesar Rp 18,881,619,868.00 terealisasi sebesar Rp.18.444.911.888,00 atau 97,69% yang diperoleh dari pendapatan dana jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

1.3.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.724.113.886.050,00 dan direalisasikan sebesar Rp 1.666.267.854.429,42 atau mencapai 96,64%.

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Anggaran Belanja Operasi Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 1.101.225.155.728,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.060.208.662.323,49 atau 96,28% sebagaimana pada table berikut:

Tabel 1.17

Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.1	**Belanja Operasi**	**1,101,225,155,728,00**	1.060.208.662.323,49	96,28%
5.1.1	Belanja Pegawai	495.837.789.291,00	486.820.782.784,00	98,18
5.1.3	Belanja Barang dan Jasa	506.276.098.170,00	486.677.113.079,43	96,13
5.1.4	Belanja Subsidi	2,000,000,000	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	90.579.422.767,00	80.641.627.360,06	89,03
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	6.531.845.500,00	6.069.139.100,00	92,92

Sumber : LRA BPKD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)

Belanja Berdasarkan tabel di atas, belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp495.837.789.291,00,00 terealisasi Rp486.820.782.784,00 atau 98,18%, Belanja pegawai ini antara lain meliputi Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, KDH/WKDH, Tambahan Penghasilan ASN.Sementara Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp506.276.098.170,00 terealisasi Rp486.677.113.079,43 atau 96,13. Realiasasi belanja Barang dan jasa dipengaruhi oleh komponen Belanja antara lain belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang yang diserahkan ke pihak ketiga/pihak lain/masyarakat berupa hadiah atau beasiswa. Belanja Subsidi dianggarkan Rp2.000.000.000,00 yang dipersiapkan untuk rencana operasional bandara Sorowako namun tidak terealisasi, Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp90.579.422.767,00 terealisasi Rp80.641.627.360,06 atau 89,03%, Komponen belaja hibah ini antara lain hibah ke pengurus Rumah ibadah dan kelompok masyarakat. Dan untuk Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp6.531.845.500,00 terealisasi Rp6.069.139.100,00 atau 92,92%, dimana realisasi ini merupakan bagian dari belanja beasiswa kurang mampu yang menjadi program pemerintah daerah selama beberapa tahun.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Dalam APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp303.462.165.792,00 terealiasi sebesar Rp 289.744.487.264,93 atau 95,48% sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.18
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2.2	**Belanja Modal**	**303.462.165.792,00**	**289.744.487.264,93**	**95,48**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	7.860.552.500,00	7.860.552.480,00	100,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.186.547.755,00	48.712.736.356,00	101,09
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	106.604.239.730,00	94.715.866.695,32	88,85
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	140.450.435.807,00	138.096.590.733,61	98,32
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	360.390.000,00	358.741.000,00	99,54

Sumber : LRA BPKD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)

Berdasarkan tabel di atas, belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah yang dianggarkan sebesar Rp7.860.552.500,00,00 terealisasi Rp7.860.552.480,00 atau100,00%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp48.186.547.755,00,00 terealisasi Rp48.712.736.356,00 atau 101,09%, pelampauan realisasi ini disebabkan oleh adanya pencatatan belanja dari Dana BOS dan BLUD yang *reclass* ke komponen belanja Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada pelaporan keuangan. Sementara Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp106.604.239.730,00 terealisasi Rp 94.715.866.695,32 atau 88,85%, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dianggarkan Rp 140.450.435.807,00,00 terelisasi Rp 138.096.590.733,61 atau 98,32% dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp 360.390.000,00,00 terealisasi Rp358.741.000,00 atau 99,54%. Untuk belanja Modal beberapa diantaranya masih belum merealisasikan belanja retensi atau pemeliharaan.

3. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dalam APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp3.500.000.000,00 terealiasi sebesar Rp 707.600.000,00 atau 20,22%, belanja yang terealisasi tersebut dipergunakan untuk penanganan wabah corona virus disease (covid 19) sebesar Rp376.600.000,- sesuai SK Bupati No.173/F-04/IV/Tahun 2022, dan direalisasikan pula bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya sebesar Rp331,000,000,- sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.19

Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak TerdugaTahun Anggaran 2022

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2.3.	**Belanja Tak Terduga**	**3,500,000,000**	**707.600.000,00**	**20,22**
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	3,500,000,000	707.600.000,00	20,22

Sumber : LRA BPKD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Dalam APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp 315.926.564.530,00 terealiasi sebesar Rp 315.607.104.841,00 atau 99,90%. Realisasi tersebut diperoleh dari realisasi komponen Belanja Bagi Hasil sebesar Rp18.735.918.471,00 (100%) dan Realisasi Komponen Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp296.871.186.370,00 atau 99,89% dari anggaran, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.20

Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.4	**Belanja Transfer**	315.926.564.530,00	315.607.104.841,00	**99,90**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	18.735.937.530,00	18.735.918.471,00	100,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	297.190.627.000,00	296.871.186.370,00	99,89

Sumber : LRA BPKD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)

1.3.7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Komponen pembiayaan dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/(defisit) anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi Keuangan Daerah untuk menutupi selisih antara Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah. Rincian anggaran dan realisasi dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.21
Anggaran dan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan T.A 2022

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
6.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**113.847.103.327,00**	**113.847.103.327,37**	**100,00**
6.1.1	Sisa lebih perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya	113.847.103.327	113.847.103.327,37	100,00
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**6.602.575.088,00**	**6.446.575.088,00**	**97,64**
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.602.575.088,00	6.446.575.088,00	97,64
	Pembiayaan Netto	107.244.528.239,00	107.400.528.239,37	100,15
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenan		185.516.697.885,23	

Sumber : LRA BPKD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 sebesar Rp185.516.697.885,23

yang terdiri dari :

a. Saldo akhir Kas BUD sebesar Rp. 174.137.373.555,13
b. Kas di Bendahara Pengeluaran (Utang PFK) senilai Rp.9.543.090,00;
c. Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp.0,00;
d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah senilai Rp. 6.903.436.801,00;
e. Kas di Bendahara FKTP/JKN senilai Rp. 398.365.098,10;
f. Kas di Bendahara BOS senilai Rp. 67.979.341,00;
g. Setara Kas (Rekening Deposito BLUD) senilai Rp4.000.000.000,00.

Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp 113.847.103.327,00 dengan realisasi sebesar Rp113.847.103.327,37 atau 100%. Jumlah Penerimaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp 6.602.575.088,00 dengan realisasi sebesar Rp Rp 6.446.575.088,00 atau 97,64%. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan yang dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran.

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan tahapan selanjutnya dari perencanaan anggaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022. Dimana perubahan tersebut didasarkan dengan adanya perubahan proyeksi dan asumsi terhadap target pada program kegiatan atau target Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan.

Peraturan Daerah No.11 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur No.24 tentang Perubahan Penjabaran Aanggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang memuat rincian-rincian Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022. Peraturan tersebut juga memuat pergeseran anggaran yang telah dilakukan sebanyak dua kali setelah penetapan APBD Tahun Anggaran 2022. Pergeseran anggaran pertama dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-170/PK/2021 tanggal 01 Oktober 2021 hal penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal TA. 2022, serta perubahan nomeklatur belanja pada SKPD yang bersifat mendesak.

Untuk pergeseran kedua sebagai tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 889/IV/Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp10 milyar berupa alokasi anggaran untuk pembangunan Lanjutan Peningkatan Jalan Ruas Pekaloa-Tole-tole Kecamatan Towuti senilai Rp9,825,000,000.00 dan Program Pencegahan stunting dan gizi buruk senilai Rp175,000,000.00 .

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 di gambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022

Uraian	APBD	Pergeseran I	Pergeseran II	P-APBD	% Bertambah/ Berkurang ((5-2/2)*100)
1	2	3	4	5	6
Pendapatan	1.551.157.980.944	1.551.157.980.944	1.551.157.980.944	1.616.869.357.811	**4.24**
Pendapatan Asli Daerah	351,605,264,925	351,605,264,925	351,605,264,925	325,302,193,230	(7.48)
Pendapatan Transfer	1,141,148,716,019	1,141,148,716,019	1,151,148,716,019	1,223,583,544,713	7.22
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	58,404,000,000	58,404,000,000	58,404,000,000	67,983,619,868	16.40
Belanja	1.030.292.351.353	1.030.292.351.353	1.030.292.351.353	1.101.225.155.728	**7.91**
Belanja Operasi	1.030.292.351.353	1.030.292.351.353	1.030.292.351.353	1.101.225.155.728	6.88
Belanja Modal	254.170.373.135	254.170.373.135	254.170.373.135	303.462.165.792	19.39
Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	0.00
Belanja Transfer	309.697.123.400	309.697.123.400	309.697.123.400	315.926.564.530	2.01
Pembiayaan	46.501.866.944	46.501.866.944	46.501.866.944	107.244.528.239	**130.62**
Penerimaan Pembiayaan	51,501,866,944	51,501,866,944	51,501,866,944	113,847,103,327	121.05
Pengeluaran Pembiayaan	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	6,602,575,088	32.05

Sumber : BKAD (Data Olah Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022)

2.1. Perubahan Pendapatan Daerah

Kebijakan umum pendapatan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan, sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Melihat dinamika dan kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional, serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dan evaluasi kinerja pendapatan sampai dengan bulan Juni 2022, maka perubahan kebijakan pendapatan daerah diarahkan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2022 mempertimbangkan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan berdasarkan realisasi PAD sampai dengan Juni 2022 dan proyeksi potensi penerimaan pendapatan sampai dengan akhir tahun.
b. Penyesuaian terhadap silpa tahun anggaran sebelumnya.
c. Penyesuaian Dana Perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah Pendapatan Daerah terdiri dari 3 komponen utama yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Daerah sebelum perubahan sebesar Rp1,551,157,980,944.00 dan sesudah perubahan mengalami kenaikan sebesar 4% atau Rp65,711,376,867.00 sehingga menjadi Rp1,616,869,357,811.00. Adapun Struktur pendapatan dalam Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**1,551,157,980,944**	**1,616,869,357,811.00**	**65,711,376,867.00**	**4.24%**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**351,605,264,925**	**325,302,193,230**	(26,303,071,695)	(7.48)
1.1.1	Pajak Daerah	188,134,600,000	189,380,000,000	1,245,400,000	0.66
1.1.2	Retribusi Daerah	6,079,664,925	4,833,681,025	(1,245,983,900)	(20.49)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	51,391,000,000	23,740,807,304	(27,650,192,696)	(53.80)
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	106,000,000,000	107,347,704,901	1,347,704,901	1.27
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1,141,148,716,019**	**1,223,583,544,713**	**82,434,828,694**	**7.22**
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	958,750,314,000	1,021,000,629,629	62,250,315,629	6.49
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	182,398,402,019	202,582,915,084	20,184,513,065	11.07
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**58,404,000,000**	**67,983,619,868**	**9,579,619,868**	16.40
1.3.1	Pendapatan Hibah	40,404,000,000	49,102,000,000	8,698,000,000	21.53
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18,000,000,000	18,881,619,868	881,619,868	4.90
	Jumlah Pendapatan	**1,551,157,980,944,00**	**1,616,869,357,811**	**65,711,376,867**	**4,24**

Sumber: BKAD (Data Olahan Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022

Adapun rincian komponen pendapatan dalam Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah digambarkan sebagai berikut :

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Dalam Perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran secara umum Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 7.48% atau sebesar Rp26,303,071,695.00,. Pendapatan Asli Daerah terbagi dalam 4 komponen utama yaitu Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Bertambah berkurang terjadi pada sebagian besar obyek pendapatan dengan memperhatikan tingkat capaian realisasi sampai dengan semester I Tahun 2022 dan potensi pendapatan yang masih bisa ditingkatkan sampai dengan Desember 2022. Beberapa penambahan target antara lain pada obyek Pajak Daerah bertambah Rp1,245,400,000.00 atau 0.66% yang diperoleh dari penambahan target pendapatan pada pajak hotel sebesar Rp 100.000.000,-, Pajak reklame bertambah sebesar Rp 240,000,000,00, dan Pajak Tanah bertambah Rp 5,400,000,00- dan pertambahan target pada pajak penerangan jalan sebesar Rp 900.000.000,00 dengan

mempertimbangan Potensi peningkatan setoran PPJ oleh PT PLN dan PT. Vale Indonesia. Namun demikian pendapatan pajak daerah ditargetkan menurun pada obyek Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBBP2) namun sebaliknya mengalami penambahan pada Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dengan nilai yang sama Rp 1,500,000,000.00. Di sisi lain Restribusi Daerah ditargetkan mengalami penurunan sebesar Rp 1,245,983,900.00 atau minus 20.49%. Bertambah berkurang terjadi pula pada obyek restribusi jasa umum yang bertambah sebesar Rp 217,395,000.00 sehingga menjadi Rp 1,468,795,000.00 demikian pula pada obyek Retribusi Jasa Usaha bertambah sebesar Rp 19,621,100.00 sehingga menjadi Rp1,463,886,025.00, namun sebaliknya terjadi penurunan target yang cukup signifikan pada obyek Retribusi Perizinan Tertentu yaitu sebesar Rp 1,483,000,000.00, penurunan target ini terjadi pada rincian obyek pendapatan jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai konsekuensi dari Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung. Dalam aturan ini disebutkan bahwa Pemerintah menghapus izin mendirikan bangunan (IMB) dan menggantinya dengan persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan untuk itu SKPD teknis PUPR perlu menyesuaikan persyaratan teknis dalam pengelolaan retribusi PBG. Sementara itu untuk komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mengalami penurunan target sebesar Rp 27,650,192,696.00 atau minus 53.80% sehingga menjadi Rp 23,740,807,304.00,- Hal tersebut terjadi pada obyek Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD. Selanjutnya Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami peningkatan target menjadi Rp 107,347,704,901.00 atau naik 1,27% dari anggaran pokok. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pendapatan yang disetorkan ke Kas Daerah seperti Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun sebelumnya dan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan. Lebih lanjut Perubahan target pendapatan pada Komponen Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Perubahan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**351,605,264,925.00**	**325,302,193,230.00**	**(26,303,071,695.00)**	**(7.48)**	
1.1	**Pajak Daerah**	188,134,600,000.00	189,380,000,000.00	**1,245,400,000.00**	**0.66**	
	Pajak Hotel	1,000,000,000.00	1,100,000,000.00	100,000,000.00	**10.00**	Penyesuaian realisasi sd. Juni 2022 dan potensi penerimaan s.d desember 2022
	Pajak Restoran	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	-	**-**	Masih sejalan dengan realisasi sd.Juni 2022
	Pajak Hiburan	55,000,000.00	55,000,000.00	-	**-**	Masih sejalan dengan tingkat realisasi dan objek pajak dipengaruhi cuaca
	Pajak Reklame	1,260,000,000.00	1,500,000,000.00	240,000,000.00	**19.05**	Menargetkan potensi objek pajak baru reklame yang terpasang
	Pajak Penerangan Jalan	52,300,000,000.00	53,200,000,000.00	900,000,000.00	**1.72**	Potensi peningkatan setoran PPJ oleh PT PLN dan PT. Vale Indonesia
	Pajak Air Tanah	19,600,000.00	25.000.000,00	5,400,000.00	**27.55**	Potensi peningkatan jumlah penggunaan air tanah oleh pengusaha
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	114,000,000,000.00	114,000,000,000.00	-	**-**	Masih sejalan denga capaian sehingga tak ada perubahan
	Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBBP2)	7,500,000,000.00	6,000,000,000.00	(1,500,000,000.00)	**(20.00)**	Peralihan objek pajak lahan dari PT. Vale Indonesia ke Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (DAM Karebbe)
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	3,000,000,000.00	4,500,000,000.00	1,500,000,000.00	**50.00**	Potensi peningkatan jumlah rata2 transaksi perbulan untuk pajak BPHTB
1.2	**Retribusi Daerah**	**6,079,664,925.00**	**4,833,681,025.00**	**(1,245,983,900.00)**	**(20.49)**	
	Retribusi Jasa Umum	1,251,400,000.00	1,438,795,000.00	187.395.000	**15**	Peningkatan beberapa objek retribusi dibeberapa sector antara retribusi pelayanan pasar, pengujian kendaraan motor dan tera ulang,dan potensi retribusi baru pengujian sampel laboratorium
	Retribusi Jasa Usaha	1,444,264,925.00	1,493,886,025.00	**49.621.100**	**3%**	Potensi Peningkatan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi kepelabuhanan
	Retribusi Perizinan Tertentu	3,384,000,000.00	1,901,000,000.00	**(1,483,000,000.00)**	**(43.82)**	Penurunan pada retribusi PBG yang dulunya IMB, dimana SKPD teknis PUPR perlu menyesuaikan persyaratan teknis dalam pengelolaan retribusi PBG
1.3	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**	**51,391,000,000.00**	**23,740,807,304.00**	**(27,650,192,696.00)**	**(53.80)**	
	Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD	51,391,000,000.00	23,740,807,304.00	(27,650,192,696.00)	**(53.80)**	Penurunan asumsi penerimaan Deviden dari PT Bank Sulselbar untuk Saham yang awalnya Seri B kemudian bergabung menjadi seri A baru akan diterima pada Tahun 2023 untuk masa Buku Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.4	**Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**	**106,000,000,000.00**	**107,347,704,901.00**	**1,347,704,901.00**	**1.27**	Menyesuaikan dengan penerimaan yang disetorkan ke kas daerah
	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		35,498,099.00	35,498,099.00	100	Menyesuaikan dengan penerimaan yang disetorkan ke kas daerah
	Hasil Kerja Sama Daerah		155,536,381.00	155,536,381.00	100	Menyesuaikan dengan penerimaan yang disetorkan ke kas daerah
	Jasa Giro	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00			Menyesuaikan karena jasa giro yang diterima menyesuaikan dengan kondisi kas setiap bulannya
	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		16.200.000	16.200.000	100	Menyesuaikan dengan penerimaan yang disetorkan ke kas daerah
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		903.158.669	903.158.669	100	Menyesuaikan dengan penerimaan yang disetorkan ke kas daerah
	Pendapatan Denda Pajak Daerah		8.284.527	8.284.527	100	Menyesuaikan dengan penerimaan yang disetorkan ke kas daerah
	Pendapatan dari Pengembalian		64.458.800	64.458.800	100	Menyesuaikan dengan penerimaan yang disetorkan ke kas daerah
	Pendapatan BLUD	95.000.000.000	95.000.000.000		0	BLUD Rumah Sakit
	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	6.000.000.000	6.163.653.425	163.653.425	3%	Potensi peningkatan jumlah jasa layanan pada PKM
	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		915.000	915.000	100	Menyesuaikan dengan penerimaan yang disetorkan ke kas daerah

Sumber; BAPENDA (Data Olah Perubahan Penjabaran APBD)

2.1.2. Pendapatan Transfer

Dalam Perubahan Penjabaran APBD untuk Pendapatan Transfer sebelum perubahan sebesar Rp 1,141,148,716,019.00 dan sesudah perubahan menjadi Rp 1,223,583,544,713.00 atau mengalami kenaikan 7.22% yaitu sebesar Rp 82,434,828,694.00. Pendapatan Transfer secara umum terdiri dari 2 komponen pendapatan yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar 6,49% atau Rp 62,250,315,629.00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar 11.07% atau Rp 20,184,513,065.00. Bertambah berkurang pada Pendapatan Transfer ditetapkan sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-170/PK/2021 tanggal 01 Oktober 2021 hal penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Desa. Dana Perimbangan mengalami penambahan target pendapatan sebesar 7.27% atau Rp 62,250,315,629.00 yang merupakan hasil dari bertambah berkurang pada Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) yang bertambah sebesar Rp68.340.771.926 atau 52,77% dan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) yang berkurang Rp 573.680.000 atau minus 0.11% , Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang berkurang Rp 4.904.176.297 atau minus 5.03% dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang berkurang Rp 612.600.000 atau minus 0.49%. sehingga Dana Perimbangan pada Penjabaran perubahan APBD menjadi Rp 917,997,542,629.00, sedangkan Dana Desa tetap sesuai anggaran pokok yaitu Rp 103,003,087,000.00.

Selanjutnya Pendapatan Transfer Antar Daerah ditargetkan mengalami kenaikan sebesar Rp 20.184.513.065 atau 11.07%. Kenaikan target ini diproyeksikan bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil pada jenis obyek Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp 15,437,488,065.00 dimana ada potensi peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Provinsi terhadap penggunaaan Air permukaan oleh PT Vale Indonesia.Tbk. Disamping itu juga terjadi peningkatan Bantuan Keuangan pada obyek Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp 4,747,025,000.00. Uraian pendapatan transfer dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Perubahan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1,141,148,716,019**	**1,223,583,544,713**	**82,434,828,694**	**7.22**	
3.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**958,750,314,000**	**1,021,000,629,629**	**62,250,315,629**	**6.49**	
1.1	Dana Perimbangan	855,747,227,000	917,997,542,629	62,250,315,629	7.27	Kenaikan tersebut telah menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan alokasi kurang/lebih salur untuk dana bagi hasil tahun 2022
1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	129,502,057,000	197,842,828,926	68.340.771.926	53,77	
1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	503,126,813,000	502,553,133,000	(573.680.000)	(0,11)	
1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	97,476,401,000	92,572,224,703	(4.904.176.297)	(5,03)	
1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non	125,641,956,000	125,029,356,000	(612.600.000)	(0.49)	

No	Uraian	Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Fisik					
1.2	Dana Desa	103,003,087,000	103,003,087,000	0	0	
3.2	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**182,398,402,019**	**202,582,915,084**	**20.184.513.065**	**11 %**	
2.1	**Pendapatan Bagi Hasil**	**172,398,402,019**	**187,835,890,084**	**15,437,488,065**	**8.95%**	
2.1.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	19,075,604,000	19,075,604,000	0	0	Menyesuaikan SK Gubernur yang keluar dalam tahun berjalan
2.1.2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	18,500,000,000	18,500,000,000	0	0	
2.1.3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	39,119,348,019	39,119,348,019	0	0	
2.1.4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	81,703,450,000	97,140,938,065	15,437,488,065	18.89%	Potensi peningkatan penerimaan DBH dari pemrov atas penggunaan air permukaan oleh PT. Vale Indonesia Tbk
2.1.5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	14,000,000,000	14,000,000,000	0	0	Menyesuaikan SK Gubernur
2.2	**Bantuan Keuangan**	**10,000,000,000**	**14,747,025,000**	4.747.025.000	47,47	
2.2.1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	10,000,000,000	14,747,025,000	4.747.025.000	47,47	Menyesuaikan bantuan kuangan khusus dari provinsi Sulawesi selatan

Sumber; BAPENDA (Data Olah Perubahan Penjabaran APBD)

2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebelum perubahan sebesar Rp58,404,000,000.00 dan sesudah perubahan menjadi Rp67,983,619,868.00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 9,579,619,868.00 atau 16,40%. Kenaikan tersebut ditargetkan pada obyek pendapatan hibah sebesar Rp 8,698,000,000 atau 21,53% yang terdiri dari penambahan hibah dari pemerintah pusat berupa sebesar Rp 1,602,000,000.00 yaitu Pendapatan Hibah Air Bersih dan penambahan target Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri sebesar Rp 7,096,000,000.00. dengan pertimbangan adanya potensi penambahan penerimaan pendapatan dari PT. PLN dan potensi dari hasil lelang scrab/besi tua tahun 2022 oleh PT. Vale Indonesia Tbk dan untuk Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ditarget bertambah sebesar Rp 881,619,868 atau 4.90% yang mempertimbangkan potensi pendapatan jasa layanan puskesmas.

Uraian Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran		Bertambah/ Berkurang		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**58,404,000,000**	**67,983,619,868**	**9.579.619.868**	**16,40**	
4.1	**Pendapatan Hibah**	**40,404,000,000**	**49,102,000,000**	**8.698.000.000**	**21.53**	
4.1.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	1,602,000,000	1,602,000,000	100	Penyesuaian pendapatan hibah dari pemerintah pusat
4.1.2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	37,904,000,000	45,000,000,000	7,096,000,000	18.72	menyesuaikan dengan jumlah rata2 penerimaan dari PT. PLN dan potensi dari hasil lelang scrab/besi tua tahun 2022 oleh PT. Vale Indonesia Tbk
4.1.3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri	2,500,000,000	2,500,000,000	0	0	Menyesuaikan dengan pendapatan hibah
4.2	**Lain Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan**	**18,000,000,000**	**18,881,619,868**	**881,619,868**	**4.90**	
	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	18,000,000,000	18,881,619,868	881,619,868	4.90	Kenaikan tersebut telah menyesuaikan atas realisasi pada apbd pokok Tahun dan potensi penerimaam jasa layanan pada puskemas 2022

Sumber; BAPENDA (Data Olah Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022)

Perubahan Pendapatan pada penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditopang oleh kinerja Perangkat Daerah yang mengelolah sumber-sumber Pendapatan yaitu 19 OPD mengalami perubahan target pendapatan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perubahan Pendapatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)		Bertambah/Berkurang		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Bapenda	188,134,600,000.00	189,380,000,000.00	1,245,400,000.00	0.66	Pajak Daerah
	Retribusi Daerah	**6,079,664,925.00**	**4,833,681,025.00**	(1,245,983,900.00)	(20.49)	
2	Dinas Kesehatan	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	329,327,025.00	329,327,025.00	-	-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Alat
4	Dinas Perhubungan	255,000,000.00	396,000,000.00	141,000,000.00	55.29	Retribusi Jasa Umum
					9.06	Retribusi Jasa Usaha

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)		Bertambah/Berkurang		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
		320,080,000.00	349,080,000.00	29,000,000.00		
		2,000,000.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	(50.00)	Retribusi Perizinan Tertentu
5	Dinas Pertanian	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan
		120,000,000.00	120,000,000.00	-	-	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
6	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pangan	274,750,000.00	274,750,000.00	-	-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi Penyewaan Bangunan
		217,000,000.00	100,000,000.00	(117,000,000.00)	(53.92)	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit Atau Benih Ikan
7	Sekretariat Daerah	52,107,900.00	52,529,000.00	421,100.00	0.81	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi Penyewaan Tanah
		90,000,000.00	60,000,000.00	(30,000,000.00)	(33.33)	Retribusi Penyewaan Bangunan
8	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,500,000,000.00	1,900,000,000.00	(600,000,000.00)	(24.00)	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
9	Dinas Komunikasi Dan Informasi	650,000,000.00	650,000,000.00	-	-	Retribusi Pengawasan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
10	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Ukm	70,000,000.00	70,000,000.00	-	-	Retribusi Pelayanan Tera Ulang
11	Dinas Lingkungan Hidup		30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	Retribusi Pengujian Sampel Laboratorium
12	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan		151,200,000.00	151,200,000.00	100.00	Retribusi Penyewaan Bangunan
13	Kecamatan Burau	100,000,000.00	-	(100,000,000.00)	(100.00)	Retribusi Perizinan Tertentu
14	Kecamatan Wotu	12,600,000.00	10,080,000.00	(2,520,000.00)	(20.00)	Retribusi Sewa Losd Pasar
		75,000,000.00	-	(75,000,000.00)	(100.00)	Retribusi Perizinan Tertentu
15	Kecamatan Tomoni	56,000,000.00	60,000,000.00	4,000,000.00	7.14	Retribusi Pelayanan Pasar
		110,000,000.00	-	(110,000,000.00)	(100.00)	Retribusi Perizinan Tertentu
16	Kecamatan Angkona	60,000,000.00	-	(60,000,000.00)	(100.00)	Retribusi Perizinan Tertentu
17	Kecamatan Tomoni Timur	100,000,000.00	-	(100,000,000.00)	(100.00)	Retribusi Perizinan Tertentu
18	Kecamatan					Retribusi Perizinan

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)		Bertambah/Berkurang		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Mangkutana	105,000,000.00	-	(105,000,000.00)	(100.00)	Tertentu
19	Kecamatan Kalaena	10,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	100.00	Retribusi Pelayanan Pasar
		40,000,000.00	-	(40,000,000.00)	(100.00)	Retribusi Perizinan Tertentu
20	Kecamatan Malili	57,720,000.00	77,715,000.00	19,995,000.00	34.64	Retribusi Pelayanan Pasar
		16,000,000.00	2,000,000.00	(14,000,000.00)	(87.50)	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
		130,000,000.00	-	(130,000,000.00)	(100.00)	Retribusi Perizinan Tertentu
21	Kecamatan Wasuponda	45,000,000.00	-	(45,000,000.00)	(100.00)	Retribusi Perizinan Tertentu
22	Kecamatan Nuha	40,000,000.00	-	(40,000,000.00)	(100.00)	Retribusi Perizinan Tertentu
23	Kecamatan Towuti	60,080,000.00	75,000,000.00	14,920,000.00	24.83	Retribusi Pelayanan Pasar
		77,000,000.00	-	(77,000,000.00)	(100.00)	Retribusi Perizinan Tertentu
24	Bapenda	51,391,000,000.00	23,740,807,304.00	(27,650,192,696.00)	(53.80)	Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD
25	Bapenda	106,000,000,000.00	107,347,704,901.00	1,347,704,901.00	1.27	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
26	Bapenda	958,750,314,000.00	1,021,000,629,629.00	62,250,315,629.00	6.49	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
27	Bapenda	182,398,402,019.00	202,582,915,084.00	20,184,513,065.00	11.07	Pendapatan Transfer Antar Daerah
28	Bapenda	58,404,000,000.00	67,983,619,868.00	9,579,619,868.00	16.40	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sumber : BAPENDA (Data Olah Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022)

2.2. Perubahan Belanja Daerah

Perubahan Belanja Daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Luwu Timur No. 24 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 , memuat selisih bertambah berkurang pada 4 komponen Belanja Daerah yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Total anggaran belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 126,454,038,162 atau 8 persen dari rencana belanja daerah yang ditetapkan pada APBD Pokok 2022. Hal tersebut dipengaruhi oleh pelampauan asumsi Silpa tahun sebelumnya yang tetapkan dalam APBD Pokok Tahun Anggaran 2022 serta perubahan asumsi pendapatan tahun berjalan yang perlu dialokasikan dalam tahun berkenaan.

Tabel 2.7
Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2	**BELANJA**	**1,597,659,847,888**	**1,724,113,886,050**	**126,454,038,162**	**8%**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**1,030,292,351,353**	**1,101,225,155,728**	**70,932,804,375**	**7%**
2.1.1	Belanja Pegawai	478,817,636,500	495,837,789,291	17,020,152,791	4%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	453,061,497,271	506,276,098,170	53,214,600,899	12%
2.1.3	Belanja Subsidi	-	2,000,000,000	2,000,000,000	100%
2.1.4	Belanja Hibah	80,995,185,082	90,579,422,767	9,584,237,685	12%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	17,418,032,500	6,531,845,500	(10,886,187,000)	62%
2.2	**BELANJA MODAL**	**254,170,373,135**	**303,462,165,792**	**49,291,792,657**	**19%**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	5,385,070,000	7,860,552,500	2,475,482,500	46%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39,996,603,566	48,186,547,755	8,189,944,189	20%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	105,096,434,635	106,604,239,730	1,507,805,095	1%
2.24	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	103,667,264,934	140,450,435,807	36,783,170,873	35%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25,000,000	335,390,000	310,390,000	1242%
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	25,000,000	25,000,000	100%
2.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**3,500,000,000**	**3,500,000,000**	**-**	**0%**
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	3,500,000,000	3,500,000,000	-	0%
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**309,697,123,400**	**315,926,564,530**	**6,229,441,130**	**2%**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	19,424,036,400	18,735,937,530	(688,098,870)	4%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	290,273,087,000	297,190,627,000	6,917,540,000	2%
	Jumlah Belanja	**1,597,659,847,888**	**1,724,113,886,050**	**126,454,038,162**	**8%**

Sumber; BKAD (Data Olah Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022)

2.2.1. Belanja Operasi

Perubahan Belanja Belanja Operasi dipengaruhi oleh 5 jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Operasi bertambah sebesar 7 persen atau Rp 70,932,804,375,- dari anggaran pokok sehingga menjadi Rp 1,101,225,155,728,-. Penambahan tersebut dialokasikan pada Belanja Pegawai yang bertambah Rp 17,020,152,791 atau 4%. Bertambahnya alokasi **Belanja Pegawai** dipengaruhi meningkatnya alokasi anggaran pada Gaji dan Tunjangan ASN dimana pada Perubahan APBD Tahun 2022, dialokasikan anggaran untuk pemenuhan Gaji dan Tunjangan untuk Guru yang diangkat melalui formasi Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),dan pemenuhan kekurangan gaji dan tunjangan pada Dinas Pertanian. **Belanja Barang dan Jasa** mengalami Penambahan alokasi belanja sebesar Rp53,214,600,899 atau 12% dari anggaran pada APBD Pokok. Alokasi bertambah berkurang pada Belanja Barang dan Jasa ini meliputi Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak

Lain/Masyarakat dimana didalamnya terdapat alokasi anggaran Beasiswa untuk mahasiswa berprestasi. Perubahan juga terjadi pada Belanja Barang dan Jasa BOS dan Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Selanjutnya **Belanja Subsidi** yaitu Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta dialokasikan sebesar Rp 2,000,000,000,-, yang rencananya disediakan untuk belanja subsidi pada operasinal bandara sorowako. Alokasi **Belanja Hibah** pada Perubahan penjabaran APBD bertambah sebesar 12% atau Rp 9,584,237,685. Belanja Hibah mengalami bertambah berkurang pada Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, dan Alokasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Dan untuk alokasi **Belanja Bantuan Sosial** mengalami penurunan sebesar Rp 10,886,187,000 atau minus 62%. Pengurangan alokasi belanja tersebut antara lain terjadi pada Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu dalam hal ini penganggaran untuk beasiswa mahasiswa kurang mampu mengalami penyesuaian pembebanan rekening.

Tabel 2.8
Perubahan Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.1	BELANJA OPERASI	1,030,292,351,353	1,101,225,155,728	70,932,804,375	7%	
2.1.1	Belanja Pegawai	478,817,636,500	495,837,789,291	17,020,152,791	4%	Kenaikan tersebut disebabkan terdapat penambahan Pengalokasian Kekurang Gaji pada Dinas Pertanian dan Dinas Pendidikan
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	453,061,497,271	506,276,098,170	53,214,600,899	12%	Kenaikan tersebut disebabkan terdapat pada iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3 dan uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yaitu pemberian Beasiswa
2.1.3	Belanja Subsidi	-	2,000,000,000	2,000,000,000	100%	penyediaan belanja subsidi pada bandara sorowako
2.1.4	Belanja Hibah	80,995,185,082	90,579,422,767	9,584,237,685	12%	Kenaikan tersebut disebabkan terdapat

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						penambahan Pengalokasian hibah pada rumah ibadah dan pada kelompok tani
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	17,418,032,500	6,531,845,500	(10,886,187,000)	62%	Pengurangan tersebut disebabkan penyesuaian pembebanan rekening dari bantuan Sosial ke Belanja Barang/jasa yang diserahkan bagi mahasiswa yang berprestasi

Sumber; BKAD (Data Olah Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022)

2.2.2. Belanja Modal

Alokasi **Belanja Modal** mengalami kenaikan sebesar Rp 49,291,792,657 atau 19% sehingga menjadi Rp 303,462,165,792,00. Belanja Modal terdiri dari 6 jenis komponen belanja yaitu alokasi Belanja Modal Tanah mengalami kenaikan sebesar Rp. 2,475,482,500,00, (46%) yang dialokasikan untuk Belanja Modal Tanah Pensil, Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah dalam hal ini lokasi Islamic Centre juga dan Belanja Modal Tanah pembebasan lahan untuk jalan. Alokasi Belanja Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar Rp 8,189,944,189 (20%) yang diperuntukan untuk antara lain Belanja Modal Alat Angkutan berupa pengadaan kendaraan Dinas dan Operasional, Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dan Belanja Modal alat Kantor. Alokasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp1,507,805,095 (1%) berupa Rehabilitasi Kantor dan Rumah Jabatan, alokasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp.36,783,170,873 (35%) yang dialokasikan untuk penambahan paket pembangunan Jalan, jaringan, irigasi termasuk memuat Retensi Tahun 2021 yang dianggarkan pada Perubahan Penjabaran APBD. Selain itu terdapat alokasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 310,390,000 (1242%) yaitu penambahan belanja Alat peraga Kesenian, belanja modal buku dan belanja modal goodwiil dan penambahan Belanja Modal Aset Lainnya Rp 25,000,000 yaitu belanja Modal BLUD, yang sebelumnya tidak ada di Anggaran APBD Pokok.

Tabel 2.9
Perubahan Belanja Modal Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.2	BELANJA MODAL	254,170,373,135	303,462,165,792	49,291,792,657	19%	
2.2.1	Belanja Modal Tanah	5,385,070,000	7,860,552,500	2,475,482,500	46%	Kenaikan tersebut disebabkan terdapat penambahan Pengalokasian pembebasan lahan untuk islamic center
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39,996,603,566	48,186,547,755	8,189,944,189	20%	Kenaikan tersebut disebabkan terdapat penambahan pada pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk operasional Kantor dan pengadaan peralatan pada kebutuhan rumah sakit
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	105,096,434,635	106,604,239,730	1,507,805,095	1%	Kenaikan tersebut disebabkan terdapat pada Rehabilitasi Kantor dan Rumah jabatan
2.24	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	103,667,264,934	140,450,435,807	36,783,170,873	35%	Kenaikan tersebut disebabkan pada Pembangunan jalan dan jembatan yang sangat signifikan
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25,000,000	335,390,000	310,390,000	1242%	Kenaikan ini disebabkan adanya penambahan belanja Alat peraga Kesenian, belanja modal buku dan belanja modal goodwiil
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	25,000,000	25,000,000	100%	Kenaikan disebabkan adanya penambaan belanja modal blud

Sumber; BKAD (Data Olah Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022)

2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp3.500.000.000,-

Tabel 2.10
Perubahan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(RP)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**3,500,000,000**	**3,500,000,000**	**-**	**0%**	
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	3,500,000,000	3,500,000,000	-	0%	

Sumber; BKAD (Data Olah Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022)

2.2.4. Belanja Transfer

Alokasi Belanja Transfer naik sebesar 2% atau Rp 6.229.442.130,- sehingga menjadi Rp 315,926,564,530. Alokasi tersebut merupakan penyesuaian terhadap Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-170/PK/2021 tanggal 01 Oktober 2021 hal penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

Tabel 2.11
Perubahan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(RP)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**309,697,123,400**	**315,926,564,530**	**6,229,441,130**	**2%**	
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	19,424,036,400	18,735,937,530	(688,098,870)	4%	Penurunan Tersebut disebabkan Adanya Pengurangan Dana Bagi Hasil Pajak tiap desa dan bagi hasil retribusi
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	290,273,087,000	297,190,627,000	6,917,540,000	2%	Adanya Penambahan Belanja untuk Dana Desa tiap desa yang bersumber dari APBN maupun APBD

Sumber; BKAD (Data Olah Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022)

2.3. Perubahan Belanja Perangkat Daerah

2.3.1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Alokasi Belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebelum Perubahan sebesar Rp 295,062,101,500.00 dan sesudah perubahan sebesar Rp. 310,367,402,477,00 bertambah Rp 15,305,300,977.00 atau 15,19%.

Dengan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp 262,799,970,175.00 sesudah perubahan Rp 273,846,242,980.00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp 32,262,131,325 dan sesudah perubahan Rp 36,521,159,497.00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut ini.

Tabel 2.12

Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TA.2022

No	Progran/Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ Berkurang	%	Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**135,681,514,431**	**148,502,948,786**	**12,821,434,355**	**9.45**	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	206,999,239	234,529,239	27,530,000	13.30	Penambahan Volume konsultasi /coaching
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	131,753,149,517	143,860,428,272	12,107,278,755	9.19	Penyesuaiaan kekurangan Gaji dan Tunjangan PNS dan pemenuhan gaji PPPK 3 Bulan
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	822,167,660	900,371,660	78,204,000	9.51	Penyesuaian kebutuhana anggran Bimtek dan pendataan
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,061,647,150	1,390,721,750	329,074,600	31.00	Penambahan Volume Konsultasi
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	907,955,400	1,138,202,400	230,247,000	25.36	Penambahan alat prasarana kantor seperti Drone,mobilier,dan laptop
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	706,945,465	726,045,465	19,100,000	2.70	Penyesuain kebutuhan Tenaga administrasi
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222,650,000	252,650,000	30,000,000	13.47	Pemeliharaan Gedung kantor
2	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**158,980,622,669**	**160,869,919,491**	**1,889,296,822**	**1.19**	
2.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	87,611,527,669	89,777,194,177	2,165,666,508	2.47	Penambahan Pemb. sapras Utilitas pada 14 sekolah dasar untuk penataan halaman dan pembangunan 1 sekolah, Rehabilitasi 2 Sekolah Dasar, Pengurangan/penyesuaian anggaran Bos daerah, pengadaan mobel di SD 236 Laoli, Penambahan paket perlengkapan siswa berupa seragam siswa sebanyak 491 pasang
2.2	Pengelolaan	56,778,305,410	57,105,934,074	327,628,664	0.58	Pembangunan Pagar 2

No	Progran/Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ Berkurang	%	Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7
	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					unit pagar sekolah SMP dan 6 unit penataan halaman sekolah, Pengadaan mebel di pada 5 sekolah berupa meja dan kursi
2.3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	11,751,794,640	11,212,582,640	(539,212,000)	(4.59)	penyesuaian anggaran DAK Non Fisik dan terdapat Panambahan sapras utilitas di TK pembina Wotu,
3	**Program Pengembangan Kebudayaan**	**169,994,800**	**743,193,000**	**573,198,200**	**337.19**	
3.1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	139,995,000	716,234,000	576,239,000	411.61	Pengadaan Alat kesenian pada Pemuda kreatif desa Balantang,sanggar musik melodia,sanggar seni Meruruno Moputeh dan Drone di Sanggar Tari Setia Kawan
3.2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	29,999,800	26,959,000	(3,040,800)	(10.14)	Penyesuain kebutuhan sd. Desember
3.3	**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	**29,999,600**	**40,504,200**	**10,504,600**	**35.02**	
3.4	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	29,999,600	40,504,200	10,504,600	35.02	Penambahan volume konsultasi
5	**Program Pembinaan Sejarah**	**91,970,000**	**87,870,000**	**(4,100,000)**	**(4.46)**	
5.1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	91,970,000	87,870,000	(4,100,000)		Penyesuain kebutuhan sd. Desember
6	**Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**108,000,000**	**122,967,000**	**14,967,000**	**13.86**	
6.1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	78,000,000	91,007,000	13,007,000	16.68	Penambahan volume konsultasi
6.2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	30,000,000	31,960,000	1,960,000	6.53	Penyesuain kebutuhan sd. Desember
Total Belanja		**295,062,101,500**	**310,367,402,477**	**15,305,300,977**	**154**	

Sumber ; Data olah DPPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TA. 2022

2.3.2. Dinas Kesehatan

Alokasi Belanja pada Dinas Kesehatan sebelum Perubahan sebesar Rp 192,660,922,890.00 dan sesudah perubahan sebesar Rp 206,645,272,759.00 bertambah Rp13,984,349,869.00 atau 7.26%. Dengan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp 151,926,985,810,00 sesudah perubahan Rp 171,371,773,879.00,Belanja Modal sebelum perubahan Rp40,733,937,080.00 dan sesudah perubahan Rp 35,273,498,880.00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.13 berikut ini.

Tabel 2.13
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Kesehatan TA.2022

NO	Program / Kegiatan	Anggaran		Bertambah / Berkurang		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**89,005,995,305**	**95,797,287,346**	**6,791,292,041**	**7.63**	
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71,522,600	71,522,600	0	0.00	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	83,387,560,645	89,685,542,686	6,297,982,041	7.55	Penyesuain gaji dan tunjangan untuk ASN ada penambahn CPNS 28 orang dan mutasi masuk 7 orang dan penyesuaian TPP
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	109,265,000	112,865,000	3,600,000	3.29	Penyesuaian Anggaran
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	13,677,960	10,917,960	(2,760,000)	(20.18)	Penyesuaian Anggaran
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	161,051,100	167,571,100	6,520,000	4.05	Penyesuaian Anggaran
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	397,084,250	535,784,250	138,700,000	34.93	Pengadaan
1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,282,807,750	1,335,307,750	52,500,000	4.09	Pergeseran nomenklatur pengadaan dari bidang
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,299,626,000	3,553,426,000	253,800,000	7.69	Penambahan gaji upah jasa
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283,400,000	324,350,000	40,950,000	14.45	Penyesuaian Kebutuhan biaya pemeliharaan
1.10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	143,700,000	174,700,000	31,000,000	21.57	Penyesuaian pajak dan pemeliharaan kendaraan

NO	Program / Kegiatan	Anggaran		Bertambah / Berkurang		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Lapangan					
2	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**98,260,890,095**	**104,965,262,923**	**6,704,372,828**	**6.82**	
2.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	46,696,736,767	41,222,122,917	(5,474,613,850)	(11.72)	Pembatalan pembangunan RS Atue dengan pertimbangan proses adminitrasi tender yang terlambat, Penyesuain sisa kontrak UTD, , Penyesuain kontrak DAK,Pengembalian belanja vaksin rabies yang disebabkan belum adanya penyedia vaksin, Penambahan ruang bersalin
2.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51,508,236,768	63,701,712,318	12,193,475,550	23.67	Penambahan Upah jasa tenaga bidan sebanyak 155 orang dan penambahan biaya premi asuransi BPJS dan penghapusan insentif Covid, pengurangan volume pertemuan, Panambahan lokus foging DBD
2.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	45,000,000	29,886,128	(15,113,872)	(33.59)	Pengurangan Volume kegiatan pertemuan
2.4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10,916,560	11,541,560	625,000	5.73	Penyesuaian anggaran
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**5,050,205,270**	**5,543,295,270**	**493,090,000**	**9.76**	
3.1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	25,117,950	25,117,950	0	0.00	
3.2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	4,860,000,000	5,353,000,000	493,000,000	10.14	Penambahan untuk tenaga upah jasa dokter, perawat dan tenaga kesehatan
3.3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya	165,087,320	165,177,320	90,000	0.05	Penyesuaian anggaran

NO	Program / Kegiatan	Anggaran		Bertambah / Berkurang		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
4	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**	**300,814,160**	**296,409,160**	**(4,405,000)**	**(1.46)**	
4.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	76,513,000	77,163,000	650,000	0.85	Penyesuaian anggaran
4.2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	224,301,160	219,246,160	(5,055,000)	(2.25)	Penyesuaian anggaran
5	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**43,018,060**	**43,018,060**	**0**	**0.00**	
5.1	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43,018,060	43,018,060	0	0.00	
Total Belanja		**192,660,922,890.00**	**206,645,272,759.00**	**13,984,349,869.00**	**7.26**	

Sumber; Data olah DPPA Dinas Kesehatan TA. 2022

2.3.3. Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo

Alokasi Belanja pada Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo sebelum Perubahan sebesar Rp 134,617,989,439.00 dan sesudah perubahan sebesar Rp 137,517,989,450.00 bertambah Rp 2,900,000,011.00 atau 2.15%. Dengan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp 129,354,564,439.00 sesudah perubahan Rp 131,797,197,451.00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp 5,263,425,000.00 dan sesudah perubahan Rp 5,720,791,999.00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.14 berikut ini.

Tabel 2.14
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan
Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo TA.2022

NO	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah / Berkurang		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	128,674,975,439	131,096,008,451	2,421,033,012	1.88	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34,555,300	26,025,300	(8,530,000)	(24.69)	Pengurangan anggaran, menyesuaikan kebutuhan (makan minum rapat dikurangi)
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25,957,889,439	28,626,912,151	2,669,022,712	10.28	Penyesuaian Anggaran Gaji dan Tunjangan, Tunjangan Fungsional dan TPP kelangkaan profesi (dokter spesialis)
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8,000,000	8,000,000	-	-	
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7,674,530,700	7,435,071,000	(239,459,700)	(3.12)	Pengurangan jumlah tenaga upah jasa (Lulus PNS, PPPK, dan berhenti)
1.5	Peningkatan Pelayanan BLUD	95,000,000,000	95,000,000,000	-	-	
2	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	5,943,014,000	6,421,980,999	478,966,999	8.06	
2.1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	263,425,000	387,430,371	124,005,371	47.07	Penambahan BM peralatan kantor (Laptop, printer, scaner, LCD, Kamera, Penghancur kertas)
2.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5,679,589,000	6,034,550,628	354,961,628	6.25	Pengurangan anggaran pada belanja MOU spesialis direncanakan awal 9 menjadi 5 spesialis; Penambahan anggaran insentif tenaga kesehatan pelayanan covid-19
Total Belanja		**134,617,989,439**	**137,517,989,450**	**2,900,000,011**	**2.15**	

Sumber; Data olah DPPA Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo TA. 2022

2.3.4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Alokasi Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebelum Perubahan sebesar Rp 187,659,318,403.00 dan sesudah perubahan sebesar Rp 206,947,569,002.00 bertambah Rp 19,288,250,599.00 atau 10.28%. Dengan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp 62,228,884,489.00 sesudah perubahan Rp 62,769,513,833.00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp 125,430,433,914.00 dan sesudah perubahan Rp 144,178,055,169.00

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut ini.

Tabel 2.15
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA.2022

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ Berkurang		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**11,214,645,036**	**12,132,072,939**	**917,427,903**	**7.56**	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89,061,030	170,486,914	81,425,884	47.76	Penambahan volume kegiatan coaching dan studi tiru
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,621,685,086	8,645,365,800	23,680,714	0.27	Penyesuaian Gaji dan Tunjangan ASN sesuai Realisasi Juni 2022
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24,990,450	77,359,900	52,369,450	67.70	Penambahan volume Konsultasi
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	149,068,044	158,360,594	9,292,550	5.87	Penambahan volume Konsultasi
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	568,122,050	1,194,031,350	625,909,300	52.42	penambahan pengadaan bahan komputer berupa laptop, printer, hardisk, dan table untuk menunjang pekerjaan di kantor dan Volume konsultasi
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	250,468,980	257,568,980	7,100,000	2.76	Pengadaan Mebel
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	391,872,196	420,722,201	28,850,005	6.86	Penyesuaian beban listrik
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,119,377,200	1,208,177,200	88,800,000	7.35	Pemelihaaraan BMD ke PU an
2	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)**	**30,638,565,776**	**29,868,085,940**	**(770,479,836)**	**(2.58)**	
2.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	19,223,162,404	19,612,406,901	389,244,497	1.98	Penambahan belanja modal kegiatan fisik (penguatan tebing Pembangunan bronjong dsn kelapa 2 desa cendana proteksi sungai belakang landmark, pembangunan lining sungai cakra desa sorowako kec.Nuha, Bronjong sungai Tomoni Rante Mario, dan (penyesuaian kontrak)
2.2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah	11,415,403,372	10,255,679,039	(1,159,724,333)	(11.31)	Penyesuaian nilai kontrak dan penambahan volume pemeliharaan

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ Berkurang		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
3	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**13,035,855,370**	**13,904,776,988**	**868,921,618**	**6.25**	
3.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota	13,035,855,370	13,904,776,988	868,921,618	6.25	Penambahan pembangunan SPAM Di Tomoni Timur (kertoraharjo),Towuti (desa asuli & wawondula), pemeliharaan SPAM
4	**Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional**	**813,400,000**	**43,600,000**	-	-	
4.1	Pengembangan Sistem dan Pegelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	813,400,000	43,600,000	-	-	
5	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**15,983,470,500**	**15,092,958,362**	**(87,284,638)**	**(0.58)**	
5.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	15,983,470,500	14,862,958,362	(87,284,638)	(0.59)	Penyesuaian nilai kontrak
6	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**	**5,696,678,000**	**8,592,248,000**	**2,895,570,000**	**33.70**	
6.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	5,696,678,000	8,592,248,000	2,895,570,000	33.70	Pembangunan Drainase lingkungan di 15 titik tersebar
7	**Program Pengembangan Permukiman**	**4,112,795,000**	**4,435,195,000**	**322,400,000**	**7.27**	
7.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4,112,795,000	4,435,195,000	322,400,000	7.27	Penambahan belanja tagihan listrik PJU
8	**Program Penataan Bangunan Gedung**	**41,008,682,641**	**261,142,620**	**76,140,000**	**29.16**	
8.1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	41,008,682,641	261,142,620	76,140,000	29.16	Pengurangan belanja disesuaikan dengan nilai kontrak kegiatan fisik
9	**Program Penataan**					

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ Berkurang		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Bangunan Dan Lingkungannya	**327,470,000**	**901,039,163**	**573,569,163**	**63.66**	
9.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	327,470,000	901,039,163	573,569,163	63.66	Penataaan kantor perpustakaan dan pendopok kejaksaan wotu
10	**Program Penyelenggaraan Jalan**	**62,938,797,993**	**78,564,590,237**	**15,625,792,244**	**19.89**	
10.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	62,938,797,993	78,564,590,237	15,625,792,244	19.89	Penambahan ruas jalan pada 9 titik tersebar, 3 proteksi dan 4 Jembatan plat duiker
11	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	**463,748,764**	**497,394,636**	**33,645,872**	**6.76**	
11.1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	230,553,445	172,078,755	(5,740,000)	(3.34)	Penyesuaian kebutuhan pelatihan
11.2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	38,372,244	51,548,778	13,176,534	25.56	Penyesuaian kebutuhan sd. Desember
11.3	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	59,589,800	48,626,800	(10,963,000)	(22.55)	Penyesuaian kebutuhan sd. Desember
11.4	Pengawasan Terbit Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	135,233,275	144,309,803	9,076,528	6.29	Penambahan belanja sewa hotel dan perjalanan dinas
12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,425,209,323	1,461,379,323	36,170,000	2.48	
12.1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1,197,348,550	1,158,058,550	(39,290,000)	(3.39)	Penyesuaian anggaran konsultansi
12.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	9,958,160	9,958,160	-	-	
12.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	40,000,000	40,000,000	-	-	
12.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah kabupaten/Kota	177,902,613	253,362,613	75,460,000	29.78	Penambahan Volume konsultasi
TOTAL BELANJA		**187,659,318,403**	**206,947,569,002**	**19,288,250,599**	**10,28**	

Sumber : Data Olah DPPA Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2022

2.3.5. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Alokasi Belanja pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebelum Perubahan sebesar Rp 14,243,389,593.00 dan sesudah perubahan sebesar Rp 32,856,221,100.00 bertambah Rp 18,612,831,507.00 atau 130,68%. Dengan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp 5,579,369,593.00 sesudah perubahan Rp 5,453,388,261.00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp 8,664,020,000.00 dan sesudah perubahan Rp 27,402,832,839.00

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.16 berikut ini;

Tabel 2.16
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan TA.2022

No	Program / Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**3,572,989,143**	**3,377,221,501**	**195,767,642**	**(5.48)**	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72,424,350	100,923,350	28,499,000	39.35	Penambahan volume konsultasi/coaching/ studytiru
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,622,316,662	2,206,877,578	(415,439,084)	(15.84)	Penyesuaian kebutuhan Gaji dan Tunjangan sesuai realisasi Juni dan keadaan ASN
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19,400,000	19,400,000	-	0.00	
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	7,799,780	7,799,780	0	0.00	
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	135,260,723	152,970,723	17,710,000	13.09	
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	374,889,100	532,962,850	158,073,750	42.17	Penambahan volume koordinasi dan konsultasi
1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21,500,000	36,500,000	15,000,000	69.77	Penambahan DED Pemeliharaan Kantor
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172,208,528	157,597,220	14,611,308	(8.48)	Penyesuaian tagihan listrik dan air
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147,190,000	162,190,000	15,000,000	10.19	Penambahan pemeliharaan BMD
2	**Program Pengembangan Perumahan**	**513,601,300**	**566,852,600**	**53,251,300**	**10.37**	
2.1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	58,761,300	67,888,000	9,126,700	15.53	Tambahan perjalanan dinas untuk pendataan penghunian dan

No	Program / Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
						pemanfaatan rumah susun
2.2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	250,000,000	0	(250,000,000)	(100)	Tidak ada penetapan Status Bencana
2.3	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	179,220,000	446,286,600	267,066,600	149.02	Penambahan untuk belanja pemeliharaan Rusunawa Sumasang dan pembayaran utang tahun 2021 untuk pemeliharaan Rumah Sederhana Sewa (Rusunawa) Sumasang
2.4	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	25,620,000	52,678,000	27,058,000	105.61	Tambahan Kosultasi/koordinasi pembangunan PSU perumahan MBR
3	**Program Kawasan Permukiman**	**3,553,050,000**	**5,207,044,500**	**1,653,994,500**	**46.55**	
3.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	475,000,000	547,810,000	72,810,000	15.33	Pengurangan menyesuaikan dengan nilai kontrak, penambahan koordinasi pembangunan kawasan permukiman
3.2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	3,078,050,000	4,659,234,500	1,581,184,500	51.37	Penambahan perjalanan dinas untuk monitoring kegiatan 31 Desa (10 Kecamatan) dan rapat evaluasi bulanan di Makassar, Ada penamban 14 paket untuk pelaksanaan pemugaran kawasan kumuh dan pembayaran utang
4	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)**	**359,000,000**	**15,018,703,589**	**14,659,703,589**	**4083.48**	
4.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	359,000,000	15,018,703,589	14,659,703,589	4083.48	Ada penambahan 86 paket PSU perumahan yang tersebar di KabLuwu Timur antara lain : jalan, drainase, platduicker dan proteksi
5	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**41,234,675**	**14,755,860**	**(26,478,815)**	**(64.21)**	
5.1	Penyelesaian Sengketa Tanah	41,234,675	14,755,860	(26,478,815)	(64.21)	

No	Program / Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota					
6	**Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**	**5,647,068,675**	**8,122,551,175**	**2,475,482,500**	**43.84**	
6.1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5,647,068,675	8,122,551,175	2,475,482,500	43.84	Penambahan kekurangan pembayaran Islamic Centre dan Jalan PPI Tambahan BM tanah jalan perumahan PNS
7	**Program Pengelolaan Tanah Kosong**	**69,123,900**	**49,191,715**	**(19,932,185)**	**(28.84)**	Penyesuaian/pergeseran sesuai realisasi
7.1	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	69,123,900	49,191,715	(19,932,185)	(28.84)	Penyesuaian/pergeseran sesuai realisasi
8	**Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah**	**13,748,025**	**8,542,900**	**(5,205,125)**	**(37.86)**	Penyesuaian/pergeseran sesuai realisasi
8.1	Penerbitan Izin Membuka Tanah	13,748,025	8,542,900	(5,205,125)	(37.86)	Penyesuaian/pergeseran sesuai realisasi
9	**Program Penatagunaan Tanah**	**473,573,875**	**491,357,260**	**17,783,385**	**3.76**	
9.1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	473,573,875	491,357,260	17, 783,385	3.76	Penambahan volume konsultasi koordinasi ke Pusat terkait persertifikatan EX Lahan kompensasi DAM Karebbe
Total Belanja		**14.243.389.593**	**32.856.221.100**	**18.612.831.507**	**130,68**	

Sumber : Data DPPA *Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan TA.2022*

2.3.6. Satuan Polisi Pamong Praja

Alokasi Belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja sebelum Perubahan sebesar Rp 12,194,299,907.00 dan sesudah perubahan sebesar Rp 12,074,299,907.00 berkurang Rp -120,000,000.00 atau -0.98%. Dengan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp 11,708,699,907.00 sesudah perubahan Rp 11,539,349,907.00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp 485,600,000.00 dan sesudah perubahan 534,950,000.00

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.17 berikut ini;

Tabel 2.17
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan
Satuan Polisi pamong Praja TA.2022

No.	Program/Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ Berkurang		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**5,638,522,954**	**5,560,355,854**	**(78,167,100)**	**(1.39)**	

No.	Program/Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ Berkurang		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	113,616,867	122,426,867	8,810,000	7.75	Penambahan volume konsultasi dan coaching clinik
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,324,496,133	3,929,381,333	(395,114,800)	(9.14)	Penyesuaian Kondisi Jumlah pegawai (mutasi keluar)
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30,289,006	32,329,006	2,040,000	6.74	Penyesuaian honorarium Pengurus Barang
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	258,647,098	303,657,098	45,010,000	17.40	Penyediaan Seragam Seragam dan atribut Satpol dan panambahan anggaran bimtek
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	300,229,450	470,513,650	170,284,200	56.72	Penambahan volume konsultasi dan coaching clinik
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	225,435,000	247,560,000	22,125,000	9.81	Penyesuaian kebutuhan pemeliharaan BMD+B13:B16
2	**Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**	**6,555,776,953**	**6,513,944,053**	**(41,832,900)**	**(0.64)**	
2.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6,229,012,500	6,092,309,600	(136,702,900)	(2.19)	Peergeseran dan penyesuaian kebutuhan anggaran pelatihan linmas desa
2.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	287,140,184.00	384,260,184.00	97,120,000.00	33.82	Penambahan anggaran pengawasan pelanggaran perda trantibum, Kawasan Tanpa Rokok dan pegawasan Depot air minum disetiap kecamatan
2.3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	39,624,269	37,374,269	(2,250,000)	(5.68)	Sisa penyesuaian harga
Total Belanja		**12,194,299,907**	**12,074,299,907**	**(120,000,000)**	**(0.98)**	

Sumber : Data olah DPPA *Satuan Polisi Pamong Praja TA.2022*

2.3.7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Alokasi Belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebelum Perubahan sebesar Rp 4,120,208,839.00 dan sesudah perubahan sebesar Rp 4,120,208,839.00 tetap Rp 4,120,208,839.00 atau 0%.Namun mengalami perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp 4,105,208,839.00 sesudah perubahan Rp 3,918,681,470.00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp 15,000,000.00 dan sesudah perubahan Rp 201,527,369.00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.18 berikut ini;

Tabel 2.18
Perubahan Program /Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA.2022

No	Program/ Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota**	**2.560.903.469**	**2.436.448.914**	**(124.454.555)**	**(4,86)**	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.380.675	30.542.125	6.161.450	25,27	Penambahan Atk Penggandaan Dan Makan Minum Rapat
1.2	Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	2.034.107.291	1.565.492.467	(468.614.824)	(23,04)	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran Pada Gaji, Tunjangan Dan Tpp Dengan Menyesuaikan Jumlah Asn Yang Ada, Penambahan Honor Pengurus Barang
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.804.425	1.804.425	-	-	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.648.378	62.149.953	14.501.575	30,43	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran Pada Gaji Upah Jasa berhenti, Penambahan Anggaran Bimtek Lkpj Dan TAPD
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	299.582.700	401.612.575	102.029.875	34,06	Penambahan Komponen Listrik, Alat/Bahan Kebersihan, Penambahan Volume Konsultansi
1.6	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	15.000.000	201.527.369	186.527.369	1.243,52	Pengadaan Sofa, Kursi Rapat, Pengadaan Papan Himbauan, Pengadaan Ac, Laptop,Pembuatan Partisi Ruangan Dan Panggung Aula Kantor
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	96.900.000	93.700.000	(3.200.000)	(3,30)	Pengurangan anggaran listrik
1.8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	41.480.000	79.620.000	38.140.000	91,95	Penambahan Anggaran Pemeliharaan Mobil Dinas, Penataan Halaman Kantor

No	Program/ Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**84.835.590**	**151.804.590**	**66.969.000**	**78,94**	
2.1	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	84.835.590	151.804.590	66.969.000	78,94	Penambahan Anggaran Pengadaan Pakaian Lapangan Kader Bela Negara Sebanyak 73 Orang
3	**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**	**724.517.315**	**752.192.315**	**27.675.000**	**3,82**	
3.1	Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	724.517.315	752.192.315	27.675.000	3,82	Penambahan volume konsultasi dan koordinasi
4	**Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan**	**24.351.370**	**40.761.370**	**16.410.000**	**67,39**	
4.1	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	24.351.370	40.761.370	16.410.000	67,39	Penambahan Volume Konsultansi
5	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**360.501.865**	**308.608.365**	**(51.893.500)**	**(14,39)**	
5.1	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	360.501.865	308.608.365	(51.893.500)	(14,39)	Pengurangan anggaran tes urine
6	**Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial**	**365.099.230**	**430.393.285**	**65.294.055**	**17,88**	
6.1	Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	365.099.230	430.393.285	65.294.055	17,88	Penambahan Anggaran Pertemuan Forkopimda dan konsultasi
	Total Belanja	**4.120.208.839**	**4.120.208.839**	-		

Sumber ; Data olah DPPA *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA.2022*

2.3.8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Alokasi Belanja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebelum Perubahan sebesar Rp 4,594,450,041.00 dan sesudah perubahan sebesar Rp 4,444,450,041.00

berkurang Rp -150,000,000.00 atau -3.26%. Dengan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp 4,482,282,041.00 sesudah perubahan Rp 4,314,782,041.00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp 112,168,000.00 dan sesudah perubahan Rp 129,668,000.00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.19 berikut ini;

Tabel 2.19

Perubahan Anggaran Program/ Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana TA.2022

No	Progran/Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ Berkurang		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	*Rp*	*%*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**	**2,944,205,949**	**2,831,939,699**	**(112,266,250)**	**(3.81)**	
1.2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59,759,131	85,539,131	25,780,000	43.14	Penambahan Volume Kegiatan Pertemuan Coaching
1.3	Kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,101,379,345	1,842,286,343	(259,093,002)	(12.33)	Penyesuaian Kondisi Existing Pegawai Sampai Juni 2022 (Mutasi Keluar)
1.4	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	18,009,260	18,009,260	-	-	
1.5	Kegiatan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35,500,000	55,780,000	20,280,000	57.13	
1.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	408,134,050	512,468,850	104,334,800	25.56	Penyesuaian Kebutuhan Rapat Koordinasi Dan Adminitrasi Perangkat Daerah Lainnya Sampai Dengan Desember
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	112,168,000	112,168,000	-	-	
1.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86,416,163	67,948,115	(18,468,048)	(21.37)	Penyesuaian Realisasi Sd.Juni Dan Kebutuhan Sd Desember 2022
1.9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	122,840,000	137,740,000	14,900,000	12.13	Penyesuaian Kebutuhan Pemeliharaan Sd.Desember
2	**Program Penanggulangan Bencana**	**1,650,244,092**	**1,612,510,342**	**(37,733,750)**	**(2.29)**	
2.1	Kegiatan Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	75,368,925	72,518,925	(2,850,000)	(3.78)	Penyesuaian Kebutuhan Sd Desember 2022
2.2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan Dan	587,139,418	611,728,418	24,589,000	4.19	Kegiatan Pemenuhan SPM

No	Progran/Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ Berkurang		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					Dan Pengadaan Sapras Kesiapsiagaan Penting Mendesak Chainsaw Dan Life Jacket
2.3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	967,745,660	908,272,910	(59,472,750)	(6.15)	Penyesuaian Kebutuhan Tenaga TRC Sampai Dengan Desember 2022
2.4	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	19,990,089	19,990,089	-	-	Penyusunan Regulasi
Total Belanja		**4,594,450,041**	**4,444,450,041**	**(150,000,000)**	**(3.26)**	

Sumber : Data Olah DPPA *Badan Penanggulangan Bencana TA.2022*

2.3.9. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Alokasi Belanja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebelum Perubahan sebesar Rp 7,473,718,450.00 dan sesudah perubahan sebesar Rp 7,473,718,450.00 atau tetap. Namun terjadi perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp 7,025,211,322.00 sesudah perubahan Rp 6,896,852,322.00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp 448,507,128.00 dan sesudah perubahan Rp 576,866,128.00

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.20 berikut ini;.

Tabel 2.20
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ Berkurang		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**3,072,309,662**	**2,835,849,732**	**(236,459,930)**	**(8)**	
1.2.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56,259,022	72,899,022	16,640,000	30	Penambahan volume kebutuhan coaching perencanaan ,penganggaran dan evaluasi

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ Berkurang		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.3	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,222,002,917	1,657,438,912	(564,564,005)	(25)	Pengurangan Gaji ASN, Menyesuaian kondisi Pegawai ASN (18-13)
1.4	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	16,158,422	19,273,422	3,115,000	19	Penambahan Biaya Jasa Pejabat Pengurus Barang dan ATK
1.5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74,081,828	94,544,828	20,463,000	28	Penyesuaian kebutuhan diklat kepegawaian
1.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	152,007,600	259,119,850	107,112,250	70	Penyediaan kebutuhan Rakor sd.Desember 2022
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	284,557,128	391,616,128	107,059,000	38	
1.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82,942,745	86,207,570	3,264,825	4	Pengurangan/Pergeseran Jasa Tenaga Kebersihan
1.9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184,300,000	254,750,000	70,450,000	38	Penambahan Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor (Gudang)
2	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**4,401,408,788**	**4,637,868,718**	**236,459,930**	**5**	
2.1	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4,260,543,528	4,358,775,458	98,231,930	2	Penyesuaian kebutuhan dalam pemenuhan SPM trantibun
2.2	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	4,999,740	20,159,740	15,160,000	303	Penyesuaian kebutuhan dalam pemenuhan SPM trantibun
2.3	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	5,043,380	7,488,380	2,445,000	48	Penyesuaian kebutuhan dalam pemenuhan SPM trantibun
2.4	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	56,215,340	58,255,340	2,040,000	4	Penyesuaian kebutuhan dalam pemenuhan SPM trantibun
2.5	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	74,606,800	193,189,800	118,583,000	159	Penambahan Biaya Kursus Singkat Latihan Penyelaman (Diving) dan Bantuan Hidup Dasar (BHD)
Total Belanja		**7,473,718,450**	**7,473,718,450**	**-**	**-**	

Sumber ; Data Olah DPPA *Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan TA.2022*

2.3.10. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Alokasi Belanja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebelum Perubahan sebesar Rp 9,796,080,192.00 dan sesudah perubahan sebesar Rp 11,781,940,200.00 atau bertambah Rp 1,985,860,008.00 atau 20,27%. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp 9,012,474,216.00 sesudah perubahan Rp 11,064,011,224.00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp 783,605,976.00 dan sesudah perubahan Rp 717,928,976.00

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.21 berikut ini;

Tabel 2.21
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak TA.2022

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**3.610.259.625**	**3.625.248.468**	**14.988.843**	**0,42**	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**114.465.010**	**123.400.010**	**8.935.000**	**7,81**	Penambahan anggaran pembelian Laptop Perencana, Penyesuaian anggaran upah jasa yang mengundurkan diri
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.694.964.565	2.517.594.908	(177.369.657)	(6,58)	Pengembalian anggaran untuk pejabat fungsional yang mengalami mutasi. Penambahan anggaran untuk honor pengurus barang,PPK dan bendahara
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.830.000	59.830.000	-	-	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	450.530.850	554.565.550	104.034.700	23,09	Penambahan biaya BBM mobil operasional, penggandaan, penambahan volume konsultansi
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.700.000	24.700.000	-	-	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.210.000	96.510.000	(11.700.000)	(10,81)	Penyesuaian anggaran dan Penambahan honor pejabat pengadaan
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	157.559.200	248.648.000	91.088.800	57,81	Penambahan anggaran untuk perbaikan mobil Hilux dan Resque,

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Urusan Pemerintahan Daerah					perbaikan untuk peralatan kantor, perbaikan ruangan
2	**Program Pemberdayaan Sosial**	**2.998.470.128**	**4.375.076.853**	**1.376.606.725**	**45,91**	
2.1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2.998.470.128	4.375.076.853	1.376.606.725	45,91	Penambahan anggaran Bansos Kube sebanyak 56 kelompok
3	**Program Rehabilitasi Sosial**	**1.017.095.485**	**1.351.400.485**	**334.305.000**	**32,87**	
3.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.017.095.485	1.351.400.485	334.305.000	32,87	Penambahan anggaran untuk bansos Lansia dan Disabilitas, tranportasi pengantaran ODGJ penambahan volume konsultansi,
4	**Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**	**542.227.600**	**542.227.600**	**-**	**-**	
4.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	542.227.600	542.227.600	-	-	
5	**Program Penanganan Bencana**	**213.499.490**	**297.070.770**	**83.571.280**	**39,14**	
5.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	213.499.490	297.070.770	83.571.280	39,14	Penambahan anggaran untuk bantuan sosial korban bencana
6	**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**119.880.000**	**179.690.000**	**59.810.000**	**49,89**	
6.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	119.880.000	179.690.000	59.810.000	49,89	Penambahan anggaran untuk penyematan gelar tanda kepahlawanan Andi Nyiwi
7	**Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**	**177.151.665**	**213.211.665**	**36.060.000**	**20,36**	
7.1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan	112.279.625	122.279.625	10.000.000	8,91	Penambahan biaya makan minum rapat dan penggandaan

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Kabupaten/Kota					
7.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	64.872.040	90.932.040	26.060.000	40,17	Penambahan anggaran biaya makan minum rapat dan biaya narasumber
8	**Program Perlindungan Perempuan**	**836.463.354**	**890.491.714**	**54.028.360**	**6,46**	
8.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	33.713.106	33.713.106	-	-	
8.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	477.386.823	533.375.183	55.988.360	11,73	Penambahan biaya makan minum kasus dan konsultasi penjangkauan kasus
8.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat daerah Kabupaten / Kota	325.363.425	323.403.425	(1.960.000)	(0,60)	Penyesuaian/Pergeseran s.d desember 2022
9	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**60.000.600**	**60.000.400**	**(200)**	**(0,00)**	
9.1	Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) Dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.000.600	60.000.400	(200)	(0,00)	
10	**Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**	**40.777.000**	**40.777.000**	**-**	**-**	
10.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam	40.777.000	40.777.000	-	-	

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
11	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**180.255.245**	**206.745.245**	**26.490.000**	**14,70**	
11.1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	54.999.550	72.419.550	17.420.000	31,67	Penambahan biaya makan minum rapat dan perjalanan dinas
11.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	125.255.695	134.325.695	9.070.000	7,24	Penambahan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Hari Anak Nasional
Total Belanja		**9.796.080.192**	**11.781.940.200**	**1.985.860.008**	**20,27**	

Sumber : Data Olah DPPA *Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*

2.3.11. Dinas Lingkungan Hidup

Alokasi Belanja pada Dinas Dinas Lingkungan Hidup sebelum Perubahan sebesar Rp 7,872,315,838.00 dan sesudah perubahan sebesar Rp 8,467,828,838.00 atau bertambah 595,513,000.00 atau 7.56%. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp 7,615,315,838.00 sesudah perubahan Rp 8,030,828,838.00 Belanja Modal sebelum perubahan Rp 257,000,000.00 dan sesudah perubahan Rp 437,000,000.00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.22 berikut ini;

Tabel 2.22
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan
Dinas Lingkungan Hidup TA.2022

No	Program/ Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten**	**3.491.311.414**	**3.693.423.387**	**202.111.973**	**5,79**	
1.1	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.201.000	73.841.000	21.640.000	41,46	Penambahan volume konsultasi untuk studi tiru perencanaan dan penginputan FMIS

No	Program/ Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.993.378.996	2.838.016.366	(155.362.630)	(5,19)	Penyesuaian kebutuhan Anggaran gaji dan tunjangan untuk ASN yang real, Jabatan yang kosong tidak perlu di anggarkan dan Penambahan volume untuk studi tiru
						bendahara dan PPK keuangan
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Skpd	18.855.675	18.855.675	-	-	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.806.540	45.806.540	-	-	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.947.315	303.081.918	126.134.603	71,28	penambahan belanja balon lampu, belanja makan dan minum tamu dan penambahan volume konsultasi
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.813.288	140.013.288	1.200.000	0,86	Penambahan anggaran Honorarium pejabat pengadaan
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.308.600	273.808.600	208.500.000	319,25	Penambahan pembangunan tempat parkir dan papan nama kantor, serta penambahan anggaran pemeliharaan gedung kantor
2	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**193.082.115**	**186.458.315**	**(6.623.800)**	**(3,43)**	
2.1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Klhs) Kabupaten/Kota	193.082.115	186.458.315	(6.623.800)	(3,43)	Pengurangan anggaran untuk sisa penggunaan anggaran sewa gedung pertemuan dan makan minum rapat
3	**Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota**	**549.663.768**	**593.944.385**	**44.280.617**	**8,06**	
3.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	509.665.768	532.162.523	22.496.755	**4,41**	Penambahan anggaran belanja AC I unit dan belanja bahan-bahan lainnya seperti baju laboratorium, baju lapangan, helm dan sepatu safety
3.2	Pemulihan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lh Kabupaten/Kota	39.998.000	61.781.862	21.783.862	**54,46**	Penambahan anggaran tim verifikasi RHL oleh

No	Program/ Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
						KLHK.
4	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	**62.683.320**	**182.336.520**	**119.653.200**	**190,89**	
4.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	62.683.320	182.336.520	119.653.200	190,89	Penambahan anggaran pemeliharaan gedung nurseri, perbaikan instalasi pipa air,instalasi listrik, pemeliharaan taman sayang 1, taman sayang 2
5	**Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**	**23.350.000**	**36.570.000**	**13.220.000**	**56,62**	
5.1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	23.350.000	36.570.000	13.220.000	56,62	Penambahan anggaran perjalanan dinas dalam daerah untuk pengawasan terhadap pelaku usaha penghasil limbah B3 yang memiliki ijin pengelolaan LB3 untuk penyimpanan LB3
6	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**71.414.000**	**93.757.410**	**22.343.410**	**31,29**	
6.1	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	71.414.000	93.757.410	22.343.410	31,29	Penambahan volume konsultasi dan belanja ATK
7	**Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH**	**15.296.590**	**15.296.590**	**-**	**-**	
7.1	Pengakuan Mha, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	15.296.590	15.296.590	-	-	
8	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**11.827.431**	**32.767.431**	**20.940.000**	**177,05**	
8.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.827.431	32.767.431	20.940.000	177,05	Penambahan volume konsultasi untuk Adiwiyata dan Proklim
9	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**10.340.000**	**10.340.000**	**-**	**-**	
9.1	Penyelesaian Pengaduan	10.340.000	10.340.000	-	-	

No	Program/ Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota					
10	**Program Pengelolaan Persampahan**	**3.443.347.200**	**3.622.934.800**	**179.587.600**	**5,22**	
10.1	Pengelolaan Sampah	3.443.347.200	3.622.934.800	179.587.600	5,22	Penyesuaian harga BBM terbaru (anggaran pokok masih menggunakan harga BBM lama) Pemeliharaan jembatan timbang di TPA
Total Belanja		**7.872.315.838**	**8.467.828.838**	**595.513.000**	**7,56**	

Sumber : Data Olah DPPA *Dinas Lingkungan Hidup TA.2022*

2.3.12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Alokasi Belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebelum Perubahan sebesar Rp 5,871,351,727.00 dan sesudah perubahan sebesar Rp 5,984,848,250.00 atau bertambah Rp 113,496,523.00 atau 1,93%. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp 5,671,630,091.00 sesudah perubahan Rp 5,784,126,614.00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp 199,721,636.00 dan sesudah perubahan Rp 200,721,636.00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.23 berikut ini;.

Tabel 2.23
Perubahan Anggaran Program/ Kegiatan
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil TA.2022

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten**	**4.588.444.232**	**4.695.400.755**	**106.956.523**	**2,33**	
1.1	*Perencanaan, pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	34.072.631	36.072.631	2.000.000	5,87	Penambahan untuk honorarium Tim teknis DAK Non Fisik Dana Pelayanan ADMINDUK di Derektorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.474.048.897	2.362.914.897	(111.134.000)	(4,49)	Penyesuaian kebutuhan Anggaran juni s.d desember disebabkan adanya 2 jabatan fungsional yang kosong
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.386.095	16.386.095	-	-	

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.4	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	81.818.100	85.798.100	3.980.000	4,86	penambahan anggaran untuk belanja kontribusi bimtek Sakip
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.042.178.950	1.191.159.473	148.980.523	14,30	Pengurangan anggaran disebabkan adanya penyesuaian harga dari Ekatalog
1.6	*Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	199.721.636	200.721.636	1.000.000	0,50	Penambahan anggaran disebabkan adanya kenaikan harga dari e Katalog (Finger Print untuk pembuatan KTP)
1.7	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	504.840.650	553.570.650	48.730.000	9,65	Penambahan anggaran untuk Pelayanan stelsel aktif capil masuk desa dalam rangka penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	235.377.273	248.777.273	13.400.000	5,69	Penambahan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas (bertambah dari 4 unit kendaraan dinas menjadi 5 Unit)
2	**Program Pendaftaran Penduduk**	**435.651.995**	**435.651.995**	**-**	**-**	
2.1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	435.651.995	435.651.995	-	-	Penyesuaian kebutuhan Anggaran juni s.d desember 2022 dan Penambahan bahan cetak formulir untuk kelengkapan dokumen pendaftaran penduduk
3	**Program Pencatatan Sipil**	**367.429.324**	**361.429.324**	**(6.000.000)**	**(1,63)**	
3.1	Pelayanan Pencatatan Sipil	324.553.725	318.553.725	(6.000.000)	(1,85)	Penyesuaian kebutuhan anggaran juni s/d desember 2022 disebabkan adanya upah jasa yang mengundurkan diri
3.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	42.875.599	42.875.599	-	-	
4	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**121.219.175**	**126.259.175**	**5.040.000**	**4,16**	
4.1	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan penyajian Database Kependudukan	21.754.175	26.794.175	5.040.000	23,17	penambahan volume konsultansi
4.2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	99.465.000	99.465.000	-	-	
5	**Program Pengelolaan Propil Kependudukan**	**358.607.001**	**366.107.001**	**7.500.000**	**2,09**	
5.1	Penyusunan Propil Kependudukan	358.607.001	366.107.001	7.500.000	2,09	Penambahan anggaran untu belanja makan dan minum untuk validasi dan verifikasi data kependudukan
Total Belanja		**5.871.351.727**	**5.984.848.250**	**113.496.523**	**1,93**	

Sumber : Data Olah DPPA *Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil TA.2022*

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7

2.3.13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Alokasi Belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebelum Perubahan sebesar Rp 5,188,596,016.00 dan sesudah perubahan sebesar Rp 5,633,470,200.00 atau bertambah Rp 444,874,184.00 atau 8.57%. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp 4,971,860,416.00 sesudah perubahan Rp 5,313,135,930.00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp 216,735,600.00 dan sesudah perubahan Rp 320,334,270.00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.24 berikut ini;

Tabel 2.24
Perubahan Anggaran Program Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa TA.2022

No	Program/ Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**3.577.729.280**	**3.442.275.925**	**(135.453.355)**	**(3,79)**	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.237.710	64.237.710	-	-	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.567.997.177	2.140.299.052	(427.698.125)	(16,65)	Penyesuaian kebutuhan anggaran s/d desember 2022 belanja gaji pokok ASN, dan Tambahan Penghasilan
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	21.404.580	21.404.580	-	-	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64.337.063	101.177.063	36.840.000	57,26	penyesuaian kebutuhan anggaran s/d desember 2022, Penambahan belanja kursus singkat dan penambahan volume konsultansi
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	417.604.050	593.600.150	175.996.100	42,14	Pengurangan Alat Tulis Kantor, Penambahan belanja langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah, Penambahan belanja perjalanan dinas
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	219.135.600	303.544.270	84.408.670	38,52	Penambahan belanja modal meja dan kursi kerja pejabat , Penambahan prasarana Gedung PKK
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.413.100	117.413.100	-	-	

No	Program/ Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.600.000	100.600.000	(5.000.000)	(4,73)	Penambahan belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor, Pengurangan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor
2	**Program Penataan Desa**	**40.929.286**	**132.121.286**	**91.192.000**	**222,80**	
2.1	Penyelenggaraan Penataan Desa	40.929.286	132.121.286	91.192.000	222,80	Penambahan Belanja Alat Tulis Kantor dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa
3	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**820.390.967**	**937.644.238**	**117.253.271**	**14,29**	
3.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	820.390.967	937.644.238	117.253.271	14,29	penyesuaian kebutuhan anggaran s/d desember 2022, Penambahan belanja alat tulis kantor, belanja jasa kolsultasi manajemen, penambahan volume konsultansi Penambahan kegiatan penyusunan dan monev BKK,
4	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**	**749.546.483**	**1.121.428.751**	**371.882.268**	**49,61**	
4.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	749.546.483	1.121.428.751	371.882.268	49,61	Penambahan belanja jasa tenaga administrasi, Penambahan kegiatan stunting
Total Belanja		**5.188.596.016**	**5.633.470.200**	**444.874.184**	**8,57**	

Sumber : Data Olah DPPA *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa TA.2022*

2.3.14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Alokasi Belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebelum Perubahan sebesar Rp 10,177,992,432.00 dan sesudah perubahan sebesar Rp 10,047,516,878.00, atau berkurang Rp - 130,475,553.00 atau -1.28%. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp 9,702,854,931.00 sesudah perubahan Rp 9,624,866,878.00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp 475,137,500.00 dan sesudah perubahan Rp 422,650,000.00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.25 berikut ini:

Tabel 2.25
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana TA.2022

No	Program/ Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.893.406.999**	**2.870.367.026**	**(23.039.973)**	**(0,80)**	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.983.575	48.983.575	-	-	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.135.649.833	2.065.264.860	(70.384.973)	(3,30)	Penyesuaian Anggaran Gaji dan Tunjangan,
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.292.325	16.292.325	-	-	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.080.125	38.815.125	(2.265.000)	(5,51)	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	443.521.141	487.201.150	43.680.009	9,85	Penambahan volume konsultasi
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.000.000	12.000.000	(76.000.000)	(86,36)	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.880.000	104.880.000	(15.000.000)	(12,51)	
2	**Program Pengendalian Penduduk**	**461.442.275**	**450.952.275**	**(10.490.000)**	**(2,27)**	
2,1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	264.059.725	239.464.725	(24.595.000)	(9,31)	
2.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	197.382.550	211.487.550	14.105.000	7,15	Penambahan volume konsultasi
3	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)**	**4.392.436.495**	**4.373.490.995**	**(18.945.500)**	(0,43)	
3.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	905.984.155	901.209.155	(4.775.000)	(0,53)	Penyesuaian Dana DAK Non Fisik
3.2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.839.289.775	1.838.689.775	(600.000)	(0,03)	
3.3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	1.177.237.565	1.152.657.065	(24.580.500)	(2,09)	Penyesuaian Dana DAK Non Fisik, Sisa Kontrak Pengadaan Komputer dan Kendaraan Dinas Roda 2 DAK Fisik
3.4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	469.925.000	480.935.000	11.010.000	2,34	
4	**Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks**	**2.430.706.662**	**2.352.706.582**	**(78.000.080)**	**(3,21)**	

No	Program/ Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.414.109.452	2.338.419.372	(75.690.080)	(3,14)	Sisa Kontrak Pengadaan BKB KIT
4.2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	16.597.210	14.287.210	(2.310.000)	(13,92)	
Total Belanja		**10.177.992.431**	**10.047.516.878**	**(130.475.553)**	**(1,28)**	

Sumber : Data Olah DPPA *Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana TA.2022*

2.3.15. Dinas Pehubungan

Alokasi Belanja pada sebelum Perubahan sebesar Rp 14,146,760,400.00 dan sesudah perubahan sebesar Rp 13,759,760,400.00 atau berkurang Rp -387,000,000.00 atau -2,74%. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp 6,642,942,500.00 sesudah perubahan Rp 6,829,090,300.00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp 7,503,817,900.00 dan sesudah perubahan Rp 6,930,670,100.00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada belanja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.26 berikut ini;:

Tabel 2.26
Perubahan Anggaran Program/ Kegiatan TA.2022

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**4.582.474.850**	**4.622.628.108**	**40.153.258**	**0,88**	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.737.598	67.657.598	(3.080.000)	(4,35)	Rasionalisasi kebutuhan anggaran s/d Desember 2022
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.907.005.782	2.957.885.715	50.879.933	1,75	Penambahan anggaran TPP 13 dan 14
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.851.490	15.851.490	-	0,00	
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	11.112.310	9.972.310	(1.140.000)	(10,26)	Penyesuaian anggaran Honor Bendahara Penerimaan
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.052.700	55.352.700	(13.700.000)	(19,84)	Penyesuaian kebutuhan konsultansi

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	464.512.650	561.834.900	97.322.250	20,95	Penambahan Biaya BBM karena kenaikan harga BBM dari Rp. 5.100 - Rp. 18.980, dan, Penambahan volume konsultansi
1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	776.231.900	715.061.900	(61.170.000)	(7,88)	Penyesuaian nilai kontrak pengadaan.
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.095.420	123.556.495	(5.538.925)	(4,29)	Penyesuaian kebutuhan s.d desember 2022
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.875.000	115.455.000	(23.420.000)	(16,86)	Penyesuaian biaya asuransi kendaraan dinas Jabatan, dan biaya asuransi kendaraan Operasional lapangan
2	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**8.881.422.660**	**8.456.165.860**	**(425.256.800)**	**(4,79)**	
2.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	185.191.104	185.191.104	-	0,00	
2.2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	5.693.519.866	5.935.194.066	241.674.200	4,24	Penambahan anggaran untuk pembangunan 2 unit shelter dan jalan masuk Terminal Tarengge dan Plat dekker Terminal Malili, Penambahan biaya pemeliharaan Terminal Malili
2.3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	20.498.970	17.529.390	(2.969.580)	(14,49)	Pengurangan volume kosultasi
2.4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	134.258.270	177.258.270	43.000.000	32,03	Penambahan Belanja Suku Cadang dan Biaya Technical Support Sistem SIM PKB
2.5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	164.719.405	219.625.655	54.906.250	33,33	Penambahan volume konsultansi untuk POS PAM.
2.6	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.539.059.550	1.794.320.350	(744.739.200)	(29,33)	Pengurangan belanja 1 unit bis sekolah
2.7	Penerbitan Izin Penyelenggaraan	144.175.495	127.047.025	(17.128.470)	(11,88)	Pengurangan gaji upah jasa

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
3	**Program Pengelolaan Pelayaran**	**682.862.890**	**680.966.432**	**(1.896.458)**	**(0,28)**	
3.1	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	197.356.809	232.040.459	34.683.650	17,57	Penambahan anggaran pemeliharaan Kapal Banawa 1 unit
3.2	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	220.527.645	223.240.945	2.713.300	1,23	Penambahan volume konsultansi
3.3	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	264.978.436	225.685.028	(39.293.408)	(14,83)	Penyesuaian kontrak pembangunan Mushollah di dermaga Timampu,
Total Belanja		**14.146.760.400**	**13.759.760.400**	**(387.000.000)**	**(2,74)**	

Sumber : Data Olah DPPA *TA.2022*

2.3.16. Dinas Komunikasi, Informatikan, Statistik dan Persandian

Alokasi Belanja pada Dinas Komunikasi, Informatikan, Statistik dan Persandian sebelum Perubahan Rp 8,145,894,744.00 dan sesudah perubahan menjadi Rp 9,352,674,750.00 atau bertambah Rp 1,206,780,006.00 atau 14,81%. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp 8,145,894,744.00 sesudah perubahan Rp 8,648,575,750.00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp 0 dan sesudah perubahan Rp 704,099,000.00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada belanja Dinas Komunikasi, Informatikan, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.27 berikut ini;

Tabel 2.27
Perubahan Anggaran Program /Kegiatan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian TA.2022

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**3.401.074.220**	**3.736.600.559**	***335.526.339***	***9,87***	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.565.060	109.695.060	33.130.000	43,27	Penambahan volume konsultansi coaching
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.715.453.923	2.596.025.862	(119.428.061)	(4,40)	Penyesuaian realisasi gaji dan tunjangan
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.764.210	22.263.210	8.499.000	61,75	pengadaan AC dan mesin babat
1.4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	51.440.600	59.360.600	7.920.000	15,40	Penambahan volume konsultansi
1.5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.218.025	21.498.025	8.280.000	62,64	Penambahan volume konsultansi
1.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	185.858.250	404.857.650	218.999.400	117,83	belanja bola lampu dan Penambahan volume konsultansi
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.534.152	311.210.152	33.676.000	12,13	belanja listrik tower telekomunikasi dan upah jasa
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.240.000	211.690.000	144.450.000	214,83	perawatan mobil kantor yang mengalami kecelakaan, perawatan genset dan perawatan gedung kantor.
2	**Program Informasi Dan Komunikasi Publik**	**2.192.834.366**	**2.406.225.197**	**213.390.831**	**9,73**	
2.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.192.834.366	2.406.225.197	213.390.831	9,73	belanja modal laptop , pengadaan meja layanan PPID, pengadaan alat poadcast dan alat studio penambahan volume konsultansi
3	**Program Aplikasi Informatika**	**2.468.871.684**	**3.078.731.684**	**609.860.000**	**24,70**	
3.1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.974.080.699	2.056.850.699	82.770.000	4,19	pengadaan AC, TV monitor, Tablet, baterai server.
3.2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah	494.790.985	1.021.880.985	527.090.000	106,53	pembelian server, pembuatan aplikasi dan pengadaan laptop

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Kabupaten/Kota					untuk programer
4	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**54.384.474**	**102.387.310**	**48.002.836**	**88,27**	
4.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	54.384.474	102.387.310	48.002.836	88,27	Penambahan volume konsultansi dan pengadaan mebel dan laptop
5	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**28.730.000**	**28.730.000**	**-**	**0,00**	
5.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28.730.000	28.730.000	-	0,00	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28.730.000	28.730.000	-	0,00	
Total Belanja		**8.145.894.744**	**9.352.674.750**	**1.206.780.006**	**14,81**	

Sumber : Data Olah DPPA *Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian TA.2022*

2.3.17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Alokasi Belanja pada Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebelum Perubahan sebesar Rp 4,769,180,131.00 dan sesudah perubahan sebesar Rp 4,739,180,131.00 atau berkurang Rp -30,000,000.00 atau -0.63%. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp 4,753,226,781.00 sesudah perubahan Rp 4,729,180,131.00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp15,953,350.00 dan sesudah perubahan Rp 10,000,000.00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada belanja Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.28 berikut ini;:

Tabel 2.28
Perubahan Program/ Kegiatan
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu TA.2022

No	Program/ Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**3.376.376.433**	**3.389.606.008**	**13.229.575**	**0,39**	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.294.735	77.244.735	7.950.000	11,47	Penambahan volume konsultasi terkait Coaching Fmis

No	Program/ Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.646.150.513	2.538.049.438	(108.101.075)	(4,09)	Penyesuaian gaji dan tunjangan,
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.781.981	16.781.981	-	-	
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	10.623.710	10.623.710	-	-	
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.615.956	69.085.956	(13.530.000)	(16,38)	Penyesuaian kebutuhan s/d desember 2022
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	307.938.550	438.017.950	130.079.400	42,24	penambahan volume konsultasi
1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.168.750	7.000.000	(3.168.750)	(31,16)	Penyesuaian kebutuhan s/d desember 2022
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.889.438	152.889.438	-	-	
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.912.800	79.912.800	-	-	
2	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**450.076.460**	**406.846.885**	**(43.229.575)**	**(9,60)**	
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	278.541.420	235.311.845	(43.229.575)	(15,52)	Penyesuaian kebutuhan s/d desember 2022
2.2	Pembuatan Peta Potensi investasi kabupaten/Kota	171.535.040	171.535.040	-	-	
3	**Program Promosi Penanaman Modal**	**188.444.480**	**188.444.480**	-	-	
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	188.444.480	188.444.480	-	-	
4	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**307.191.107**	**307.191.107**	**-**	-	
4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	307.191.107	307.191.107	-	-	
5	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**417.091.801**	**417.091.801**	**-**	-	
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	417.091.801	417.091.801	-	-	
6	**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**29.999.850**	**29.999.850**	-	-	
6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.999.850	29.999.850	-	-	
Total Belanja		**4.769.180.131**	**4.739.180.131**	**(30.000.000)**	**(0,63)**	

Sumber : Data Olah DPPA *Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu TA.2022*

2.3.18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Alokasi Belanja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebelum Perubahan sebesar Rp 4,159,467,840.00 dan sesudah perubahan sebesar Rp 5,314,467,850.00 atau bertambah Rp 1,155,000,010.00 atau 27.77%. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp 3,978,967,840.00 sesudah perubahan Rp 4,891,517,850.00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp 180,500,000.00 dan sesudah perubahan Rp 422,950,000.00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.29 berikut ini:

Tabel 2.29
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan TA.2022

No	Program/ Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	3.501.391.034	4.620.943.844	1.119.552.810	31,97	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.094.335	94.936.635	17.842.300	23,14	Penambahan anggaran belanja cetak, dan penambahan volume konsultasi
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.607.804.993	3.391.246.371	783.441.378	30,04	Penambahan/penyesuaian belanja gaji pokok,belanja tunjangan dan Tambahan penghasilan (TPP)
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	14.788.711	14.788.711	-	-	
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.170.000	79.515.000	14.345.000	22,01	Penambahan Belanja bimbingan teknis Fungsional dan belanja perjalanan dinas
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.534.800	292.671.200	93.136.400	46,68	Penambahan belanja makanan dan minuman rapat, dan belanja jamuan tamu dan penambahan volume konsultasi
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	182.020.000	370.960.000	188.940.000	103,80	Penambahan pengadaan mebel ,25 unit kursi rapat, 6 set meja bundar, 1 unit meja bundar, 10 unit kursi komputer, dan 10 unit meja komputer, pengadaan peralatan dan mesin lainnya1 unit tangga lipat, 1 unit mesin bababt, 2 unit laptop,1 unit tablet notebook,10 unit PC. belanja modal alat pendingin (AC standing)
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.718.195	238.490.927	(13.227.268)	(5,25)	Penyesuaian pada belanja tagihan listrik dan Penambahan belanja tenaga administrasi 1 orang, dan 2

No	Program/ Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						orang celaning service
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.260.000	138.335.000	35.075.000	33,97	Penambahan belanja suku cadang (beban pergantian suku cadang jok mobil), belanja pemeliharaan (AC,Printer), belanja pemeliharaan gedung kantor
2	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**374.281.083**	**410.728.683**	**36.447.600**	**9,74**	
2.1	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	220.958.811	263.696.411	42.737.600	19,34	Belanja Jasa tenaga pelayanan umum (tenaga Administrasi), belanja modal buku, belanja makanan dan minuman rapat
2.2	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	153.322.272	147.032.272	(6.290.000)	(4,10)	Penyesuaian belanja makanan dan minuman rapat,belanja jamuan tamu,
3	**Program Pengelolaan Arsip**	**221.274.416**	**221.274.166**	**(250)**	**(0,00)**	
3.1	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	80.310.495	80.310.495	-	-	
3.2	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	14.999.730	14.999.730	-	-	
3.3	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	125.964.191	125.963.941	(250)	(0,00)	Penyesuaian belanja perjalanan dinas (BBM)
4	**Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip**	**40.521.745**	**39.521.595**	**(1.000.150)**	**(2,47)**	
4.1	Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	40.521.745	39.521.595	(1.000.150)	(2,47)	Penyesuaian belanja Jasa tenaga pelayanan Umum (Jasa tenaga Adminitrasi dan belanaja perjalanan dinas (BBM)
5	**Program Perizinan Penggunaan Arsip**	**21.999.562**	**21.999.562**	**-**	**-**	
5.1	Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	21.999.562	21.999.562	-	-	
Total Belanja		**4.159.467.840**	**5.314.467.850**	**1.155.000.010**	**27,77**	

Sumber : Data Olah DPPA *Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan TA.2022*

2.3.19. Dinas Perikanan

Alokasi Belanja pada Dinas Perikanan sebelum Perubahan Rp 15,072,942,397.00 dan sesudah perubahan menjadi Rp 17,763,119,236.00 atau bertambah Rp 2,690,176,839.00 atau 17.85%. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp 12,967,257,397.00 sesudah perubahan Rp 15,269,596,636.00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp 2,105,685,000.00 dan sesudah perubahan Rp 2,493,522,600.00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada belanja Dinas Perikanan

Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.30 berikut ini :

Tabel 2.30
Perubahan Anggaran Program / Kegiatan Dinas Perikanan TA.2022

No	Program/ Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**3.911.739.614**	**3.983.748.301**	**72.008.687**	**1,84**	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.423.460	67.423.460	-	-	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.955.669.013	2.984.925.500	29.256.487	0,99	Penambahan volume konsultansi
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	26.094.801	34.494.801	8.400.000	32,19	Penambahan Honorarium untuk pengurus barang dan Pengurus Barang Pembantu
1.4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangat Daerah	6.839.245	6.839.245	-	-	
1.5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	106.250.920	83.650.920	(22.600.000)	(21,27)	Penyesuaian Biaya Konstribusi Bimtek
1.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	394.302.175	451.254.375	56.952.200	14,44	Penambahan volume konsultansi
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.500.000	2.500.000	-	-	
1.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.460.000	239.460.000	-	-	
1.9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.200.000	113.200.000	-	-	
2	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**4.498.480.525**	**5.379.089.800**	**880.609.275**	**19,58**	
2.1	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan	4.161.917.160	5.042.456.980	880.539.820	21,16	Penambahan Kegiatan Untuk Penyusunan Dokumen bathimetri survey ekosistem dan hidrooseanografi
2.2	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil	136.863.365	136.932.820	69.455	0,05	Penyesuaian anggaran Sosialisasi pengusulan untuk sertifikat tanah nelayan
2.3	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	199.700.000	199.700.000	-	-	
3	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**5.539.644.245**	**7.280.826.792**	**1.741.182.547**	**31,43**	

No	Program/ Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	178.117.210	294.074.570	115.957.360	65,10	Sosialisasi pengusulan untuk sertifikat tanah petani tambak, Penambahan Kegiatan Pendampingan Demplot budidaya polykultur
3.2	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	5.361.527.035	6.986.752.222	1.625.225.187	30,31	Penambahan 1 unit Jembatan Tambakan dan 6 Km Jalan Produksi, 1 Unit Sanggar Tani, Penambahan Bantuan Hibah Bibit Ikan Unggul (Benih Ikan dan Bibit Rumput Laut), Pengadaan Sarana dan Prasarana BBI
4	**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan**	**74.225.430**	**68.220.180**	**(6.005.250)**	**(8,09)**	
4.1	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	74.225.430	68.220.180	(6.005.250)	(8,09)	Pengurangan Belanja BBM untuk kegiatan Pengawasan
5	**Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**1.048.852.583**	**1.051.234.163**	**2.381.580**	**0,23**	
5.1	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	100.569.480	100.569.480	-	-	
5.2	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	86.923.000	89.923.000	3.000.000	3,45	
5.3	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	861.360.103	860.741.683	(618.420)	(0,07)	Penyesuaian kontrak Dana Dak
JUMLAH BELANJA		**15.072.942.397**	**17.763.119.236**	**2.690.176.839**	**17,85**	

Sumber : Data Olah DPPA *Dinas Perikanan TA.2022*

2.3.20. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Alokasi Belanja pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur sebelum Perubahan sebesar Rp 27,882,781,924.00 dan sesudah perubahan sebesar Rp 29,157,663,950.00 atau bertambah Rp 1,274,882,026.00 atau 4.57%. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp 11,129,347,124.00 sesudah perubahan Rp10,639,360,598.00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp 16,753,434,800.00 dan sesudah perubahan Rp18,518,303,352.00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.31 berikut ini:

Tabel 2.31
Perubahan Anggaran/Kegiatan
Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga TA.2022

No	Program/ Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**3.957.880.362**	**4.178.518.636**	**220.638.274**	**5,57**	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.999.675	68.114.675	15.115.000	28,52	Penambahan anggaran untuk Kegiatan penginputan FMis di Makassar
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.880.479.148	2.863.112.922	(17.366.226)	(0,60)	Rasionalisasi /pergeseran dan, Penambahan anggaran Couching untuk laporan Akhir Tahun 2022 di BPKP
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	20.894.145	22.694.145	1.800.000	8,61	
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	126.531.394	145.346.394	18.815.000	14,87	Penambahan volume konsultasi
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	524.657.000	731.449.000	206.792.000	39,41	Penambahan untuk belanja modal pengadaan Kamera digital, kamera udara dan lensa kamera.
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	281.004.000	276.486.500	(4.517.500)	(1,61)	Pergeseran sesuai kebutuhan untuk Biaya Pemasangan lampu di landmark dan penambahan daya lampu di Andi Nyiwi Park
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.315.000	71.315.000	-	-	
2	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**1.553.459.420**	**1.691.419.420**	**137.960.000**	**8,88**	
2.1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.284.496.600	1.627.071.600	342.575.000	26,67	Penambahan Biaya untuk kontribusi peserta bimtek para wira usaha pemula, perencanaan gedung pemuda, studi wawasan anggota paskibraka dan rasionalisasi kebutuhan anggaran s/d desember 2022

No	Program/ Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	268.962.820	64.347.820	(204.615.000)	(76,08)	Pengurangan anggaran untuk penambahan biaya kegiatan wira usaha pemula dan tambahan biaya perencanaan gedung pemuda
3	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**20.468.445.000**	**21.060.958.552**	**592.513.552**	**2,89**	
3.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	18.205.000.000	17.751.603.352	(453.396.648)	(2,49)	Pengurangan anggaran untuk digeser ke liga 3 dan kegiatan olahraga pertandingan bola basket
3.2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	142.445.000	1.054.265.200	911.820.200	640,12	Penambahan anggaran untuk kegiatan Olahraga Basket dan untuk kegiatan liga tiga dan turnamen sepakbola.
3.3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	10.000.000	34.090.000	24.090.000	240,90	Penambahan biaya untuk kegiatan pendataan sarana dan prasarana olahraga sektoral olahraga di seluruh desa.
3.4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.061.000.000	2.142.590.000	81.590.000	3,96	Penambahan anggaran untuk kegiatan olahraga taekwondo dan pelatihan wasit.
3.5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	50.000.000	78.410.000	28.410.000	56,82	Penambahan anggaran untuk kegiatan cabang olahraga tradisional (engrang, bakiak, gasing dan tarik tambang)
4	**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**250.000.000**	**250.000.000**	**-**	**-**	
4.1	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	250.000.000	250.000.000	-	-	
5	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**745.014.638**	**1.333.441.638**	**588.427.000**	**78,98**	
5.1	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	134.985.500	301.475.000	166.489.500	123,34	Penambahan anggaran untuk kegiatan penataan kawasan pengembangan ekosistem sagu
5.2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	596.000.000	1.017.937.500	421.937.500	70,79	Penambahan anggaran untuk pembangunan obyek wisata, landmark, Wasubonti, Pantai timampu, Sungai malela.
5.3	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah	14.029.138	14.029.138	-	-	

No	Program/ Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Kabupaten/Kota					
6	**Program Pemasaran Pariwisata**	**499.984.389**	**384.711.889**	**(115.272.500)**	**(23,06)**	
6.1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	499.984.389	384.711.889	(115.272.500)	(23,06)	Rasionalisasi untuk penggajian bagian IT dan pergeseran ke rakor
7	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**	**100.000.000**	**-**	**(100.000.000)**	**(100,00)**	
7.1	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100.000.000	-	(100.000.000)	(100,00)	Pengurangan Anggaran Dan Digeser Ke Bidang Olahraga Untuk Tambahan Biaya Kegiatan Olahraga Basket.
8	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**	**307.998.115**	**258.613.815**	**(49.384.300)**	**(16,03)**	
8.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	307.998.115	258.613.815	(49.384.300)	(16,03)	Penambahan anggaran untuk kegiatan ADWI Matano,
Total Belanja		**27.882.781.924**	**29.157.663.950**	**1.274.882.026**	**4,57**	

Sumber : Data Olah DPPA *Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga TA.2022*

2.3.21. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Alokasi Belanja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebelum Perubahan sebesar Rp 46,442,531,339.00 dan sesudah perubahan sebesar Rp 62,413,822,914.00 atau bertambah Rp 15,971,291,575.00 atau 34.39 %. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp 46,225,031,339.00 sesudah perubahan Rp 61,904,322,914.00 Belanja Modal sebelum perubahan Rp 217,500,000.00 dan sesudah perubahan Rp 509,500,000.00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada belanja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.32 berikut ini;

Tabel 2.32
Perubahan Anggaran Program /Kegiatan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan TA.2022

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan**	**3.482.070.000**	**3.153.820.000**	**(328.250.000)**	**(9,43)**	
1.1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.482.070.000	3.153.820.000	(328.250.000)	(9,43)	rasionalisasi 1 kelompok dikarenakan anggaran tidak mencukupi untuk menjadi 1 paket
2	**Program Peningkatan Diserfikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**734.629.125**	**734.549.125**	**(80.000)**	**(0,01)**	
2.1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	153.082.140	153.002.140	(80.000)	(0,05)	
2.2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	59.706.405	59.706.405	-	-	
2.3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	521.840.580	521.840.580	-	-	
3	**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	**24.190.000**	**24.120.000**	**(70.000)**	**(0,29)**	
3.1	Penanganan Kerawanan pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	24.190.000	24.120.000	(70.000)	(0,29)	
4	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**43.200.982**	**43.200.982**	**-**	**-**	
4.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	43.200.982	43.200.982	-	-	
5	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**20.261.646.429**	**26.119.154.038**	**5.857.507.609**	**28,91**	
5.1	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	148.845.582	150.595.582	1.750.000	1,18	penambahan belanja makan minum rapat
5.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.863.022.106	22.100.304.815	5.237.282.709	31,06	Pemenuhan kekurangan Gaji dan Tunjangan berdasarkan realisasi tahun berjalan.
5.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.908.200	104.675.100	29.766.900	39,74	penyesuaian harga dos arsip, penambahan biaya bimtek (kontribusi)
5.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	410.836.106	822.903.206	412.067.100	100,30	penambahan instalasi listrik dan tambah daya

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
						gedung 2, pengurangan belanja BBM, cetak, belanja bahan bacaan, penambahan makan minum tamu/rapat, dan biaya rakor
5.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84.000.000	231.000.000	147.000.000	175,00	penyesuaian harga di ecatalog dan penambahan peralatan komputer/PC yang terbakar
5.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	279.779.335	268.619.335	(11.160.000)	(3,99)	pengurangan anggaran pada rekening listrik dan air
5.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.400.255.100	2.441.056.000	40.800.900	1,70	pengurangan biaya pemeliharaan kendaraan, pemeliharaan peralatan, rehab gedung 2 (bidang peternakan) yang terbakar
6	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**8.151.935.780**	**11.135.659.380**	**2.983.723.600**	**36,60**	
6.1	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.526.454.635	3.323.810.735	797.356.100	31,56	- penambahan anggaran (handtraktor) sebanyak 28 Unit dan cultivator 3 unit untuk 3 kelompok, penyesuaian kebutuhan s/d desember 2022
6.2	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (Sdg) Hewan,Tumbuhan,Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	2.914.893.645	3.003.643.645	88.750.000	3,04	penambahan alat di IKB (seed cleaner), penambahan strow, hormon, penambahan volume konsultansi dan penambahan jasa tenaga teknis peternakan 2 orang
6.3	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.710.587.500	4.808.205.000	2.097.617.500	77,39	utang pengadaan sapi sebanyak 300 ekor yang diadakan di tahun 2021
7	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**9.280.392.726**	**16.791.802.092**	**7.511.409.366**	**80,94**	
7.1	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	9.280.392.726	16.791.802.092	7.511.409.366	80,94	Penambahan 3 paket pembangunan Jides di kec. Tomoni Timur,Kalena dan Wotu , Penambahan 25 paket Jalan Usaha Tani untuk 25 kelompok dan 20 paket jalan produksi untuk 20 kelompok

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
						tersebar di kecamatan-kecamatan, retensi tahun 2020
8	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**451.140.000**	**515.880.000**	**64.740.000**	**14,35**	
8.1	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan,Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	346.240.000	411.180.000	64.940.000	18,76	penambahan obat akibat wabah PMK
8.2	Kegiatan Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	104.900.000	104.700.000	(200.000)	(0,19)	Rasionalisasi kebutuhan anggaran s/d .Desember 2022
9	**Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**331.732.625**	**314.552.625**	**(17.180.000)**	**(5,18)**	
9.1	Kegiatan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	331.732.625	314.552.625	(17.180.000)	(5,18)	Rasionalisasi kebutuhan anggaran s/d .Desember 2022
10	**Program Penyuluhan Pertanian**	**3.681.593.672**	**3.581.084.672**	**(100.509.000)**	**(2,73)**	
10.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.681.593.672	3.581.084.672	(100.509.000)	(2,73)	Rasionalisasi kebutuhan anggaran s/d .Desember 2022
Total Belanja		**46.442.531.339**	**62.413.822.914**	**15.971.291.575**	**34,39**	

Sumber : Data Olah DPPA *Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan TA.2022*

2.3.22. Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian

Alokasi Belanja pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian sebelum Perubahan sebesar Rp 7,564,418,264.00 dan sesudah perubahan sebesar Rp 10,081,728,300.00 atau bertambah Rp 2,517,310,036.00 atau 33,28%. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp 5,851,544,464.00 sesudah perubahan Rp 7,951,084,500.00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp 1,712,873,800.00 dan sesudah perubahan Rp 2,130,643,800.00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.33 berikut ini;

Tabel 2.33
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan
Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian TA.2022

No	Program/ Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)		KeterangaN
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**3.837.226.925**	**4.302.414.041**	**465.187.116**	**12,12**	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.057.765	60.057.765	-	-	penambahan anggaran belanja penggandaan dan perjalanan dinas terkait coaching clinic penginputan E-SAKIP
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.005.361.070	3.285.533.586	280.172.516	9,32	Penambahan anggaran direkening belanja gaji dan tunjangan dan Tambahan Penghasilan ASN. Khusus untuk rekening belanja tambahan penghasilan ASN penambahan sebesar Rp. 197.340.000 dari total
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.060.000	19.060.000	-	-	
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5.786.600	5.786.600	-	-	
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.159.040	58.749.040	(10.410.000)	(15,05)	Penyesuaian anggaran s/d desember 2022 yang dianggarkan untuk diklat teknis Penera untuk bimbingan teknis bagi Pengawas Kemetrologian dan Pengawas Koperasi.
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	393.800.650	611.285.250	217.484.600	55,23	Penambahan anggaran direkening belanja alat listrik dan elektronik untuk Lampu Led 20 watt. Penyesuaian belnaj media dan penambahan volume konsultansi.
1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.400.000	42.400.000	-	-	
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.091.800	123.091.800	(21.000.000)	(14,57)	Penyesuaian anggaran di Biaya rekening listrik untuk bengkel industri karena belum berfungsi secara optimal dan pembayaran rekening listrik pusat niaga menjadi tanggungjawab pengelola/pedagang pasar
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.510.000	96.450.000	(1.060.000)	(1,09)	Penyesuaian kebutuhan anggaran juni s/d desember 2022
2	**Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**	**25.022.100**	**25.022.100**	**-**	**-**	

No	Program/ Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)		KeterangaN
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.022.100	25.022.100	-	-	
3	**Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**	**96.007.300**	**57.257.300**	**(38.750.000)**	**(40,36)**	
3.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	96.007.300	57.257.300	(38.750.000)	(40,36)	Penyesuaian kebutuhan anggaran juni s/d desember 2022
4	**Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi**	**75.411.750**	**75.411.750**	**-**	**-**	
4.1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.411.750	75.411.750	-	-	
5	**Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**	**75.542.750**	**75.542.750**	**-**	**-**	
5.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.542.750	75.542.750	-	-	
6	**Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi**	25.569.120	25.569.120	-	-	
6.1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.569.120	25.569.120	-	-	
7	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha MikrO (UMKM)**	**237.566.390**	**438.691.890**	**201.125.500**	**84,66**	
7.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	237.566.390	438.691.890	201.125.500	84,66	Penambahan volume konsultansi, Penambahan anggaran untuk pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha muda sebanyak 40 UMKM yang dilaksanakan di Makassar.
8	**Program Pengembangan UMKM**	**114.461.600**	**121.884.620**	**7.423.020**	**6,49**	
8.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	114.461.600	121.884.620		-	Penambahan volume konsultansi,
9	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**1.821.143.150**	**2.257.963.150**	**436.820.000**	**23,99**	
9.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.797.753.800	2.215.803.800	418.050.000	23,25	Penambahan anggaran untuk pembangunan/ revitalisasi 4 pasar.

No	Program/ Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)		KeterangaN
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
9.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	23.389.350	42.159.350	18.770.000	80,25	Penambahan anggaran belanja cetak spanduk dan untuk kegiatan studi tiru tata cara pengelolaan pasar yang baik sesuai standar untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Makassar untuk 5 (lima) pengelola pasar yang telah diUPTD-kan.
10	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**	**341.872.824**	**1.784.072.824**	**1.442.200.000**	**421,85**	
10.1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	314.973.498	1.757.173.498	1.442.200.000	457,88	Penambahan anggaran untuk operasi pasar murah dalam rangka mengurangi dampak inflasi. yang Ditargetkan sebanyak 15.000 rumah tangga miskin akan mendapatkan bantuan sembako.
10.2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.899.326	26.899.326	-	-	
11	**Program Pengembangan Ekspor**	**300.109.925**	**300.109.925**	-	-	
11.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	300.109.925	300.109.925	-	-	
12	**Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen**	**224.857.100**	**206.367.100**	**(18.490.000)**	**(8,22)**	
12.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	224.857.100	206.367.100	(18.490.000)	(8,22)	Penyesuian kebutuhan anggaran juni s/d desember 2022
13	**Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**	**338.609.560**	**360.403.960**	**21.794.400**	**6,44**	
13.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	338.609.560	360.403.960	21.794.400	6,44	Penambahan volume konsultansi dan Penyesuian kebutuhan anggaran juni s/d desember 2022
14	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	**51.017.770**	**51.017.770**	**-**	**-**	
14.1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	51.017.770	51.017.770	-	-	
Jumlah Belanja		**7.564.418.264**	**10.081.728.300**	**2.517.310.036**	**33,28**	

Sumber : Data Olah DPPA *Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian TA.2022*

2.3.23. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Alokasi Belanja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebelum Perubahan sebesar Rp 5,980,934,190.00 dan sesudah perubahan sebesar Rp 6,230,934,190.00 atau bertambah Rp 250,000,000.00 atau 4.18%. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp 5,866,637,041.00 sesudah perubahan Rp 6,097,137,041.00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp 114,297,149.00 dan sesudah perubahan Rp 133,797,149.00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.34berikut ini;:

Tabel 2.34
Perubahan Anggaran Program / Kegiatan
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja TA.2022

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**3,901,341,446**	**3,770,493,671**	**(130,847,775)**	**(3.35)**	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62,749,785	89,219,785	26,470,000	42.18	Penambahan Anggaran biaya Perjalanan Dinas terkait Coaching Clinic dan Evaluasi SAKIP ke Jakarta
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,232,461,473	2,879,924,498	(352,536,975)	(10.91)	Penyesuaian Anggaran Gaji dan Tunjangan, Tunjangan Fungsional hasil penyetaraan sudah dianggarkan pada anggaran pokok 2022 namun belum terbayarkan.
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12,721,360	15,721,360	3,000,000	23.58	Penambahan honorarium Bendahara Barang (pada anggaran Pokok masih menggunakan nominal harga satuan yang lama)
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55,477,460	68,487,460	13,010,000	23.45	Penambahan jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek dari 7 orang pada anggaran pokok menjadi 10 orang pada anggaran perubahan
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	244,955,300	404,664,500	159,709,200	65.20	Penyesuaian Kebutuhan Konsultasi

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44,957,149	64,457,149	19,500,000	43.37	Penambahan Pengadaan Peralatan Kantor (1 unit PC, 1 unit AC dan 2 unit Printer)
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139,271,344	139,271,344	-	-	
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108,747,575	108,747,575	-	-	
2	**Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**902,610,388**	**1,102,689,763**	**200,079,375**	**22.17**	
2.1	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	902,610,388	1,102,689,763	200,079,375	22.17	Penambahan Jumlah Peserta Pendidikan Peserta Pelatihan berbasis Kompetensi K3 /SIO sebanyak 35 orang. Peserta pelatihan pada anggaran pokok sebanyak 111 orang bertambang menjadi 146 orang pada anggaran perubahan
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	299,436,988	294,416,988	(5,020,000)	(1.68)	Rasionalisasi kebutuhan anggaran s.Desember 2022
3.1	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	223,441,000	218,421,000	(5,020,000)	(2.25)	Rasionalisasi kebutuhan anggaran s.Desember 2022
3.2	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	37,999,988	37,999,988	-	-	
3.3	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	37,996,000	37,996,000	-	-	
4	Program Hubungan Industrial	552,258,555	542,246,955	(10,011,600)	(1.81)	
4.1	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	111,873,705	109,623,705	(2,250,000)	(2.01)	
4.2	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	440,384,850	432,623,250	(7,761,600)	(1.76)	Penyesuaian kebutuhan anggaran menyesuaikan target dari 15 kasus pada anggaran pokok menjadi 35 kasus perselisihan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						Hubungan Indutrial yang difasilitasi dan dimediasi pada anggaran perubahan.
5	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	39,929,995	50,949,995	11,020,000	27.60	
5.1	Kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	39,929,995	50,949,995	11,020,000	27.60	Penambahan biaya perjalanan Dinas dalam Daerah untuk survey lokasi dan pengambilan titik koordinat kawasan transmigran
6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	165,602,830	269,562,830	103,960,000	62.78	
6.1	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	165,602,830	269,562,830	103,960,000	62.78	Penambahan anggaran menyesuaikan target dari 3 MoU pada anggaran pokok menjadi 15 MoU pada anggaran perubahan (Biaya Perjalanan Dinas untuk pendampingan dan Makan Minum Tamu dari Daerah asal Pengirim warga transmigran)
7	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	119,753,988	200,573,988	80,820,000	67.49	
7.1	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	119,753,988	200,573,988	80,820,000	67.49	Penambahan anggaran untuk perjalanan Dinas dan Pendampingan Dana Tugas Pembantuan (APBN)
Total Belanja		**5,980,934,190**	**6,230,934,190**	**250,000,000**	**4.18**	

Sumber : Data Olah DPPA *Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja TA.2022*

2.3.24. Sekretariat Daerah

Alokasi Belanja pada Sekretariat Daerah sebelum Perubahan sebesar Rp 61,970,997,414.00 dan sesudah perubahan sebesar Rp 74,270,997,414.00 atau bertambah Rp 12,300,000,000.00 atau 19.85 %. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp 60,248,252,847.00 sesudah perubahan Rp 67,327,650,813.00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp 1,722,744,567.00 dan sesudah perubahan Rp 6,943,346,601.00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.35 berikut ini:

Tabel 2.35
Perubahan Anggaran Program / Kegiatan Sekretariat Daerah TA.2022

NO	Program/Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**30.676.052.155**	**31.621.714.947**	**945.662.792**	**3,08**	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	141.471.600	104.021.000	(37.450.600)	(26,47)	Penyesuaian kebutuhan Juni - Desember 2022
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.334.058.702	10.712.125.163	(621.933.539)	(5,49)	Penyesuaian Kebutuhan Juni - Desember 2022 Gaji dan Tunjangan ASN, dan Tambahan Penghasilan, Penambahan volume konsultasi.
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	109.418.000	103.258.000	(6.160.000)	(5,63)	Penyesuaian kebutuhan Juni - Desember 2022
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	208.783.740	183.103.740	(25.680.000)	(12,30)	Penyesuaian kebutuhan Juni - Desember 2022
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.516.564.379	3.413.356.379	(103.208.000)	(2,93)	Penyesuaian kebutuhan Juni - Desember 2022, Penambahan Belanja alat Rumah tangga Lainnya (Badcover Rujab Bupati, Rujab Wakil dan Rujab Sekda), Penambahan volume konsultasi
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.407.416.567	4.003.016.601	2.595.600.034	184,42	Penambahan Pengadaan kendaraan Dinas Asisten dan Kendaraan Dinas TP-PKK, Penambahan peralatan Rumah Tangga mebel Kantor Bupati dan Rujab Penambahan belanja Modal LCD, Microphone, Belanja Lampui Hias Mushollah Rujab, Lemari Pendingin Mess Makssardan Rujab

NO	Program/Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						Wakil, Belanja Peralatan sound sistem, Wireless, Pengadaan Laptop. Penambahan Pengadaan Bangunan Parkir Kendaraan Bermotor (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.871.752.684	1.509.395.334	(362.357.350)	(19,36)	Penyesuaian kebutuhan Juni - Desember 2022
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.267.800.395	5.696.580.395	428.780.000	8,14	Penambahan belanja suku cadang kendaraan dinas KDH/WKDH/SEKDA dan Ekbang, Pengurangan Belanja Perjalanan Dinas, Penambahan Pemeliharaan Meja dan kursi, Pemeliharaan tempat tidur Rujab Bupati, Penambahan Belanja Servis Printer, Penambahan, Rehab Kantor Kabupaten Kota sehat (KKS), Pemeliharaan Rujab Bupati, Rehab Kamar mandi Rujab Bupati, Pengecatan Dinding Luar Rujab Bupati, Sewa Rumah untuk mess makassar.
1.9	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.366.797.112	2.633.923.359	(732.873.753)	(21,77)	Penyesuaian Kebutuhan Juni - Desember 2022 Gaji dan Tunjangan,dan Belanja Dana Operasional KDH/WKDH, Belanja Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
1.10	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.728.500.000	1.383.500.000	(345.000.000)	(19,96)	Penambahan Belanja Peralatan dan perlengkapan Makan, Penyesuaian Kebutuhan Juni - Desember 2022
1.11	Kegiatan Penataan Organisasi	963.111.300	974.221.300	11.110.000	1,15	Penyesuaian kebutuhan Juni - Desember 2022. Penambahan Belanja Jasa Tenaga Administrasi, .Penambahan volume konsultasi
1.12	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	760.377.676	905.213.676	144.836.000	19,05	Penambahan volume konsultasi
2	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**	**29.523.434.615**	**40.688.871.823**	**11.165.437.208**	**37,82**	
2.1	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	506.353.385	478.674.493	(27.678.892)	(5,47)	Penyesuaian kebutuhan Juni - Desember 2022. Penambahan volume konsultasi
2.2	Kegiatan Pelaksanaan	28.122.301.65	39.366.267.750	11.243.966.10	39,98	Penambahan Belanja Cetak,

NO	Program/Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	0		0		Belanja Honorarium Narasumber Keg. MTQ, Honorarium Petugas Keagamaan, Belanja Sewa Alat kantor lainnya, Belanja Hibah Rumah Ibadah.Penyesuaian kebutuhan Juni - Desember 2022. , Bantuan Sosial Mahasiswa Kurang Mampu.Penambahan Belanja Beasiswa Mahasiswa Berprestasi
2.3	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	782.162.888	740.162.888	(42.000.000)	(5,37)	Penyesuaian kebutuhan Juni - Desember 2022
2.4	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	112.616.692	103.766.692	(8.850.000)	(7,86)	Penyesuaian kebutuhan Juni - Desember 2022.
3	**Program Perekonomian Dan Pembangunan**	**1.771.510.644**	**1.960.410.644**	**188.900.000**	**10,66**	
3.1	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	489.209.606	650.219.606	161.010.000	32,91	Penambahan belanja Jasa Penyusunan Naskah Akademink Regulasi BUMD, Penambahan volume konsultasi Penyesuaian kebutuhan Juni - Desember 2022.
3.2	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	111.896.817	171.856.817	59.960.000	53,59	Penambahan volume konsultasi
3.3	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.083.312.796	1.071.312.796	(12.000.000)	(1,11)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksanan Kegiatan.
3.4	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber daya alam	87.091.425	67.021.425	(20.070.000)	(23,04)	Penyesuaian kebutuhan Juni - Desember 2022.
Total Belanja		**61.970.997.414**	**74.270.997.414**	**12.300.000.000**	**19,85**	

Sumber : Data Olah DPPA *Sekretariat Daerah TA.2022*

2.3.25. Sekretariat DPRD

Alokasi Belanja pada Sekretariat DPRD sebelum Perubahan sebesar Rp 33,001,493,900.00 dan sesudah perubahan sebesar Rp 36,972,433,300.00 atau bertambah Rp 3,970,939,400.00 atau 12.03 %. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp 30,957,993,900.00 sesudah perubahan Rp 33,839,825,900.00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp 2,043,500,000.00 dan sesudah perubahan Rp 3,132,607,400.00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.36 berikut ini:

Tabel. 2.36
Perubahan Anggaran Program / Kegiatan Sekretariat DPRD TA.2022

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	**Program Penunjang Urusanpemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**22,583,936,949**	**23,157,283,846**	**573,346,897.00**	**2.54**	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66,865,818	73,224,518	6,358,700	9.51	Penyesuaian kebutuhan cetak mamin kegiatan sd.Desember
1.2	Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah	2,878,939,285	2,370,214,713	(508,724,572)	(17.67)	Penyesuaian kondisi exsiting pegawai dari 26 orang menjadi 21 orang
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17,354,500	23,354,500	6,000,000	34.57	Pemenuhan Honorarium BMD
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	583,664,550	682,054,400	98,389,850	16.86	Penambahan Volume kegiatan Bimtek untuk ASDEKSI DPRD
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,182,510,600	1,171,162,700	(11,347,900)	(0.96)	Penyesuaian kebutuhan admintrasi kegiatan, sapras kantor dan Rakor sd.Desember
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,978,000,000	2,965,630,000	987,630,000	49.93	Pembangunan Gedung dan pengadaan Sapras Gedung Kantor/Rujab
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	902,354,230	859,301,984	(43,052,246)	(4.77)	Rasionalisasi anggaran berdasarkan realisasi Juni 2022
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	546,737,500	924,589,500	377,852,000	69.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Gudang, Ruang PPID, Jaringan pipa air kantor dan Jaringan Listrik Koneksi dari Genset ke Gedung Bar dan pemeliharaan/Rehabilitasi Rujab dan BMD lainnya
1.9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12,985,110,466	12,609,301,531	(375,808,935)	(2.89)	Penyesuaian Kebutuhan BOP dan Medical check up
1.10	Layanan Administrasi DPRD	1,442,400,000	1,478,450,000	36,050,000	2.50	Penambahan belanja cetak undangan PAW, makan dan minum rapat PAW dan Penetapan Wabup dan belanja Dekorasi (disiapkan)

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd**	**10,417,556,651**	**13,815,149,454**	**3,397,592,803**	**32.61**	
2.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1,907,569,533	3,323,664,461	1,416,094,928	74.24	Penambahan anggaran fasilitasi RANPERDA RTRW, Ranperda Bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Perubahan Ranperda terkait Desa, Ranperda Penyertaan Modal Daerah PDAM Waemami dan Naskah akademik Ranperda inisiatif
2.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	997,237,150	810,351,150	(186,886,000)	(18.74)	Rasionalisasi anggaran berdasarkan realisasi Juni 2022
2.3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2,768,411,149	3,814,477,274	1,046,066,125	37.79	Penyesuaian kebutuhan konsultasi Komisi I DPRD terkait Bidang pemerintahan dan hukum,infrastruktur dan perekonomian
2.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	1,160,365,300	1,840,061,750	679,696,450	58.58	Penambahan belanja kursus singkat/pelatihan dan belanja perjalanan dinas (panmbahan volume Bimtek Anggota DPRD)
2.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1,473,219,606	1,464,419,606	(8,800,000)	(0.60)	Pengurangan item belanja sewa mobilitas air untuk menghimpun aspirasi
2.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	37,818,810	51,618,810	13,800,000	36.49	Penambahan belanja perjalanan dinas (konsultasi antara Asdeksi)
2.7	Pembahasan Kerja Sama Daerah	1,058,560,000	1,006,675,000	(51,885,000)	(4.90)	Rasionalisasi anggaran berdasarkan realisasi Juni 2022
2.8	Fasilitasi Tugas DPRD	1,014,375,103	1,503,881,403	489,506,300	48.26	Penambahan Volume konsultasi unsur DPRD
Total Belanja		**33,001,493,900**	**36,972,433,300**	**3,970,939,400**	**12.03**	

Sumber : Data Olah DPPA Sekretariat DPRD *TA.2022*

2.3.26. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Alokasi Belanja pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebelum Perubahan sebesar Rp 8,988,679,600.00 dan sesudah perubahan sebesar Rp 9,188,679,600.00 atau bertambah Rp 200,000,000.00 atau 2.23 %. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp 8,782,829,600.00 sesudah perubahan Rp 8,739,469,600.00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp 205,850,000.00 dan sesudah perubahan Rp 449,210,000.00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.37 berikut ini :

Tabel 2.37
Perubahan Anggaran Program Kegiatan
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangunan Daerah TA.2022

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**4.992.619.855**	**5.343.574.602**	**350.954.747**	**7,03**	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.989.600	56.529.600	(13.460.000)	(19,23)	Rasionalisasi kebutuhan anggaran s/d desember 2022
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.914.567.015	3.649.200.562	(265.366.453)	(6,78)	Penyesuaian Anggaran Gaji dan Tunjangan, Tunjangan Fungsional
1.3	Kegiatan Administrasi BMD Perangkat Daerah	11.215.000	15.415.000	4.200.000	37,45	Penambahan honorarium Bendahara Barang)
1.4	Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	147.895.650	161.175.650	13.280.000	8,98	Penambahan anggaran keikutsertaan Bimtek LKPJ
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	423.190.000	662.473.000	239.283.000	56,54	Penyesuaian satuan media dan penambahan volume konsultasi
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	205.850.000	449.210.000	243.360.000	118,22	Penambahan anggaran untuk meja kerja pejabat, kursi kerja pejabat dan lemari arsip, belanja PC, Laptop, Printer, AC, Scanner, smart TV
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	136.482.590	161.640.790	25.158.200	18,43	Penambahan anggaran untuk belanja tagihan listrik
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83.430.000	187.930.000	104.500.000	125,25	Penambahan anggaran untuk belanja suku cadang

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						kendaraan dinas (double cabin), belanja pemeliharaan alat kantor lainnya, pemeliharaan toilet, papan nama kantor, ruang DWP, ruang arsip dan meteran air
2	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**1.561.127.938**	**1.366.133.191**	**(194.994.747)**	**(12,49)**	
2.1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.014.985.448	823.999.581	(190.985.867)	(18,82)	Rasionalisasi kebutuhan anggaran s/d desember 2022 dan pergeseran rincian belanja ke belanja barang
2.2	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	121.484.390	111.529.710	(9.954.680)	(8,19)	Rasionalisasi kebutuhan anggaran s/d desember 2022
2.3	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	424.658.100	430.603.900	5.945.800	1,40	Penambahan anggaran untuk belanja honorarium TAPD dan pergeseran rincian belanja
3	**Program Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**1.459.292.432**	**1.388.332.432**	**(70.960.000)**	**(4,86)**	
3.1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	589.418.677	534.148.677	(55.270.000)	(9,38)	Rasionalisasi kebutuhan amggaran s/d desember 2022, penambahan volume konsultasi, Penambahan anggaran dalam rangka coaching clinic PPRG
3.2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	462.515.118	384.835.118	(77.680.000)	(16,80)	Rasionalisasi kebutuhan anggaran s/d desember 2022
3.3	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	407.358.637	469.348.637	61.990.000	15,22	Rasionalisasi kebutuhan anggaran s/d desember 2022, penambahan volume konsultasi dalam rangka penyusunan dokumen RTRW
4	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**975.639.375**	**1.090.639.375**	**115.000.000**	**11,79**	
4.1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penkajian Peraturan	269.999.555	222.749.555	(47.250.000)	(17,50)	Rasionalisasi kebutuhan anggaran s/d desember 2022

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
4.2	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	143.078.860	243.858.860	100.780.000	70,44	penambahan anggaran untuk belanja jasa konsultansi terkait kajian survey kinerja kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan
4.3	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah	376.945.665	364.295.665	(12.650.000)	(3,36)	Rasionalisasi kebutuhan anggaran s/d desember 2022
4.4	Kegiatan Pengembngan Inovasi dan teknologi	185.615.295	259.735.295	74.120.000	39,93	penambahan anggaran untuk kebutuhan lomba inovasi dan penambahan volume konsultasi
Total Belanja		**8.988.679.600**	**9.188.679.600**	**200.000.000**	**2,23**	

Sumber : Data Olah DPPA *Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangunan Daerah TA.2022*

2.3.27. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Alokasi Belanja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebelum Perubahan sebesar Rp 36,326,905,040.00 dan sesudah perubahan sebesar Rp 32,890,408,532.00 atau berkurang Rp (3,436,496,508.00) atau (9.46%). Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp 35,944,955,040.00 sesudah perubahan Rp 32,467,458,532.00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp 381,950,000.00 dan sesudah perubahan Rp 422,950,000.00, Belanja Tak Terduga tetap sebesar Rp 3,500,000,000,00, Belanja Trasnfer sebelum perubahan Rp 309,697,123,400,00 dan sesudah perubahan menjadi Rp 315,926,564,530,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.38 berikut ini.

Tabel 2.38
Perubahan Anggaran Program dan Kegiatan
Badan Keuangan dan Aset Daerah TA.2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		KETERANGAN
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**32.731.426.554**	**26.734.388.460**	**(5.997.038.094)**	**(18,32)**	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	156.089.000	133.669.000	(22.420.000)	(14,36)	Penyesuaian kebutuhan anggaran berdasarkan realisasi juni 2022, Penambahan harga pada

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		KETERANGAN
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Perangkat Daerah					belanja ATK
1.2	Kegiatan Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.509.261.354	24.440.562.960	(6.068.698.394)	(19,89)	Rasionalisasi kebutuhan anggaran s/d desember 2022
1.3	Kegiatan Adminsitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.090.000	17.090.000	-	-	
1.4	Kegiatan Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	465.940.500	562.590.000	96.649.500	20,74	Penyesuaian kebutuhah anggaran berdasarkan realisasi Juni 2022, Penambahan volume kegiatan Bimtek TAPD
1.5	Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	707.160.200	763.741.000	56.580.800	8,00	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	381.950.000	422.950.000	41.000.000	10,73	Penyesuaian kebutuhah anggaran berdasarkan realisasi Juni 2022, Pengadaan Laptop, Printer dan Tablet Notebook, Pengadaan motorPengurangan anggaran bangunan gudang arsip
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323.125.500	172.975.500	(150.150.000)	(46,47)	Penyesuaian kebutuhah anggaran berdasarkan realisasi Juni 2022
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	170.810.000	220.810.000	50.000.000	29,27	Penambahan anggaran pemeliharaan bangunan
2	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**315.963.762.570**	**324.522.175.286**	**8.558.412.716**	**2,71**	
2.1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.444.051.665	1.474.643.231	30.591.566	2,12	Penyesuaian kebutuhah anggaran berdasarkan realisasi Juni 2022
2.2	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaopran Keuangan Daerah	280.356.000	443.446.000	163.090.000	58,17	Penambahan volume konsultansi kegiatan coaching klinik perbendaharaan di Makasar
2.3	Kagiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaopran Keuangan Daerah	1.042.231.505	1.177.521.525	135.290.020	12,98	penyesuaian kebutuhan konsultasi
2.4	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	313.197.123.400	321.426.564.530	8.229.441.130	2,63	Penambahan anggaran dikarenakan Kekurangan Belanja Transfer Dana Desa
3	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**828.839.316**	**1.060.409.316**	**231.570.000**	**27,94**	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		KETERANGAN
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	828.839.316	1.060.409.316	231.570.000	27,94	Penambahan volume pertermuan coaching penatausahaan BMD, Penyediaan dokumen penilaian,
Total Belanja		**349.524.028.440**	**352.316.973.062**	**2.792.944.622**	**0,80**	-

Sumber : Data Olah DPPA *Badan Keuangan dan Aset Daerah TA.2022*

2.3.28. Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Belanja pada Badan Pendapatan Daerah sebelum Perubahan sebesar Rp 12,267,803,116.00 dan sesudah perubahan sebesar Rp 15,367,803,150.00 atau bertambah Rp 3,100,000,034.00 atau 25.27%. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp 11,602,123,116.00 sesudah perubahan Rp 14,169,332,690.00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp 665,680,000.00 dan sesudah perubahan Rp 1,198,470,460.00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.39 berikut ini;

Tabel 2.39
Perubahan Anggaran Program dan Kegiatan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur TA.2022

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**9.512.135.126**	**12.267.464.560**	**2.755.329.434**	**28,97**	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.794.000	68.794.000	3.000.000	4,56	Penambahan belanja penggandaan dan makan minum rapat
1.2	Kegiatan Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.514.039.147	9.286.016.721	1.771.977.574	23,58	Penambahan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
1.3	Kegiatan Adminsitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.381.000	13.581.000	1.200.000	9,69	Penambahan honorarium Bendahara Barang
1.4	Kegiatan Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	301.261.259	396.207.259	94.946.000	31,52	Penambahan biaya penggandaan, Penambahan biaya kontribusi Bintek dan perjalanan dinas (Bintek Aparat Pengelola PAD)Penyesuaian biaya honorarium Narasumber, sewa

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
						kendaraan bermotor perorangan dan sewa hotel
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	485.605.200	769.510.600	283.905.400	58,46	Penambahan biaya alat listrik, instalasi dan lampu sorot, Penyesuaian anggaran, menyesuaikan target dari 132 exampler di anggaran pokok menjadi 36 exampler di anggaran perubahan (biaya surat kabar), penambahan volume konsultasi
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	665.680.000	1.198.470.460	532.790.460	80,04	Penambahan Belanja Modal Lemari Arsip dan Meja Kerja, Penambahan Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, Belanja Modal Alat Studio, Belanja Modal Komputer dan Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja, Pengurangan Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Gorden), sesuai dengan asas manfaatnya target 2 unit gorden tidak direalisasikan
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.454.520	258.954.520	(20.500.000)	(7,34)	Penyesuaian biaya paket/pengiriman, biaya rekening listrik dan air , honor Jasa Tenaga Kebersihan dan Cleaning Service
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	187.920.000	275.930.000	88.010.000	46,83	Penambahan biaya pemeliharaan alat kantor lainnya (papan himbauan 4 titik)
2	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**2.755.667.990**	**3.100.338.590**	**344.670.600**	**12,51**	
2.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.755.667.990	3.100.338.590	344.670.600	12,51	Penambahan volume konsultasi, biaya Jasa Konsultansi Manajemen (Naskah Akademik Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), biaya cetak banner dan spanduk himbauan pajak dan retribusi, Penyesuaian biaya jasa konsultansi
Total Belanja		**12.267.803.116**	**15.367.803.150**	**3.100.000.034**	**25,27**	

Sumber : Data Olah DPPA *Badan Pendapatan Daerah TA.2022*

2.3.29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alokasi Belanja pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebelum Perubahan sebesar Rp 10,701,258,050.00 dan sesudah perubahan sebesar Rp 10,748,258,050.00 atau bertambah Rp 47,000,000.00 atau 0.44%. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp 10,598,173,050.00 sesudah perubahan Rp 10,473,841,525.00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp 103,085,000.00 dan sesudah perubahan Rp 274,416,525.00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.40 berikut ini:

Tabel 2.40

Perubahan Anggaran Program dan Kegiatan

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia TA.2022

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	4.270.790.059	4.487.061.026	195.657.887	4,58	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.066.000	136.042.300	72.976.300	115,71	Penambahan Anggaran pada Makan Minum Rapat dan penyesuaian kebutuhan konsultasi
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.352.832.982	2.918.457.161	(434.375.821)	(12,96)	Penambahan Anggaran pada Makan Minum Rapat dan penyesuaian kebutuhan konsultasi
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	9.484.360	16.284.000	6.799.640	71,69	
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	119.160.000	125.330.000	6.170.000	5,18	Penambahan Disiapkan untuk Biaya Bimtek LKPJ & LPPD dan penyesuaian kebutuhan konsultasi
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	320.015.010	648.080.290	340.372.200	106,36	Penyesuaian kebutuhan konsultasi
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	105.785.000	276.816.525	159.261.525	150,55	Penambahan Anggaran untuk Belanja Meja Bundar
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.487.407	203.708.400	(20.779.007)	(9,26)	Rasionalisasi kebutuhan anggaran s/d desember 2022
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.959.300	162.342.350	65.233.050	85,88	Penambahan Anggaran pemeliharaan untuk Kendaraan Roda Empat sebanyak 1 Unit, Renovasi Kamar Mandi, Rasionalisasi kebutuhan anggaran s/d desember 2022
2	**Program Kepegawaian Daerah**	4.800.334.861	4.291.240.894	(509.093.967)	(10,61)	
2.1	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	735.117.654	768.447.654	33.330.000	4,53	Penambahan Anggaran untuk Makan Minum dan sosialisasi aturan pensiun, penyesuaian kebutuhan konsultasi terkait aplikasi SIYANTI
2.2	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	936.399.900	782.298.800	(154.101.100)	(16,46)	Rasionalisasi kebutuhan anggaran

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
						s/d desember 2022
2.3	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	2.851.636.367	2.418.873.500	(432.762.867)	(15,18)	Penambahan Anggaran untuk Kegiatan Sosialisasi DUPAK (Daftar Usul Penetapan Angka Kredit)
2.4	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	277.180.940	321.620.940	44.440.000	16,03	Penambahan Anggaran untuk Sosialisasi E-Kinerja
	Pendidikan Dan Pelatihan	1.630.133.130	1.969.956.130	339.823.000	20,85	
3	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	1.630.133.130	1.969.956.130	339.823.000	20,85	
3.1	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	872.489.330	1.247.724.330	375.235.000	43,01	Penambahan Anggaran untuk Pelaksanaan Kegiatan Bimtek LKPJ & LPPD dan penyesuaian kebutuhan konsultasi
3.2	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	757.643.800	722.231.800	(35.412.000)	(4,67)	Rasionalisasi kebutuhan anggaran s/d desember 2022
Total Belanja		**10.701.258.050**	**10.748.258.050**	**47.000.000**	**0,44**	

Sumber : Data Olah DPPA *Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia TA.2022*

2.3.30. Inspektorat

Alokasi Belanja pada Inspektorat sebelum Perubahan sebesar Rp 12,035,567,579.00 dan sesudah perubahan sebesar Rp 12,920,567,600.00 atau bertambah Rp 885,000,021.00 atau 7.35 %. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp 11,507,067,579.00 sesudah perubahan Rp 12,428,567,600.00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp 528,500,000.00 dan sesudah perubahan Rp 492,000,000.00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.41 berikut ini;

Tabel 2.41
Perubahan Anggaran Program / Kegiatan Inspektorat TA.2022ss

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**8.074.768.252**	**8.556.218.273**	**481.450.021**	**5,96**	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.174.378	141.435.978	78.261.600	123,88	Penambahan anggaran untuk : Coacing Clinik Evaluasi Register Risiko, Penyusunan PKPT Pokok 2022 dan Perubahan PKPT 2022 berdasarkan hasil Evaluasi RR
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.502.016.148	6.143.244.511	641.228.363	11,65	Penambahan anggaran untuk gaji dan TPP disebabkan karena adanya perubahan kelas jabatan fungsional Auditor dan P2UPD
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	871.413.926	603.553.106	(267.860.820)	(30,74)	Penambahan anggaran untuk penyesuaian harga ATK pada aplikasi LPSE, Pengurangan untuk menyesuaikan harga ATK pada aplikasi LPSE
1.4	Administrasi Umum Perangkat daerah	898.198.100	968.818.700	70.620.600	7,86	Penambahan anggaran untuk penyesuaian harga barang PC dan Laptop berdasarkan ketentuan TKDN, pengadaan tempat sampah besar sebanyak 10 buah, Penambahan volume konsultasi terkait Maturitas SPIP
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	510.500.000	457.000.000	(53.500.000)	(10,48)	Penyesuaian nilai pengadaan kendaraan
1.6	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	138.905.700	147.855.978	8.950.278	6,44	Penambahan harga ATK dan Harga listrik per KWH
1.7	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.560.000	94.310.000	3.750.000	4,14	Penambahan anggaran untuk biaya pemeliharaan laptop
2	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**2.879.952.335**	**3.268.652.335**	**388.700.000**	**13,50**	
2.1	Penyelenggaraan pengawasan internal	2.404.397.145	2.543.897.145	139.500.000	5,80	Rasionalisasi kebutuhan anggaran realisasi juni 2022 dalam rangka pengawasan, pendampingan pemeriksaan APH. Penambahan volume konsultasi
2.2	Penyelenggaraan pengawasan dengan Tujuan Tertentu	475.555.190	724.755.190	249.200.000	52,40	Penambahan anggaran untuk pemeriksaan khusus terkait perceraian dan pemeriksaan khusus lainnya
3	**Program Perumusan**	**1.080.846.992**	**1.095.696.992**	**14.850.000**	**1,37**	

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi					
3.1	Pendampingan dan Asistensi	1.080.846.992	1.095.696.992	14.850.000	1,37	penambahan anggaran untuk jasa Reviu HPS, Reviu Tata kelola pajak, Monev dana Bos, reviu Tata kelola PTSP dan pendampingan proyek
Total Belanja		**12.035.567.579**	**12.920.567.600**	**885.000.021**	**7,35**	

Sumber : Data Olah DPPA *Inspektorat TA.2022*

2.3.31. Kecamatan

Perubahan Alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Kecamatan digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.42
Perubahan Rincian Anggaran Belanja Kecamatan
Kecamatan Se Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022

No	Kecamatan	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Total	Belanja Operasi	Belanja Modal	Total	Bertambah/ Berkurang (%)
1	Burau	3,028,207,150.00	287,758,700.00	3,315,965,850.00	3,069,347,150.00	316,618,700.00	3,385,965,850.00	2.11
2	Wotu	2,839,422,275.00	306,950,000.00	3,146,372,275.00	2,881,922,275.00	339,450,000.00	3,221,372,275.00	2.38
3	Tomoni	3,948,091,700.00	418,498,850.00	4,366,590,550.00	4,416,140,550.00	620,450,000.00	5,036,590,550.00	15.34
4	Mangkutana	2,670,566,000.00	343,306,800.00	3,013,872,800.00	2,658,066,000.00	355,806,800.00	3,013,872,800.00	-
5	Tomoni Timur	2,262,073,250.00	303,750,000.00	2,565,823,250.00	2,329,573,250.00	306,250,000.00	2,635,823,250.00	2.73
6	Kalaena	2,230,485,700.00	292,750,000.00	2,523,235,700.00	2,589,995,700.00	295,149,200.00	2,885,144,900.00	14.34
7	Angkona	2,554,877,300.00	304,886,600.00	2,859,763,900.00	2,643,693,900.00	316,750,000.00	2,960,443,900.00	3.52
8	Malili	3,583,936,598.00	275,000,000.00	3,858,936,598.00	3,651,236,598.00	607,700,000.00	4,258,936,598.00	10.37
9	Wasuponda	2,540,471,400.00	277,750,000.00	2,818,221,400.00	2,586,221,400.00	282,000,000.00	2,868,221,400.00	1.77
10	Towuti	3,670,218,600.00	277,750,000.00	3,947,968,600.00	3,654,218,600.00	343,750,000.00	3,997,968,600.00	1.27
11	Nuha	3,680,917,970.00	275,000,000.00	3,955,917,970.00	3,728,917,970.00	527,500,000.00	4,256,417,970.00	7.60

Sumber : Data dari DPPA Kecamatan TA 2022

2.3.32. Puskesmas

Alokasi belanja pada puskesmas dipengaruhi oleh perubahan dana kapitalis dan non kapitalis pada masing-masing puskesmas. Perubahan alokasi belanja operasi dan belanja modal pada puskesmas digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.43
Perubahan Rincian Anggaran Belanja Puskesmas
Se Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022

NO	Perangkat Daerah	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			KETERANGAN	
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Total	Belanja Operasi	Belanja Modal	Total	Bertambah/ Berkurang	%
1	Puskesmas Burau	2,580,060,600.00	16,940,000.00	2,597,000,600.00	2,986,181,925.00	53,189,000.00	3,039,370,925.00	442,370,325.00	17.03
2	Puskesmas Wotu	3,615,794,800.00	6,400,000.00	3,622,194,800.00	3,763,203,452.00	82,300,000.00	3,845,503,452.00	223,308,652.00	6.17
3	Puskesmas Mangkutana	3,095,918,165.00	306,650,000.00	3,402,568,165.00	3,248,477,700.00	122,235,000.00	3,370,712,700.00	(31,855,465.00)	(0.94)
4	Puskesmas Tomoni	2,773,605,450.00	68,655,170.00	2,842,260,620.00	3,201,822,600.00	130,855,170.00	3,332,677,770.00	490,417,150.00	17.25
5	Puskesmas Tomoni Timur	2,431,970,100.00	29,530,000.00	2,461,500,100.00	2,442,906,100.00	52,590,000.00	2,495,496,100.00	33,996,000.00	1.38
6	Puskesmas Kalaena	2,426,935,400.00	86,400,000.00	2,513,335,400.00	2,482,385,400.00	72,950,000.00	2,555,335,400.00	42,000,000.00	1.67
7	Puskesmas Angkona	3,132,614,600.00	30,533,400.00	3,163,148,000.00	3,208,148,300.00	45,533,400.00	3,253,681,700.00	90,533,700.00	2.86
8	Puskesmas Lakawali	1,979,812,800.00	64,890,000.00	2,044,702,800.00	2,229,167,998.00	189,620,000.00	2,418,787,998.00	374,085,198.00	18.30
9	Puskesmas Parumpanai	1,689,082,065.00	194,530,330.00	1,883,612,395.00	1,819,282,848.00	157,480,250.00	1,976,763,098.00	93,150,703.00	4.95
10	Puskesmas Malili	3,586,627,218.00	110,370,060.00	3,696,997,278.00	4,371,196,110.00	117,855,108.00	4,489,051,218.00	792,053,940.00	21.42
11	Puskesmas Lampia	1,953,780,190.00	80,300,000.00	2,034,080,190.00	1,990,524,190.00	138,300,000.00	2,128,824,190.00	94,744,000.00	4.66
12	Puskesmas Wasuponda	2,730,107,661.00	43,878,500.00	2,773,986,161.00	2,626,121,500.00	55,878,500.00	2,682,000,000.00	(91,986,161.00)	(3.32)
13	Puskesmas Nuha	2,382,932,300.00	46,000,000.00	2,428,932,300.00	2,651,209,000.00	74,000,000.00	2,725,209,000.00	296,276,700.00	12.20
14	Puskesmas Wawondula	2,986,265,402.00	18,260,000.00	3,004,525,402.00	3,283,802,904.00	33,260,000.00	3,317,062,904.00	312,537,502.00	10.40
15	Puskesmas Timampu	1,908,931,575.00	4,500,000.00	1,913,431,575.00	1,976,958,459.00	32,919,940.00	2,009,878,399.00	96,446,824.00	5.04
16	Puskesmas Mahalona	1,942,721,480.00	9,860,000.00	1,952,581,480.00	2,059,469,480.00	24,860,000.00	2,084,329,480.00	131,748,000.00	6.75
17	Puskesmas Bantilang	2,230,812,400.00	71,500,000.00	2,302,312,400.00	2,235,277,800.00	130,600,000.00	2,365,877,800.00	63,565,400.00	2.76
18	Puskesmas Bonepute	2,447,554,735.00	14,980,000.00	2,462,534,735.00	2,308,922,561.00	231,842,974.00	2,540,765,535.00	78,230,800.00	3.18

Sumber : Data Olah DPPA *Puskemas TA.2022*

2.4. Perubahan Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit.

Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diperoleh dari penyertaan modal pada PT. Bank SulselBar dan Perusahaan Air Minum Daerah.

Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan Tahun 2022 yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa) sebesar Rp.113.847.103.327 naik sebesar Rp.62.345.236.383 atau 55 persen dari Target Tahun 2022. Naiknya penerimaan pembiayaan ini berdasarkan hasil Audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2022. Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan pada perubahan tahun 2022, arah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk Investasi/Penyertaan Modal ditargetkan sebesar Rp.6.602.000.000- mengalami kenaikan sebesar Rp.1.602.000.000, Diharapkan dengan Penyertaan Modal bisa memberikan Income dalam bentuk deviden ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. Berikut di sajikan Target Pembiayaan sebelum perubahan dan sesudah Perubahan pembiayaan pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022.

Tabel. 2.44

Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	**PEMBIAYAAN**	**51.501.866.944**	**113.847.103.327**	**62.345.236.383**
1.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**51.501.866.944**	**113.847.103.327**	**62.345.236.383**
1.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggarantahun sebelumnya (silpa)	51.501.866.944	113.847.103.327	62.345.236.383
1.1.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**5.000.000.000**	**6.602.000.000**	**1.602.000.000**
1.1.3	Penyertaan Modal (Investasi)	5.000.000.000	6.602.000.000	1.602.000.000

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan azas otonomi. Sejak berlakunya kewenangan otonomi daerah tersebut, banyak hal yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa program kegiatan yang belum mencapai target pembangunan sesuai yang diharapkan bersama. Indikator kinerja adalah alat ukut kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah. Pencapaian indikator makro pembangunan memberikan gambaran atas hasil-hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

3.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Secara umum indikator makro Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 berdasarkan Rilis BPS Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2022 tanggal 28 Februari 2023 lalu, tumbuh positif atau lebih baik dari Tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja positif pada sektor ekonomi, sosial dan pemerintahan.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB ADHB Kabupaten Luwu Timur dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian dimana pada tahun 2022 mencapai 50,04 persen yang kemudian disusul oleh sector pertanian sebesar 21,89 persen. Sementara Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan atau PDRB ADHK untuk sector pertambangan dan penggalian sebesar 1,67% atau jauh lebih baik dari tahun 2021 yang mengalami kontraksi yaitu minus 7,81%. Sedangkan nilai PDRB ADHK Kabupaten Luwu Timur mencapai 16,35 triliun rupiah meningkat dibandingkan Tahun 2021 yang hanya mencapai 16,03 triliun rupiah. Sementara nilai PDRB ADHB mencapai 28,41 Triliun lebih tinggi dari capaian 2021 yaitu 23,61 Triliun. Kondisi tersebut berimplikasi positif pada peningkatan Laju pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 yang mencapai 1,99 persen. Capaian tersebut merupakan tertinggi sejak Tahun 2019. Capaian pertumbuhan ekonomi seiring dengan perkembangan usaha pada setiap sektor lapangan usaha. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha paling besar didukung oleh sektor transportasi dan pergudangan sebesar yaitu 14,38% dan kemudian disusul oleh penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu 11,01%. Kedua sector tersebut bertumbuh cukup signifikan ditahun 2022. Disisi lain laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang hanya mencapai 2,31 persen dimana hal tersebut dapat dimaklumi karena sektor pertambangan tumbuh positif dengan peranan yang cukup besar, sehingga dengan mengeluarkan sektor pertambangan, pertumbuhan ekonomi Luwu Timur tidak akan terlalu jauh berbeda dengan Pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Selain itu, faktor penyebab lainnya adalah sektor pertanian yang mengalami kontraksi -1,84 persen ditahun 2022 yang disebabkan oleh produksi Tanaman Pangan, dan Perkebunan yang mengalami pertumbuhan yang minus akibat adanya serangan hama dan serta program peremajaan pada beberapa jenis komoditi, namun sektor perikanan dan peternakan tumbuh cukup baik di Tahun 2022.

Dampak positif dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur berimplikasi pada menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2022 yaitu sebesar 4,48 persen, terjadi penurunan 0.48 poin dibanding tahun sebelumnya, Kondisi ketenagakerjaan di

Kabupaten Luwu Timur yang membaik didukung oleh program strategi peningkatan kapasitas pencari kerja dengan pembekalan keterampilan yang dapat berdaya saing. Strategi pemberian pelatihan keterampilan kepada pencari kerja, mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah serta fasilitasi dan pembinaan terus dilakukan oleh pemerintah daerah agar Tingkat Pengangggguran Terbuka (TPT) dapat terus di tekan dari tahun ke tahun. Beberapa pelatihan yang diselenggarakan di Tahun 2022 antara lain pelatihan juru ukur surveyor, operator alat berat dan Dum Truk dengan peserta mencapai 146 orang.

Salah satu indikator kinerja makro yang juga menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah Persentase penduduk miskin dimana pada tahun 2022 sebesar 6,81 persen atau 20,89 ribu jiwa atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 sebesar 6,94 persen atau 20,99 ribu jiwa. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 masih berada di bawah Provinsi Sulawesi Selatan dimana persentasenya sebesar 8,66 persen. Penurunan tingkat kemiskinan ini antara lain disebabkan oleh intervensi yang dilakukan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) yang berasal dari Pemerintah Pusat dan beberapa program Pemerintah Kabupaten Luwu Timur antara lain bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), bantuan Kelompok Nelayan berupa alat penangkapan, Bantuan sarana budidaya dan pengolahan perikanan serta bantuan benih dan ternak pada masing-masing sector tanaman pangan dan peternakan.

Selanjutnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dari sisi Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan. Capaian IPM tahun 2022 juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2022 capaian IPM Kabupaten Luwu Timur tetap konsisten berada pada peringkat ke empat dibandingkan seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan yaitu sebesar 73,92 persen atau kategori tinggi, angka ini meningkat 0,58 poin dibanding tahun 2021. Pencapaian IPM Kabupaten Luwu Timur, ditopang oleh Usia Harapan Hidup (UHH) yang meningkat menjadi 70,94 Tahun atau naik 0.31 poin, Rata-rata lama sekolah yang juga naik 0.11 poin menjadi 8,92 Tahun. Harapan Lama sekolah (HLS) juga tumbuh positif menjadi 13,00 Tahun atau naik 0.16 poin dibandingkan tahun 2021**.** Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Capaian PDRB perkapita pada tahun 2022 sebesar 92,98 juta/jiwa, meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 78,58 juta/jiwa dan jauh melampaui target RPJMD untuk tahun 2022 yaitu 71,45 juta/jiwa.

Capaian Rasio Gini Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 juga menunjukkan tren yang positif dibandingkan tahun sebelumnya, dimana capaian nilai gini ratio Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 sebesar 0,394 atau turun sebesar 0,002 poin dari tahun 2021. Penurunan Gini Ratio tersebut mengindikasikan bahwa selama periode Tahun 2022 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran penduduk di Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Makro
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian (%)	Keterangan
				Target RKPD	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1,39	2,49	1,99	79,91	Meningkat (3.38 poin)
	Dengan Tambang Biji Logam	Persen	-1,39	2,49	1,99	79,91	Meningkat (3.38 poin)
	Tanpa Tambang Biji Logam	Persen	5,76	-	2,31		Melambat
2	Angka Kemiskinan	Persen	6,94	6,64	6,81	97,43	Menurun (0,13 poin atau ±100 jiwa)
3	Tingkat Pengangggguran Terbuka	Persen	4,96	3,30	4,48	73,66	Menurun (0.48 poin atau ±822 orang)
4	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,34	73,80	73,92	100,16	Meningkat (0.58 poin)
5	Pendapatan Per Kapita	Juta Rupiah	78,58	71,45	92,98	100,45	Meningkat
	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Juta Rupiah	78,58	71,45	92,98	130,13	Meningkat
	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	Juta Rupiah	53,34	53,27	53,51	100,45	Meningkat
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Poin	0,396	0,389	0,394	98,71	Membaik (0,002 poin)

3.2 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.2.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Urusan pelayanan dasar terdiri dari urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Target RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 Tahun Pelaksanaan 2022, untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar dapat dilihat pada table 3.1 berikut ini:

Tabel 3.2
Pelaksanaan Wajib Urusan Dasar
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pelaksanaan Wajib Urusan Dasar													
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Meningkatkan kualitas lulusan dan kompetensi peserta didik,mendorong kreatifitas peserta didik serta mengefektifkan pelaksanaan kegiatan organisasi penunjang pembelajaran	Program Pengelolaan Pendidikan			Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar ('%)	100	97,09	97,09%			
							Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD ('%)	100	56,62	56,62%	Dikarenakan belum adanya regulasi atau peraturan pemerintah yang mengharuskan anak usia 5-6 tahun untuk masuk TK	Perlunya dibuatkan peraturan yang mengharuskan anak usia 5-6 tahun untuk masuk TK	
							Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100	82,67	82,67%	Dikarenakan banyaknya anak usia 13-15 tahun yang bersekolah di luar Kabupaten Luwu Timur	Perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat/orang tua siswa untuk tetap melanjutkan pendidikan anaknya	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							(%)				terutama pada sekolah pesantren	pada sekolah menengah pertama yang ada di Kab. Luwu Timur tentunya dengan lebih meningkatkan pelayan pendidikan terhadap siswa SMP utamanya dalam memberikan fasilitas yang baik sehingga orang tua siswa tidak perlu lagi menyekolahkan anak-anak mereka ke luar kabupaten luwu timur.	
							Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan ('%)	100	93,94	93,94%			
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Persentase SD/MI terakreditasi minimal B(%)	82,16	62,79	76,42%	Kewenangan Badan Akreditasi Nasional, Akreditasi sekolah dilakukan 5 tahun sekali	Memberikan bimbingan dan motivasi ke satuan pendidikan agar lebih meningkatkan kinerja dan hal-hal lain yang menjadi peniilaian oleh BAN	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana disetiap Jenjang Pendidikan			Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB SD yang dibangun (unit)	8	8	100%			
						Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD yang dibangun (unit)	1	1	100%			
						Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan (UKS)SD yang dibangun (unit)	9	9	100%			
						Pembangunan Sarana,prasarana Utilitas Sekolah	Jumlah ruang ibadah SD yang dibangun (Unit)	1	1	100%			
							Jumlah WC SD yang dibangun (unit)	6	6	100%			
							Panjang pagar SD sederajat yang dibangun (meter)	800	800	100%			
							Jumlah Halaman SD yang di tata (paket)	24	24	100%			
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas SD yang direhab (unit)	19	19	100%			
						Pengadaan Mebel Sekolah	jumlah mebel SD yang diadakan (paket)	7	7	100%			
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan SD yang diadakan (unit)	37	37	100%			
			Meningkatkan kualitas lulusan dan kompetensi			Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah seragam peserta didik SD sederajat yang	6500	6500	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			peserta didik,mendorong kreatifitas peserta didik serta mengefektifkan pelaksanaan kegiatan organisasi penunjang pembelajaran				diadakan (psg)						
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lomba minat bakat tingkat Sekolah Dasar yang dilaksanakan (lomba)	3	3	100%			
			Meningkatkan kualitas, Kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik serta pembinaan kelembagaan pengelolaan sekolah			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang disediakan (org)	517	517	100%			
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti lomba guru berprestasi(org)	60	60	100%			
							Jumlah guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional (org)	45	45	100%			
							Jumlah KKG SD yang dibina (kkg)	35	35	100%			
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Peserta binaan kelembagaan dan manajemen sekolah (Org)	1100	1100	100%			
			Menfasilitasi Penyediaan Bantuan			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya	164	164	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD				Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD sederajat (sekolah)						
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Persentase SMP/MTs terakreditasi minimal B (%)	82,6	48,97	59,28%	Kewenangan Badan Akreditasi Nasional	Memberikan bimbingan dan motivasi ke satuan pendidikan agar lebih meningkatkan kinerja dan hal-hal lain yang menjadi peniilaian oleh BAN	
			Menigkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana disetiap Jenjang Pendidikan			Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB SMP yang dibangun (unit)	21	21	100%			
						Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU SMP yang dibangun (unit)	4	4	100%			
						Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah (UKS) SMP yang dibangun (Unit)	2	2	100%			
						Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium Komputer SMP yang dibangun (Unit)	1	1	100%			
						Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah (Unit)	1	1	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah halaman sekolah SMP yang ditata (paket)	8	8	100%			
							Jumlah ruang ibadah SMP yang dibangun (Unit)	4	4	100%			
							Jumlah WC peserta didik SMP yang dibangun (Unit)	6	6	100%			
							Jumlah pagar SMP sederajat yang dibangun (meter)	400	400	100%			
						Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung sekolah	Jumlah bangunan kantor SMP yang direhab (unit)	1	1	100%			
						Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel SMP yang diadakan(Paket)	9	9	100%			
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah media pendidikan SMP yang diadakan (Unit)	28	28	100%			
						Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah seragam peserta didik SMP sederajat yang diadakan (psg)	5100	5100	100%			
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat praktik dan peraga siswa SMP yang diadakan(Paket)	10	10	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah minat,bakat dan kreativitas siswa(lomba)	5	5	100%			
			Meningkatkan kualitas,Kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik serta pembinaan kelembagaan pengelolaan sekolah			Penyediaan Pendidik dan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang disediakan (org)	217	217	100%			
						Tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama							
						Pengembangan Karir Pendidik dan	Jumlah guru,kepala sekolah,dan pengawas yang mengikuti lomba guru berprestasi(org)	30	30	100%			
						Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
							Jumlah guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional (org)	30	30	100%			
							Jumlah MGMP yang terbina	11	11	100%			
						Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah Peserta binaan kelembagaan dan manajemen sekolah (Org)	1100	1100	100%			
			Memfasilitasi Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pengelolaan dana BOS Sekolah menengah pertama (sekolah)	52	45	87%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Persentase TK terakreditasi minimal B (%)	63,49	44,91	70,73%	Kewenangan Badan Akreditasi Nasional	Memberikan bimbingan dan motivasi ke satuan pendidikan agar lebih meningkatkan kinerja dan hal-hal lain yang menjadi peniilaian oleh BAN	
			Menigkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana disetiap Jenjang Pendidikan			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang dibangun (Unit)	1	1	100%			
						Pembangunan Sarana,Prasarana Utilitas PAUD	Jumlah UKS TK yang dibangun (unit)	5	5	100%			
							Jumlah WC TK yang dibangun (unit)	1	1	100%			
						Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang direhab	1	1	100%			
						Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/ruang Kelas/ruang guru PAUD yang dipelihara (sekolah)	11	11	100%			
						Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel TK yang diadakan (paket)	1	1	100%			
						Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan siswa TK yang diadakan (eks)	6508	6508	100%			
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa TK yang diadakan	13	13	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						PAUD	(paket)						
			Meningkatkan kualitas,Kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik serta pembinaan kelembagaan pengelolaan sekolah			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan TK yang disediakan (org)	189	189	100%			
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti lomba guru berprestasi (org)	15	15	100%			
							Jumlah Guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional (orang)	10	10	100%			
							Jumlah KKG TK yang dibina (KKG)	23	23	100%			
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah lomba gebyar PAUD yg dilaksanakan (lomba)	6	6	100%			
			Menfasilitasi Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Jenjang PAUD dan PNF			Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah TK yang menerima BOP PAUD (sekolah)	175	175	100%			
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase kelulusan warga belajar paket A, B, dan C (%)	96	87,97	91,35%			
			Meningkatkan kualitas,Kompetensi dan profesionalisme			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah TUTOR penyelenggara dan pengelola yang dilatih (org)	43	43	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			tenaga pendidik serta pembinaan kelembagaan pengelolaan sekolah			pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta yang mengikuti penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI)	60	0	0%	Tidak dilaksanakannya kegiatan HAI tingkat provinsi		
			Menfasilitasi Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Jenjang PAUD dan PNF			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang menerima BOP Kesetaraan (PKBM)	8	8	100%			
			1.Menerapkan Perencanaan urusan Pendidikan berbasis kinerja 2.Melakukan Pendampingan serta Evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	100	99,61	99,61%			
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaa,penganggaran dan evaluasi tepat waktu(%)	100	100	100'%			
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu(dok)	7	7	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun(dok)	10	10	100%			
					Administrsi Keuangan Perangkat Daerah		persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100	95,43	95,43%			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan (orang)	1755	1711	90,87%	Abe berapa PNS yang pensiun dan meninggal dunia		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD yang disusun tepat waktu(dokumen)	18	18	100%			
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	100	100	100%			
						Pengadaan Pakaian Dinas	jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	110	110	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							yang diadakan(Stel)						
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (laporan)	3	3	100%			
						Monitoring,Evaluasi,dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring,evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai (dokumen)	6	6	100%			
						Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan(orang)	401	401	100%			
						Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (org)	10	10	100%			
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (%)	100	100	100'%			
						Penyediaan Komponen	Jumlah komponen instalasi	324	324	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (buah)						
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (buah)	73	73	100%			
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	37	37	100%			
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	3	3	100%			
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratutan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eks)	84	84	100%			
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	3000	3000	100%			
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	1676	1676	100%			
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi(%)	100	100	100'%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan(unit)	22	22	100%			
						Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah sarana atau prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan(unit)	5	5	100%			
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100' %			
						penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang di administrasikan (surat)	3200	3200	100%			
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon,listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	2	2	100%			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (orang)	3	3	100%			
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Yang terpelihara dengan baik(%)	100	100	100'%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	67	67	100%			
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara (unit)	78	78	100%			
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1	1	100%			
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan serta Sumber Daya Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			Persentase capaian SPM bidang Kesehatan ('%)	100	98,30	98,30%			
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten kota ('%)	70	96,96	96%			
						Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang	20	10	50%	Tidak mencapai target karena anggaran untuk	Tahun 2023 pembangunan rumah sakit di fokuskan di	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						dan Prasarana Pendukungnya	dibangun				pembangunan rumah sakit Malili di kembalikan di perubahan tahun 2022, sementara untuk pembangunan rumah sakit Towuti kegiatan yang sudah terlaksana yaitu penyusunan dokumen FS, master plan dan DED	pembangunan rumah sakit malili dengan anggaran sebesar Rp 15.100.000.000,-	
			Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	1	1	100%			
			Penyediaan dan Peningkatan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun yang di tingkatkan dan di kembangkan	5	5	100%			
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang direhabilitasi dan dipelihara	14	14	100%			
						Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas kesehatan yang diadakan	17	17	100%			
			Peningkatan Promosi Kesehatan, Penyehatan Lingkungan,			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	Jumlah puskesmas yang memiliki mutu dan ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	14	14	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Perbaikan Status Gizi Masyarakat serta Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak			Kesehatan							
			Peningkatan upaya kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana / kedaruratan di Kabupaten Luwu Timur			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat yang dikalibrasi dan di pelihara	390	0	0%	Anggaran yang tersedia di tahun 2022 tidak mencukupi untuk memfasilitasi tenaga ahli dalam pelaksanaan kalibrasi.	Tahun 2023 untuk pemeliharaan kalibrasi alkes di anggarkan di masing - masing puskesmas dengan sumber dana DAK Non Fisik	
						Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	100	87	87%	beberapa obat dan vaksin diantranya vaksin rabies tdk ada tersedia didistributor	untuk menghindari kekosongan perlu dilakukan pengadaan langsung diawal jika tdk tersedia di ecatalog	
						Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase ketersediaan bahan medis habis pakai di puskesmas	100	94	94%	beberapa jenis obat program tdk tersedia di ecatalog	untuk menghindari kekosongan perlu dilakukan pengadaan langsung diawal jika tdk tersedia di ecatalog	
						Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar	88	88	100%	dari 18 puskesmas ada 2 puskesmas yg belum sesuai standal dalam melakukan pelayanan kefarmasian dikarenakan kurangnya SDM tenaga Apoteker dan sarana prasarana pada pukm tersebut	menemptkan tenaga apoteker pada puskesmas parumpanai disertai dengan kelengkapan prasarana, bgitupun dgn pkm bonepute kekurangan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kefarmasian.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar ('%)	100	98,21	98%	1. Ada beberpa kematian bayi sbelum usia 28 hari sehingga Pelayanan Neontalnya tidak lengkap.	1. Penguatan Pelaksanaan AMP-SR(Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon) untuk mencegah kematian Ibu dan Neonatal, 2. Tingakatan kunjungan rumah Bayi baru Lahir oleh bidan Pendamping	
							Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar ('%)	100	92,81	92%	1. Masi banyak kasus Abortus sehingga pelayanan pada ibu hamil nyang mengalami abortus tidak lengkap, 2. Ada beberapa kehamilan yang tidak diinginkan yang lambat memeriksakan kehamilannya	1. Tingkatkan pendampingan Ibu hamil, 2. Tingkatkan Pelayanan kesehatan Remaja(buat posyandu remaja di setiap Desa)	
							Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar ('%)	100	99	99%	Masih ada Ibu bersalin yang bersalin di rumah karena tidak sempat ke faskes	Tingkatkan edukasi pada hamil tentang pentingnya persalinan di faskes	
							Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar ('%)	100	93,34	93%	Balita yang sudah lengkap Imunisasinya jarang ke Posyandu	Tingkatkan edukasi tentang penting memantau tumbuh kembang anak, dan tingkatkan kunjungan rumah	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	95,74	95%			
							Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100,00	100%			
							Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	98,91	98%	Kurangnya Strip untuk pemeriksaan Kolesterol yang merupakan indikator pelayanan lansia sesuai standar	Pengadaaan Strip Kolesterol	
							Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100%			
							Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100%			
							Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Persentase orang dengan terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100	100%			
							Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi HIV sesuai standar	100	100	100%			
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	5621	5217	92%	1. Masi banyak kasus Abortus sehingga pelayanan pada ibu hamil nyang mengalami abortus tidak lengkap, 2. Ada beberapa kehamilan yang tidak diinginkan yang lambat memeriksakan kehamilannya	1. Tingkatkan pendampingan Ibu hamil, 2. Tingkatkan Pelayanan kesehatan Remaja(buat posyandu remaja di setiap Desa) untk mencegah perkawinan usia dini	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Orang)	5255	5250	99%	Masih ada Ibu bersalin yang bersalin di rumah karena tidak sempat ke faskes	Tingkatkan edukasi pada hamil tentang pentingnya persalinan di faskes	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Orang)	5251	5157	98%	1. Ada beberpa kematian bayi sbelum usia 28 hari sehingga Pelayanan Neontalnya tidak lengkap. 2. Kunjungan Rumah Neonatal	1. Penguatan Pelaksanaan AMP-SR(Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon) untuk mencegah kematian Ibu dan Neonatal, 2. Tingakatan kunjungan rumah	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											belum maksimal	Bayi baru Lahir oleh bidan Pendamping	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pekayanan kesehatan (Orang)	29570	27602	93%	Balita yang sudah lengkap Imunisasinya jarang ke Posyandu	Tingkatkan edukasi tentang penting memantau tumbuh kembang anak, dan tingkatkan kunjungan rumah	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan (Orang)	17930	17167	95%	tidak mencapai tergat karena beberapa puskesmas tidak melakukan sweeping pada siswa baru		
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan (Orang)	89135	144030	161%			
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Orang)	15500	15331	98%	1. Kurangnya Strip untuk pemeriksaan Kolesterol yang merupakan indikator pelayanan lansia sesuai standar, 2 ada Lansia yang tidak pernah ikut posyandu lansia	1. Pengadaaan Strip Kolesterol, 2. Tingkatkan kunjungan Rumah Lansia	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Orang)	20643	40725	197%			
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan	4957	5031	101%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penderita Diabetes Melitus	pelayanan kesehatan (Orang)						
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Orang)	369	454	123%			
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Orang)	330	384	116%			
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang kelompok resiko yang diperiksa HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Orang)	5460	5435	99%	Jumlah pemeriksaan tidak tercapai dikarenakan ketersediaan reagen tidak mencukupi		
							Jumlah orang yang terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan (orang)	75	349	465%			
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar pasca bencana (jiwa) (Jiwa)	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah ibu hamil KEK (Orang)	534	721	135%	Tingginya kasus Bumil kEK sebagian besar terjadi pada Ibu hamil dibawah umur 20 Tahun	Tingkatkan Edukasi pada Calon Pengantin dan Pencegahan Perkawinan anak, dan Pemberian PMT Bagi BUMIL KEK	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah puskesmas yang melakukan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga	18	18	100%			
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan STBM	80	80	100%			
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah KK yang ber-PHBS (KK)	49.000	53338	108%			
							Jumlah desa / kelurahan yang menerapkan kebijakan germas (Desa/kelurahan)	50,00	60	120%			
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya (PKM)	18	18	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (Desa/kelurahan)	4,00	4	100%			
						Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah calon jamaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan (org)	74	74	100%			
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan penanganan Kasus Gigitan hewan penular rabies sesuai standar (Sarana)	19	19	100%			
							Jumlah Penanganan Kasus DBD (Kasus)	147,00	236	160%	Kasus Demam berdarah meningkat karena dipengarungaruhi oleh musim peralihan kemusim penghujan dan siklus 6 tahunan, peningkatan kepadatan vektor aedes aegypti pada beberapa wilayah terutama wilayah endemis dbd, masih rendahnya kesadaran	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan PSN 3MPlus melalui sosialisasi dan kerjasama lintas sektor , mengaktifkan kembali kader jumantik di setiap desa terutama daerah endemis	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											masyarakat dalam pelaksanaan PSN 3MPlus, tidak berjalnnya G1R1J karena tidak terdapatnya kader jumantik pada sebagian besar wilayah serta adanya kasus import dari makassar,palopo dan morowali yang juga merupakan daerah endemis dbd		
							Jumlah anak Usia 0-11 bln yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap (Orang)	5.466	5552	101%			
						Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Masyarakat Kurang Mampu yang memiliki jaminan kesehatan nasional PBI APBD (jiwa) (Jiwa)	50.275	51.921	103%			
							Jumlah Masyarakat Kurang Mampu yang memiliki jaminan kesehatan nasional PBI APBD Integrasi (Jiwa) (Jiwa)	69.279	69.279	100%			
						Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Jumlah kecamatan yang melaksanakan tatanan sehat (kec)	11	11	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas)	18	18	100%			
						Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang di re-akreditasi (PKM)	11	0	0%	Pelaksanaan Survey Akreditasi tidak terlaksana sesuai target, karena adanya Surat Edaran tentang perpanjangan masa berlaku sertifikat akreditasi puskesmas berlaku sampai dengan 31 Desember 2023, sehingga pelaksanaan survey di tunda	diusulkan kembali di tahun 2023	
						Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah FKTP yang melakukan pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar (PKM)	18	18	100%			
							Persentase kegawatdaruratan yang tertangani (%)	100	100	100%			
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Persentase data sarana dan prasarana FKTP yang dimutakhirkan (%)	65,00	65	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah data sarana dan prasarana FKTP yang didokumentasikan	3	3	100%			
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang diterbitkan ('%)	50	50	100%			
						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah rumah sakit yang dilakukan pengawasan perpanjangan izin operasional rumah sakit	1	1	100%			
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			Persentase tenaga kesehatan yang berkompeten (%)	80,86	90	111%			
					Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase kepemilikan SIK/ SIP bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan (%)	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah SIK/ SIP yang dikeluarkan	746	746	100%			
					Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase rata-rata distribusi pemerataan sumber daya manusia kesehatan	100	100	100%			
						Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga SDMK non ASN yang di tempatkan secara merata sesuai kompetensinya (Orang)	315	315	100%			
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SDMK yang ditingkatkan kompetensinya	100	90	90%			
						Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber	Jumlah tenaga SDMK yang ditingkatkan kompetensinya (Orang)	10	9	90%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
				Program Sediaan Farmasi,Alat Kesehatan dan Makanan Minuman			Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan dan persyaratan perizinan (%)	68	68	100%			
					Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase fasilitas pelayanan farmasian yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan (%)	95	95	100%			
						Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang melakukan pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan (Sarana kefarmasian)	52	52	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	42	42	100%			
						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan (Sarana IRTP)	180	180	100%			
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			Persentase desa/ kelurahan siaga aktif	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan UKBM	127	127	100%			
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah posyandu aktif	275	273	99%			
			Peningkatan Kapabillitas Kelembagaan, Koordinasi dan Kompetensi Sumber	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	99,90	99%			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100	100	100%			
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2	2	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2	2	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2	2	100%			
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10	10	100%			
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100	100	100%			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan (orang)	846	846	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu(laporan)	18	18	100%			
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat		Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Daerah								
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4	4	100%			
					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD (%)	100	100	100%			
						Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu	4	4	100%			
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	100	100%			
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mutakhirkan	12	12	100%			
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan(orang)	7	7	100%			
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja	100	99,12	99%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							administrasi umum PD (%)						
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	5	5	100%			
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	3	3	100%			
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	15	15	100%			
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	3	100%			
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (eksemplar)	96	90	93%			
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	121	121	100%			
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan (kali)	441	441	100%			
					Pengadaan Barang Milik		Persentase BMD-PD penunjang yang	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		terpenuhi (%)						
						Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	5	5	100%			
						Pengadaan Mebel	Jumlah meubel yang diadakan	2	2	100%			
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan / mesin lainnya yang diadakan	11	11	100%			
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	4	4	100%			
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ('%)	100	100	100%			
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pelayanan surat menyurat yang disediakan	2800	2800	100%			
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayarkan	60	60	100%			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum	230	230	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Kantor							
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik ('%)	100	100	100%			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	23	22	95%			
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	43	43	100%			
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	1	100%			
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota			Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan sesuai standar (%)	100%	100%	100%			
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan,	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Perangkat Daerah		Penganggaran, dan Evaluasi Tepat Waktu						
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun Tepat Waktu (Dok)	8	8	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang Disusun (Dok)	1	1	100%			
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100	100	100%			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang dibayarkan (orang)	384	372	103%			
							Jasa Kebersihan Umum Rumah Sakit yang Terbayarkan (Bulan)	8	8	100%			
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Rata-Rata capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100%			
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen laporan hasil Penatausahaan	5	5	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Arsip Dinamis pada SKPD (Dok)						
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan yang Terselenggara dengan Baik (%)	100	100	100%			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangan Terbayarkan (Org)	229	230	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun tepat waktu (Dok)	7	7	100%			
					Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD (%)	4	4	100%			
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Kunjungan Pasien BLUD (Kunjungan)	90.873	90.626	99%			
							Jumlah PAD BLUD (Rp)	95.000.000.000	100.061.203.127	100,05%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pengelolaan Sumber Daya Air			Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air (%)	46,49	46,94	100%			
							Rasio jaringan irigasi (Angka)	12,39	12,65	102%			
			Membangun dan memelihara infrastruktur untuk mengendalikan daya rusak air(Sungai dan pantai)		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Panjang infrastruktur pengaman sungai dan pantai (Km)	71,99	72,69	100%			
						Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang dibangun (Km)	0,11	0,15	136,%			
						Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun (Km)	1,71	2,15	125%			
						Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang dibangun (unit)	1	1	100%			
						Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai	Panjang seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya yang	270	227,17	84%	kondisi lapangan tidak sesuai dengan rencana fisik dan alokasi	Melakukan identifikasi awal untuk kemungkinan perubahan serta	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Lainnya	dibangun (m)				dana	melakukan penyesuaian pada target kinerja	
						Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang dipelihara (km)	0,08	0,87	1087,5%	Kebutuhan lapangan lebih besar daripada volume yang ditargetkan sehingga perlu dilakukan penyesuaian volume	Mengoptimalkan pengalokasian anggaran yang tersedia sehingga melampaui target yang ditetapkan	
						Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dipelihara (km)	0,138	0,136	98%	Anggaran yang disediakan berdasarkan asumsi standar biaya pemeliharaan sehingga cenderung ada perbedaan realisasi yang ada di lapangan dengan yang sebelummnya direncanakan	Lebih memperhitungkan kembali standar biaya yang ada dengan kondisi lapangan yang akan dilakukan kegiatan pemeliharaan sehingga target dapat terpenuhi	
						Rehabilitasi Pintu Air/Bendung pengendali Banjir	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang dipelihara (unit)	4	4	100%			
						Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya yang dipelihara (km)	0,012	0,195	1625%	Kebutuhan lapangan lebih besar daripada volume yang ditargetkan sehingga perlu dilakukan penyesuaian	Mengoptimalkan pengalokasian anggaran yang tersedia sehingga melampaui target yang ditetapkan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											volume		
						Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai/saluran pembuang yang dinormalisasi (Km)	34	26	76%	Anggaran bersifat disediakan berdasarkan asumsi standar biaya normalisasi sehingga cenderung ada perbedaan realisasi yang ada di lapangan dengan yang sebelummnya direncanakan	Perlu identifikasi awal untuk kemungkinan perubahan serta melakukan penyesuaian pada perjanjian kinerja	
			Mengembalikan dan memelihara fungsi jaringan yang sudah ada (33 Daerah irigasi)		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Panjang jaringan irigasi kondisi baik (km)	78,19	80,25	102%			
						Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang dibangun (unit)	1	1	100%			
						Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang saluran jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan (Km)	1,94	3,74	192%			
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Panjang rehabilitasi jaringan irigasi	0,15	0,409	272%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Permukaan	permukaan yang ditingkatkan (km)						
						Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dipelihara (Km)	0,177	2,21	1248,5%	Kebutuhan lapangan lebih besar daripada volume yang ditargetkan sehingga perlu dilakukan penyesuaian volume	Mengoptimalkan pengalokasian anggaran yang tersedia sehingga melampaui target yang ditetapkan	
						Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang dipelihara (unit)	2	7	350%	Kebutuhan lapangan lebih besar daripada volume yang ditargetkan sehingga perlu dilakukan penyesuaian volume	Mengoptimalkan pengalokasian anggaran yang tersedia sehingga melampaui target yang ditetapkan	
						Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah laporan pengelolaan irigasi (Laporan)	8	8	100%			
						Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah laporan informasi musim tanam (Laporan)	2	2	100%			
			Pembangunan, peningkatan, perluasan dan operasi dan pemeliharaan SPAM perkotaan dan perdesaan	Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Sir Minum			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (%)	59,46	60,9	102%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan (RT)	37.244	37.142	99%	Ada perubahan desain dengan perubahan pada panjang pipa Distribusi Utama yang menyebabkan volume perpipaan mengalami pengurangan	Perlu identifikasi awal untuk kemungkinan perubahan serta melakukan penyesuaian pada perjanjian kinerja	
						Pembangunan SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Panjang SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan yang dibangun (Km)	2,85	2,85	100%			
						Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Panjang SPAM Jaringan Perpipaan kawasan perdesaan yang ditingkatkan (Km)	0,26	4,13	1588,4%	Kebutuhan lapangan lebih besar daripada volume yang ditargetkan sehingga perlu dilakukan penyesuaian volume	Mengoptimalkan pengalokasian anggaran yang tersedia sehingga melampaui target yang ditetapkan	
						Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah kelompok penyelenggara SPAM yang dibina (kelompok)	35	35	100%			
						Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah kegiatan SPAM jaringan perpipaan kawasan pedesaan yang dipelihara	1	7	700%			
						Perluasan SPAM	Jumlah rumah	1.500	1.398	93,2%	Ada perubahan	Perlu identifikasi awal	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	tangga yang mendapatkan akses (SR) melalui SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan (SR)				desain dengan perubahan pada panjang pipa Distribusi Utama yang menyebabkan volume perpipaan mengalami pengurangan	untuk kemungkinan perubahan serta melakukan penyesuaian pada perjanjian kinerja	
			Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan	Program Pengelolaan & Pengembangan Persampahan Regional			Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun (%)	9,09	0	0%	target yang ditetapkan masih berdasarkan perhitungan pada dokumen Renstra	Perlu penyesuaian pada perjanjian kinerja	
					Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah sarana / prasarana persampahan yang disediakan (Unit)	5	5	100%			
						Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPS-3R/TPS yang dibangun (Unit)	1	1	100%			
						Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah kontainer sampah yang diadakan (Unit)	2	2	100%			
							Jumlah truk sampah yang diadakan (Unit)	1	1	100%			
							Jumlah motor sampah yang diadakan (Unit)	1	1	100%			
							Jumlah tempat sampah yang	0	0	0%	Pada tahun ini memang tidak ada	Perlu identifikasi awal untuk kemungkinan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							terpilah (Unit)				rencana target yang dilaksanakan	perubahan serta melakukan penyesuaian pada perjanjian kinerja	
			Pembangunan sarana/prasarana serta pengelolaan SPALD	Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah			Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S Akses Aman (%)	0,345	0	0%	target yang ditetapkan masih berdasarkan perhitungan pada dokumen Renstra	target perlu disesuaikan dengan rencana aksi	
					Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah tangga yang memiliki SPALD-S Akses aman (RT)	8.033	8.033	100%			
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah dokumen air limbah (Dokumen)	1	2	200%	Dokumen SSK dan Ranperda Air Limbah		
						Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah sarana dan prasarana air limbah yang dibangun (SR)	1.922	1.922	100%			
						Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah peserta kegiatan pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik (Orang)	10	10	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah peserta kegiatan pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik (orang)	5	5	100%			
						Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah kendaraan pengangkut lumpur tinja (Unit)	1	1	100%			
						Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Terlaksananya penyedotan lumpur tinja (bulan)	12	0	0%	Menunggu Persetujuan pembentukan UPTD dan Persetujuan Perda Pengelolaan Air Limbah	Perlu identifikasi awal untuk kemungkinan perubahan serta melakukan penyesuaian pada perjanjian kinerja	
			Pembangunan dan pemeliharaan drainase	Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Drainase			Persentase saluran drainase dalam kondisi baik (%)	89,51	90,24	100%			
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air (Km)	368,99	373,617	101%			
						Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang drainase yang dibangun (Km)	7,44	9,087	122%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang drainase yang dipelihara (Km)	0,39	0,47	120%			
			Pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum	Program Pengembangan Permukiman			Persentase panjang jalan yang dilengkapi Penerangan Jalan Umum (PJU)	22,21	22,26	100%			
					Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Panjang jalan yang dilengkapi penerangan jalan umum (PJU) (Km)	1,55	3,5	225%	Kebutuhan lapangan lebih besar daripada volume yang ditargetkan sehingga perlu dilakukan penyesuaian volume	Mengoptimalkan pengalokasian anggaran yang tersedia sehingga malampaui target yang ditetapkan	
						Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah penerangan jalan umum (PJU) yang diadakan (Unit)	53	70	132%			
			Pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung	Program Penataan Bangunan Gedung			Rasio kepatuhan IMB kabupaten (%)	91,14	90,71	99,5%	masih ada IMB bangunan yang belum sesuai peruntukannya yang terbit sebelum tahun 2021	perlunya peningkatan pengawasan bangunan gedung	
							Persentase bangunan gedung daerah kabupaten	85,7	85,71	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							yang dibangun (%)						
					Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Jumlah bangunan yang Ber-IMB (unit)	5.438	5.493	101%	adanya peningkatan jumlah permohonan yang masuk melampaui permohonan pada tahun 2021	Perlu identifikasi awal untuk kemungkinan perubahan serta melakukan penyesuaian pada perjanjian kinerja	
						Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah rekomendasi IMB yang diberikan oleh Pemda (Rekomendasi)	25	80	600%	target bersifat perkiran, adanya peningkatan jumlah permohonan yang masuk melampaui permohonan pada tahun 2021	Perlu identifikasi awal untuk kemungkinan perubahan serta melakukan penyesuaian pada perjanjian kinerja	
						Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi bangunan gedung Kabupaten yang disusun (dokumen)	1	1	100%			
						Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten /	Jumlah bangunan gedung yang dibangun (Unit)	6	6	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Kota							
						Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten yang dipelihara (Unit)	1	1	100%			
			Pembangunan dan pemeliharaan bangunan/gedung layanan publik, keagamaan dan lingkungan publik Prioritas pembangunan islamic centre	Program Penataan Bangunan & Lingkungan			Persentase Luas RTH publik yang ditata (%)	0,28	0,28	100%			
					Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Luas RTH publik yang ditata (ha)	5	5	100%			
						Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan publik yang di bangun (Unit)	1	1	100%			
							Jumlah RTH publik yang ditata (Unit)	1	2	200%			
						Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan publik yang dipelihara (Unit)	0	0	0%	Pada tahun ini memang tidak ada rencana target yang dilaksanakan		
							Jumlah RTH publik yang dipelihara (Unit)	1	1	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Membangun dan memelihara jalan/jembatan kondisi rusak ringan dan rusak berat	Program Penyelenggaraan Jalan			Persentase jalan kabupaten kondisi baik (%)	34,55	34,67	100%	kelebihan realisasi 0,35% dari target jalan yang berkondisi baik diakibatkan oleh kurang maksimalnya penentuan target yang tidak disesuaikan dengan rencanan pembangunan / peningkatan jalan aspal dan beton.	memaksimalkan penyesuaian target dengan rencanan pembangunan / peningkatan jalan aspal dan beton.	
					Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Panjang jalan kondisi baik (km)	652,589	654,918	100%	kelebihan realisasi 0,35% dari target jalan yang berkondisi baik diakibatkan oleh kurang maksimalnya penentuan target yang tidak disesuaikan dengan rencana pembangunan / peningkatan jalan aspal dan beton.	memaksimalkan penyesuaian target dengan rencanan pembangunan / peningkatan jalan aspal dan beton.	
							Jumlah jembatan kondisi baik (unit)	341	340	99,7%	Bertambahnya jumlah jembatan rusak melebihi asumsi rencana kegiatan	Lebih memperhatikan kondisi lapangan yang akan dilakukan kegiatan fisik sehingga target dapat terpenuhi	
						Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen database jalan/jembatan yang diupdate	4	4	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							(Dokumen)						
						Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan menjadi jalan aspal (km)	9	8,94	99,3%	kurangnya realisasi terhadap target diakibatkan oleh adanya penyesuaian di lapangan yang mengharuskan pengurangan volume pengaspalan yang dialihkan ke pekerjaan lain seperti proteksi, timbunan, maupun bahu jalan yang kondisinya sendiri untuk mendukung pengaspalan yang sedang dikerjakan.	Lebih memperhatikan kondisi lapangan sebelum tahap perencanaan agar target pengaspalan bisa tercapai pada saat pekerjaan fisik.	
							Panjang jalan yang ditingkatkan menjadi jalan beton (km)	6,5	5,78	88,9%	adanya eskalasi harga bahan yang tidak sesuai dengan asumsi pada saat penyusunan renja	perlu analisis yang lebih baik dalam penyusunan renja	
							Panjang jalan yang ditingkatkan menjadi jalan kerikil (km)	13	32,07	246%	adanya aspirasi DPRD terkait dengan usulan masyarakat	perlu adanya sinkronisasi antara data teknis, aspirasi dan renja.	
						Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang dilebarkan menjadi jalan aspal (km)	0	0	0%	Kegiatan tidak dialokasikan pada tahun 2021		
							Panjang jalan yang dilebarkan menjadi jalan beton (km)	1	1,1	110%	kondisi lapangan yang mengharuskan pelebaran melebihi target. Hal ini	memaksimalkan peninjauan lapangan terhadap jalan beton yang perlu pelebaran.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											disebabkan karena kurang maksimalnya peninjauan lapangan terkait target jalan beton yang perlu dilepbarkan.		
							Panjang jalan yang dilebarkan menjadi jalan kerikil (km)	0	0	0%	Pada tahun ini memang tidak ada rencana target yang dilaksanakan		
						Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang dipelihara (km)	1,5	2	133,3%	pengecakan lapangan masih kurang maksimal, sehingga terkadang masih ada jalan yang perlu pemeliharaan namun tidak dimasukkan ke dalam target pekerjaan.	lebih memaksimalkan peninjauan lapangan terkait jalan yang perlu pemeliharaan.	
						Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun (Unit)	9	9	100%			
						Pelebaran Jembatan	Jumlah jembatan yang dilebarkan (unit)	2	2	100%			
						Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara (unit)	4	4	100%			
			Melakukan pelatihan bagi SDM jasa konstruksi, menjamin ketersediaan dan	Program Pengembangan Jasa Konstruksi			Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	41,89	48,11	114%	target yang ditetapkan masih berdasarkan perhitungan pada dokumen Renstra	Perlu penyesuaian pada perjanjian kinerja	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			tersosialisasi informasi jasa konstruksi serta melakukan monitoring pelaksanaan fisik jasa konstruksi										
							Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kerja (%)	100	100	100%			
					Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah tenaga teknis yang terlatih bersertifikat (orang)	432	457	105%	target yang ditetapkan masih berdasarkan perhitungan pada dokumen Renstra	Perlu penyesuaian pada perjanjian kinerja	
						Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih (orang)	100	50	50%	Pelatihan diklat tenaga terampil sebanyak 100 Orang Belum terealisasi 50%. 1 kegiatan tidak terlaksana karena kurangnya peserta yang mendaftar hanya sebanyak 46 orang dan yang memenuhi persyaratan 26 orang dari target 50 orang sehingga di batalkan pelaksanaannya serta peserta yang	Lebih intens melakukan koordinasi dan sosialisasi terhadap stakeholder terkait pelaksanaan kegiatan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											mendaftar tidak memenuhi kualifikasi persyaratan yang di inginkan		
						Fasilitasi Sertifikat Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih / difasilitasi (orang)	50	92	184%	Dari 117 peserta yang diundang, hanya 92 orang yang hadir karena ada halangan saat pelaksanaan kegiatan.	Melakukan konfirmasi kehadiran lebih instens kepada peserta.	
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SIPJAKI cakupan kabupaten yang terupdate	100	100	100%			
						Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah layanan SIPJAKI yang update (Layanan)	7	7	100%			
					Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non kecil dan Kecil)		Persentase rekomendasi SIUJK sesuai SOP (%)	100	100	100%			
						Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan jasa konstruksi (Orang)	150	150	100%			
					Pengawasan Terbit Usaha, Tertib		Jumlah SDM yang terlatih bersertifikat (orang)	50	50	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi								
						Bimbingan Teknis Tentang Terbit Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah penyedia dan pengguna jasa yang mengikuti bimtek (Orang)	50	50	100%			
						Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah kegiatan jasa konstruksi yang dimonitoring (Paket)	200	179	89,5%	Kurangnya kapasitas SDM dalam melakukan pengawasan paket konstruksi yang cukup banyak pelaksanaannya	Perlunya tambahan kapasitas SDM yang memadai untuk melakukan pengawasan	
							Jumlah dokumen rencana kerja anggaran yang disusun (Dokumen)	2	2	100%			
			Menyusun dan menetapkan peraturan tata ruang serta mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang			Persentase kesesuaian penataan ruang (%)	42,72	39,94	93,4%	Dari 3 perkada yang ditetapkan baru 1 perkada yang ditetapkan. sedangkan 2 Ranperda masih menunggu persetujuan substansi belum terbit dari Kementerian ATR	Melakukan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN agar mempercepat pembahasan, Lebih aktif berkoordinasi dengan stakeholder terkait, serta Lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait sosialisasi yang akan diadakan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Persentase penetapan rencana tata daerah/rencana rinci tata ruang (%)	100	50	50%	Dari 3 perkada yang ditetapkan baru 1 perkada yang ditetapkan. sedangkan 2 Ranperda masih menunggu persetujuan substansi belum terbit dari Kementerian ATR	Melakukan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN agar mempercepat pembahasan dan Lebih aktif berkoordinasi dengan stakeholder terkait	
						Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Perbup RDTR yang dihasilkan (Dokumen)	3	1	33%	Dari 3 perkada yang ditetapkan baru 1 perkada yang ditetapkan. sedangkan 2 Ranperda masih menunggu persetujuan substansi belum terbit dari Kementerian ATR	Melakukan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN agar mempercepat pembahasan dan Lebih aktif berkoordinasi dengan stakeholder terkait	
						Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen RDTR yang dihasilkan (Dokumen)	1	1	100%			
					Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan (persen)	100	0	0%	Tidak terealisasi. Kendala di nara sumber yang tidak bersedia untuk memfasilitasi kegiatan ini dan juga tidak adanya pengganggaran di DPA untuk nara sumber.	Lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait sosialisasi yang akan diadakan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi (Orang)	0	0	0%	Tidak terealisasi. Kendala di nara sumber yang tidak bersedia untuk memfasilitasi kegiatan ini dan juga tidak adanya pengganggaran di DPA untuk nara sumber.	Lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait sosialisasi yang akan diadakan	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Persentase informasi tentang penataan ruang (persen)	100	100	100%			
						Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Papan Himbauan/Papan Informasi Penataan Ruang (unit)	2	2	100%			
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah kabupaten/Kota		Persentase penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang (Persen)	100	100	100%			
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan pengawasan penataan ruang yang dihasilkan (Laporan)	4	4	100%			
						Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah keterangan kesesuaian ruang yang diterbitkan (Surat)	25	99	396%	target bersifat perkiran, adanya peningkatan jumlah permohonan yang masuk melampaui	Perlu identifikasi awal untuk kemungkinan perubahan serta melakukan penyesuaian pada	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											permohonan pada tahun 2021	perjanjian kinerja	
			Mengoptimalkan penyusunan dokumen dan pelaporan perencanaan, dan penganggaran berbasis kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota			Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100%			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100	100	100%			
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	2	2	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	2	2	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	2	2	100%			
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	16	16	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100	100	100%			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	87	87	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (Dokumen)	1	1	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	18	18	100%			
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar (%)	100	100	100%			
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	4	4	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	100	100%			
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)	2	2	100%			
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	4	4	100%			
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	14	14	100%			
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	100	100	100%			
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	45	23	51%	Terdapat beberapa komponen yang tidak memerlukan adanya penggantian	Lebih memperhatikan kebutuhan komponen yang perlu dilakukan penggantian agar	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												realisasi dapat sesuai dengan target	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)	8	8	100%			
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (jenis)	29	26	89,6%	Terdapat beberapa komponen yang tidak memerlukan adanya penggantian	Lebih memperhatikan kebutuhan komponen yang perlu dilakukan penggantian agar realisasi dapat sesuai dengan target	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	7	7	100%			
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksemplar)	72	72	100%			
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	560	661	118%	Target bersifat perkiran, adanya peningkatan jumlah realisasi yang melampaui jumlah target yang diperkirakan pada tahun 2021	Perlu identifikasi awal untuk kemungkinan perubahan serta melakukan penyesuaian pada perjanjian kinerja	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	100	281	281%	Target bersifat perkiran, adanya peningkatan jumlah realisasi yang melampaui jumlah	Perlu identifikasi awal untuk kemungkinan perubahan serta melakukan penyesuaian pada	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											target yang diperkirakan pada tahun 2021	perjanjian kinerja	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100	100	100%			
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	6	6	100%			
						Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	38	38	100%			
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	8	8	100%			
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100%			
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (surat)	800	1.329	166%	Target bersifat perkiran, adanya peningkatan jumlah realisasi yang melampaui jumlah target yang diperkirakan pada tahun 2021	Perlu identifikasi awal untuk kemungkinan perubahan serta melakukan penyesuaian pada perjanjian kinerja	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang	96	96	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						dan Listrik	terbayarkan (rekening)						
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	19	19	100%			
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100	100	100%			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	2	2	100%			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	2	21	1050%	target yang ditetapkan masih berdasarkan perhitungan pada dokumen Renstra	Perlu penyesuaian pada perjanjian kinerja	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar	Persentase alat besar yang dipelihara (%)	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	73	50	68,4%	Terdapat beberapa komponen yang tidak memerlukan adanya pemeliharaan	Lebih memperhatikan kebutuhan komponen yang perlu dilakukan pemeliharaan agar realisasi dapat sesuai dengan target	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	2	3	150%	target yang ditetapkan masih berdasarkan perhitungan pada dokumen Renstra	Perlu penyesuaian pada perjanjian kinerja	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penataan dan peningkatan kualitas hunian kawasan permukiman yang layakdan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) khususnya pada kawasan permukiman Kumuh	Program Pengembangan Perumahan			Persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang (%)	100	100	100%			
							Persentase rumah warga negara korban bencana atau terkena relokasi yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100%			
					Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil pendataan identifikasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/Kota yang akan dibangun dan direhabilitasi serta Jumlah dokumen hasil pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan	2	2	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Rumah Khusus yang termanfaatkan sebagai bahan Informasi perumahan						
						Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pendataan perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten (dok)	1	1	100%	dokumen hasil identifikasi telah tersedia, namun masih bersifat makro, pada tahun 2023 direncanakan identifikasi dan pendataan yang bersifat mikro yang lenih detail	Pada tahun anggaran 2023 telah disiapkan anggaran untuk pelaksanaan identifikasi/pendataan yang lebih detail	
						Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah laporan hasil pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus yang termanfaatkan sebagai bahan informasi perumahan (dok)	1	1	100%	Kurang SDM pada bidang perumahan, sehingga sampai berakhirnya APBD-P 2022, pendataan hanya menjangkau 7 kecamatan dan masih terdapat 4 kecamatan yang belum dilakukan pendataan diantaranya : Kec. Wasuponda, Wotu, Mangkutana dan Malili	Telah diusulkan melalui BKPSDM untuk penambahan SDM pada bidang perumahan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Persentase rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota yang direhabilitasi/dibangun dan dibangun	-	-		Pada kegiatan ini yang terdiri dari 3 subkegiatan, anggarannya dikeluarkan pada penyusunan APBD-P 2022 dikarenakan sampai pada Triwulan III, tidak ada Penetapan status bencana.	Pelaksanaan pada kegiatan ini, dapat dilaksanakan jika ada penetapan status bencana oleh Kepala daerah	
						Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi	-	-		Pada kegiatan ini yang terdiri dari 3 subkegiatan, anggarannya dikeluarkan pada penyusunan APBD-P 2022 dikarenakan sampai pada Triwulan III, tidak ada Penetapan status bencana.		
						Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang dibangun	-	-		Pada kegiatan ini yang terdiri dari 3 subkegiatan, anggarannya dikeluarkan pada penyusunan APBD-P 2022 dikarenakan sampai pada Triwulan III, tidak ada Penetapan status bencana.		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah khusus beserta PSU bagi korban relokasi program Kabupaten/Kota yang dibangun	-	-		Pada kegiatan ini yang terdiri dari 3 subkegiatan, anggarannya dikeluarkan pada penyusunan APBD-P 2022 dikaren		
											akan sampai pada Triwulan III, tidak ada Penetapan status bencana.		
					Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelola (%)	100	85,71	85,7%			
						Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelola (lokasi)	7	6 L	85,7%	Rumah Khusus Malili belum terselesaikan karena terdapat penghunian yang tidak melalui verifikasi dan tidak dilaporkan ke Dinas Perkimtan.	Diperlukan penertiban terhadap masyarat yang menghuni rumah khusus Malili dengan melibatkan OPD terkait.	
					Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah rekomendasi perizinan perumahan yang diterbitkan (rekomendasi)	1	1	100%			
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah permohonan perizinan pengembangan perumahan yang responsif gender	1	1	100%	Pencapaian kinerja tidak dapat terealisasi karena sejak terbitnya aturan terkait Persetujuan Bangunan Gedung	Perlu dilakukan perubahan indikator kinerja pada revisi renstra selanjutnya.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											(PBG) Dinas Perkimtan sudah tidak dilibatkan lagi dalam penerbitan rekomendasi penerbitan IMB/PBG, sehingga diperlukan perubahan indikator kinerja pada penyusunan revisi renstra selanjutnya, namun saat ini Dinas Perkimtan melakukan pendampingan dan fasilitasi terhadap pengembang perumahan dalam pembangunan PSU Perumahan MBR dimana pada tahun 2022 terdapat 1 Perumahan yang mendapatkan bantuan pembangunan PSU Perumahan berupa pembangunan jalan lingkungan pada Perumahan Pesona Bumi Batara yang beralamat Lorong 2 Trans Desa Puncak Indah Kec. Malili		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Program Kawasan Permukiman			Rasio rumah layak huni(%)	18,04%	18,33	101%			
							Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (%)	24,94	2,71	10,8%			
					Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan Kawasan permukiman		Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi (dok)	1	1	100%			
						Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan	Jumlah dokumen rencana pembangunan dan pengembangan kawas (dok)	1	1	100%	Belum adanyalegal hukum dari dokumen RP2KPKPK yang dapat dijadikan	Tahun 2023, diajukan untuk membuat kebijakan terkait dokumen RP2KPKPK	
						dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	an permukiman dan permukiman kumuh yang disusun				sebagai acuan pelaksanaan penanganan kawasan kumuh bagi seluruh pelaku kepentingan (pola kolaborasi) penyelenggaraan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang menyeluruh		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	Jumlah kegiatan pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi (keg)	2	2	100%			
					Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawa 10 (Sepuluh) Ha		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	60,62	67,35	111%			
							Luas penanganan infras truktur kawasan kumuh(ha)	21,20	2,57	12,1%			
						Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah kawasan yang dilakukan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh kewenangan Kabupaten(kawasan)	3	3	100%			
						Perbaikan rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki (unit)	623	608	97,5%	Sampai triwulan IV masih terdapat 15 unit rumah yang belum merampungkan perbaikan rumahnya, karena	Kedepan perlu lebih ditekankan kepada penerima bantuan agar menyiapkan dana swadaya, jika melakukan perbaikan rumah dengan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											kurangnya dana swadaya dari penerima bantuan. Untuk pelaksanaan BSPS ini Dinas Perkimtan hanya mendampingi dan memfasilitasi tim dari Satker Penyediaan Perumahan dalam pelaksanaan verifikasi teknis, sosiali	melakukan perombakan seluruh rumah (membangun baru rumahnya)	
											sasi dan pelaporan. Total Penerima 623 orang tersebar di 31 Desa 10 Kecamatan, Jumlah Bantuan Rp. 20.000.000,- dengan rincian(17.500.000 untuk pembelian material bahan bangunan dan Rp. 2.500.000,- untuk upah tukang)		
						Pelaksanaan pembangunan pemugaran/perem ajaan permukiman kumuh	Jumlah kawasan yang dilakukan pembangunan pemugaran/perem ajaan permukiman kumuh kewenangan Kabupaten (kawasan)	11	11	100%	Sedikitnya luasan yang diusulkan dalam peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Dokumen RP2KPKPK yang telah disusun diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan penanganan kawasan kumuh bagi seluruh pelaku kepentingan (pola	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												kolaborasi) penyelenggaraan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang menyeluruh, tuntas dan berkelanjutan	
			Penyediaan infrstruktur PSU Kawasan Perumahan	Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum(PSU)			Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman di dukung dengan PSU(%)	21,05	70,87	336%			
					Urusan penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu (lingkungan)	1	1	100%	banyaknya persyaratan administrasi yang tidak bisa di penuhi oleh pengembang, sehingga pengusulan melalui aplikasi Sibaru sangat kurang	melakukan pendampingan dalam pengusulan selanjutnya	
						Penyediaan prasaran, Sarana, ddan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu(lingkungan)	1	1	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Ketentraman dan Ketertiban	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Program Penanggulangan Bencana			Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana(%)	100	92,16	92,1%			
							Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100%			
							Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender (%)	100	100	100%			
					Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	0,09	0,09	100%			
						Sosialisasi, Komonikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan (orang)	262	262	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender (%)	100	100	100%			
						Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)	100	100	100%			
						Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana (%)	100	100	100%			
						Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender (%)	100	100	100%			
						Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana (%)	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit (%)	100	100	100%			
					Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana(%)	2,12	2,12	100%			
							Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	100	100	100%			
						Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihana (Orang)	100	90	90%			
						Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan (unit)	47	47	100%			
						Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah desa tangguh bencana yang di bentuk (desa)	4	4	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi pasca bencana yang disusun(dokumen)	1	1	100%			
							Jumlah dokumen pemulihan rekonstruksi pasca bencana yang disusun (dokumen)	1	1	100%			
						Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat (orang)	40	40	100%			
						Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal (dokumen)	1	1	100%			
						Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihant (orang)	250	250	100%			
					Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Cukupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan (%)	100	100	100%			
						Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota yang disusun (dokumen)	3	3	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standard(%)	95	106.5	112%			
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100	100	100%			
						Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (dokumen)	2	2	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (dokumen)	2	2	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat waktu(dokumen)	2	2	100%			
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun(dokumen)	10	10	100%			
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100	93	93%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (orang)	15	13				
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (dokumen)	18	18	100%			
					Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standard(%)	100	100	100%			
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (dokumen)	4	4	100%			
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	166,6	166%			
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (orang)	15	25	166%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	100	100	100%			
						Penyediaaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan(jenis)	8	8	100%			
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (jenis)	20	20	100%			
						Penyediaaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan(jenis)	3	3	100%			
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eks)	60	60	100%			
						Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	275	275	100%			
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	69	71	102%			
					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100	111,9	111%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang diadakan	4	4	100%			
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan (unit)	13	13	100%			
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	1	0	100%	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya sebanyak 1 unit. Berdasarkan anggaran kas, pengadaan bangunan parkir direncanakan pada triwulan III TA. 2022, namun tidak terlaksana karena terkendala jasa konsultan yang terbatas serta kurangnya minat karena pagu anggaran yang sangat minim. Disamping itu besaran jasa konsultan masih dibawah besaran remunerasi	Agar PPTK mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dan lebih detai dalam penentuan pagu anggaran	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100	113,6	113%			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara (unit)	13	12	92,3%			
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	35	52	148%			
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	2	2	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	Satpol PP	Peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat terkait produk hukum daerah melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan peraturan 1) Pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum, 2) Pencegahan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.3) Peningkatan koordinasi dengan Provinsi lain dan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal terkait;	Program Peningkatan ketenteraman dan Ketertiban Umum			Persentase penegakan perda yang ditangani	100	100	100%			
							Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (Persen)	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4) Peningkatan pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya;										
			1) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia. 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana; 3)Peningkatan kemampuan Penyidik PNS dan anggota Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah; 4) Peningkatan Kualitas Teknis Anggota Satpol PP		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada (Persen)	100%	100%	100%			
							Persentase Tertib Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani (Persen)	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pencegahan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.										
			1) Pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum; 2) Peningkatan pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya;				Persentase Satlinmas Desa/Kelurahan yang Aktif (Persen)	8,59	8,59	100%			
			1)Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja				Persentase SDM Aparatur terlatih (Persen)	49,61	49,34	99,4%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;										
			2) Peningkatan kemampuan Penyidik PNS dan anggota Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah; Pengadaan Sarana dan Prasarana				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Trantibum minimal (Persen)	23,99	23,99	100%			
			Pencegahan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah operasi patroli ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan (Kali)	4015	3421	85,2%	sarana dan prasarana operasional bagi Satpol PP Kecamatan belum memadai dan belum di dukung anggaran yang memadai		
			Pencegahan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan				Jumlah operasi deteksi dini dan cegah dini yang dilaksanakan (Kali)	284	170	59,8%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.										
			Pencegahan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.				Jumlah operasi pembinaan dan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan (Kali)	1144	1125	98,3%			
			Pencegahan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.				Jumlah pengamanan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan (Kali)	1144	857	74,9%			
			Pencegahan gangguan Ketenteraman				Jumlah pengamanan pejabat dan aset	365	365	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.				daerah yang dilaksanakan (Kali)						
			Pencegahan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.				Jumlah pengawalan pejabat dan tamu daerah (VVIP/VIP) yang dilaksanakan (Kali)	110	110	100%			
			Pencegahan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.				Jumlah tenaga ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang upahnya dibayarkan (Orang)	199	193	96,9%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pencegahan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penganangan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah operasi penertiban pelanggaran/gangguan K3 yang dilaksanakan (Kali)	132	132	100%			
			Pencegahan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.				Jumlah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilaksanakan (kali)	10	10	100%			
			Peningkatan koordinasi dengan Provinsi lain dan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal terkait;			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan (Kali)	22	22	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelibatan (mobilisasi) Satlinmas dalam kegiatan penanggulangan bencana (Kali)	12	12	100%			
			Peningkatan pembinaan satuan perlind ungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya				Jumlah Anggota Satlinmas yang mengikuti pelatihan (Orang)	128	128	100%			
			Pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum				Jumlah kegiatan pemberdayaan Satlinmas yang dilaksanakan (Kegiatan)	2	2	100%			
			Peningkatan pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya				Jumlah Anggota Satlinmas yang dikukuhkan (Orang)	0	0	0%			
			Pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum				Jumlah monitoring dan evaluasi Satlinmas yang dilaksanakan (Kali)	4	4	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas (Orang)	216	418	193%			
			Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.				Jumlah kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP yang dilaksanakan (Kegiatan)	5	5	100%			
			Peningkatan pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya;				Jumlah Satgas Linmas Kabupaten dan Kecamatan yang mengikuti pelatihan (Orang)	128	128	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peningkatan pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya;				Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satgas Linmas Kabupaten dan Kecamatan yang dilaksanakan (Kegiatan)	1	1	100%			
			Peningkatan Kualitas Teknis Anggota Satpol PP				Jumlah Polisi Pamong Praja yang mengikuti Diklat Kompetensi (Orang)	6	6	100%			
			Peningkatan koordinasi dengan Provinsi lain dan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal terkait;			kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pecegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	jumlah kerjasama penyelenggaraan trantibum dan penegakan perda yang dilaksanakan (kerjasama)	2	0	0%	kerjasama yang direncanakan terlaksana pada triwulan IV ini antara Pihak RSUD dan Satpol PP tidak terlaksana dikarenakan belum ada kesepakatan terkait jumlah personil mengingat banyak Tenaga Upahjasa Satpol PP yang mengundurkan diri dan akan dilakukan perekrutan pengganti pada Tahun 2023		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana				Jumlah kendaraan operasional yang diadakan (Unit)	2	2	100%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana				Jumlah Gedung/Posko Trantibum yang	0	0	0%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							diadakan (Unit)						
			Pengadaan Sarana dan Prasarana				Jumlah sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang dipelihara (Unit)	47	47	100%			
			Peningkatan Kualitas Teknis Anggota Satpol PP			Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah dokumen SOP ketenteraman dan ketertiban umum yang disusun/dimutakhirkan (Dokumen)	10	10	100%			
						Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah layanan ganti rugi kerusakan barang/aset akibat terkena dampak penegakan Perda dan Perkada (Unit)	5	0	0%			
							Jumlah layanan pengobatan cidera akibat terkena dampak penegakan Perda dan Perkada (Orang)	5	0	0%	tidak ada warga negara yang mendapat layanan dampak akibat penegakan perda/perkada target tersebut menyesuaikan target penegakan perda yang dilakukan secara yustisi oleh bidan penegakan perda		
			Peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat terkait produk		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (Persen)	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			hokum daerah melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan peraturan		Bupati/Wali Kota								
			Peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat terkait produk hokum daerah melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan peraturan			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dilaksanakan (Kali)	30	30	100%			
			Peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat terkait produk hokum daerah melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan peraturan				Jumlah warga negara yang memperoleh sosialisasi Perda/Perkada (Orang)	1480	1480	100%			
			Peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat terkait produk hokum daerah melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan peraturan				Jumlah sosialisasi pengendalian peredaran rokok ilegal yang dilaksanakan (Kali)	11	11	100%			
			Peningkatan kemampuan dan pemahaman			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap	Jumlah pengawasan potensi	30	30	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			masyarakat terkait produk hokum daerah melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan peraturan			Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	pelanggaran pelaksanaan Perda dan Perkada yang dilaksanakan (Kali)						
			Peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat terkait produk hokum daerah melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan peraturan				Jumlah pengawasan peredaran rokok ilegal yang dilaksanakan (Kali)	11	11	100%			
			Peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat terkait produk hokum daerah melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan peraturan				Jumlah pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dilaksanakan (Kali)	32	32	100%			
			Peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat terkait produk hokum daerah melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan peraturan			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani (Kasus)	9	9	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat terkait produk hokum daerah melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan peraturan				Jumlah pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang tertangani (Kasus)	15	15	100%			
			Peningkatan kemampuan Penyidik PNS dan anggota Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah;		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Persentase PPNS yang berkompoten (Persen)	100	100	100%			
			Peningkatan kemampuan Penyidik PNS dan anggota Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah;			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Rakor PPNS yang dilaksanakan (Kali)	4	3	75%			
			Peningkatan kemampuan Penyidik PNS dan anggota Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah;				Jumlah PPNS yang mengikuti Diklat pengembangan kapasitas (Orang)	3	3	100%			
			Peningkatan kemampuan Penyidik PNS dan				Jumlah Polisi Pamong Praja yang mengikuti Diklat	0	0	0%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			anggota Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah;				PPNS (Orang)						
			Meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi perencanaan, keuangan, barang milik daerah, kepegawaian, umum, dan sarana dan prasarana penunjang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100	100	100%			
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu ('%)	100	100	100%			
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2	2	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (dokumen)	1	1	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan	"Jumlah dokumen perubahan RKA-	1	1	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Dokumen perubahan RKA-SKPD	SKPD yang disusun Tepat Waktu (dokumen)						
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	1	1	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	1	1	100%			
						koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun (Dokumen)	3	3	100%			
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	8	8	100%			
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik ('%)	100	100	100%			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	39	39	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	persentase ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100	100	100%			
						pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	persentase penyelesaian dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100	100	100%			
						Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu (laporan)	1	1	100%			
						pengelolaan dan penyiapan bahan tanggap pemeriksaan	persentase pemenuhan bahan tanggapan pemeriksaan	100	100	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	12	12	100%			
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar ('%)	100	100	100%			
						penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik	jumlah dokumen perencanan kebutuhan barang milik daerah SKPD	2	2	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						daerah SKPD	yang disusun						
						rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	jumlah dokumen hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD	1	1	100%			
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	4	4	100%			
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	100	100%			
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel)	266	266	100%			
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)	4	4	100%			
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai (Dokumen)	12	12	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Lulus Diklat berdasarkan TUSI (Orang)	0	0	0%			
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	42	42	100%			
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	7	7	100%			
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD ('%)	100	100	100%			
						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	166	166	100%			
						Penyediaan Peralatan Perangkat Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan (Unit)	204	204	100%			
						Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	11	11	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	10	10	100%			
						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)	72	72	100%			
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	180	180	100%			
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	384	384	100%			
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi ('%)	100	100	100%			
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	35	35	100%			
						Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan(unit)	2	2	100%			
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pemerintahan Daerah		urusan pemerintahan daerah ('%)						
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	2500	2500	100%			
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	84	84	100%			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	1	1	100%			
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik ('%)	100	100	100%			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara	1	1	100%			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	28	28	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	100	100	100%			
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	2	2	100%			
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	7	7	100%			
7		Dinas Pemadam Kebakaran		Pogram Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota/			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran (Persen)	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran									
					Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	14,50	8,76	60,4%			
						Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah aparatur pemadam kebakaran siaga selama 24 jam di posko (orang)	150	146	97,33%			
						Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah kebakaran yang ditangani oleh pemadam kebakaran (kejadian)	100	76	76%			
						Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran.	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani	100	145	145%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							(kali)						
						Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah layanan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran yang ditangani (kali)	2	2	100%			
						Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.	Jumlah laporan pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang disusun (dokumen)	4	4	100%			
						Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan alat Perlindungan diri yang diadakan (unit)	4	4	100%			
						Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran.	Jumlah aparatur Pemadam Kebakaran yang mengikuti Diklat Kompetensi (orang)	5	6	120%			
						Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah laporan informasi kebakaran dan penyelamatan yang ditangani (kejadian)	100	76	76%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						(SKIK).							
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.	Jumlah kerjasama (MoU) pelayanan kebakaran yang dilakukan (dokumen)	1	0	0%			
					Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran.		Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan proteksi kebakaran (Persen)	100	100	100%			
						Sub Kegiatan Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran.	Jumlah sarana prasarana proteksi kebakaran yang didata (gedung)	30	30	100%			
						Sub Kegiatan Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran.	Jumlah Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran yang diniliai (gedung)	30	30	100%			
					Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran.		Persentase jumlah kejadian kebakaran yang diinvestigasi (Persen)	10	17,10	58,4%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penilaian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran.	Jumlah investigasi kebakaran yang dilakukan (kejadian)	10	13	130%			
					Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran.		Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran (Persen)	25,78	8,66	3,35%			
						Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.	Jumlah Instansi /Kelompok Masyarakat yang mengikuti penyuluhan, Penyebaran Informasi dan peringatan bahaya kebakaran (kelompok)	22	22	100%			
						Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.	Jumlah Satuan Relawan Kebakaran yang dibentuk dan dibina (unit)	11	11	100%			
					Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan		Persentase Korban yang berhasil dievakuasi dalam pelaksanaan operasi pencarian	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.		dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia (Persen)						
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia.	Jumlah operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia yang dilaksanakan (kejadian)	10	7	70%			
						Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manuisa/Penyelamatan dan Evakuasi.	Jumlah Sarana dan Prasarana SAR yang diadakan (Unit)	4	4	100%			
						Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi.	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang mengikuti Pelatihan SAR (Orang)	1	32	320%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (Persen)	100	90	90%			
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu ('%)	100	100	100%			
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	2	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun (Dokumen)	1	1	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)	1	1	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun (Dokumen)	1	1	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)	1	1	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah dokumen laporan capaian	3	3	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun (Dokumen)						
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	8	8	100%			
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik ('%)	100	100	100%			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	18	13	72,2%			
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan honorariumnya (org)	3	3	100%			
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	12	12	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (Dokumen)	1	1	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan	18	12	66,6%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	/semesteran SKPD yang disusun (Dokumen)						
					Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar (Persen)	100	100	100%			
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang di susun (Dokumen)	2	2	100%			
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Pada SKPD (Dokumen)	1	1	100%			
						Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD yang Disusun (Dokumen)	12	12	100%			
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai PD yang dilayani (%)	100	100	100%			
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)	12	12	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai (Dokumen)	12	12	100%			
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Lulus Diklat berdasarkan TUSI (Orang)	2	2	100%			
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	21	21	100%			
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	4	4	100%			
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar ('%)	100	85	85%			
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	150	150	100%			
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan (Unit)	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	11	11	100%			
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang diadakan (jenis)	10	10	100%			
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)	60	0	0%			
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	100	100	100%			
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	120	120	100%			
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi ('%)	100	85	85%			
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (Unit)	1	1	100%			
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	1	0	0%			
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	10	10				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							(Unit)						
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	1	1	100%			
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	1	0	0%			
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	1	1	100%			
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia ('%)	100	85	85%			
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	1500	1500	100%			
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	36	36	100%			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (Orang)	1	0	0%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik ('%)	100	100	100%			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	1	1	100%			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	12	11	91,66%			
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	30	30	100%			
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	2	2	100%			
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor	3	3	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi (Jenis)						
8	Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peningkatan kerjasama dengan dengan instansi terkait dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			Persentase pelaksanaan kebijakan penguatan ideologi Pancasila dan karakter	95	100	105%	-	-	-
			Peningkatan kerjasama dengan dengan instansi terkait dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan		Persentase capaian pelaksanaan koodinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	95	100	105%			
			Peningkatan kerjasama dengan dengan instansi terkait dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat			Pelaksanaan koordinasi dibidang wawasan kebangsaan , bela negara, bhineka tunggal ika dan sejarah	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa dan	3	3	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						kebangsaan	pembauran kebangsaan yang disusun(dokumen)						
			Melakukan Pembinaan kesadaran politik kepada masyarakat	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik			Persentase capaian peningkatan partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	95	100	105%			
			Melakukan Pembinaan kesadaran politik kepada masyarakat		Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik		Persentase capaian peningkatan partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	95	95	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Melakukan Pembinaan kesadaran politik kepada masyarakat			Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	Jumlah pengurus parpol dan masyarakat yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM (orang)	20	19	95%	Karena adanya salah satu Partai Politik hanya mengutus 1 orang Pengurus untuk mengikuti bimtek	Meminta kepada Pengurus Partai Politik untuk mengutus Peserta sesuai yang diminta	
			Melakukan Pembinaan kesadaran politik kepada masyarakat			Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	Jumlah laporan partai politik yang diverifikasi (laporan)	10	10	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Melakukan Pembinaan kesadaran politik kepada masyarakat			Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	Jumlah laporan pemantauan situasi politik daerah (laporan)	4	4	100%			
			Melakukan Pembinaan kesadaran politik kepada masyarakat	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan			Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	100	100	100%			
			Melakukan Pembinaan kesadaran politik kepada masyarakat		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		Jumlah SKT yang terbit (SKT)	100	100	136%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Melakukan Pembinaan kesadaran politik kepada masyarakat			Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah SKT yang terbit (SKT)	110	150	136%			
			Peningkatan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermanfaat	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	95	100	105%			
			Peningkatan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermanfaat			Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta kerukunan umat beragama	95	100	105%			
			Peningkatan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermanfaat			Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembanganketahanan ekonomi, sosial dan budaya	4	4	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	serta kerukunan umat beragama (laporan)						
			Peningkatan kewaspadaan dalam rangka cegah dan tangkal dini terhadap konflik	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial			Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	95	95	100%			
			Peningkatan kewaspadaan dalam rangka cegah dan tangkal dini terhadap konflik		Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial		Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	95	95	100%			
			Peningkatan kewaspadaan dalam rangka cegah dan tangkal dini terhadap konflik			Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan	Jumlah laporan konflik sosial dan kewaspadaan dini di daerah (laporan)	4	4	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah							
			Peningkatan kewaspadaan dalam rangka cegah dan tangkal dini terhadap konflik			Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah	Jumlah laporan pengawasan dan pemantauan orang asing (laporan)	4	4	100%			
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggarandan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan (dokumen)	14	14	100%			
						Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (dokumen)	2	2	100%			
						Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen rka yang disusun tepat waktu(dokumen)	2	2	100%			
						Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	10	10	100%			
					Administrasi keuangan perangkat daerah		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yangdisusun tepat waktu & termanfaatkan	100	100	100%			
						Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan (orang)	12	12	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	18	18	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						/semesteran SKPD							
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan BMD pada perangkat daerah yang disusun tepat waktu & termanfaatkan	100	100	100%			
						Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	4	4	100%			
					Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Persentase data dan informasi pegawai perangkat daerah yang diadministrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100	100%			
						Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah laporan adinistrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (dokumen)	12	12	100%			
						Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	4	4	100%			
					Administrasi umum perangkat daerah		Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang tepenuhi	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	10	10	100%			
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (buah)	17	17	100%			
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistic yang disediakan (jenis)	21	21	100%			
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan(jenis)	3	3	100%			
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (eks)	60	60	100%			
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang di fasilitasi kunjungannya (orang)	200	200	100%			
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan (kali)	470	470	100%			
					Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					pemerintahan								
						Pengadaan Mebel	Jumlah Peralatan / Mesin Lainnya yang diadakan (unit)	23	23	100%			
						Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan / mesin lainnya yang diadakan (unit)	14	14	100%			
						Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit)	2	2	100%			
					Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100	100	100%			
						Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (surat)	350	350	100%			
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening, telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rek)	24	24	100%			
						Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (org)	4	4	100%			
					Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	4	4	100%			
						Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya unit)	30	30	100%			
						Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara / direhabilitasi (unit)	1	1	100%			
						Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara / direhabilitasi (unit)	1	1	100%			
9	Sosial	Dinas Sosial	Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar dan jaminan kesej ahteraan sosial	Program Pemberdaya an Sosial			Prosentase PMKS yang diberikan Bantuan Sosial	43,78	65,69	150%			
					Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Panti social yang menerima program pemberdayaan social melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya	17,50	47,50	271%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber kesejahteraan sosial masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya (kelompok)	95	95	100%			
				Program Rehabilitasi Sosial			Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)('%)	100	96	96%	jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhasn dasarnya berkurang akibat meninggal dunia sebanyak 2 orang dari target 45 orang sehingga yang terpenuhi sebanyak 143 orang.	Diusulkan kembali pada tahun berikutnya sesuai target	
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	100	98,62	98,6%	jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhasn dasarnya berkurang akibat meninggal dunia sebanyak 2 orang		
						Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar,anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan	108	106	98 %	jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhasn dasarnya berkurang akibat meninggal dunia		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Gepeng yang Menerima Paket Permakanan Sesuai Standar Gizi(orang)				sebanyak 2 orang		
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan (kali)	2	2	100%			
						Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang mendapatkan Bimbingan Fisik,Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga,Masyarakat,Dinas Sosail,Rumah Singgah/Shelter dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosia (orang)	145	143	98,6%	jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhasn dasarnya berkurang akibat meninggal dunia sebanyak 2 orang		
				Program Perlindungan Jaminan Sosial			Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM (%)	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM (orang)	60	118	124%			
						Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang miskin yang divalidasi (jiwa)	167948	173997	103%			
						Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan sosial PKH (KK)	9000 KPM	9995 KPM	111%			
				Program Penanganan Bencana			Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kotat ('%)	100	100	100%			
					Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang diberikan bantuan makanan (jiwa/KK)	200	299	149%			
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100	100	100%			
					Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit/lokasi)	3	3	100%			
						Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit/lokasi)	3	3	100%			

3.2.2 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pangan, Bidang Pertanahan, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bidang Perhubungan, Bidang Komunikasi dan Informasi Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Penanaman Modal, Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Bidang Persandian, Bidang Statistik, Bidang Kebudayaan, Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Target RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 Tahun Pelaksanaan 2022, untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
Kab. Luwu Timur Tahun 2022

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar													
1	Bidang Tenaga Kerja												
		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Pencari Kerja serta Kerjasama Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja antara Pemerintah Daerah dan Swasta	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	75,60	85,38	112%			
			Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Pencari Kerja serta Kerjasama Pelatihan		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi(org)	146	146	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			dan Penempatan Tenaga Kerja antara Pemerintah Daerah dan Swasta										
			Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Pencari Kerja serta Kerjasama Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja antara Pemerintah Daerah dan Swasta			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan (kerjasama ATS)(orang)	60	60	100%			
			Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Pencari Kerja serta Kerjasama Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja antara Pemerintah Daerah dan Swasta				Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan K3)(orang)	70	70	100%			
			Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Pencari Kerja serta Kerjasama Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja antara Pemerintah Daerah dan Swasta				Jumlah Calon Tenaga Kerja yang medapatkan Pendidikan dan Pelatihan kerjasama BLK)(orang)	16	16	100%			
			Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Pencari Kerja serta Kerjasama Pelatihan	Program penempatan tenaga kerja			Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (Persen)	20,98	15,57	74,2%	adanya peningkatan Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar pada	meningkatkan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan	

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			dan Penempatan Tenaga Kerja antara Pemerintah Daerah dan Swasta								tahun 2022 yakni 9.469 orang	SDM/Kapasitas para pencari kerja agar dapat bersaing dalam bursa kerja	
			Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Pencari Kerja serta Kerjasama Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja antara Pemerintah Daerah dan Swasta		Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kesempatan kerja/penempatan tenaga kerja)(orang)	1500	1474	98,2%			
			Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Pencari Kerja serta Kerjasama Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja antara Pemerintah Daerah dan Swasta			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatann(orang)	80	80	100%			
			Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Pencari Kerja serta Kerjasama Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja antara Pemerintah Daerah dan Swasta			Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Calon Tenaga Kerja Mandiri yang mengikuti Pelatihan)(orang)	40	40	100%			
			Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Pencari Kerja serta Kerjasama Pelatihan				Jumlah Kelompok Tenaga Kerja Mandiri yang difasilitasi dan didampingi (kelompok)	5	5	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			dan Penempatan Tenaga Kerja antara Pemerintah Daerah dan Swasta										
			Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Pencari Kerja serta Kerjasama Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja antara Pemerintah Daerah dan Swasta		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase informasi lowongan kerja yang disebarluaskan	100	100	100%			
			Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Pencari Kerja serta Kerjasama Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja antara Pemerintah Daerah dan Swasta			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Informasi Lowongan Kerja yang disebarluaskan (info loker)	100	94	94%	dari 100 informasi lowongan kerja yang ditargetkan, realisasi sebanyak 94 info loker		
			Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Pencari Kerja serta Kerjasama Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja antara Pemerintah Daerah dan Swasta		Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi	100	0	-	tidak ada tenaga kerja indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang terlaporkan		
			Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Pencari Kerja serta Kerjasama Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja antara			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi)(orang)	2	0	-	Pagu Anggaran ini bersifat disediakan, yaitu Fasilitas pekerja migran Indonesia asal Kab.Luwu	tetap melakukan koordinasi dengan Balai Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran	

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pemerintah Daerah dan Swasta			(PMI)					Timur yang bermasalah. Tahun 2022 ditargetkan sebanyak 2 orang sedangkan realisasi sebanyak 0.Hal ini terjadi karena sampai 31 desember 2022 tidak ada PMI asal Kab.Luwu Timur yang terlaporkan. namun tetap dilaksanakan pemantauan dan koordinasi dengan pihak terkait yakni Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di Makassar	Indonesia (BP3MI) Makassar	
			Pembinaan syarat-syarat kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja agar	Program Hubungan Industrial			Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%)	22,82	30,71	74,31 %	Meningkatnya Perselisihan Hubungan Industrial antar Pekerja dan Perusahaan tercatat 46 kasus yang	Dinas Tenaga Kerja terus melakukan Pembinaan terhadap Perusahaan dan Pekerja	

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			tercipta hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja								terlaporkan yang difasilitasi dan dimediasi pada tahun 2022 serta 153 Perushaan yang tercatat tahun 2022		
			Pembinaan syarat-syarat kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja agar tercipta hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja		Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Besaran pekerja/buruh terdaftar yang menjadi peserta program jamsostek(%)	100	100	100%			
			Pembinaan syarat-syarat kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja agar tercipta hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha			Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang dibina dalam Pembuatan PP/PKB (perusahaan)	15	15	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			serta peningkatan kesejahteraan pekerja										
			Pembinaan syarat-syarat kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja agar tercipta hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang dibina (perusahaan)	45	45	100%			
			Pembinaan syarat-syarat kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja agar tercipta hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi dan dimediasi	100	100	100%			
			Pembinaan syarat-syarat kerja dan penyelesaian			Pencegahan Perselisihan Hubungan	Angka Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	2	2	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			perselisihan hubungan industrial serta Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja agar tercipta hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja			Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	yang di Fasilitasi (kasus)						
			Pembinaan syarat-syarat kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja agar tercipta hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja Pertahun yang difasilitasi dan di Mediasi (kasus)	35	46	131%	terdapat 46 kasus hubungan industrial yang terlaporkan dan difasilitasi di dalam kegiatan ini.dari beberapa beberapa kasus tersebut,8 di antaranya di lakukan mediasi	akan dilakukan penyesuaian target kinerja pada di tahun anggaran berikutnya	
			Pembinaan syarat-syarat kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja agar tercipta hubungan			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat	Jumlah Organisasi Pekerja/Pengusaha yang dibina (OPP)	32	32	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja			Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi							
			Pembinaan syarat-syarat kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja agar tercipta hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan (rekomendasi)	3	3	100%			
			Pembinaan syarat-syarat kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja agar tercipta hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Rancangan UMK yang ditetapkan (dokumen)	1	1	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			pekerja										
			Pembinaan syarat-syarat kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja agar tercipta hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota			Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100%			
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100	100	100%			
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu(dokumen)	2	2	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu(dokumen)	1	1	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun(dokumen)	1	1	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu(dokumen)	1	1	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	erubahan DPASKPD yang disusun (Dokumen)	1	1	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun (Dokumen)	2	2	100%			
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu(dokumen)	8	8	100%			
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100	100	100%			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayarkan (orang)	24	24	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	19	19	100%			
					Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan BMD pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100	100	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2	100%			
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD (Dokumen)	1	1	100%			
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100	100	100%			
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang dimutakhirkan (dokumen)	12	12	100%			
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	10	10	100%			
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	100	100	100%			
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia (jenis)	5	5	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan(jenis)	13	13	100%			
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia (jenis)	7	7	100%			
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (eks)	72	72	100%			
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi Kunjungannya (orang)	100	100	100%			
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang dilaksanakan Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah yang dilaksanakan (kali)	195	195	100%			
					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	100	100	100%			
						Pengadaan Mebel	Jumlah Meubel yang diadakan (unit)	1	1	100%			
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang diadakan (unit)	9	9	100%			
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Daerah		yang terpenuhi						
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang diadministrasikan (surat)	1250	1753	100%			
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Listrik dan Air yang terbayarkan (rekening)	36	36	100%			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang terbayarkan (orang)	4	4	100%			
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100	100	100%			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipeliharan dan dibayarkan pajaknya (unit)	19	19	100%			
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (unit)	26	26	100%			
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilit	1	1	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							asi (unit)						
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			Prosentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	75,25	82,3%	108%	presentase perempuan dilembaga pemerintah meningkat sebagai akibat penerimaan CPNS		
							Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	24,75	17,65	71%	presentase perempuan dilembaga pemerintah cenderung menurun sebagai dampak banyaknya karyawan yang dirumahkan		
					Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah prasyarat prasarat PUG yang terpenuhi (SKPD)	41	41	100%			
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang memenuhi 7 prasyarat PUG (OPD)	41	41	100%			
					Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada		Jumlah keterwakilan perempuan di DPRD (orang)	2	3	150%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota								
						Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi dibidang politik, hukum sosial dan ekonomi (orang)	95	95	100%			
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah partisipasi perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi (kelompok)	41	41	100%			
			Peningkatan upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;	Program Perlindungan Perempuan			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu (%)	81,82	100	100%			
					Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah kabupaten/kota		Jumlah pengaduan / laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpaduh(kasus)	13	18	138%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Kordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat perempuan yang mengikuti rapat kordinasi dan sosialiasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan (orang)	60	60	100%			
					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah korban yang mendapatkan layanan bantuan hokum (orang)	11	17	154%			
						Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat perempuan yang diberikan penyediaan layanan atas tindak kekerasan (orang)	40	53	132%			
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga			Ratio layanan pembelajaran keluarga(%)	0,09	0,09	100%			
					Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender		Jumlah masyarakat yang diberiakan pengembangan dalam hal	50	60	120%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					(KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		peningkatan kualitas keluarga (orang/KK)						
						Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang diberiakan konseling kualitas keluarga (orang)	50	60 KK	120%			
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak			Prosentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tk. Kab/Kota (%)	100	100	100%			
					Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah data gender yang diolah (dokumen)	1	1	100%			
						Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah profil gender dan anak yang disusun (dokumen)	1	1	100%			
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)			Prosentase indikator KLA yang terpenuhi	100	100	100%			
					Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)	1	1	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)	1	1	100%			
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			100	100	100%			
						Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten (lembaga)	1	1	100%			
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota			persentase capaian kinerja program Penunjsng urusan pemerintah daerah yang di penuhi	100	100	100%			
					Perencanaan,penganggaran,dan		Prosentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan	100	100	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					evaluasi kinerja perangkat daerah		evaluasi kinerja perangkat yang disusun tepat waktu						
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2	100%			
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	10	10	100%			
					Administrasi keuangan perangkat daerah		presentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	100%			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumalah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan (orang)	20	19	95%	mutasi pegawai		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keungan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	16	16	100%			
					Administrasi kepegawaian		prosentase rata-rata capaian kinerja	100	100	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					perangkat daerah		administrasi kepegawaian perangkat daerah						
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan (orang)	10	10	100%			
					Administrasi umum perangkat daerah		presentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	100	100%			
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan antor yang diadakan (jenis)	7	7	100%			
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (jenis)	1	1	100%			
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (jenis)	5	5	100%			
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang diadakan (eks)	60	60	100%			
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi Kunjungannya (orang)	110	118	107%			
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	415	424	102%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							(kali)						
					Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	100%	100%	100%			
						Pengadaan mebel	jumlah mebel yang diadakan (jenis)	1	1	100%			
						Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	0	-				
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan(jenis)	1	1	100%			
					Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		presentase rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100%			
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat keluar dan surat masuk yang diadministrasikan (nomor)	1200	1220	101%			
						Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan(rekening)	48	48	100%			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang	36	36	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							disediakan(orang)						
					Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan		presentase barang milik daerah yang dipelihara	100	100	100%			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	11	11	100%			
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (unit)	37	37	100%			
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah bagunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	1	1	100%			
3	Urusan Bidang Pangan	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	Pengembangan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati dalam jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan			Cakupan pegelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan yang di kembangkan ('%)	100	66,67	66,6%			
			Pengembangan bisnis pangan untuk peningkat-an nilai		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung		Presentase ketersediaan infrastruktur	100	77,78	77,7%	Status salah satu lahan	Dibatalkan karena tidak	

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			tambah ekonomi, gizi dan mutu ketersedia-an pangan yang beragam dan bergizi seimbang dan aman melalui penguatan kerja sama pemerintah masyarakat dan swasta;		Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		pendukung kemandirian pangan daerah (%)				tidak memenuhi kriteria administrasi	memenuhi waktu penyesuaian adminstrasi untuk Dana Alokasi Khusus.	
			Mendorong masyarakat untuk percepatan pola konsumsi pangan berbasisi sumberdaya lokal;			Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Tersedianya Infrastruktur Lumbung Pangan	3	2	66,6%	terdapat 1 paket DAK yang tidak terealisasi karena terdapat 1 gapoktan yang tidak menerima pelaksanaan paket kegiatan	Kelompok mendapatkan sanksi (tidak diberi bantuan)	
			Pengembangan bisnis pangan untuk peningkat-an nilai tambah ekonomi, gizi dan mutu ketersedia-an pangan yang beragam dan bergizi seimbang dan aman melalui penguatan kerja sama pemerintah masyarakat dan swasta;			Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Tersedianya Infrastruktur Lantai Jemur	3	2	66,6%	terdapat 1 paket DAK yang tidak terealisasi karena terdapat 1 gapoktan yang tidak menerima pelaksanaan paket kegiatan	Kelompok mendapatkan sanksi (tidak diberi bantuan)	
			Peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan pada masyarakat;			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Persentase ketersediaan pemenuhan infrastruktur logistik ketahanan pangan (%)	85	85,	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Mengembangkan dan memperkuat kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat hingga di tingkat desa dan atau komunitas	Program Peningkatan Diserfikasi dan Ketahanan Pangan			Presentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat ('%)	100	92	92%			
			Penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dengan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang mutu dan keamanan pangan.		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Jumlah Kebutuhan Pangan Pokok (ton)	33.597,00	34.116,46	101%			
			Penguatan kelembagaan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam penanganan keamanan pangan				Presentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah (%)	100	94,12	94%			
						Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Pangan	Jumlah dokumen hasil analisis neraca bahan makanan yang dihasilkan (dokumen)	1	1	100%			
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan (kali)	17	12	70%	Intensitas koordinasi yang	Direalisasikan sesuai koordinasi dan	

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pokok dan Pangan Lainnya					ditargetkan tidak tercapai krn beberapa agenda pertemuan dipadatkan	sinkronisasi yang terlaksana	
						Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah dokumen laporan yang dihasilkan dari pemantauan (dokumen)	4	4	100%			
						Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah hasil rekomendasi yang ditindak lanjuti (Dokumen)	2	2	100%			
						Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Masyarakat	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia yang dikembangkan (Gapoktan)	5	5	100%			
					Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Persentase pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan (%)	100	100	100%			
						Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten setara beras (Kg)	3.000	3.000	100%			
						Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Frekuensi peremajaan cadangan pangan pemerintah (kali)	4	4	100%			
					Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan		Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target	100	100	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (%)						
						Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita per Tahun	Angka Kecukupan Gizi (%)	92	92	100%			
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah sosialisasi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) yang dilakukan (masyarakat) (dokumen)	1	1	100%			
				Program Penanganan Kerawanan Pangan			Jumlah Desa Rentan rawan pangan (Desa)	3	3	100%			
							Jumlah Kelanjutan Kelurahan Percontohan Mandiri Pangan (Kelurahan)	-	-				
					Penanganan Kerawanan pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Presentase penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten (%)	100	100	100%			
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan (kali)	3	5	166%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Program Pengawasan Keamanan Pangan			Jumlah Peserta Pembinaan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Segar dan Makanan yang bermutu (Orang/Peserta)	100	100	100%			
					Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah yang dilaksanakan (%)	100	80	80%	Intensitas pengawasan yang ditargetkan tidak tercapai krn agenda kterbatasan anggaran	Direalisasikan sesuai agenda pengawasan yang terlaksana	
						Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah kabupaten/Kota	Jumlah pangan segar yang direkomendasikan aman untuk dikonsumsi (sampel)	15,00	12,00	80%	Terdapat 3 sampel yang tidak diuji	Penamabahan anggaran untuk uji sampel	
4	Pertanahan	Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman,dan Pertanahan	Memfasilitasi penyelenggaraan penguatan pendataan dalam pemenuhan pelayanan pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan			Persentase penyelesaian kasus tanah negara	100	100	100			
					Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kasus yang terdaftar (kasus)	4	4	100%			
						Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1	Jumlah kasus yang ditangani (kasus)	4	4	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						(satu) Daerah Kabupaten/Kota							
				Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan			Persentase luas lahan yang dibebaskan	100	100	100%			
					Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Luas lahan kebutuhan pembangunan kabupaten pertahun pada tahun n (m2)	21093	21093	100%			
						Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas lahan yang dibebaskan pada tahun n (m2)	21093	21093	100%			
				Program Pengelolaan Tanah Kosong			Persentase pengamanan tanah Kosong aset Pemda	100	100	100%			
					Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong		Jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi (bidang)	15	15	100%			
						Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah bidang tanah yang dilakukan pengamanan melalui pengadaan sarana prasarana (bidang)	15	15	100%			
				Program Pengelolaam Izin Membuka Tanah			Persentase izin lokasi	100	100	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Penerbitan Izin Membuka Tanah		Jumlah permohonan izin lokasi yang terdaftar (izin)	2	2	100%			
						Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah izin lokasi yang ditangani (izin)	2	2	100%			
				Program Penatagunaan Tanah			Persentase luas lahan bersertifikat	39,85	59,94	150%			
					Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota		Persentase luas lahan bersertifikat yang difasilitasi	100	100	100%			
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Luas Lahan bersertifikat yang difasilitasi (m2)	4100596	4100596	100%			
			Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi pelayananperkantoran, penguatan tata laksanperencanaan serta pengendalian kinerja dan keuangan;	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota			Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran	100	88	88%	Pencapaian realisasi di pengaruhi oleh target kinerja Pada kegiatan Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah yang tidak tercapai		

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	16	16	100%			
						Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu(dokumen)	2	2	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2	100%			
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	10	10	100%			
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	100%			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang gaji dan tunjanganny a	19	19	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						ASN	terbayarkan (orang)						
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu(laporan)	18	18	100%			
					Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD		Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang ditatusahakan	100	100	100%			
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausah aan barang milik daerah skpd yang disusun tepat waktu (laporan)	4	4	100%			
					Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah		jumlah realisasi PAD perangkat daerah	151.200.000	-	0%	Belum rampungnya proses administrasi terkait penandatangan kontrak sewa rusun, sehingga pendapatan belum terealisasi	Percepatan proses administrasi	

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi Daerah yang disusun tepat waktu(laporan)	1	1	100%			
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100%			
						Pendataan dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutahirkan (dokumen)	12	12	100%			
						bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementas i peraturan perundan-undangan (orang)	22	22	100%			
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	100	100%			
						Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor yang disediakan(unit)	3	3	100%			
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan(unit)	4	4	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (unit)	2	1	50%			
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	11	11	100%			
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaa n yang diadakan (paket)	3	3	100%			
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang disediakan (eks)	72	72	100%			
						Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya (laporan)	12	12	100%			
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan (laporan)	500	500	100%			
					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (unit)	5	5	100%			
						Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	4	4	100%			
						Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yand diadakan (unit)	1	1	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						lainnya							
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah	100	100	100%			
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministra sikan (laporan)	4	4	100%			
						Penyediaan Jasa komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik, dan air yang terbayarkan (rekening)	2	2	100%			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (orang)	9	9	100%			
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (unit)	70	70	100%			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	13	13	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pemeliharaan Peralatan dan meisn lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	57	57	100%			
						Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi (unit)	1	1	100%			
5		Dinas Lingkungan Hidup	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100%	-	-	-
					Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi yang termanfaatkan (%)	100	100	100%			
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (Dokumen)	3	23	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	2	2	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	2	2	100%			
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (Dokumen)	10	10	100%			
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang termanfaatkan (%)	100%	100%	100%			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan (Orang)	26	25	96,1%			
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (Dokumen)	18	18	100%			
					Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang ditatausahakan	100%	100%	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SPd yang disusun tepat waktu (Dokumen)	4	4	100%			
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya kinerja administarasi kepegawaian perangkat daerah (%)	100	100	100%			
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhrkan (Dokumen)	1	1	100%			
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)	4	4	100%			
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya kinerja administasi umum perangkat daerah (%)	100	100	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Jenis)	4	4	100%			
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan (Jenis)	12	12	100%			
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Jenis)	5	5	100%			
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Eksampler)	1440	1440	100%			
						Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya (Orang)	418	418	100%			
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah rapat koordinasi dan	203	203	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						SKPD	konsultasi SKPD yang diselenggarakan (Kali)						
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100%			
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	1000	1000	100%			
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik, dan air yang terbayarkan	36	36	100%			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayaan umum kantor yang disediakan	4	4	100%			
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah		Persentase terlaksananya barang milik daerah yang dipelihara	100	100	100%			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah kendaraan dinas operasional	8	8	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya						
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	32	32	100%			
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/diehabilitasi	2	2	100%			
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup			Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan	100	50	50%	Tingkat capaian di pengaruhi oleh kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang tidak tercapai		
					Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan yang disediakan	100	50	50%	Tingkat capaian di pengaruhi oleh sub keg Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											yang tidak tecapai		
						Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	2	1	50%	Lokus KLHS RDTR mengikuti penetuan lokasi perencanaan RDTR oleh Dinas PUPR Kab. Luwu Timur.	Mensingkronkan perencanaan penyusunan KLHS dengan perencanaan RDTR pada Dinas PUPR Kab. Luwu Timur	
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup			Berkurangnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan (persen)	1%	1.02%	102%			
					Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota		tersedianya dokumen lingkungan	4	4	100%			
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang dihasilkan	4	4	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil uji laboratorium yang dihasilkan	176	176	100%			
					Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Luas lahan yang direhabilitasi	37	37	100%			
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas lahan yang direhabilitasi	37	37	100%			
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)			Terciptanya Ruang Terbuka Hijau	100	100	100%			
					Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen keanekaragaman hayati yang di tetapkan	5	5	100%			
						Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah RTH yang dipelihara	5	5	100%			
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan			Jumlah penghasil limbah B3 yang diawasi	100	100	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Beracun (Limbah B3)									
				Penyimpanan Sementara Limbah B3	Penyimpanan Sementara Limbah B3		Usaha yang taat pengelolaan limbah B3	30	30	100%			
						Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah penghasil Limbah B3/medis yang diawasi	30	30	100%			
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			Persentase usaha dan kegiatan yang taat pada regulasi standar lingkungan	50	73.3	146%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin pplh diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota		Persentase usaha atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan (usaha/kegiatan)	22	22	100%			
						Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang difasilitasi (usaha/kegiatan)	10	10	100%			
						Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi (jumlah usaha)	30	30	100%			
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diberi sanksi usaha/kegiatan)	2	0	0%	pelaku usaha/ kegiatan taat terhadap regulasi standar lingkungan	meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan	
				Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat			Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan	3	3	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan Pplh			tradisonal (MHA)						
					Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH		Jumlah MHA yang mendapat pengakuan(MHA)	2	2	100%			
						Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Kebaradaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah data/Dokumen terkait PPMHA(MHA)	3	3	100%			
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			Terlaksanaya pemberi penghargaan lingkungan hidup	100%	200%	200%			
					Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup		Penghargaan yang diterima	1	2	200%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		(penghargaan)						
						Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah penghargaan yang diterima (penghargaan)	1	2	200%			
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			Persentase masalah lingkungan yang diselesaikan	50%	50%	100%			
					Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Masyarakat, lingkungan dan usaha atau kegiatan	2	2	100%			
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau	Jumlah masalah lingkungan yang diselesaikan(masalah)	2	2	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Melalui Pengadilan							
				Program pengelolaan persampahan			Tingkat pelaksanaan kinerja pengelolaan persampahan	70%	71.5%	102%			
					Pengelolaan sampah		Persentase sampah yang dikelola	70%	71.5%	102%			
						Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkitan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga persampahan(Ton)	21.500	21.500	100%	Kenaikan harga BBM untuk kendaraan operasional persampahan tidak disertai dengan penambahan anggaran	Penyesuaian harga BBM terbaru untuk anggaran selanjutnya	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang dipelihara (jenis)	13	13	100%			
						Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah bank sampah yang dibina (bank sampah)	127	127	100%	-	-	-

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan jumlah pelayanan ke desa-desa dengan sistem jemput bola bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di berbagai penjuru wilayah Kabupaten Luwu Timur	Program Pendaftaran Penduduk			Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (%)	99,8	98,4	98%	Data Ini masih menggunakan data kependudukan semester I Tahun 2022		
			Melakukan kerjasama dengan OPD, lintas OPD, kerjasama dengan instansi Kesehatan / Puskesmas / Rumah Sakit untuk pasien bersalin, untuk langsung dikoordinir pembuatan akta kelahirannya. Selain itu bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk melakukan perekamanan KTP bagi pelajar yang baru berusia 17 tahun		Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	96	100	103%			
							Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (%)	40,00	39,86	99%	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya	1. Berkoordinasi dengan Instansi terkait 2. Melakukan sosialisasi ke	

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											kartu Identitas Anak	masyarakat	
						Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga (lembar)	28.000	28.754	102%			
							Jumlah pencetakan KTP-el (keping)	24.000	19003	79%	Ketersediaan blangko KTP Elektronik dari pusat terbatas	Berkaitan dengan kondisi stock blangko KTP el di Ditjen Dukcapil Kemendagri sesuai edaran Ditjen Kependudukan dan pencatatan Sipil masyarakat Luwu Timur diharapkan masyarakat Luwu Timur tidak perlu khawatir bila KTP el belum tercetak akan diterbitkan Identitas Kependudukan digital (IKD) dan Surat Keterangan (SUKET) pengganti KTP	

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												Elektronik yang membuktikan penduduk tersebut sudah melakukan perekaman KTP-el dan telah terdata dalam database kependudukan	
							Jumlah penerbitan Kartu Indentitas Anak (keping)	12000	20550	171%			
							Jumlah Perekaman Data bagi penduduk (jiwa)	3800	4.270	112%			
						Peningkatan Pelayanan pendaftar penduduk	Jumlah kegiatan pelayanan Pendaftaran dan pendistribusian dokumen KK, KTP dan KIA secara Mobile (Kegiatan)	6	6	100%			
						Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Kependudukan	Persentase Penduduk pindah datang	100	100	100%			
							Persentase Penduduk pindah Keluar	100	100	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Program Pencatatan Sipil			Cakupan penerbitan Akta kelahiran	96.55	100	100%			
					Pelayanan Pencatatan Sipil		Kepemilikan Akte Kelahiran (%)	89,59	94,56	105%			
							Kepemilikan Akta Perkawinan(%)	46,84	47	100%			
							Kepemilikan Akta Kematian (%)	100	100	100%			
							Kepemilikan Akta Cerai	100	100	100%			
						Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran (lbr)	11000	10.370 l	94%	Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen Kependudukan khususnya akte Kelahiran sehingga realisasi tidak dapat mencapai target yang direncanakan		

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Penerbitan Akta Nikah non muslim (Lbr)	600	477	79%	Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen Kependudukan khususnya akte Perkawinan sehingga realisasi tidak dapat mencapai target yang direncanakan .Akan dilakukan persuratan kepada Kecamatan dan Desa yang mana masyarakatnya masih banyak yang belum mendaftarkan pernikahannya untuk dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Khususnya yang Non		

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Muslim)		
							Jumlah Penerbitan Akta Kematian (lbr)	1600	1543	96%			
							Jumlah Penerbitan Akta cerai non muslim (lbr)	20	41	205%			
						Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan pelayanan pencatatan sipil dan pendistribusian dokumen, akta kelahiran,kematian, perkawinan dan perceraian secara Mobile (Kegiatan)	4	4	100%			
					Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100	100	100%			
						Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah MOU dengan Organisasi kemasyarakatan (MOU)	1	1	100%			
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terintegrasi	100	100	100%			
						Pengumpulan Data	Persentase OPD/Lembaga yang	25	30	150%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						kependudukan Informasi Administrasi Kependudukan	telah memanfaatkan data dan layanan kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama						
						Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah PKS/Lembaga/instansi pengguna (PKS)	5	6	120%			
						Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah media yang digunakan dalam penyebaran informasi kependudukan (jenis)	2	2	100%			
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan			Cakupan data kependudukan yang disediakan	100	100	100%			
						Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil kependudukan yang disusun tepat waktu	100	100	100%			
						Penyediaan data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kependudukan yang disusun (dok)	3	3	100%			
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota									
					Perencanaan, pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100	100	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (dok)	3	3	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-PD yang disusun (dokumen)	2	2	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun (dokumen)	2	2	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja Yang disusun (dokumen)	4	4	100%			
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Pelayanan perangkat daerah yang disusun (dokumen)	10	10	100%			
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100	100	100%			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya dibayarkan (orang)	18	18	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/	Jumlah dokumen laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun (dokumen)	18	18	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						SKPD							
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan BMD pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100	100	100%			
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	4	4	100%			
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100	100	100%			
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan kepegawaian yang disusun (dokumen)	12	12	100%			
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek Implementasikan peraturan perundangan (orang)	6	6	100%			
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100	100	100%			
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	6	6	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (jenis)	4	4	100%			
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik kantor yang disediakan (jenis)	14	14	100%			
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan atau penggandaan yang diadakan (jenis)	2	2	100%			
						Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan (eksemplar)	84	84	100%			
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya (orang)	150	150	100%			
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (APBD/DAK)	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan (kali)	544	544	100%			
					Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	100	100	100%			
						Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	7	7	100%			
						Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan (unit)	10	10	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100	100	100%			
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang Diadministrasikan (lembar)	600	600	100%			
						Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening internet,TV,Listrik dan Air yang terbayarkan (rekening)	3	3	100%			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor APBD/DAK	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan jumlah pelayanan penerbitan administrasi kependudukkan (orang)	5	5	100%			
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100	100	100%			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biayah pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara (unit)	5	5	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lain yang dipelihara (unit)	83	83	100%			
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara(paket)	1	1	100%			
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Memberikan pengetahuan dan pendampingan bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan keuangan desa Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan	Program Penataan Desa			Persentase Desa yang Baik Penataan Wilayah Desanya	100	70,83	70%	Hal-hal yang dimaksud dengan Penataan Desa ini meliputi: 1. Pembentukan; merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada. 2.Penghapusan; Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis. 3. Penggabungan; Dua Desa atau lebih yang	akan dilakukan perubahan indikator kinerja pada perubahan anggaran tahun 2023	

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yangditentukan dalam Undang-Undang. 4. Perubahan status; Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa. 5. Penetapan desa; Desa ditetapkan dalam		

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Peraturan Daerah. Sehingga yang menjadi pencapaian target pada Program Penataan Desa berdasarkan pada peningkatan status perkembangan Desa		
			Memberikan pengetahuan dan pendampingan bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan keuangan desa Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan		Kegiatan Penyelenggaran Penataan Desa		Jumlah Desa Persiapan (%)	100	100	100%			
			Memberikan pengetahuan dan pendampingan bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan keuangan desa			Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Persentase Fasilitasi Usulan Pemekaran Desa (desa)	1	1	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan										
			Memberikan pengetahuan dan pendampingan bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan keuangan desa Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan	Program Administrasi Pemerintahan Desa			Persentase Desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	100	100	100%			
			Memberikan pengetahuan dan pendampingan bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan keuangan desa Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase Desa yang Tertib Administrasi dan Keuangan Desanya	100	100	100%			
			Memberikan pengetahuan dan pendampingan bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan			Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi dengan Pemerintah Desa yang Dilakukan	-	-	-	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi dengan Pemerintah Desa		

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan keuangan desa Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan								mengalami perubahan menjadi 0 kali dari 4 kali, hal ini dikarenakan lebih difokuskan pada kegiatan monev BKK yang melekat pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		
			Memberikan pengetahuan dan pendampingan bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan keuangan desa Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan				Jumlah Rapat Koordniasi dengan Pemerintah Desa (kali)	2	2	100%			
			Memberikan pengetahuan dan pendampingan bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah produk hukum daerah yang disusun dan disosialisasikan (perbup)	5	5	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			keuangan desa Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan										
			Memberikan pengetahuan dan pendampingan bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan keuangan desa Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan				Jumlah produk daerah yang disusun dan disosialisasikan (perda)	1	1	100%			
			Memberikan pengetahuan dan pendampingan bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan keuangan desa Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Lomba Desa	-	-	-	Kegiatan ini tidak terlaksana karena belum ada petunjuk pelaksanaan lomba desa dari pusat, sehingga pada perubahan APBD 2022 target dihilangkan dan anggarannya dialihkan ke kegiatan	akan mengikuti Lomba Desa setelah ada petunjuk pelaksanaan dari pusat	

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa (Monev BKK 1 Milyar 1 Desa)		
			Memberikan pengetahuan dan pendampingan bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan keuangan desa Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan				Jumlah Fasilitasi Penyusunan RKP Desa (desa)	100	100	100%	Meningkatnya status Desa Persiapan Arolipu menjadi Desa Definitif setelah diresmikan oleh Bupati Luwu Timur Bapak Drs. H. Budiman, MPd pada tanggal 27 Oktober 2022 125 desa , sehingga jumlah desa bertambah dari 124 desa menjadi 125 desa	Akan dilakukan Pendampingan penyusunan RKPDesa sebanyak 125 desa pada perubahan APBD tahun 2023	
			Memberikan pengetahuan dan pendampingan bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan keuangan desa Memaksimalkan				Jumlah Fasilitasi Penyusunan RPJMDes (desa)	61	61	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			penyediaan sarana dan prasarana pelayanan										
			Memberikan pengetahuan dan pendampingan bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan keuangan desa Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan			Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan APBDesa (desa)	124	124	100%			
			Memberikan pengetahuan dan pendampingan bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan keuangan desa Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan				Jumlah fasilitasi penyusunan dan monev BKK (desa)	124	124	100%			
			Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur pemerintah desa melalui pelatihan dan bimtek			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa yang Dilaksanakan (orang)	61	61	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Memberikan pengetahuan dan pendampingan bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan keuangan desa Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan			Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Desa yang Penyampaian LKPJ dan LKPPD Desa tepat Waktu (desa)	124	124	100%			
			Memberikan pengetahuan dan pendampingan bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan keuangan desa Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan			Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa (desa)	20	49	245%			
			Memberikan pengetahuan dan pendampingan bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa yang Menyusun Profil Desa	-	-	-	Kegiatan ini tidak terlaksana karena telah dilaksanakan secara online dengan memakai	Tetap melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Profil Desa melalui aplikasi Prodeskel	

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			pembangunan dan keuangan desa Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan								aplikasi Prodeskel (Profil Desa dan Kelurahan), sehingga anggaran kegiatan ini dialihkan ke kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa		
			Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur pemerintah desa melalui pelatihan dan bimtek			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Diberi Peningkatan kapasitas (orang)	69	69	100%			
			Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur pemerintah desa melalui pelatihan dan bimtek				Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi BPD yang Dilakukan (desa)	124	35	28%	Dari target 124 desa hanya 35 desa yang dilakukan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi anggota BPD. Hal ini disebabkan tidak efesiensinya waktu pelaksanaan pada Triwulan 4 karena beberapa	Dinas PMD secara berkelanjutan melakukan Pembinaan dan monev terhadap BPD	

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan		
			Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur pemerintah desa melalui pelatihan dan bimtek				Jumlah Rapat Koordinasi BPD (kali)	1	1	100%			
			Memantapkan peran Lembaga pemerintah desa dan Lembaga masyarakat dalam pembangunan Kawasan perdesaan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat			Persentase Lembaga Desa yang Melibatkan Masyarakatnya dalam Membangun Desa (%)	100	96,77	96%			
			Memantapkan peran Lembaga pemerintah desa dan Lembaga masyarakat dalam pembangunan Kawasan perdesaan		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kelembagaan lembaga Masyarakat, lembaga Ekonomi Desa dalam Pembangunan Desa (%)	100	100	92%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Memantapkan peran Lembaga pemerintah desa dan Lembaga masyarakat dalam pembangunan Kawasan perdesaan			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang Mendapatkan Fasilitasi Pamsimas (desa)	3	-	-	Pada Tahun 2022 Kab. Luwu Timur tidak ada Program Pamsimas dari Kementrian dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya	akan dilakukan penyesuaian target kinerja pada perubahan anggaran di tahun anggaran berikutnya	
			Memantapkan peran Lembaga pemerintah desa dan Lembaga masyarakat dalam pembangunan Kawasan perdesaan				Jumlah kader Posyandu yang Di Bina (kader)	274	274	100%			
			Memantapkan peran Lembaga pemerintah desa dan Lembaga masyarakat dalam pembangunan Kawasan perdesaan				Jumlah Karang taruna yang Di Bina (karang Taruna)	124	-		Pada Tahun 2022 Pembinaan Karang Taruna tidak terlaksana karena kegiatan terfokus pada pembinaan kader Posyandu	akan dilakukan penyesuaian target kinerja pada perubahan anggaran di tahun anggaran berikutnya	
			Memantapkan peran Lembaga pemerintah desa dan Lembaga masyarakat dalam pembangunan Kawasan perdesaan				Jumlah LPM yang Di Bina (LPM)	124	-	-	Pada Tahun 2022 Pembinaan LPM tidak terlaksana karena kegiatan	akan dilakukan penyesuaian target kinerja pada perubahan anggaran di tahun	

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											terfokus pada pembinaan kader Posyandu	anggaran berikutnya	
			Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa serta memfasilitasi pemberian bantuan modal kepada Badan Usaha Milik Desa			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bumdesa(kali)	4	2	50%	Dari target 4 kali Jumlah Pembinaan dan Evaluasi terhadap Bumdesa sehat dan tidak sehat, terealisasi 2 kali. Hal ini dikarenakan direncanakan kegiatan pembinaan dan evaluasi per triwulan (4 triwulan) namun pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan eks PNPM ke BUMDesma sehingga pelaksanaannya dilakukan per semester (2 semester)	akan dilakukan penyesuaian target kinerja pada perubahan anggaran di tahun anggaran berikutnya	

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa serta memfasilitasi pemberian bantuan modal kepada Badan Usaha Milik Desa				Jumlah Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan P2PM (kali)	4	4	100%			
			Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa serta memfasilitasi pemberian bantuan modal kepada Badan Usaha Milik Desa				Jumlah Pengurus P2MP yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas (orang)	124	0	0%	Pada tahun 2022, Peningkatan Kapasitas tidak dilaksanakan karena berdasarkan hasil inventarisasi sudah banyak pengurus P2MP di desa tidak aktif, sehingga lebih fokus pada kegiatan pembinaan pengurus P2MP yang masih aktif	akan dilakukan penyesuaian target kinerja pada perubahan anggaran di tahun anggaran berikutnya	
			Memantapkan peran Lembaga pemerintah desa dan Lembaga masyarakat dalam pembangunan Kawasan perdesaan			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi TP-PKK Kabupaten (kali)	12	12	100%			
			Memantapkan peran Lembaga pemerintah desa dan Lembaga masyarakat dalam pembangunan Kawasan perdesaan				Jumlah Pembinaan TP-PKK Kabupaten (kali)	12	12	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Memantapkan peran Lembaga pemerintah desa dan Lembaga masyarakat dalam pembangunan Kawasan perdesaan				Jumlah TP-PKK yang Dimonitoring dan Dievaluasi (kelompok)	139	139	100%			
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100	100	100%			
			Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan , aset dan penyusunan laporan kinerja		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100	100	100%			
			Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan , aset dan penyusunan laporan kinerja			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (Dokumen)	3	3	100%			
			Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan , aset dan penyusunan laporan kinerja			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	2	2	100%			
			Peningkatan akuntabilitas			Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang	2	2	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			pengelolaan keuangan , aset dan penyusunan laporan kinerja			Dokumen DPA-SKPD	disusun tepat waktu (Dokumen)						
			Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan , aset dan penyusunan laporan kinerja			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (Dokumen)	10	10	100%			
			Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan , aset dan penyusunan laporan kinerja		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan yang terselenggarakan dengan baik	100	100	100%			
			Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan , aset dan penyusunan laporan kinerja			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya Terbayarkan (Orang)	16	16	100%			
			Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan , aset dan penyusunan laporan kinerja			Koordinasi & Peny Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (Dokumen)	18	18	100%			
			Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan , aset dan penyusunan laporan kinerja		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD		Persentase administrasi keuangan yang terselenggarakan dengan baik	100	100	100%			
			Peningkatan akuntabilitas			Penatausahaan Barang Milik	Jumlah laporan Barang Milik Daerah	4	4	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			pengelolaan keuangan , aset dan penyusunan laporan kinerja			Daerah pada SKPD	pada SKPD (Dokumen)						
			Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan , aset dan penyusunan laporan kinerja		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100	100%			
			Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan , aset dan penyusunan laporan kinerja			Pendataan dan Pegolahan Administasi Kepegawaian	Jumlah Laporan data Administrasi Kepegawaian yang Dimuktahirkan (Dokumen)	12	12	100%			
			Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan bimtek formal dan fungsional			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6	5	83,3%			
			Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan bimtek formal dan fungsional			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	9	12	180%			
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Rata-Rata Capaian Administrasi Umum Perangkat daerah	100	95,25	95%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			Penyediaaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Buah)	7	7	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Buah)	15	15	100%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (jenis)	16	16	100%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			Penyediaaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (jenis)	3	3	100%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (examplar)	132	124	93%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya (orang)	53	53	100%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan (kali)	401	292	72%			
					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100	100	98%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diadakan (Unit)	13	13	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Atau Mesin lainnya yang Diadakan (Unit)	19	18	94%	1 unit Jumlah Peralatan Atau Mesin lainnya belum terealisasi disebabkan karena pada anggaran belanja pembuatan papan nama kantor PKK sebesar 5 juta tidak mencukupi	Akan dianggarkan kembali pada Perubahan APBD tahun 2023	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Diadakan (Unit)	1	1	100%			
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa PD	100	100	100%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diagenda (surat)	1717	1717	100%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor yang terbayarkan (rekening)	24	24	100%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (orang)	4	4	100%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100	100	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Urusan Pemerintahan Daerah		Pemerintahan yang terpenuhi						
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas OPerasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas dan Operasional yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	13	13	100%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	28	28	100%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi (Gedung)	2	2	100%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bagunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara/Direhabilitasi (Gedung)	-	-	-			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peningkatan Kinerja Program Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota			Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi (%) (persen)	100	100	100%			
					Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100	100	100%			
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (dokumen)	3	3	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2	2	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2	100%			
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat daerah yang disusun tepat waktu	8	8	100%			
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah (dokumen)	100	100	100%			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang gaji dan	17	17	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							tunjangannya terbayarkan (ASN)						
						Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (laporan)	10	10	100%			
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah		Persentase Barang milik daerah pada perangkat daerah yang ditatausahakan	100	100	100%			
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah yang disusun tepat waktu (laporan)	4	4	100%			
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100	100%			
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (laporan)	8	8	100%			
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (laporan)	2	2	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase rata-rata capaian kinerja administrasi Umum perangkat daerah (laporan)	100	100	100%			
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan(jenis)	2	2	100%			
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang disediakan (barang)	203	203	100%			
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan(jenis)	3	3	100%			
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundangundangan (eksemplar)	60	60	100%			
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi (tamu)	125	125	100%			
						Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakanJumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	411	411	100%			
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan	100	100	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							daerah						
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (surat)	400	800	200%			
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	48	48	100%			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (orang)	3	3	100%			
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100	100	100%			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas Atau Kendaraan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan yang dipelihara (unit)	96	96	100%			
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	3	3	100%			
						Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	2	2	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peningkatan intensitas Pelayanan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk, di seluruh wilayah (daerah perkotaan, dan daerah tertinggal terpencil dan perbatasan/galcitas	Program Pengendalian Penduduk			Rata rata jumlah anak per keluarga (anak)	2,02	1,22	60%	Terdapat perbaikan capaian Rata rata jumlah anak per keluarga		
					Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk) (Nilai)	2	2	100%			
						Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah GDPK kabupaten yang disusun (dokumen)	1	1	100%			
						Implementasi pendidikan Kependudukan jalur pendidikan formal dan Nonformal	Jumlah Sekolah siaga kependudukan (SSK) (sekolah)	3 sekolah	3 sekolah	100%			
						Sosialisasi Tentang Pemanfaatan	Jumlah Peserta Sosialisasi (sekolah)	24	24	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan							
						Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Peserta Rapat (orang)	130	130	100%			
					Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Penyediaan data mikro keluarga di setiap desa (persen)	100	100	100%			
						Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah jenis data keluarga yang ada (jenis)	3	3	100%			
						Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Jenis data yang diolah dan dilaporkan	3	3	100%			
			Peningkatan intensitas Pelayanan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk, di seluruh wilayah (daerah perkotaan, dan daerah tertinggal terpencil dan	Program Pembinaan Keluarga Berencana			Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) (persen)	58,0	66,37	114 %			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			perbatasan/galcitas										
							Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) (persen)	28,16	35,41	80 %	masih ada perempuan usia umur 15-19 tahun yang melahirkan. Indikator ini dikatakan berhasil apabila Realisasi semakin rendah dari Target.		
							Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (persen)	12,88	20,45	63 %	Masih terdapat Pasangan Usia Subur yang tidak menggunakan alat KB dengan alasan ingin menambah anak lagi.	Meningkatkan intensitas Pembina oleh tenaga lini lapangan (PKB,PLKB, PPKBD, Sub PPKBD dan kader kelompok kegiatan	
							Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (persen)	37,89	34,24	90 %	Pengunaan KB jangka Metode Kontrasepsi jangka panjang belum mencapai target 100% disebabkan Masih ada Pasangan Usia Subur yang menggunakan Alat KB Metode	meningkatkan Penyuluhan KIE	

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Jangka Pendek (Suntik, PIL dan Kondom)		
					Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal		Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE) (persen)	100	100	100%			
						Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Jumlah Peserta Advokasi Program KKBPK (orang)	40	40	100%			
						Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KIE (orang)	625	625	100%			
						Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah media promosi dan KIE yang tersedia (jenis)	2	2	100%			
						Pelaksanaan Mekanisme Operasional program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (	Jumlah Peserta rapat koordinasi dan minilokakarya (orang)	300	300	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (minilok)							
						Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai yang mendapat dukungan Operasional Pembiayaan(balai)	12	12	100%			
						Pengendalian Program KKBPK	Jumlah program KKBPK yang dikendalikan (Nilai)	2	2	100%			
					Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk (persen)	100	100	100%			
						Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk petugas keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB yang dibina (PKLB)	110	110	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang diberdayakan (orang)	581 PPKBD dan sub PPKBD	581 PPKBD dan sub PPKBD	100%			
					Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (persen)	100	100	100%			
						Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan & Jejaringnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Mendapatkan Distribusi Alokon (Fasilitas Kesehatan)	21	21	100%			
						Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor MKJP (akseptor)	11500	9.544	82%	Pengunaan KB jangka Metode Kontrasepsi jangka panjang belum mencapai target 100% disebabkan Masih ada Pasangan Usia Subur yang	Tingkat Penyuluhan KIE	

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											menggunakan Alat KB Metode Jangka Pendek (Suntik, PIL dan Kondom)		
						Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana yang tersedia (Unit)	27	27	100%			
						Pembinaan Pelayanan keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi diFasilitasi Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dibina (Faskes)	21	21	100%			
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam pelqaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB		Jumlah Stakholder/ Pemangku kepentingan dan mitra kerja (Termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK (stackholder)	23	23	100%			
						Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Program KKBPK yang dilaksanakan di Kampung KB (Nilai)	2	2	100%			
						Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah kampung KB yang terbina (Kampung KB)	24	24	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peningkatan Pembinaan kepada keluarga, Kelompok Tribina, PIK-R dan Kelompok UPPKA di setiap Kecamatan	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)			Rata-rata usia Kawin Pertama	20 tahun	20 tahun	100%			
							Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga) (Nilai)	35.10	53,07	66%			
					Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	71,18	71,73	100%			
						Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan	Jumlah Kelompok yang terbentuk	6	6	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Ekonomi Keluarga)							
						Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejateraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Jumlah Sarana Kelompok yang tersedia	26	26	100%			
						Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut orientasi/pelatihan	60	60	100%			
						Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /	Jumlah Biaya Operasional yang tersedia	4	4	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						UPPKS)							
						Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta promosi sosialisasi (orang)	45	45	100%			
						Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah peserta Advokasi dan promosi (orang)	80	80	100%			
					Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Persen)	75,01	75,01	100%			
						Promosi dan Sosilisasi program Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga bagi mitra Kerja	Jumlah peserta promosi dan sosialisasi (orang)	80	80	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Merencanakan dan melaksanakan program / kegiatan secara konsisten mengacu kepada dokumen perencanaan jangka menengah dinas (RENSTRA), dengan harapan seluruh target Bupati – Wakil Bupati yang dibebankan kepada Dinas Perhubungan dapat dicapai dalam kurun 5 tahun;	Program Penunjang Urusan Pemerintah Ddaerah Kab/Kota			Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100	100	100%			
			Mendorong pegawai yang diberi tanggungjawab kegiatan agar melaksanakaan kegiatan tersebut sesuai dengan petunjuk dan membuat laporan pertanggungjawaban secara benar dan tepat waktu		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100	100	100 %			
			Melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan program / kegiatan. Jika terdapat permasalahan, hal – hal yang menyimpang, deviasi capaian target, agar			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2	2	100 %			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			segera dilakukan perbaikan dan revisi target										
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2	2	100 %			
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	10	10	100 %			
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2	2	100 %			
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik ('%)	95	95	100 %			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	27	26	96,3%			
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	18	18	100 %			
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar ('%)	100	100	100 %			
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah dokumen laporan penatausahaan	4	4	100 %			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						SKPD	barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)						
					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD (%)	95	95	100 %			
						Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (Dokumen)	4	4	100 %			
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	95	95	100 %			
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)	12	12	100 %			
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	5	5	100 %			
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	95	95	100%			
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	5	5	100 %			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)	8	8	100 %			
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	2	2	100 %			
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	3	3	100 %			
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)	72	72	100 %			
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	30	30	100 %			
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	150	150	100 %			
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi ('%)	95	95	100 %			
						Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	1	1	100 %			
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	4	4	100 %			
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	3	3	100 %			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ('%)	95	95	100 %			
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	1200	1200	100 %			
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	24	24	100 %			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	6	6	100 %			
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik ('%)	95	95	100 %			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	1	1	100 %			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	8	8	100 %			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	38	38	100 %			
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	2	2	100 %			
				Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)			Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan ('%)	52,68	52,68	100 %			
							Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan ('%)	94	95	100%			
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		persentase perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik ('%)	100	100	100 %			
			Penyediaan prasarana transportasi yang menunjang kelancaran arus transportasi dan keselamatan berlalu lintas			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapanjalan yang disediakan (jenis)	1	1	100 %			
			Pemeliharaan prasarana transportasi yang mendukung kontinuitas pelayanan			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara (Unit)	48	48	100 %			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah orang (L/P) yang terangkut melalui terminal (Orang)	218426	228364	104%			
			Penyediaan prasarana transportasi yang menunjang kelancaran arus transportasi dan keselamatan berlalu lintas			Pembangunan Gedung Terminal	Persentase capaian bangunan terminal (%)	63	63	100 %			
			Pemeliharaan prasarana transportasi yang mendukung kontinuitas pelayanan			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang di pelihara/direhabilitasi (unit)	3	3	100 %			
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah titik parkir yang diselenggarakan / diusahakan (Titik)	15	15	100 %			
			Peningkatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas angkutan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan (kepolisian, BPTD)			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan titik parkir (Kali)	180	180	100 %			
					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Kendaraan wajib Uji yang laik jalan (unit)	2733	2757	100 %			
							Jumlah kendaraan yang diuji (unit)	2900 unit	2900 unit	100 %			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pengembangan layanan pengujian kendaraan bermotor yang berbasis IT			Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (kali)	3431	5491	160%			
			Pengembangan layanan pengujian kendaraan bermotor yang berbasis IT			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana PKB yang dipelihara (Unit)	11	11	100 %			
					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Rekomendasi manajemen lalu lintas yang dikeluarkan (Rekomendasi)	22	22	100%			
			Peningkatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas angkutan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan (kepolisian, BPTD)			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan menejemen rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan (Kali)	18	18	100%			
			Peningkatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas angkutan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan (kepolisian, BPTD)			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Lalu Lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan yang responsive gender(kali)	4	4	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah orang (L/P) yang terangkut angkutan umum yang diusahakan oleh pemda (orang)	302400	302400	100%			
			Penyediaan dan pemeliharaan sarana angkutan yang aman dan nyaman guna membantu masyarakat mengakses fasilitas publik Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna mendapatkan bantuan sarana transportasi			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan yang dimanfaatkan dan dipelihara (unit)	27	27	100%	Pada anggaran pokok tahun 2022, dianggarkan untuk pengadaan 1 unit bus sekolah, namun pagu yang tersedia lebih kecil dari harga yang ada d e-katalog kemudian diputuskan untuk menunda pembelian bus sekolah krn tidak memungkinkan adanya penambahan anggaran, kemudian saat itu juga terjadi kenaikan BBM sehingga anggaran pembelian bus sebagian	Mengupayakan adanya alokasi anggaran untuk pembelian bus sekolah di anggaran tahun 2024	

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											ditambahkan ke Belanja BBM. Pada Renstra Dishub direncanakan pengadaa 5 unit bus sekolah dari tahun 2021-2026, namun belum ada realisasi dan pada tahun anggaran pokok tahun 2023 juga tidak ada belanja pembelian bus sekolah. Hal ini akan mempengaruhi pencapaian Renstra Dishub di tahun akhir RPJMD.		
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rasio ijin trayek (%)	0,011	0,009	77%	Angkutan pedesaan masih sangat kurang dibandingkan jumlah penduduk	Sosialisasi dan Mendorong kemudahan pengurusan izin trayek	
							Persentase kepemilikan KIR angkutan Wajib Uji (%)	5,76	4,93	114%			
			Peningkatan pengendalian dan			Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah pengawasan perizinan angkutan	24	24	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			pengawasan lalu lintas angkutan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan (kepolisian, BPTD) Peningkatan edukasi / sosialisasi keselamatan angkutan kepada masyarakat			Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	(KIR dan Izin Trayek) (Kali)						
				Program pengelolaan pelayaran			Persentase Kapal yang laik berlayar di laut ('%)	27,17	27,17	100%			
							Persentase Kapal yang laik berlayar di danau ('%)	12,50	12,50	100%			
					Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota		jumlah kapal yang laik beroperasi di laut (unit)	250	252	101%			
			Peningkatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas angkutan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan	Jumlah pengawasan kawasan pelabuhan laut Lampia dan pelayanan kapal motor BANAWA NUSANTARA ke Lokasi Wisata (Kali)	24	24	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			(kepolisian, BPTD)			Kabupaten/Kota							
			Peningkatan edukasi / sosialisasi keselamatan angkutan kepada masyarakat				Jumlah kapal yang difasiltiasi pengurusan izin (1 tahun) (Unit)	250	250	100%			
					Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha		Jumlah kapal yang laik beroperasi di danau	2	2	100%			
			Peningkatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas angkutan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan (kepolisian, BPTD)			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan terhadap pelabuhan dan angkutan ASDP (Kali)	24	24	100%			
			Peningkatan edukasi / sosialisasi keselamatan angkutan kepada masyarakat										
					Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai		Jumlah orang (L/P) / barang yang terangkut melalui dermaga ASDP (Org/Kg)	52825 /org/kg	153444/org/kg	290%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					dan Danau								
			Penyediaan prasarana transportasi yang menunjang kelancaran arus transportasi dan keselamatan berlalu lintas			Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Fasilitas Terminal Pelabuhan Yang dibangun (1 Tahun) (Unit)	1 unit	1 unit	100%			
			Pemeliharaan prasarana transportasi yang mendukung kontinuitas pelayanan			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah pelabuhan yang dioperasikan / dipelihara (Unit)	3 unit	3 unit	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		Program informasi dan komunikasi publik			Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dipublikasikan	100%	100%				
					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola	100	100%	100%			
						Pengelolaan Media Komunikasi Publik	jumlah saluran komunikasi dan informasi yang dikelola(saluran)	5	5	100%			
						Pelayanan Informasi Publik	jumlah PPID yang mengikuti sosialisasi (orang)	166	166	100%			
						Layanan Hubungan Media	jumlah mass media yang menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (media)	30	30	100%			
						Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	jumlah pengurus berjenis kelamin perempuan dalam kelompok informasi masyarakat yang dibina (kelompok)	71	71	100%			
						Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan	jumlah organisasi yang terlibat dalam penyebarluasan informasi (organisasi)	3	3	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Komunitas							
				Program aplikasi informatika			pesrentase OPD yang memanfaatkan telematika	100	100	100%			
					Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan nama domain pemerintahan daerah		100	100	100%			
						Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nama domain dan sub domain yang dibina dalam pengelolaan konten website (OPD)	41	41	100%			
						Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Jaringan Internet yang dikembangkan dan dipelihara lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (titik)	96	96	100%			
						Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan pemerintahan berbasis e-govermnet yang dikelola	100%	100%	100%			
						Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan	Jumlah aplikasi E-Goverment yang dikembangkan (Aplikasi)	4	7				

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Berbasis Elektronik							
						Pengembangan dan Pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	jumlah aplikasi yang mendukung program smart city luwu timur(aplikasi)	14	14	100%			
						Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan penetapan wajib retribusi daerah (Dokumen/menara)	140	140	100%			
11	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian	- Meningkatkan kemampuan pelaku usaha yang professional dan kompeten; - Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan usaha koperasi dan UMKM (termasuk pemanfaatan IT); - Meningkatkan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha; - Meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha; - Meningkatkan pangsa pasar regional dan internasional ;- Peningkatan akses pembiayaan dan skema kerjasama; - Pengembangan	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam			Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam (%)	6	7,24	120%			
					Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi (%)	4,92	5,79	117%			
						Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan	Jumlah koperasi yang difasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu	15	20	133%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			kemitraan dan jaringan usaha koperasi melalui penguatan kelembagaan koperasi;- Meningkatkan daya saing UMKM di pasar regional dan domestik;			Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	dan kantor kas (KSP/USP)						
				Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi			Persentase koperasi yang berkualitas (%)	30	31	101%			
					Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/ kota (%)	70	79	112%			
						Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan dan akuntabilitas koperasi (koperasi)	136	136	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi			Persentase koperasi sehat (%)	31	31	102%			
					Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya (%)	49	50	102%			
						Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti penilaian kesehatan KSP/USP (koperasi)	15	15	100%			
				Program pendidikan dan latihan perkoperasian			Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan (%)	10	11	105%			
					Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/ kota (%)	17	18	105%			
						Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan	Jumlah koperasi aktif yang ditingkatkan pemahaman dan	15	15	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi (koperasi)						
				Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi			Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi (%)	3,15	4,51	143%			
					Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam daerah Kabupaten/Kota		Persentase koperasi yang diberdayakan dari sisi peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan strukturisasi usaha (%)	3	3,75	125 %			
						Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan	Jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan dan peningkatan produktifitas, Nilai tambah, Akses pasar, Akses pembiayaan pembiayaan penguatan kelembagaan, penataam manajemen,	20	20	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	standarisasi dan restrukturisasi koperasi kewenangan kabupaten/kota (koperasi)						
				Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)			Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha (%)	40	40	101%			
					Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan dan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah wirausaha baru berskala mikro (UKM/WUB)	88	93	105%			
						Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	220	229	104%	terbatasnya aparat/SDM pada bidang UMKM dibandingkan dengan jumlah pelaku UMKM serta kondisi geografis wilayah Luwu Timur	diharapkan dilakukan penambahan tenaga ASN pada bidang UMKM dan tenaga pendata dikecamatan	

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro dan kecil yang bermitra (usaha mikro dan kecil)	50	50	100%	Masih minimnya pelaku UMK yang melakukan kemitraan dengan usaha besar	perlu dilakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dengan kerjasama dengan pola kemitraan	
						Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan (usaha mikro)	45	45	100%	usaha mikro	100,00%	
						Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM (usaha mikro dan kecil)	75	75	100%			
						Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difaslitasi pengembangan usaha (Usaha mikro)	85	89	104%	jumlah pendamping/ konsultan UMKM tidak sebanding dengan jumlah pelaku UMKM, sehingga diharapkan jumlah pendamping UMKM berjumlah minimal 4 (empat) orang	diharapkan adanya penambahan jumlah tenaga pendamping minimal 4 (empat) orang	

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Program pengembangan umkm			Rasio pertumbuhan skala usaha mikro (%)	2,27	2,87	126%			
							Persentase peningkatan skala usaha mikro (%)	6,82	7,4	108%			
						Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan standarisasi dan sertifikasi produk usaha (usaha mikro dan kecil)	59	59	100%			
12	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	1. Menyusun strategi promosi dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi, 2. Melaksanakan/ mengikuti pameran potensi dan peluang investasi, 3. Membuat dokumen kajian/peta potensi yang dapat meningkatkan iklim investasi, 4. Menyediakan data dan informasi bidang penanaman modal yang valid dan kredibel, 5. Melaksanakan kegiatan	Program pengembangan iklim penanaman modal			Meningkatnya Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional(jumlah investor)	33	35	106%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			pemantauan untuk memaksimalkan realisasi investasi										
					Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal		Persentase PMA/PMDN yang terfasilitasi(%)	100	100	100%	Regulasi penanaman modal yang belum selesai	Perda Penanaman Modal sudah terbit, Perbup turunan dari Perda tahun 2023 akan diselesaikan	
						Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahah penanaman modal	Jumlah Perda PM yang terbit(perda)	2	2	100%			
						Evaluasi pelaksanaan fasilitasi / insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah laporan Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif PM yang dihasilkan(laporan)	2	2	100%			
					Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota		Persentase jenis potensi yang disusun dalam peta potensi Kabupaten(%)	100	100	100%			
						Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Peta Potensi dan peluang usaha di Kabupaten/Kota	1	1	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							(dokumen)						
				Program promosi penanaman modal			Jumlah Realisasi PMA dan PMDN(Rp)	3,3 Triliun	4,092 Triliun	124%			
					Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			5 MoU	5 MoU	100%			
						Penyusunan Strategi promosi penanaman modal	Jumlah Media Strategi Promosi Penanaman Modal yang dibuat (media)	2	3	150%			
						Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah/kabupaten/kota	jumlah kegiatan Pameran penanaman modal yang diikuti/dilaksanakan(kegiatan)	2	4	200%			
			1.Penggunaan Pelayanan Perizinan berbasis IT 2.Penyediaan layanan konsultasi dan pengaduan 3.Penyederhanaan proses/SOP perizinan dan nonperizinan	Program pelayanan penanaman modal			Persentase ketepatan waktu penyelesaian izin yang diterbitkan sesuai SOP(%)	72	82,24	114%	ada 972 izin yang terbit tidak tepat waktu. Hal ini disebabkan adanya keterlambatan rekomendasi dari instansi teknis dan ada nya maintannace aplikasi dari pusat	1. meningkatkan frekuensi koordinasi dengan instansi terkait aagar lebih memperhatikan permohonan yang masuk pada aplikasi untuk segera ditindaklanjuti.	

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Capaian kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu(%)	100	100	100%			
						Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin yang diterbitkan (izin)	4100	5474	133,%			
							Jumlah Pemilik usaha (perempuan) yang diterbitkan izinnya(orang)	1250	1507	121%			
						Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti(laporan)	5	6	120%	Kegiatan pengaduan bersifat persediaan dan dilakukan apabila ada masyarakat yang mengadu tentang perizinan yang terbit dimasyarakat	Kegiatan pengaduan bersifat persediaan dan dilakukan apabila ada masyarakat yang mengadu tentang perizinan yang terbit dimasyarakat	

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal			Persentase Pelaku usaha yang taat terhadap peraturan yang terkait Penanaman Modal(%)	75	75	100%	Adanya kegiatan pendampingan, Bimtek dan Pengawasan yang dilakukan kepada pelaku Usaha (PMA/PMDN) sehingga Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dapat dilakukan dan dilaporkan oleh Perusahaan lebih teratur dan tepat waktu		
					Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pelaku Usaha yang menyampaikan LKPM(%)	95	100	105%	Banyak Pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha sesuai dengan kegiatan usaha	Memfasilitasi dan mendampingi pelaku usaha dalam mendaftarkan dan memiliki izin usaha sesuai dengan bidangnya pada aplikasi OSS yang berbasis resiko	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan	Jumlah kegiatan usaha yang difasilitasi penyelesaian	8	8	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penanaman Modal	permasalahannya(kegiatan)						
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti BIMTEK(orang)	240	240	100%			
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang diawasi(orang)	14	14	100%			
				Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal			Jumlah Database Penanaman Modal yang Valid(dokumen)	1	1	100%			
					Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengelolaan data dan informasi Perizinan dan nonperizinan(%)	100	100	100%			
						Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	jumlah data yang disediakan (data)	2	2	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik							
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	95%	98,7%	104%			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu(%)	17	17	100%			
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu(dokumen)	3	3	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu(dokumen)	2	2	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu(dokumen)	2	2	100%			
						Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	10	10	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Daerah	pelayanan perangkat daerah yang disusun(dokumen)						
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100	98,33	98,3%			
						Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	21	20	95%	adanya 1 jabatan pelaksana kosong (Pejabat Pengelola Keuangan)	Mengusulkan permintaan staf ke BKPSDM	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	18	18	100%			
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standard	100	100	100%			
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4	4	100%			
					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	##########	656.191.144	35%	Adanya PP no.16 Tahun 2021 tentang persetujuan Bangunan	Menunggu terbitnya Perda tentang PBG pada Dinas PU	

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Gedung dan Surat Edaran Mendagri no. Tahun 2021 sehingga retribusi IMB dihentikan untuk sementara sampai terbitnya PERDA tentang PBG		
						Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun	4	4	100%			
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100%			
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian	4	4	100%			
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	13	16	123%			
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	100	97,82	98%			
						Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	12	12	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bangunan kantor yang di sediakan						
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2	2	100%			
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	4	4	100%			
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	60	100%			
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu yang difasilitasi	120	120	100%			
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	500	424	85%			
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100	100	100%			
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1	1	100%			
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ('%)	100	96	96%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	900	804	89%			
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	60	60	100%			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	4	4	100%			
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik ('%)	57	51	89%			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara	9	8	89%			
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	47	43	91%			
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	Adapun kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu dengan pembinaan kreativitas SDM generasi muda, penyelamatan martabat serta semangat patriotisme generasi muda dalam pembangunan daerah	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan			Persentase tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	37,	46	123%			
					Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Persentase Meningkatnya Pembinaan Pemuda Pelopor dan PPAP yang ada diwilayah Luwu Timur	90					

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kewirusahaan (Orang)	30	26	86%			
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan BINLAT Calon Polisi Tk. Kab (orang)	30	30	100%	Ketidaksesuaian jadwal sosialisasi dengan Jadwal sekolah (Kalender Pendidikan)	Melakukan koordinasi sebelum melaksanakan sosialisasi	
						Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan yang di bangun/disediakan (unit)	1	1	100%			
						Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan pelatihan paskiba TK. Kecamatan/Tk. Kabupaten(orang)	74	74	100%			
					Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Meningkatnya Pembinaan OKP di Kabupaten Luwu Timur yang berkualitas	90	100	100%			
						Peningkatan Kapasitas	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	35	35	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	(okp)						
			Adapun kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi yaitu : Pemasyarakatan olahraga , pembinaan olahraga berprestasi dan Penyediaan sarana dan Prasarana Olahraga.	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan			Persentase tingkat prestasi olahraga (%)	57	84	146%			
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Meningkatnya Pembagunan Sarana dan Prasarana Olahraga di tiap Kecamatan/Sarana dan Prasaran yang terstandarisasi(%)	100	90	90%			
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tiap kecamatanan di bangun (unit)	10	9	90%	Lambatnya pekerjaan stadion antara lain disebabkan oleh lambatnya pekerjaan timbunan, serta kurangnya armada dan tenaga kerja		

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Peningkatan Peserta Olahraga Pelajar yang mengikuti Event Olahraga Pelajar di Tk. Kabupaten dan Provinsi (%)	100	100	100%			
						Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga tingkat Kab/Kota	Jumlah Kegiatan Olahraga berbakat yang dilaksanakan/diikuti (cabor)	1	1	100%			
						Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta Olahraga Pelajar yang mengikuti Event Olahraga Pelajar di Tk. Kabupaten dan Provinsi (orang)	80	80	100%			
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Meningkatnya Pembinaan Atlit yang Berpestasi	100	100	100%			
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah dokumen Inventarisasi Organisasi dan sarana prasarana olahraga (dokumen)	1	1	100%			
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Presentase Peningkatan Pembinaan Organisasi Olahraga di Luwu Timur (%)	95	83	87,7%			
						Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	3	2	66,6%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah organisasi olahraga yang dikerjasamakan dengan lembaga terkait (cabor)	24	24	100%			
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Presentase Peningkatan olahraga rekreasi yang dilaksanakan(%0	90	100	111%			
						Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang dilaksanakan(cabor)	5	5	100%			
				Program pengembangan kapasitas kepramukaan			persentase gugus depan yang aktif(%)	90	100	111%			
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Presentase Sarana dan Prasarana Kepramukaan yang di bangun(%)	100	0	0%	Tidak ada pembangunan Sarana prasarana kepramukaan	Mengaktifkan pembinaan dengan sarana yang sudah ada	
						Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah gugus depan yang dibina(gugus)	100	100	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika		Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi			Persentase Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah yang diselenggarakan(%)	100	100	100%			
					Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyelengaraan pengamanan data dan informasi elektronik (%)	100	100	100%			
						Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat, Aplikasi dan Informasi yang diamankan(aplikasi)	10	10	100%			
15	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika		Program penyelenggaraan statistik sektoral			persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	100%			
						Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	persentase data statistik sektoral kabupaten yang tersusun (%)	100	100	100%			
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan,	Jumlah data /informasi/ statistik sektoral daerah yang tersusun (data)	13	13	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral							
						Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah dokumen pengelolaan data perencanaan pembangunan daerah (dokumen)	1	1	100%			
16	Kebudayaan	Pendidikan	Melakukan upaya peningkatan seni dan budaya lokal yang diakui dan dilestarikan	Program pengembangan kebudayaan			Persentase sanggar seni budaya yang di Bina (%)	80	17	22%	Beberapa sanggar seni belum teridentifikasi/ terdaftar secara adminsitrasi	Akan dilakukan identifikasi lebih intensif dan di data secara administrasi agar bisa dilakukan pembinaan	
					Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Budaya lokal yang di kelola(%)	100	100	100%			
						Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah kegiatan dialog kebudayaan yang dilaksanakan(kegiatan)	2	2	100%			
					Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase seni budaya daerah yang di lestarikan(%)	100	100	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah festival Kebudayaan yang diselenggarakan/diikuti (event)	1	1	100%			
				Program pengembangan kesenian tradisional			Persentase sanggar seni budaya yang di Bina (%)	100	77	77%	Dari target 21 sanggar seni terealisasi 20 sanggar seni yang di bina	melakukan pendataan ulang terkait sanggar seni yang masih aktif	
					Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase sanggar seni dan budaya yang dibina(%)	80	76	95			
						Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia kesenian Tradisional	Jumlah sanggar seni dan paduan suara yang dibina dan dikembangkan(sanggar seni)	25	21	84%	Dikarenakan ada beberapa sanggara seni yang sudah tidak aktif tetapi masih terdata	melakukan pendataan ulang terkait sanggar seni yang masih aktif	
				Program pembinaan sejarah			Persentase sejarah dan tradisi lokal yang dilestarikan(%)	100	8,3	8,3%	masih ada sejarah dan tradisi lokal yang dilestarikan	akan dilakukan pembinaan terhadap sejarah lokal yang dilestarikan yang ada diluwu timur	
					Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase sejarah lokal yang dibina(%)	100	100	100%			
						Pemberdayaan Sumber Daya	persentase sumber daya manusia dan	100	100	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	lembaga sejarah lokal kab/kota yang dibina(%)						
						Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	persentase masyarakat yang mengakses data dan informasi sejarah(%)	50	50	100%			
				Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya			Persentase pengelolaan Cagar Budaya yang dilestarikan(%)	100	8,3	8,3%	masih ada cagar budaya yang belum dilestarikan	akan dilakukan pendataan terhadap cagar budaya yang belum dilestarikan yang ada dikabupaten luwu timur	
					Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Jumlah cagar budaya yang ditetapkan (lokasi)	4	4	100%			
						Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang deregister(lokasi)	4	4	100%			
					Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Jumlah cagar budaya yang dikelola(lokasi)	1	1	100%			
						Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilindungi(lokasi)	1	1	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	Perpustakaan			Program pembinaan perpustakaan			Persentase peningkatan jumlah orang yang mengakses perpustakaan yang responsive gender	100	88	88 %			
					Pengeloaan Perpustakaan Tingkat daerah Kabupaten/ Kota		Persentase jumlah orang yang mengakses perpustakaan	100	155	155%			
						Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik (layanan)	2	2	100%			
						Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kabupaten/ kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan sekolah yang dibina(perpustakaan)	20	11	55%	Refocusing Anggaran ke iten belanja yang prioritas	Optimalisasi anggaran yang tersedia	
						Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/ Kota	Jumlah Hari Kegiatan Pameran yang dilakukan (hari)	5	5	100%			
							Jumlah Kunjungan Perpustakaan keliling (kali)	50	50	100%			
							Jumlah Pengunjung Perpustakaan(pengunjung)	12200	15451	126%			
						Pengeloaan dan Pengembangan	Jumlah Buku yang dilestarikan(eksempl	200	200	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Bahan Pustaka	ar)						
							Jumlah Koleksi Buku yang Diadakan (judul)	270	270	100%			
						Penyusunan data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah kabupaten/Kota	Jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang terdata (dokumen)	10	10	100%			
					Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten		Persentase Peningkatan jumlah orang yang mengakses perpustakaan (%)	100	81	81%			
						Sosialisasi Budaya baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan dasar dan pendidikan khusu serta masyarat	Jumlah peserta dalam sosialisasi budaya baca dan literasi (orang)	200	200	100%			
						Pemberiaan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah lomba minat baca yang dilaksanakan	3	3	100%			
							Jumalh perpustakaan yang dinilai (perpustakaan)	22	22	100%			
						Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Kegiatan Perpustakaan berbasis inklusi social (kegiatan)	10	10	100%			
						Pemilihan Duta baca tingkat Daerah	Jumlah Peserta duta baca yang dilombakan (peserta)	33	28	84 %			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Kabupaten/Kota							
18	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penyelenggaraan kearsipan yang sesuai standar nasional kearsipan	Program pengeloaan arsip			Persentase Perangkat Daerah dan Desa yang menerapkan Tata Kelola Kearsipan sesuai dengan Peraturan yang berlaku	100	100	100%			
					Pengeloaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase pengelolaan arsip dinamis Perangkat Daerah dan Desa	100	100	100%			
						Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Arsip yang Dikelola (dokumen)	6000	6000	100%			
						Pengawasan arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah OPD dan Desa yang diawasi kearsipannya (OPD & desa)	54	54	100%			
					Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		Persentase arsip statis yang dikelola	100	100	100%			
						Akuasisi, pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah berkas (arsip)	1000	1000	100%			
					Pengelolaam Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional tingkat kabupaten/Kota		Persentase pengelolaan simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan	100	100	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan daerah kabupaten/ Kota	Jumlah Pengelola Arsip OPD, Organisasi Politik dan Desa Yang dBina (pengelola)	45	45	100%			
							Jumlah Pengelola Arsip yang Fasilitasi(pengelola)	40	40	100%			
				Program perlindungan penyelamatan arsip			Persentase Arsip Perangkat Daerah yang Terlindungi dan Terselamatkan (%)	100	100	100%			
					Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retunsi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Persentase arsip usul musnah yang terealisasi (%)	100	100	100%			
						Penilaian Penetapan dan Pelakssanaan Pemusnahan asrip yang memiliki Retensi dibawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumah Dokumen arsip yang dinilai dan penetapan pemusnahannya (dokumen)	2000	2000	100%			
						Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) tahun	Jumlah Arsip usul Musnah (dokumen)	2000	2000	100%			
				Program perizinan pengguna arsip			Persentase perizinan penggunaan arsip yang bersifat tertutup(%)	25%	25%	100%	akan dilakukan perubahan target pada renstra		

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pelayanan izin pengguna arsip yang bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota		Persentase surat izin pengguna arsip yang besifat tertutup(%)	25	25	100%	akan dilakukan perubahan target pada renstra		
						Penyusunan dan Penetapan SOP Pengguna arsip yang bersifat Tertutup	Jumlah Penyusunan dan Penetapan SOP yang bersifat Tertutup (SOP)	1	1	100%			
						Penyediaan Daftar dan penetapan izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Surat izin Pengguna Arsip (surat)	20	20	100%			
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota			Persentase Rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	100	98	99%			
					Perencana, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat yang disusun tepat waktu(%)	100	100	100%			
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Daerah							
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2	100%			
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	10	10	100%			
					Administrasi Keuangan Perangkat daerah		Prosentase rata-rata capaian kinerja adminsitrasi keuangan peranglat daerah	100	100	100%			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan (orang)	30	29	96,6%			
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keunagan Bulanan/Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laopran Dokumen Keungan Bulanann/ Triwulan/ semesteran SKPD yang di susun tepat waktu (laporan)	18	18	100%			
					Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat daerah		Persentase BMD yang di administrasikan sesuai standard (%)	100	100	100%			
						Penatausahan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah dokumen laporaan penatausahaan barang milik daerah	4	4	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							pada SKPD yang di susun						
					Administrasi Kepegwaian Perangkat daerah		Prosentase rata -rata capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah (laporan)	100	100	100%			
						Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi perundang – undangan (orang)	11	12	109%			
						Pengadaan pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (stel)	41	41	100%			
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase rata-rata kinerja pelayanan adminitrasi perkantoran terpenuhi (%)	100	83	83%	Tingkat capaian dipengaruhi oleh target sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tidak tercapai		
						Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan gedung kantor	Jumlah komponen instalasai listrik dan penerangan bangunan gedung kantor yang disediakan (jenis)	6	6	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	14	14	100%			
						Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (jenis)	8	8	100%			
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang diadakan (eksemplar)	60	60	100%			
						Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya (orang)	2683	2210	82%			
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikut (kali)	165	134	81%			
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah		Prosentase rata -rata capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	100	100%			
						Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Banguan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (unit)	39	39	100%			
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lain	Jumlah Peralatan/mesin lainnya yang diaadakan (unit)	16	16	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (paket)	1	1	100%			
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan (%) Daerah	100	99	99,4%			
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar dan surat masuk yang diadministrasikan (surat))	600	585	97,5%	disesuaikan dgn surat masuk yg diadministrasikan	mengoptimalkan pengadministrasian surat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	48	48	100%			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (orang)	10	10	100%			
					Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase rata -rata kinerja pelayanan administrsi (%)	100	100	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (10/9* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peronganan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	6	6	100%			
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lain	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	33	33	100%			
						Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	2	2	100%			

3.2.3 URUSAN PILIHAN

Urusan pilihan terdiri dari urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan, bidang Pariwisata, bidang Pertanian, bidang Perdagangan, bidang Perindustri dan bidang Transmigrasi . Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Target RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 Tahun Pelaksanaan 2022, untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4
Urusan Pilihan
Kab. Luwu Timur tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan pilihan													
1	Perikanan	Dinas Perikanan	Pengembangan usaha perikanan tangkap	Program pengelolaan perikanan tangkap			Produksi perikanan tangkap (ton)	10.165	10.267,50	101%			
			Penguatan modal usaha pada nelayan		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan		Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap (Persen)	100	100	100%			
			Pembinaan kelompok nelayan			Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen data dan informasi sumber daya perikanan (Dokumen)	4	4	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pembinaan dan pendampingan pada kelompok nelayan			Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah tambatan perahu yang dibangun/rehab (Unit)	2	2	100%			
			Pemberdayaan masyarakat pesisir			Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana alat tangkap dan alat bantu usaha perikanan ikan yang disediakan (Kelompok) (KP 1)	32	32	100%			
			Peningkatan kapasitas pelaku utama dan daya dukung lingkungan		Kegiatan pemberdayaan nelayan kecil		Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan (persen)	100	68,75	68,7%	Tidak tercapainya indikator kegiatan ini disebabkan ada 2 sub kegiatan yang tidak mencapai target sehingga pemberdayaan ke kelompok nelayan tidak maksimal	Ketepatan dalam perencanaan penentuan target kinerja lebih di tingkat	
						Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yang dilatih teknologi penangkapan ikan (Orang)	20	10	50%	Tidak tercapainya indikator sub kegiatan ini disebabkan kurangnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelatihan yang dilaksanakan.	Kegiatan pelatihan dilakukan harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan dan dilaksanakan di Lapangan/ Desa sehingga	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												memudahkan masyarakat	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pendampingan (Kelompok)	12	12	100%			
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, dan Kemitraan Usaha	Jumlah lahan nelayan yang disertifikatkan (Persil)	80	0	0%	Tidak tercapainya indikator sub kegiatan ini disebabkan tidak adanya penambahan kuota lahan nelayan yang disertifikatkan oleh BPN/Pemerintah Pusat.	Koordinasi dengan Pihak BPN dan Kementrian lebih di intenskan	
					Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar (Persen)	57	71,42	125%			
						Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat	Jumlah TPI/fasilitas pokok TPI yang dibangun/rehab (Unit)	1	1	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pelelangan Ikan (TPI)							
			Peningkatan sarana budidaya	Program pengelolaan perikanan budidaya			Produksi perikanan budidaya (ton)	315.565	318.944,59	101%			
			Peningkatan prasarana budidaya berupa jalan produksi dan jembatan tambak		Kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil		Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses iptek dan informasi dan penguatan kelembagaan (persen)	90	100	111%			
			Pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan			Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, dan Kemitraan Usaha	Jumlah lahan pembudidaya ikan yang disertifikatkan (Persil)	50	50	100%			
			Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha			Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan	Jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan bantuan/APBN/APBD I (Kelompok)	30	30	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pelatihan							
			Dukungan permodalan usaha melalui bantuan saprodi, bibit dan benih		Kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan		Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan (persen)	100	100	100%			
						Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	Jumlah dokumen data dan informasi pembudidaya ikan (Dokumen)	4	4	100%			
						Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan	Jumlah prasarana di BBI yang dibangun/rehab (Unit)	5	5	100%			
							Jumlah jembatan tambak yang disediakan (Unit) (KP 1)	5	5	100%			
							Jumlah jalan produksi tambak yang dibangun dan ditingkatkan (Km) (KP 1)	12	11,03	92%	Tidak tercapainya indikator sub kegiatan ini disebabkan adanya 1 paket kegiatan Jalan produksi di kurangi volume panjang namun yang di tingkatkan volume lebar.	Ketepatan dalam perencanaan penentuan target kinerja lebih di tingkat	
						Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan	Jumlah benih unggul serta sarana pembudidaya ikan yang tersedia (Kelompok) (KP 1)	49	49	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Ikan							
						Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya	Jumlah pembudidaya yang mendapatkan informasi hama dan penyakit ikan dengan memperhatikan kesetaraan gender (Orang)	30	30	100			
						Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidaya Ikan di Darat	Jumlah bibit unggul yang dihasilkan (Ekor)	80.000	100.000	125%			
			Penyuluhan hukum terhadap masyarakat mengenai aturan hukum dan UU perikanan	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan			Persentase kepatuhan pelaku usaha kp terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (persen)	94	94	100%			
					Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan		Cakupan masyarakat/ kelompok masyarakat pengawas yang aktif (Persen)	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha perikanan tangkap (Kali)	24	24	100%			
			Pembinaan Fasilitas Industri Pengolahan Hasil Perikanan	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan			Produksi hasil pengolahan ikan (ton)	322	710,57	221%			
			Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP) (Persen)	100	100	100%			
			Penguatan Kelembagaan dan SDM perikanan dengan memperhatikan pengarusutamaan gender			Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah dokumen data dan informasi usaha pemasarana dan pengolahan hasil perikanan (Dokumen)	4	4	100%			
			Dukungan ketersediaan sarana dan prasarana		Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan		Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya (Persen)	83	63	76%	Tidak tercapainya indikator kegiatan ini disebabkan ada	Lebih intes dalam melakukan pembinaan ke kelompok wanita	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			produksi bermutu dan terjangkau		Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						2 kelompok binaan yang belum bisa naik peringkat karena masih banyak kelengkapan kelompok yang belum terpenuhi.	tani	
			Pengembangan kualitas manajemen usaha dan Diseminasi IPTEK dan usaha kelautan			Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil (Kali)	2	2	100%			
					Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan		Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang (Persen)	55	100	182%			
						Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok/pelaku usaha yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pengolahan ikan skala mikro dan kecil (Kelompok)	4	4	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pengelolaan dan penataan administrasi sesuai aturan serta perencanaan yang SMART	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran (persen)	100	100	100%			
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100%			
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (dokumen)	2	2	100%			
						Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA/SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2	100%			
						Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan DPA/SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2	100%			
						Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	10	10	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (persen)	100	97,54	98%	Tidak tercapainya indikator kegiatan ini disebabkan anggaran Tunjangan Kinerja tidak terealisasi akibat pemotongan keterlambatan	Kedisiplinan Pegawai lebih di tingkatkan	
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (orang)	26	26	100%			
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	10	10	100%			
					Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		Persentase bmd yang diadministrasi sesuai standar (persen)	100	100	100%			
						Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	4	4	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah		Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (persen)	100	23,60	24%	Tidak tercapainya indikator kegiatan ini disebabkan ada tidak tercapaianya target PAD yang direncanakan	Lebih teliti dan relevan dalam penentuan target PAD	
						Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	4	4	100%			
					Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (persen)	100	90,48	90%	Tidak tercapainya indikator kegiatan disebabkan ada 3 sub kegiatan yang realisasi capaian kinerjanya tidak terlaksana	Ketepatan dalam perencanaan penentuan target kinerja lebih di tingkat	
						Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan (paket)	48	48	100%			
						Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (dokumen)	12	12	100%			
						Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	2	2	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	2	1	50%	Tidak tercapainya indikator Sub kegiatan ini disebabkan tidak adaya surat atau panggilan dari pihak terkait untk menginkuti sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan	Ketepatan dalam perencanaan penentuan target kinerja lebih di tingkat	
						Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	5	4	80%	Tidak tercapainya indikator Sub kegiatan ini disebabkan tidak adaya surat atau panggilan dari pihak terkait untk menginkuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Ketepatan dalam perencanaan penentuan target kinerja lebih di tingkat	
					Kegiatan administrasi umum perangkat daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (persen)	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	10	10	100%			
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (jenis)	4	4	100%			
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	18	18	100%			
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (jenis)	4	4	100%			
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah barang bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (eksemplar)	48	48	100%			
						Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Makan Minum Tamu)	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya (orang)	160	160	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan (kali)	210	211	100%			
					Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase bmd-pd penunjang yang terpenuhi (persen)	100	100	100%			
						Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan (unit)	2	2	100%			
					Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan (persen)	100	125	126%			
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (surat)	2.000	2.532	127%			
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	10	10	100%			
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum	8	8	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pelayanan Umum Kantor	kantor yang disediakan (orang)						
					Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (persen)	100	100	100%			
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	23	23	100%			
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	5	5	100%			
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	3	3	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Urusan Bidang Pariwisata		Adapun kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu peningkatan kualitas kawasan / sarana prasarana obyek wisata dan peningkatan peran serta dunia usaha kepariwisataan/ investor	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata			Presentase Meningkatnya Pengembangan Objek Wisata (Persen)	32	40	122%			
					Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota		Presentase meningkatnya penyusunan master dan bisnis plan objek wisata	80	100	125%			
						Sub Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Master Plan dan rencana bisnis destinasi pariwisata yang dibuat (dokumen)	4	4	100%			
					Pengelolaan destinasi pariwisata		Peningkatan pengembangan objek pariwisata (%)	60	100	166%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					kabupaten/kota								
						Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun, dipelihara dan rehabilitasi tiap tahun (paket)	9	9	100%			
					Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota		Pesentase meningkatnya tanda daftar usaha pariwisata yang telah ditetapkan (%)	70	100	142%			
						Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah tanda Daftar Usaha Parwisata per sub jenis usaha di Kab/Kota	10	10	100%			
						Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata yang di bina	10	10	100%			
				Program pemasaran pariwisata			Presentase meningkatnya Pemasaran Parwisata di Luwu Timur (%)	72%	67%	92%			
					Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,		Presentase Peningkatan Kenaikan Jumlah Kunjungan Wisatawan (%)	70%	70%	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
						Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah jenis kegiatan pameran dan promosi pariwisata yang diikuti/dilaksanakan tiap tahun (jenis)	6	6	100%			
						Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event Pariwisata yang di ikuti/dilaksanakan tiap Tahun (event)	5	0	0%	Event tahunan provinsi yang direncanakan tidak terlaksana	Mengintesifkan komunikasi dengan provinsi terkait penyelenggaraan even	
						Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Pelaporan Data Monev Pengembangan Pemasaran Pariwisata (laporan)	1	1	100%			
						Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Destinasi Parwisata yang Koordinasikan kemitraan Pembangunannya (lokasi)	1	1	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual			Presentase Meningkatnya Pengembangan Ekonomi kreatif di Luwu Timur(%)	20	0	0%	Sub Kegiatan dikeluarkan pada perubahan anggaran 2022 karena alasan tidak ada pelaku ekonomi kreatif yang mengajukan proposal.	Mendorong peningkatan usaha pelaku ekonomi kreatif yang mengajukan perlindungan hak kekayaan intelektual	
					Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif		Persentase meningkatnya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif (%)	0	0	0%			
						Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang menerima bantuan (%)	0	0	0%	Sub Kegiatan dikeluarkan pada perubahan anggaran 2022 karena alasan tidak ada pelaku ekonomi kreatif yang mengajukan proposal.		
				Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif			Persentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (%)	21,3%					
					Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan		Persentase Meningkatnya Pembinaan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (%)	50	103	207%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								
						Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang dibentuk dan dibina (kelompok)	3	3	100%			
						Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif (orang)	11	15	136%			
						Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Dibina (kelompok)	4	0	0%	Proses identifikasi ekonomi kreatif belum terlaksana dengan baik	Idenfikasi kelompok ekonomi kreatif segera diselesaikan	
			Adapun Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sarana penunjangnya	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	97	80	82%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu ('%)	100	100	100%			
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu (dokumen)	2	2	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu (dokumen)	2	2	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun (dokumen)	2	2	100%			
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (dokumen)	10	10	100%			
					Administrasi keuangan perangkat		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara	100	92,30	92,3%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					daerah		dengan baik ('%)						
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan (orang)	26	20	76%	Kegiatan ini terlaksana hanya 79,17% tidak memenuhi target karena sampai pada akhir tahun belum ada pegawai yang mengisi kekosongan jabatan	Anggaran gaji masih tetap disiapkan sesuai dengan kebutuhan dan untuk penganggaran berikutnya gaji akan dihitung sesuai dengan kebutuhan pegawai dan jabatan yang sudah ada maupun yang masih kosong	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (dokumen)	1	1	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	4	4	100%			
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar		100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Daerah	('%)							
						Penatausahaan BMD pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	4	4	100%			
					Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase rara-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah ('%)	Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah ya ng diadministrasikan (dokumen)	100	100	100%			
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan(dokumen)	12	12	100%			
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan (orang)	7	5	71%	Keterbatasan keikutsertaan bimtek	Mengoptimalkan anggaran terhadap pelaksanaan Bimtek yang diikuti.	
					Administrasi umum perangkat daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD ('%)		100	92,47	92%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang penuhi (jenis)	17	17	100%			
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (jenis)	7	7	100%			
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (jenis)	2	2	100%			
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (jenis)	3	3	100%			
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan (eks)	72	72	100%			
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya(kotak/ orang)	2500	1225	49%	Fasilitas Tamu lebih kecil dari yang ditargetkan bersifat persediaan	Direalisasikan sesuai jumlah tamu yang difasilitasi	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan(kali)	860	845	98%			
					Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)		100	100	100%			
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (surat)	2000	2000	100%			
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rek/bln)	50	50	100%			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan(orang)	18	18	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)		100	100	100%			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	12	12	100%			
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	60	60	100%			
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1	1	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Urusan Bidang Pertanian	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	Penyediaan benih yang berkualitas	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian			Presentase Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian (%)	100	99	99,3%			
			Pemberian Bantuan alat dan mesin pertanian				Jumlah Populasi ternak Kecil (ekor)	24.462	37.217	152%	Terdapat peningkatan pada populasi Babi. Hal ini dikarenakan factor kelahiran ternak kecil yaitu kambing dan babi yang lebih banyak yakni bisa mencapai 2-3 ekor anak dan dapat melahirkan 2 kali setahun bahkan ternak babi menyuplai dari Luwu Timur ke Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara serta Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara		
			Pengembangan kebun hortikultura				Jumlah Produktivitas kelapa sawit (ton/Ha)	12,01	14,53	120%	Produksi TBS sudah mulai meningkat, hal ini dipengaruhi harga yang sudah		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											stabil di akhir tahun 2022, untuk Tanaman Menghasilkan (TM) sebagian besar sudah menggunakan aplikasi pupuk yang baik dan tepat sehingga produktivitas mengalami kenaikan dan petani sudah melakukan pertanaman secara swadaya dengan cara membuka lahan baru/ekstensifikasi. Selain itu, Pada tahun 2022, terdapat pembukaan lahan baru penanaman sawit rakyat yang sebelumnya berasal dari kebun kakao dan lada serta lahan kosong		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pengadaan ternak				Jumlah Populasi ternak Besar (Ekor)	23.109	21.222	91%	Untuk populasi ternak besar belum mencapai target dikarenakan masa bunting ternak yang relative Panjang disertai dengan lemahnya deteksi birahi ternak dalam melakukan perkawinan. Perdagangan lalulintas ternak juga memberikan andil yang berpengaruh dalam terjadinya ternak yang dikeluarkan dari kab. Luwu Timur		
			Pengawasan dan sertifikasi benih				Jumlah Produktivitas padi (Ton/Ha)	7,12	6,09	85%	1. Hal ini karena wilayah tersebut masuk periode tanam Januari sampai Maret 2022 mengalami pergeseran tanam (jadwal tanam mundur), yang seharusnya ditanam pada	1. Percepatan jadwal tudang sipulung untuk memutus mata rantai perkembangan OPT 2. Penyediaan bantuan benih padi Varietas Unggul Baru	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Bulan Januari bergeser ke Bulan Februari, Maret dan April . 2. Fenomena dampak perubahan iklim (DPI) di awal tahun 2022 seperti adanya banjir. 3. Ketersediaan saprodi seperti pupuk yang masih terbatas dan terlambat pasokannya sehingga mempengaruhi jadwal penggunaan dan aplikasi pupuk pada tanaman padi. 4. Ketersediaan dan penggunaan Benih Varietas Unggul Baru (VUB) yang relatif masih rendah, sehingga beberapa areal tanam masih menggunakan	(VUB) sesuai spesifikasi lokasi melalui alokasi bantuan APBN dan Provinsi Sulsel 3. Penyediaan saprodi (pupuk) yang cukup dan tepat waktu. 4. Pemanfaatan Alsintan khususnya Combine Harvester (alat panen) untuk mengurangi kehilangan hasil pada saat panen.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											varietas benih yang memiliki potensi produksi rendah. 5. Kurangnya alokasi bantuan pemerintah pada sektor-sektor yang mempengaruhi peningkatan produksi seperti penyediaan Benih Varietas Unggul Baru (VUB) sesuai spesifikasi lokasi, pupuk dan alat pasca panen (mesin panen)		
							Jumlah Populasi Unggas (Ekor)	899.529	525.643	58%	Hal ini dikarenakan jenis unggas terbanyak yang ditargetkan adalah ayam ras pedaging yang dinamikanya sangat cepat yakni 60 hari mulai masa awal hingga panen dan ejak pertengahan tahun 2021	peningkatan populasi unggas	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											hingga saat ini peternak ayam pedaging di Kabupaten Luwu Timur telah menurun drastis karena pasarnya tersaingi oleh ayam pedaging yang masuk dari luar Luwu Timur sehingga yang dipelihara oleh peternak local banyak dikirim keluar dan banyak yang tidak melanjutkan usaha peternakannya.		
							Jumlah Produktivitas lada (Ton/ha)	0,96	0,65	67%	Adanya penurunan luas areal tanaman menghasilkan		
							Jumlah Produktivitas kakao (Ton/Ha)	0,78	0,78	100%	Jumlah Produksi mengalami kenaikan karena akumulasi masa panen raya yang telah diremajakan pada tahun 2017 sudah		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											berproduksi dan akumulasi masa panen raya 2 kali setahun Untuk kakao masa panen raya berada pada bulan Juni, Juli, November dan Januari.		
							Jumlah Produktivitas Jagung (Ton/Ha)	6,31	5,33	84%	1. Ketersediaan dan penggunaan Benih Varietas Unggul Baru (VUB) yang relatif masih rendah, sehingga beberapa areal tanam masih menggunakan varietas benih yang memiliki potensi produksi rendah. 2. Fenomena dampak perubahan iklim (DPI) tahun 2022 pada sebagian besar wilayah Kab. Luwu Timur dimana curah hujan yang sangat tinggi	1. Penyediaan bantuan benih Jagung Varietas Unggul Baru (VUB) sesuai spesifikasi lokasi melalui alokasi bantuan APBN dan Provinsi Sulsel 2. Penyediaan saprodi (pupuk) dan alsintan yang cukup dan tepat waktu.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											sehingga mempengaruhi perkembangan tanaman yang tidak optimal (produktivitas rendah) 3. Luas areal tanam jagung menurun disebabkan kurangnya daya dukung dari pemerintah (penyediaan benih) 4. Mayoritas petani hanya mau menanam benih varietas tertentu yang sesuai dengan spesifikasi lokasi, karena sangat mempengaruhi jumlah saprodi yang harus disediakan dan produksi yang dihasilkan		
					Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian		Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian (%)	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas dan Spesifik Lokasi	Presentase tersalurnya pupuk subsudi sesuai kuota dan tepat sasaran (%)	95	97,82	102%			
							Jumlah alsintan yang diadakan (unit)	34	34	100%			
						Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah kegiatan perkebunan yang didampingi (kegiatan)	5	5	100%			
							Jumlah kegiatan perternakan yang didampingi (kegiatan)	2	2	100%			
							Jumlah kegiatan TPH yang didampingi (kegiatan)	3	3	100%			
							Jumlah kegiatan PSP yang didampingi (kegiatan)	2	2	100%			
					Kegiatan pengelolaan sumber daya genetik (sdg) hewan,tumbuhan ,dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota		Presentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota (%)	100	97,5	97%	Benih Padi yang terjual hanya 58.0000 kg dari target 65.000 Ton		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah sarana dan prasarana pendukung IB yang diadakan (Jenis)	4	4	100%			
							Jumlah benih padi yang di produksi IKB (Kg)	65.000	58.500	90%	Belum melakukan penyesuaian target pada perubahan	perbaikan perhitungan penetapan target	
						Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah kolam perendaman merica yang dibangun (unit)	2	2	100%			
							Jumlah lahan perkebunan yang diidentifikasikan, direhab dan diremajakan (Ha)	80	80	100%			
					Kegiatan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain		Presentase penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota lain (%)	100	100	100%			
						Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah	Jumlah sapi betina yang di adakan (ekor)	195	195	100%			
							Jumlah kambing betina yang diadakan (ekor)	49	49	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Kabupaten/Kota Lain							
							Jumlah kambing jantan yang diadakan (ekor)	4	4	100%			
			Pengadaan sarana dan prasaran	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			Presentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian (Persen)	100	98,07	98%			
			Perbaikan jaringan irigasi		Kegiatan pengembangan prasarana pertanian		Presentase pembangunan prasarana pertanian (persen)	100	78,80	78%	Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan JIDES capaian 1107 m dari target 3200 m, Jalan usaha tani target 76.347 m dengan capaian 52605m		
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Panjang jides yang dibangun atau direhab (meter)	3.200	1.107	34%	Belum melakukan penyesuaian target pada anggaran perubahan	perbaikan perhitungan penetapan target	
							Jumlah jaringan irigasi yang dibangun (km)	-	-				
							Jumlah sumber-sumber air yang dibangun/direhab (unit)	-	-				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung yang dibangun (%)	-	-				
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah panjang jalan produksi yang dibangun/ditingkatkan (meter)	32.635	43.372	132%	Belum melakukan penyesuaian target pada anggaran perubahan	perbaikan perhitungan penetapan target	
							Jumlah panjang jalan usaha tani yang dibangun (meter)	76.347	52.605	68,9%	Belum melakukan penyesuaian target pada anggaran perubahan	perbaikan perhitungan penetapan target	
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah pintu air yang dibangun (%)	-	-				
				Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner			Persentase penurunan kejadian kasus penyakit hewan menular (%)	1,50	1,13	124%			
							Persentase pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner (%)	100	104	104%			
					Kegiatan penjaminan kesehatan hewan,penutupa		Presentase pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					n dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota								
						Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah hewan yang terlayani kesehatannya (ekor)	30.500	31.991	104%	Disesuaikan dengan jumlah hewan yang dilayani		
					Kegiatan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner		Presentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner (%)	95	100	105%			
						Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah capaian statistik peternakan (dok)	1	1	100%			
							Jumlah Ternak yang diasuransikan (ekor)	50	138	276%	terdapat peningkatan pendaftaran asuransi hewan ternak oleh peternak dikarenakan adanya wabah penyakit PMK	penyesuaian target di tahun berikutnya	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pengawasan dan sertifikasi benih	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			Presentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (%)	95	93	98%			
					Kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota		Presentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (%)	95	95	100%			
						Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase pengendalian tingkat serangan OPT perkebunan (%)	95	95	100%			
							Persentase pengendalian tingkat serangan OPT tanaman pangan (%)	95	95	100%			
			Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur	Program penyuluhan pertanian			Presentase Penyuluhan Pertanian(%)	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	58,26	12,44	21%	Jumlah penerima bantuan 336 kelompok dari target penerima 1573 kelompok tani		
					Pelaksanaan penyuluhan pertanian		Persentase penyuluhan pertanian yang dilaksanakan (%)	95	100	105%			
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah dokumen programa yang disusun (dokumen)	11	11	100%			
							Jumlah penyuluh yang mengikuti sosialisasi bimtek/diklat (orang)	200	200	100%			
							Jumlah rekomendasi teknis yang ditindak lanjuti (dok)	6	6	100%			
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah data base kepenyuluhan yang disusun (dokumen)	2	2	100%			
							Jumlah kelembagaan petani tingkat desa yang difasilitasi	126	126	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Perdagangan	Dinas Perdaganagan Koperasi UKM dan Perindustrian	- Peningkatan stabilisasi barang kebutuhan pokok dan penguatan jaringan distribusi; - Meningkatkan pangsa pasar regional dan internasional; - Pemenuhan barang dan jasa sesuai standar nasional dan internasional; - Penguatan sarana/ prasarana perdagangan dalam negeri dan ekspor; - Meningkatkan kemampuan pelaku usaha yang professional dan kompeten;	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan			Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/ direvitalisasi (%)	10	8,65	86%	pertumbuhan omzet pedagang diharapkan dapat meningkat sebesar 10% setalah dilaksanakan pembangunan/revitalsasi pasar, namun pembangunan sarana distribusi perdagangan yang dibangun tidak secara tuntas pada setiap sarana distribusi perdagangan, didasarkan pada ketersediaan anggaran, sehingga masih terdapat pedagang yang tidak tertampung dalam pembangunan/re	mengajukan perhonoan ke ekmterian peradganagan melalui propsal guna dukungan pembangunan sarana distribusi perdagangan	-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											vitalisasi pasar yang dibangun sehingga peningkatan omzet pedagang tidak tercapai berdasarkan target yang telah ditetapkan		
					Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan (pasar)	6	6	100%	-	-	-
						Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dibangunnya/ revitalisasi pasar beserta sarana dan prasarana (pasar)	6	6	100%	-	-	-
					Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase peningkatan kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan ('%)	70	100	142%	berdasarkan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan, diharapkan kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan meningkat sebesar 70%, namun pengelola pasar yang dibina mampu menerapkan	-	-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											pembinaan yang diperoleh pada pasar yang dikelola		
						Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina (Pengelola pasar)	5	5	100%	-	-	-
				Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting			Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	8	6,84	85%	target 8% merupakan standar nasional nilai maksimal stabilitas harga bahan pokok yang ditetapkan oleh Kementeian Perdagangan RI, yang dimana dengan nilai maksimal 8% menunjukkan stabilitas harga bahan pokok suatu daerah dikatakan stabil, dimana semakin rendah nilai stabilitas yang diperoleh, menunjukkan semakin stabilnya harga bahan pokok	melakukan operasi pasar serta pengawasan pendistribusian barang penting agar lebih tepat sasaran	-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											pada daerah tersebut		
					Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali (%)	44	48,17	109%	target 44% ditetapkan dengan melihat dari 39 harga kebutuhan bahan pokok yang diawasi terdapat minimal 18 bahan pokok yang terkendali yaitu beras, daging sapi, susu, jagung pipilan, tepung terigu, garam, mie instan, ketela,minyak goreng kemasan, pisang ambon, jeruk lokal:	-	-
						Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah jurnal harga yang terintegrasi ke dalam sistem informasi perdagangan (Jurnal)	260	249	95%	pendataan harga bahan pokok dilakukan berdasarkan hari kerja dari 260 hari kerja tahun anggaran 2022 yang didteapkan pada target, dimana pada realisasi tahun 2022 hanya	-	-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											terdapat 249 hari kerja., dimana sebagai contoh pada hari besar keagaman yang merupakan hari kerja tetapi tanggal merah sehingga informasi haraga bahan pokok tidak dilaporkan		
						Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga miskin sasaran dalam operasi pasar (RTM)	16800	16800	100%	-	-	-
					Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida (%)	100	99,90	99,9%	dari target yang ditetapkan sebesar 100%, diharapkan dalam pengawasannya, penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida tersalur 100%, namun pada pelaksanaanny hanya terealisasi 99,90% disebabkan ada		-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											penyaluran yang yang tersalurkan menyeberang bulan/tahun.		
						Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida yang diawasi (Laporan)	84	84	100%	-	-	-
				Program pengembangan ekspor			Persentase peningkatan nilai ekspor ('%)	15	36,14	240%	target 15% ditetapkan dari realiasai peningkatan ekspor tahun-tahun sebelumnya, namun pada tahun 2022 realiasai ekspor meningkat sebesar 36,14% yang disebabkan oleh kainkan harga nikel dunia	-	-
					Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang		Persentase produk yang memperoleh fasilitas promosi dagang ('%)	40	40 %	100%	-	-	-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
						Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang memperoleh fasilitasi pembinaan dan pengembangan usaha (Usaha)	225	226	100%	-	-	-
						Pameran Dagang Nasional	Jumlah produk ekspor unggulan yang diikutsertakan dalam pameran dagang nasional (Produk)	1	1	100%	-	-	-
						Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah produk ekspor unggulan dalam rangka misi dagang (Produk)	1	1	100%	-	-	-
						Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha yang mengetahui prosedur dan dokumen kegiatan ekspor/impor (pelaku usaha)	25	25	100%	-	-	-
				Program standardisasi dan perlindungan konsumen			Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTTP ('%)	5	2,33	46%	semakin rendah pengaduan yang diterima, menunjuukan kinerja pelayanan konsumen terkait UTTP baik		-
					Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diawasi ('%)	60	69,87	116%	dari jumlah alat UTTP yang di tera/tera ulang tahun 2022, diharapkan 60% dapat diawasi,	-	-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											namun pada pelaksanaannya terdapat 69,87% alat uttp yang diawasi		
						Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapnnya (UTTP) yang ditera/tera ulang (UTTP)	915	800	87%	pelaksanaan tera dan tera ulang yang dilakukan dipasar hanya dijadwalkan 1 kali per pasar		-
5	Perindustrian	Dinas Perdaganagan Koperasi UKM dan Perindustrian	- Meningkatkan kemampuan pelaku IKM yang professional dan kompeten; - Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan IKM (termasuk pemanfaatan IT); - Mengembangkan IKM dan kerajinan rakyat; - Meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha; ;- Peningkatan akses pembiayaan dan skema	Program perencanaan dan pembangunan industri			Jumlah peraturan Bupati (Perbub) kawasan industri yang ditetapkan (dokumen)	1	1	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			kerjasama;										
					Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen revisi siteplan dan amdal kawasan industri yang dievaluasi (dokumen)	1	1	100%			
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM pangan dan handycraft yang difasilitasi dan dibina (IKM)	20	26	130%			
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM dalam sentra yang dibina dan dikembangkan (IKM)	25	25	100%			
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM pangan yang mendapatkan binaan good manufacturing practice/GMP (IKM)	10	10	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Program pengelolaan sistem informasi industri nasional			Persentase pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi industri nasional yang terkelola sesuai standar (%)	7	7,04	107%			
					Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase usaha industri yang terkelola dalam sistem informasi industri nasional (SINAS) ('%)	50	50	100%			
						Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (siinas)	Jumlah data industri yang terintegrasi ke dalam sistem informasi industri nasional (SIINAS) (dokumen)	1	1	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Bidang Transmigrasi												
		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Peningkatan Kerjasama antar Daerah	Program perencanaan kawasan transmigrasi			Persentase penetapan kawasan transmigrasi (%)	100	100	100%			
			Peningkatan Kerjasama antar Daerah		Kegiatan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi		Luas kawasan transmigrasi yang dicanangkan (Ha)	184	184	100%			
			Peningkatan Kerjasama antar Daerah			Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang diidentifikasi (kawasan)	1	1	100%			
			Peningkatan Kerjasama antar Daerah			Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Penyediaan Lahan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Ha)	184	184	100%			
			Peningkatan Kerjasama antar Daerah	Program pembangunan kawasan transmigrasi			Jumlah luas wilayah transmigrasi yang dibangun (Ha)	184	184	100%			
			Peningkatan Kerjasama antar Daerah		Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah KK warga transmigran yang ditempatkan (KK)	92	92	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peningkatan Kerjasama antar Daerah			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mou yang direalisasikan (MOU)	15	15	100%			
			Peningkatan Kerjasama antar Daerah			Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Rumah Tangga Jamban Keluarga (RTJK) yang difasilitasi (unit)	92	92	100%			
			Peningkatan Kerjasama antar Daerah			Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Transmigrasi yang diseleksi (KK)	150	150	100%			
			Peningkatan Kerjasama antar Daerah			Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang mendapatkan Penyuluhan (orang)	32	32	100%			
			Peningkatan Kualitas Warga Transmigran	Program pengembangan kawasan transmigrasi			Persentase masyarakat transmigran yang dibina (%)	100	100	100%			
			Peningkatan Kualitas Warga Transmigran		Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap		Jumlah satuan pemukiman transmigran yang dikembangkan (kawasan)	1	1	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/kegiatan/subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10* 100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Kemandirian								
			Peningkatan Kualitas Warga Transmigran			Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Transmigran yang dibina Usaha Ekonominya (KK)	50	50	100%			
			Peningkatan Kualitas Warga Transmigran			Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Panjang Batas Lahan Transmigran yang Dibangun (meter)	1000	1000	100%			

3.2.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Unsur pendukung urusan pemerintahan yaitu unsur Sekretariat Daerah dan unsur Sekretariat DPRD.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Target RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 Tahun Pelaksanaan 2022, untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Kab. Luwu Timur Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah	Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	90,20	90%	Persentase Program yang tidak maksimal disebabkan ada beberapa kegiatan tidak memenuhi target	Akan melakukan evaluasi dan perbaikan agar realisasi bisa dimaksimalkan.	
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2	2	100%			
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2	2	100%			
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2	2	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	9	9	100%			
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik '%)	10	84,8	84,8%			
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	84	83	98%	Jumlah ASN yang dibayarkan sesuai dengan jumlah pegawai yang diamperakan		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian, Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Kegiatan yang diverifikasi (Kegiatan)	20	20	100%			
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	18	18	100%			
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	4	4	100%			
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	76,75	76 %	Persentase Kegiatan ini tidak maksimal disebabkan beberapa subkegiatan tidak memenuhi target	Sifatnya disediakan dan perencanaan kedepannya akan lebih dimaksimalkan	
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	12	12	100%			
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	6	5	83%	Subkegiatan ini merupakan kegiatan yang disiapkan untuk memfasilitasi ASN lingkup Sekretariat Daerah untuk mengikuti Sosialisasi	Sifatnya disediakan dan perencanaan kedepannya akan lebih dimaksimalkan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional								PerUndang-Undangan.		
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	21	20	95%	Subkegiatan ini merupakan kegiatan yang disiapkan untuk memfasilitasi ASN lingkup Sekretariat Daerah untuk mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi PerUndang-Undangan.	Sifatnya disediakan dan perencanaan kedepannya akan lebih dimaksimalkan	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	100	95.19	95%	Persentase kegiatan ini tidak maksima sebagai akibat adanya Peralatan Rumah Tangga yang diperuntukkan pada Rumah Jabatan Wakil Bupati yang tidak diproses karena Kekosongan Jabatan Wakil Bupati.	Akan disiapkan kembali jika jabatan Wakil Bupati sudah terisi.	
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	9	9	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional										
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	9	9	100%			
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (Unit)	11	10	90%	Peralatan Rumah Tangga yang tidak diproses pengadaannya adalah penyediaan Kompor Gas 1 mata dan 2 mata yang diperuntukkan untuk Rumah Jabatan Wakil Bupati disebabkan adanya kekosongan jabatan.	Akan disiapkan kembali jika jabatan Wakil Bupati sudah terisi.	
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	8	8	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			formal dan Fungsional										
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	9	9	100%			
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)	7330	7330	100%			
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	12000	10562	88%	Subkegiatan ini sifanya disediakan untuk memfasilitasi tamu-tamu Pemerintah Daerah sehingga realisasi sesuai dengan jumlah tamu yang diterima oleh Daerah.	Kegiatan ini sifatnya disediakan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Fungsional										
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	650	684	105%			
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Dokumen)	50	50	100%			
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100	92,18	92%	Persentase Kegiatan ini tidak maksimal disebabkan beberapaPengadaan Barang Milik Daerah tidak terlaksana.	Selanjutnya akan lebih memaksimalkan perencanaan pengadaan barang.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	4	3	75%	Kinerja Subkegiatan ini tidak maksimal disebabkan pengadaan Kendaraan operasional PKK harus Inden selama 3 (tiga) bulan sehingga belum bisa diproses pengadaannya pada Tahun 2022.	Telah dilakukan pemesanan sehingga Tahun Anggaran berikutnya pengadaan sudah bisa diproses.	
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	62	58	93%	Pengadaan Mebel yang tidak sempat diproses pengadaannya Lemari Penyimpan 2 unit untuk Mess Makassar, Pengadaan Meja makan 2 set di Ruangan Bupati disebabkan Anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan spesifikasi barang.	Melakukan survey harga pada beberapa tempat penyedia barang yang dimaksud.	
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	84	66	78%	Salah satu peralatan kantor yang tidak diproses pengadaannya adalah Printer untuk Bagian Perencanaan dan Keuangan yang terkendala pada nilai TKDN		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	2 Paket	2	100%			
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	88	88%			
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	4000	8672	216%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	420	420	100%			
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	45	42	93%	Kinerja tidak maksimal disebabkan adanya kekosongan tenaga Upah Jasa yakni tenaga lapangan 1 (satu) orang, tenaga administrasi 4 (empat) orang, Cleaning Service kantor Bupati 4 (empat) orang, Tenaga Sopir 2 (dua) orang dan tenaga alat studio 1 (satu) orang.	Kekosongan tenaga Upah Jasa sudah dilaporkan kepada Pimpinan sehingga menunggu petunjuk Pimpinan selanjutnya.	
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100	91,08	91%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Fungsional										
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	45	45	100%			
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	3	3	100%			
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mebel yang dipelihara (Unit)	126	126	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Pemeliharaan Meubel	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	173	169	97%	Sebagian Peralatan Kantor belum dilakukan pemeliharaan disebabkan karena beberapa peralatan kantor pada Kantor Bupati, Mess Pemda Makassar dan Mess Pemda Jakarta belum diakukan pemeliharaan karena masih dalam proses penyelesaian pengerjaan Rehab Gedung.	Pemeliharaan peralatan kantor akan dilakukan setelah Rehab gedung kantor dan Gedung Mess selesai.	
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	10	10	100%			
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase Laporan Administrasi Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (%)	100	54,17	54%	Kekosongan jabatan wakil Bupati mempengaruhi pencapaian realisasi kinerja		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional										
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah KDH dan WKDH yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan (Orang)	2	1	50%	Gaji Wakil Bupati tidak dibayarkan disebabkan jabatan Wakil Bupati masih kosong.	Biaya Gaji untuk Wakil Bupati sifatnya disediakan	
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapan KDH/WKDH yang diadakan (Stel)	16	8	50%	Pakaian Dinas untuk Wakil Bupati tidak diadakan disebabkan jabatan Wakil Bupati masih kosong.	Biaya penyediaan Pakaian Dinas untuk Wakil Bupati sifatnya disediakan	
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase medical check-up KDH dan WKDH yang terlaksana ('%)	100	0	0%	Biaya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan untuk Bupati, Wakil Bupati beserta istri dan 2 (dua) orang anak ini tidak digunakan	Biaya Jaminan Kesehatan ini sifatnya disediakan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			formal dan Fungsional										
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan (kegiatan)	4	4	100%			
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Rujab dan Mess (%)	100	54,03	54%			
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Pemenuhan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah (Jenis)	3	3	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Fungsional										
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pemenuhan kebutuhan rumah tangga wakil Kepala Daerah (Jenis)	4	1	25%	Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Bupati yakni Belanja Operasional Rumah Tangga dan Tenaga Upah Jasa Pramusaji tidak terpenuhi disebakan Jabatan Wakil Bupati masih kosong.	Biaya pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Bupati sifatnya disediakan	
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Pemenuhan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah dan Mess (jenis)	7	7	100%			
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan ungsional		Penataan Organisasi		Persentase OPD yang meningkat nilai sakip (%) .	31,7	82	82%	Terdapat OPD yang tidak mengalami peningkatan nilai sakip	Melakukan coaching penyusunan sakip	
							Persentase OPD yang menghasilkan Inovasi pelayanan publik (%)	50	40	80%	Terdapat OPD yang tidak melakukan inovasi pelayanan public sesuai yang ditargetkan	Mendorong OPD untuk melakukan inovasi pelayanan publik	
			Peningkatan			Pengelolaan	Jumlah Perangkat	39	47	120%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Kelembagaan dan Analisis Jabatan (OPD)	daerah yang dilakukan Penataan Kelembagaan (Perangkat Daerah)						
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (OPD)	Jumlah Sosialisasi Tata Laksana yang Difasilitasi (Kegiatan)	1	0	0%	Kegiatan Sosialisasi ini tidak dilaksanakan.	Kegiatan ini dialihkan ke kegiatan Monitoring dan Evaluasi Proses Bisnis	
							Jumlah OPD yang dibina dalam rangka menghasilkan inovasi pelayanan publik (Perangkat Daerah). Jumlah Sosialisasi Tata Laksana yang dilaksanakan (OPD)	10	4 0	40%	Dari sekian Perangkat Daerah yang diikutkan dalam Bimbingan Teknis terkait Inovasi Pelayanan Publik, hanya ada 4 Inovasi yang memenuhi persyaratan untuk diikutkan dalam kompetisi yakni dari Puskesmas Angkona, Puskesmas Nuha dan Puskesmas Mangkutana.	Akan dilakukan Coaching terkait Inovasi Peayanan Publik terhadap seluruh perangkat Daerah.	
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (OPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam rangka peningkatan Kinerja dan	39	39	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional				Reformasi Birokrasi (kegiatan)						
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Monitoring, Evaluasi dan Pengendaian Kualitas Pelayanan Pubik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana (Laporan)	2	2	100%			
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LAKIP pemerintah daerah yang disusun (dokumen)	1	1	100%			
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Jumlah Keprotokoleran, komunikasi dan pendokumentasian pimpinan yang difasilitasi	900	900	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional				(kegiatan)						
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah kegiatan kedinasan KDH/WKDH yang difasilitasi (kegiatan)	300	300	100%			
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi (kegiatan)	300	300	100%			
			Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah informasi kedinasan KDH/WKDH yang didokumentasikan/ dipublikasikan (kegiatan)	300	300	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional										
				Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat			Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100	100	100%			
					Administrasi Tata Pemerintahan		Jumlah Rekomendasi administrasi tata pemerintahan yang dihasilkan (laporan)	4	4	100%			
						Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang ditata administrasi pemerintahannya(kel/kec)	11	14	127%			
						Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Peta yang dihasilkan (peta)	30	34	113%			
						Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan otonomi daerah yang difasililitasi (laporan)	3	3	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Rekomendasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan (rekomendasi)	4	4	100%			
						Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan (kegiatan)	7	7	100%			
						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah kegiatan kesejahteraan sosial yang dibina dan dievaluasi (kegiatan)	2	2	100%			
						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah kegiatan kesejahteraan masyarakat yang dibina dan dievaluasi (kegiatan)	3	3	100%			
			Melaksanakan Pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam menyusun regulasi yang Implementatif di Daerah		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase koordinasi hukum yang dilaksanakan ('%)	85	98	115%			
			Melaksanakan Pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan (Perda/Perbup/S	400 Produk Hukum	461 Produk Hukum	115%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			menyusun regulasi yang Implementatif di Daerah				K)						
			Melaksanakan Pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam menyusun regulasi yang Implementatif di Daerah			Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang didampingi melalui bantuan hukum (Kasus)	2	0 Kasus	0%	Target 2 (dua) kasus merupakan target asumsi permasalahan hukum/perkara Pemerintah Daerah yang diselesaikan melalui jalur pengadilan (Litigasi). Namun pada tahun 2022, tidak ada perkara hukum yang diselesaikan sampai ke Pengadilan baik sebagai penggugat maupun tergugat. Sehingga sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan tidak tergambar capaian kinerja sub kegiatan ini.	Akan dilakukan perbaikan indikator kinerja atau merumuskan kembali defenisi operasional indikator, sehingga capaian kinerja sub kegiatan dapat diukur dengan segala aktivitas yang dilaksanakan melalui sub kegiatan. Hal ini dilakukan agar terjadi keselarasan antara jumlah dana yang dialokasikan dengan indikator kinerja.	
			Melaksanakan Pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam menyusun regulasi yang Implementatif di Daerah			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum yang dipublikasikan (Perda/Perbup/SK)	400 Produk Hukum	461 Produk Hukum	115%			
							Jumlah Desa Sadar Hukum (desa)	11	11	100%			
					Fasilitasi Kerjasama Daerah		Jumlah kerja sama daerah yang difasilitasi (MOU/PKS)	30	22	73%	Jumlah PKS yang dihasilkan pada kegiatan ini berdasarkan perjanjian Kerjasama	Perencanaan seanjutnya agar lebih cermat dalam menetapkan target kinerja kegiatan.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											yang dilaksanakan oleh OPD yang difasilitasi.		
						Fasilitasi Kerja Sama luar Negeri	Jumlah MOU Luar Negeri yang difasilitasi (MOU)	22	29	131%			
						Evaluasi Peaksanaan Kerjasama	Jumlah Kerja sama yang dievaluasi (MOU)	2	2	100%			
			Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan Monev terhadap kebijakan perekonomian daerah.	Program perekonomian dan pembangunan			Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan (Rekomendasi)	50	37,49	74%	Terdapat beberapa rekomendasi yang tidak realisasi yakni dari kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Kebijakan Sumber Daya Alam	Melakukan Koordinasi secara Intensif dengan Tim TPAKD Provins serta meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah yang terkait.	
			Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan Monev terhadap kebijakan perekonomian daerah.		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Jumlah rekomendasi kebijakan perekonomian yang dihasilkan (rekomendasi)	12	11	91%	Rekomendasi tentang Penyusunan Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah tidak terlaksana	Melakukan Koordinasi secara Intensif dengan Tim TPAKD Provinsi.	
			Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan Monev terhadap kebijakan perekonomian daerah.			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pegelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD yang dihasilkan (rekomendasi)	4	4	100%			
			Melaksanakan			Pengendalian	Jumlah	4	4	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			pengembangan, pengkajian dan Monev terhadap kebijakan perekonomian daerah.			dan Distribusi Perekonomian	rekomendasi kebijakan pengendalian dan distribusi perekonomian yang dihasilkan (rekomendasi)						
			Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan Monev terhadap kebijakan perekonomian daerah.			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah rekomendasi kebijakan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil yang dihasilkan (rekomendasi)	4	3	75%	Kurang maksimalnya kegiatan ini disebabkan karena harus melaksanakan koordinasi pada semua lini koordinasi atau lintas sektor.	Solusi yang diharapkan pada sub kegiatan ini adalah harus sering melakukan koordinasi lintas sektor	
			Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan Monev terhadap kebijakan perekonomian daerah.		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Jumlah rekomendasi pelaksanaan administrasi pembangunan yang dihasilkan (rekomendasi)	8	8	100%			
			Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan Monev terhadap kebijakan perekonomian daerah.			Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah rekomendasi Pelaksanaan Pengendalian dan evauasi pembangunan (Rekomendasi)	4	4	100%			
			Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan Monev terhadap kebijakan			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah rekomendasi pelaksanaan pembangunan fisik	4	4	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			perekonomian daerah.				(Rekomendasi)						
					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa ('%)	80%	111%	139%			
						Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket yang diproses oleh POKJA dan Pejabat Pengada (Paket)	800	1233	154%			
						Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Aplikasi Digital pendukung layanan pengadaan Barang dan Jasa yang dapat diakses oleh Perangkat Daerah, Pelaku Usaha, dan UMK (aplikasi)	7	7	100%			
						Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah OPD yang mendapatkan pembinaan pengadaan barang dan Jasa (OPD)	61 opd	61 opd	100%			
					Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Jumlah Rekomendasi kebijakan Sumber Daya Alam yang	8	2	25%	Dari target 8 Rekomendasi pada Kebiajakan Sumber Daya Alam yang tercapai hanya 2 (dua)	Adapun solusi yang diharapkan pada sub kegiatan ini masih pada tahap koordinasi pada	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							dihasilkan (Rekomendasi)				rekomendasi yang belum tercapai secara maksimal.	organisasi perangkat daerah yang terkait untuk tahun berikutnya kegiatan ini diharapkan dapat lebih dimaksimalkan.	
			Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan Monev terhadap kebijakan perekonomian daerah.			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah rekomendasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang dihasilkan (rekomendasi)	4	0	0%	Permasalahan pada kegiatan ini belum maksimal dikarenakan kegiatan ini harus lebih banyak koordinasi dengan OPD terkait	Adapun solusi yang diharapkan untuk tahun berikutnya diupayakan untuk kegiatan ini lebih maksimal.	
			Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan Monev terhadap kebijakan perekonomian daerah.			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah rekomendasi kebijakan pertambangan dan lingkungan yang dihasilkan (Rekomendasi)	4	2	50%	Permasalahan pada kegiatan ini belum maksimal dikarenakan kegiatan ini harus lebih banyak koordinasi dengan OPD terkait	Adapun solusi yang diharapkan pada sub kegiatan ini masih pada tahap koordinasi pada organisasi perangkat daerah yang terkait.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pemerintahan Umum	Sekretariat DPRD	Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang kegiatan DPRD yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kab.Luwu Timur. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD		Persentase pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (%)	54 Ranperda	31 Ranperda	57,4%	pada Kegiatan Pembentukan Peraturan ranperda tidak mencapai target dikarenakan Pada sub kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan dan Pembahasan Ranperda penentuan target pada anggaran pokok tinggi dan pada saat perubahan anggaran tidak melakukan pengurangan target	Akan melakukan Evaluasi kinerja internal terkait penentuan target	
						Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah kajian perundang-undangan yang diselenggarakan (ranperda)	27	8	29%	Target yang di tentukan 27 ranperda pada DPA namun pada pelaksanaanya berbeda, karena ranperda yang ditargetkan dalam SK 18 dan yang menyeberang ada 6 ranperda	Melakukan penyesuaian evaluasi terhadap Ranperda yang masih dalam tahap pembahasan.	
			Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang kegiatan DPRD yang dilandasi dengan komitmen dalam			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda yang dibahas (ranperda)	27	23	85%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			rangka mewujudkan visi dan misi Kab.Luwu Timur. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD										
					Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase pembahasan kebijakan anggaran (%)	100%	100%	100%			
			Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang kegiatan DPRD yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kab.Luwu Timur. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			Pembahasan KUA Dan PPAS	Jumlah Nota Kesepakatan Yang Disetujui Bersama (Nota Kesepakatan)	2	2	100%			
			Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang kegiatan DPRD yang dilandasi dengan komitmen dalam			Pembahasan Perubahan KUA Dan PPAS	Jumlah Nota Kesepakatan Yang Disetujui Bersama (Nota Kesepakatan)	2	2	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			rangka mewujudkan visi dan misi Kab.Luwu Timur. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD										
			Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang kegiatan DPRD yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kab.Luwu Timur. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			Pembahasan APBD	Jumlah Ranperda Yang disetujui (Dokumen)	1	1	100%			
			Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang kegiatan DPRD yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kab.Luwu Timur. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas			Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Ranperda Perubahan Yang disetujui (Dokumen)	1	1	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			dan Fungsi DPRD										
			Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang kegiatan DPRD yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kab.Luwu Timur. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD Yang Disetujui (Dokumen)	1	1	100%			
			Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang kegiatan DPRD yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kab.Luwu Timur. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan		Persentase pengawasan penyelengga raan Pemerintahan (%)	100	99,40%	99%			
			Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintah	4	4	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang kegiatan DPRD yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kab.Luwu Timur. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			Pemerintahan Dan Hukum	Bidang Pemerintahan Dan Hukum (Dokumen)						
			Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang kegiatan DPRD yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kab.Luwu Timur. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Infastruktur	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan Bidang Infastruktur (Dokumen)	4	4	100%			
			Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang kegiatan DPRD yang dilandasi dengan			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Dokumen)	4	4	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kab.Luwu Timur. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD										
			Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang kegiatan DPRD yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kab.Luwu Timur. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Rekomendasi LHP Yang Ditindaklanjuti (Rekomendasi)	3	7	233%			
			Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang kegiatan DPRD yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kab.Luwu Timur. Program Dukungan			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Dearah	Jumlah Rekomendasi Yang dihasilkan (Rekomendasi)	10	8	80%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD										
			Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang kegiatan DPRD yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kab.Luwu Timur. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	100%	100%			
			Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang kegiatan DPRD yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kab.Luwu Timur. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimtek yang Diikuti Oleh Pimpinan Dan Anggota DPRD (Kali)	3	3	100%			
			Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi			Penyediaan Kelompok pakar Dan Tim	Jumlah Tim Pakar Dan Tim Ahli Yang disediakan	3	3	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang kegiatan DPRD yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kab.Luwu Timur. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			Ahli	(Orang)						
			Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang kegiatan DPRD yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kab.Luwu Timur. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tim Ahli Fraksi (Orang)	6	6	100%			
			Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang kegiatan DPRD yang			Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Laporan Program Kerja DPRD (Dokumen)	1	1	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kab.Luwu Timur. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD										
			Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang kegiatan DPRD yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kab.Luwu Timur. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase Meningkatnya Peran Serta DPRD Dalam Menindaklanjuti Masalah Pembangunan Dan Terwujudnya Jaringan Aspirasi Masyarakat	100%	100%	100%			
			Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang kegiatan DPRD yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kab.Luwu Timur.			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Pokok-Pokok pikiran yang Terserap (Kali)	3	3	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD										
			Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang kegiatan DPRD yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kab.Luwu Timur. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			Pelaksanaan Reses	Jumlah reses Perseorangan Yang Dilaksanakan Pimpinan Dan Anggota DPRD (Kali)	3	3	100%			
			Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang kegiatan DPRD yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kab.Luwu Timur. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Pelaksanaan Dan Pengawasan Kode Etik DPRD		persentase pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun ('%)	100%	100%	100%			
			Menciptakan upaya-upaya peningkatan			Pengawasan Kode Etik	Jumlah Pengawasan	3	3	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang kegiatan DPRD yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kab.Luwu Timur. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			DPRD	Kode Etik DPRD (Kali)						
			Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang kegiatan DPRD yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kab.Luwu Timur. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Pembahasan Kerja Sama Daerah		Pembahasan kerjasama daerah (%)	100%	100%	100%			
			Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang			Penyusunan Bahan Komunikasi Dan Publikasi	Jumlah Kegiatan Yang Dipublikasikan (Jenis)	5	5	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			kegiatan DPRD yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kab.Luwu Timur. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD										
			Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang kegiatan DPRD yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kab.Luwu Timur. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase fasilitasi tugas DPRD (%)	100%	100%	100%			
			Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang kegiatan DPRD yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi			Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah koordinasi Dan Konsultasi Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Dilaksanakan (Kali)	80	80	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Kab.Luwu Timur. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD										
			Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang kegiatan DPRD yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kab.Luwu Timur. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Bamus Yang difasilitasi (kali)	12	12	100%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.	Program penunjang urusanpemerintahan daerah kabupaten /kota			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100%	95,00%	95%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (%)	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu (dok)	2	2	100%			
							Jumlah Tenaga Upah Jasa Administrasi Perencanaan Perangkat Daerah yang terbayar-ka (orang)	2	2	100%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (dok)	2	2	100%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu (dok)	2	2	100%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun (dok)	10	10	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.		Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik ('%)	100%	100%	100%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan (orang)	23	23	100%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Honorarium PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran yang terbayarkan (orang)	2	2	100%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.				Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	18	18	100%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk				Jumlah Tenaga Upah Jasa Administrasi Keuangan yang	3	3	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.				terbayarkan						
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang ditatausahakan (%)	100	100	100%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu (Dok)	4	4	100%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.				Jumlah Honorarium Bendahara Barang dan Pembantu Bendahara Barang yang terbayarkan (Orang)	2	2	100%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.				Jumlah Honorarium Pejabat Pengadaan yang terbayarkan (Orang)	1	1	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100%	93%	93%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang dimutahirkan (dok)	4	4	100%			
							Jumlah Tenaga Administrasi Kepegawaian yang terbayarkan (orang)	28	28	100%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	20	18	90%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah ('%)	100%	96,80%	96%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Jns)	9	9	100%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (unit)	5	5	100%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Jns)	2	2	100%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang disediakan (jns)	2	2	100%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang	2	2	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.				disediakan (jns)						
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Exp)	1835	1754	95%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi (orang)	700	700	100%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan (kali)	120	114	95%			
							Jumlah Upah Jasa Sopir Yang Terbayarkan (Orang)	6	6	100%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100	64,29	64%	Tingkat capaian dipengaruhi oleh target sub kegiatan pengadaan gedung kantor yant tidak tercapai		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			kapabel di bidangnya.										
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.			Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan (Unit)	3	3	100%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan(Unit)	5	3	60%	Terdapat Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah dan Belanja Modal Penataan Halaman Rujab Ketua DPRD DiBatalkan karena waktu yang tersedia untuk pekerjaan tersebut tidak memungkinkan	Akan melakukan evaluasi terhadap belanja modal, agar belanja modal dilaksanakan d tw 2 thn berikutnya	
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan (unit)	3	3	100%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan (unit)	3	0	0%	Pengadaan Lampu Jalan tidak terealisasi karena ada aturan yang bertentangan		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100%	100%	100%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang diadministrasikan (surat)	2400	2400	100%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Bulanan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik yang terbayarkan (Rek)	36	36	100%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pengamanan yang terbayarkan (orang)	1	1	100%			
							Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan yang terbayarkan (orang)	21	21	100%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat		Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Barang Milik Daerah penunjang urusan	100%	100%	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		pemerintaha n yang terpelihara dengan baik ('%)						
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan dipelihara yang dibayarkan Pajaknya (unit)	11	11	100%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (unit)	203	183	90%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Barang Milik Daerah yang diasuransikan (Unit)	6	6	100%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	3	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.			Lainnya	yang dipelihara/direhabilitas (unit)						
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	3	3	100%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD (%)	100	97	97%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Bulanan Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang terbayarkan (orang)	30	30	100%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya yang diadakan (orang)	30	30	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.			Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan (orang)	17	4	23%	Sulit menyesuaikan agenda kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD dengan jadwal Medical Check-Up.	Pada tahun 2023 akan dilakukan penentuan jadwal medical check-up lebih awal dari tahun 2020 sehingga dapat mengakomodir jadwal Mcu anggota DPRD dengan agenda kegiatannya.	
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.		Layanan Administrasi DPRD		persentase layanan administrasi DPRD ('%)	100%	85%	85%			
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat dan Konsultasi DPRD yang diselenggarakan (kali)	4	2	50%	Fasilitasi koordinasi dan Konsultasi DPRD terdapat rencian belanja penetapan Wakil Bupati tidak di Laksanakan oleh Partai Pengusung dan Beluam adanya PAW (disediakan)	pengurangan target yang disesuaikan dengan kebutuhan di tahun 2023	
			Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Bahan/ Perlengkapan Rumah Tangga yang di sediakan (unit)	3	3	100%			

3.2.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unsur penunjang urusan pemerintahan terdiri dari unsur Keuangan, unsur Perencanaan, unsur Penelitian dan Pengembangan dan unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Target RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 Tahun Pelaksanaan 2022, untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar dapat dilihat pada tabEL 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Kab. Luwu Timur Tahun 2022

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan													
1	Keuangan	BPKD/ BAPENDA	Peningkatan kapasitas sistem pengelolaan keuangan dengan sistem manajemen keuangan yang terintegrasi	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	96,70	100	103%			
			Mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan		Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran		Waktu penyusunan Rancangan APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (minggu)	10	11	90%			
			Menguatkan penerapan defisit dan pembiayaan dalam perencanaan			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun (dokumen)	1	2	200%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			anggaran keuangan daerah										
			4. Menguatkan penerapan defisit dan pembiayaan dalam perencanaan anggaran			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang tersusun (dokumen)	1	2	200%			
			5. Menguatkan sistem pengendalian dan pengawasan internal			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi	1	1	100%			
			6. Meningkatkan perencanaan keuangan daerah yang terukur dan transparan			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi (dokumen)	1	1	100%			
						Koodinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi (dokumen)	1	3	300%			
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen perda tentang APBD dan perbup tentang penjabaran APBD yang disusun (dokumen)	2	2	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah dokumen perda tentang APBD dan perbup tentang penjabaran APBD yang disusun (dokumen)	2	4	200%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Perubahan APBD							
						Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi serta Kebijakan BidangAnggaran yang tersusun (dokumen)	34	34	100%			
						Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (laporan)	4	4	100%			
						Pembinaan penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan perencanaan penganggaran daerah kabupaten/kota (laporan)	4	4	100%			
					Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	97%	100%	100%			
						Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan pengelolaan kas daerah yang telah	36	36	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							direkonsiliasi (laporan)						
						Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dan Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen laporan dana perimbangan dan dana transfer lainnya (dokumen)	12	12	100%			
						Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran OPD yang telah di rekonsiliasi (laporan)	10750	19772	183%			
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terkoordinasi dan terlaksana	97	97,19	100%			
						Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan akuntansi (laporan)	12	12	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (dokumen)	224	236	105%			
						Koordinasi Penyusunan Laporan Pertangggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semester yang disusun (laporan)	18	18	100%			
						Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang Dikonsolidasikan (dok)	18	18	100%			
						Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	Jumlah dokumen ranperda dan ranperbup yang tersusun (dok)	2	2	100%			
						Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban	Jumlah dokumen LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan	1	1	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						APBD	APBD yang disusun (dok)						
						Penyusunan Kebijakan dan Panduan Tekhnis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah regulasi kebijakan dan panduan teknis operasional penyelanggaran akuntansi pemerintah daerah yang disusun (dokumen)	2	2	100%			
						Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pembinaan akuntansi	2	2	100%			
					Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase besaran Bantuan Keuangan dan Dana Desa yang tersalurkan	95	98,31	103%			
						Analisis Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah belanja transfer ke desa (desa)	124	124	100%			
						pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah Dokumen dana darurat dan mendesak yang dikelola (dokumen)	3	1	33,3%			
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah			Perangkat Daerah Yang Pengelolaan BMD tertata dengan baik	58	59	102%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pengembangan kapasitas sistem pengelolaan keuangan dengan pemutakhiran sistem manajemen aset/barang milik daerah		Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Barang Milik daerah yang terkelola dengan baik	90	90	100%			
			Mendorong peningkatan kapasitas pengelola penatausahaan aset dan barang milik daerah			Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar harga (dok)	2	2	100%			
			Menguatkan sistem pengendalian dan pengawasan internal			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen perencanaan barang milik daerah (dok)	2	2	100%			
						Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD yang disusun(dok)	2	2	100%			
						Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen inventarisasi barang milik daerah yang disusun (dok)	2	2	100%			
						Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan berita acara serah terima BMD yang	2	2	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							dilakukan (laporan)						
						Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penilaian BMD yang disusun (dok)	2	2	100%			
						Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan BMD yang telah dilakukan pengawasan dan pengendalian (dok)	2	2	100%			
						Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen inventarisasi barang milik daerahJumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD yang optimal	2	2	100%			
						Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	1	1	100%			
						Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemeritah	1	2	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							kabupaten/kota						
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				95,30	90	94,4%			
			Pengembangan sistem operasional pelayanan OPD		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100	100	100%			
			Peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan OPD			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	2	100%			
			Optimalisasi sarana pelayanan			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2	100%			
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (dokumen)	10	10	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	100%	100%			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan (orang/bulan)	26	26	100%			
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Persentase penyelesaian dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Persen)	95	95	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (dokumen)	1	1	100%			
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	19	19	100%			
					Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	98	100	102%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (dokumen)	4	4	100%			
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95	67	70%	Tingkat capaian dipengaruhi oleh kinerja sub kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang tidak tercapai		
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian (persen)	95	95	100%			
						Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	125	125	100%			
						Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (orang)	68	58	85%			
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	95	98	103%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	5	5	100%			
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (unit)	1	2	200%			
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	18	18	100%			
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	3	3	100%			
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (exampler)	144	144	100%			
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (kotak/orang)	1210	1177	97%			
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	253	225	88%			
					Kegiatan Pengadaan		Persentase BMD-PD penunjang	97	100	103%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		yang terpenuhi						
						Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	18	17	94,4%			
						pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	16	16	100%			
						Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (paket)	1	1	100%			
						pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (unit)	24	28	117%			
					Kegiatan Peenyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100%			
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (dokumen)	6000	7600	126%			
						penyediaan jasa komunikasi, sumber	Jumlah rekening telepon, listrik	24	24	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						daya air dan listrik	dan air yang terbayarkan (rekening)						
						penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (orang)	3	3	100%			
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	95	95	100%			
						Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	10	8	80%			
						Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	66	61	80%			
						Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1	1	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Perencanaan	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah											
		Badan Perencanaan Penelitian & Pengembangan Daerah	Peningkatan kualitas produk perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	100	100%			
			Memantapkan sistem koordinasi perencanaan pembangunan daerah		Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase Dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (%)	100	100	100%			
			Pengembangan kualitas data dan informasi pembangunan daerah			Analisis Kondisi Daerah Permasalahan, dan Isu Strategi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah yang disusun (dokumen)	1	1	100%			
			Peningkatan kualitas evaluasi dan pengendalian kebijakan pembangunan daerah			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Jumlah dokumen hasil penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan	1	1	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Dokumen Kebijakan Lainnya	dokumen kebijakan lainnya (dokumen)						
						Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan konsultasi public (dokumen)	1	1	100%			
						Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD (dokumen)	1	1	100%			
						Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan musrenbang yang disusun (dokumen)	1	1	100%			
						Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen bahan koordinasi musrenbang kecamatan yang disusun (dokumen)	1	1	100%			
						Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Kepala Daerah (dokumen)	2	2	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan yang dianalisis (%)	95	95	100%			
						Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun (laporan)	1	1	100%			
						Pembinaan dan Pemanfaatn Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Persentase perangkat daerah yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah	100%	100%	100%			
						Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang disusun (dokumen)	1	1	100%			
					Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Peaporan Bidang Perencanaan Pembangunan		Persentase Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang	100%	100%	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Daerah		Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dihasilkan Tepat Waktu						
						Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan (laporan)	2	2	100%			
						Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah laporan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang disusun tepat waktu (laporan)	1	1	100%			
						Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah yang dihasilkan (laporan)	6	6	100%			
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam Renja	100	100	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100%			
							Persentase Perangkat Daerah Lini Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Menerapkan Anggaran Responsif Gender	100	100	100%			
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang disusun tepat waktu (laporan)	4	4	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (laporan)	6	6	100%			
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (laporan)	5	5	100%			
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang pembangunan manusia (laporan)	6	6	100%			
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan	3	3	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (laporan)						
					Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	100%	100%			
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian yang disusun (dokumen)	4	4	100%			
						Pelaksanaan Monitoring an Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pereknomian	4	4	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							yang disusun (dokumen)						
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (dokumen)	4	4	100%			
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang disusun (dokumen)	4	4	100%			
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (dokumen)	4	4	100%			
					Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang	100	100	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Infrastruktur dan Kewilayahan						
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun (dokumen)	4	4	100%			
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (dokumen)	4	4	100%			
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keilayahan yang disusun (dokumen)	4	4	100%			
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (dokumen)	4	4	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100	100	100%			
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, pengangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100	100	100%			
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (dokumen)	3	3	100%			
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2	100%			
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2	100%			
						Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2	100%			
					Kegiatan Administrasi Keuangan		persentase administrasi keuangan yang	100	100	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Perangkat Daerah		terselenggara dengan baik						
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (orang)	32	28	87,5%			
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (dokumen)	18	18	100%			
					Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang diadminstrasikan sesuai standar	100	100	100%			
						Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (dokumen)	4	4	100%			
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (laporan)	12	12	100%			
						Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	10	10	100%			
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah.	100	98,90	98,9%			
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	8	8	100%			
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	20	20	100%			
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (jenis)	3	3	100%			
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan	jumlah bahan bacaan dan	60	60	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	peraturan perundang-undangan yang disediakan (eks)						
						Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya (orang/dos)	605	597	98%			
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarkan (kali)	285	270	94%			
					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah yang terpenuhi	100	100	100%			
						Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang diadakan (unit)	5	5	100%			
						Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan (unit)	15	15	100%			
						Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1	1	100%			
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang		Persentase rata-rata capaian kinerja	100	98,78	98,7%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.						
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (surat)	850	819	96,3%			
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik , air dan tv kabel yang terbayarkan (rekening)	36	36	100%			
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga upah jasa kebersihan dan sekuriti yang terbayarkan (orang)	3	3	100%			
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase BMD penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100	96	96%			
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas oprasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	9	9	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	40	38	95%			
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bagunan lainnya dan dipelihara / Rehabilitasi (unit)	1	1	100%			
3	penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah			Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	15,38	38,10	247%			
							Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100	100	100%			
					Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			100	100	100%			
						Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah dokumen Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan	1	1	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Peraturan yang di hasilkan (dokumen)						
					Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang termanfaatkan (dokumen)	100	100	100%			
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial yang di hasilkan	1	1	100%			
					Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang termanfaatkan (dokumen)	100	100	100%			
						Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Kopersi usaha kecil menegah yang di hasilkan (dokumen)	1	1	100%			
						Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang	1	1	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							lingkungan hidup yang dihasilkan (dokumen)						
					Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai dengan aturan (Dokumen)	100	100	100%			
						Uji Coba dan Penerapab Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah inovasi rancang bangun yang direplikasi / di invensi (inovasi)	1	1	100%			
						Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Jumlah hasil kelitbangan yang disosialisasikan	2	2	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Kepegawaian	BKPSDM	Pemberian Penghargaan terhadap ASN yang telah menunjukkan kesetiaan, Pengabdian, Kecakapan, Kejujuran, Kedisiplinan dan Prestasi Kerja dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya	Program kepegawaian daerah			Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat (%)	96	92,14	95%	masih terdapat beberapa pegawai yang tidak akurat dan terupdate data kepegawaiannya	Melakukan Sosialisasi dan Rakor Kepegawaian untuk meningkatkan kesadaran pegawai dalam rangka mengupdate data-data kepegawaiannya pada Aplikasi Simpeg	
					Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase ASN yang difasiitasi pengadaan, pemberhentian dan data kepegawaiannya	95	99,99	105%	Terdapat sub kegiatan yang realisasinya melebihi target yaitu sub kegiatan Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian		
						penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabtan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN yang disusun (formasi)	4820	4820	100%			
						Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Calon CPNS dan PPPK yang akan diterima (Orang)	1042	875	83%	Penerimaan PPPK dilakukan dalam 3 tahap. Namun karena adanya kebijakan	Berupaya untuk terus melakukaan koordinasi yang berkesinambungan	

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											dari Pusat maka pelaksanaan Tahap 3 dialihkan ke tahun berikutnya.	dengan Pihak BKN terkait kebijakan-kebijakannya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penetapan target.	
						Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah pelayanan pemberhentian ASN tepat waktu (Orang)	75	87	116%			
						pengelolaan sistem informasi kepegawaian	jumlah sistem informasi kepegawian yang dikelola (aplikasi)	6	6	100%			
					Mutasi dan Promosi ASN		Persentase ASN yang di mutasi dan promosi	95	94	98%	1. terdapat beberapa usulan kenaikan pangkat yang tidak mendapat persetujuan teknis BKN 2. Masih terdapat beberapa jabatan yang lowong	1. Akan dilakukan koordinasi dan sosialisasi kepada Kasubag Kepegawaian masing-masing OPD terkait pengusulan kenaikan pangkat melalui SIMPEG; 2. akan dilakukan pengisian jabatan lowong.	
						Pengelolaan Mutasi ASN	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (persen)	34	32,91	96%	Rendahnya realisasi disebabkan karena adanya moratorium jabatan fungsional berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Akan dilakukan pengangkatan jabatan fungsional bagi yang memenuhi persyaratan	

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Republik Indonesia (Menpan RB RI) Nomor B/639/M.SM.02.00/ 2021 tanggal 3 Nopember 2021 hal Moratorium pengusulan jabatan fungsional baru. Disamping itu beberapa Pejabat Fungsional telah mendapat promosi menjadi pejabat struktural Eselon III.		
						Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	persentase SK kenaikan pangkat ASN yang terbit	98	93,50	95%	Terdapat beberapa usulan yang tidak mendapat persetujuan teknis BKN karena tidak memenuhi syarat, dan juga ada yang terlambat memasukkan dokumen persyaratan.	Usulan kenaikan pangkat akan dilakukan melalui aplikasi SIASN yang diusulkan melalui SIMPEG masing-masing pegawai	
						Pengelolaan promosi ASN	persentase jumlah pejabat ASN daerah	95,0	94,54	99%	Terdapat pejabat yang meninggal dunia, Pensiun BUP dan mutasi keluar Daerah	Direncanakan pada tahun 2023 diadakan seleksi JPT Pratama dan Jobfit untuk pengisian jabatan Eselon II yang lowong	
					Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	95	89,51	94%	1. terdapat 1 orang Dokter yang mengusul Tubel namun tidak lulus	1. Menunggu hasil tes seleksi selanjutnya 2. telah dilakukan	

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											seleksi 2. terdapat beberapa OPD belum menyampaikan update data IKKnya ke BKPSDM	permintaan data IKK kepada seluruh OPD	
						Pengelolaan Assessment Center	persentase jumlah pejabat struktural yang mengikuti assesment	15	15,08	100%	target adalah 15% (60 orang) dari 400 orang pejabat struktural, namun terdapat 1 orang pejabat yang meninggal dunia dan 1 orang mutasi keluar daerah, sehingga realisasi melebihi target.	Akan dilakukan penyesuaian target untuk tahun berikutnya dan disesuaikan dengan jumlah pejabat struktural yang terdapat di Kabupaten Luwu Timur	
						pengelolan pendidkan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan lanjutan (orang)	34	33	97%	1 orang Dokter yang mengusulkan Tubel tidak lulus seleksi	Menunggu hasil seleksi tahap selanjutnya	
						Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	65	46,11	70,9%	Masih terdapat OPD yang belum menyampaikan update data IKKnya ke BKPSDM	Telah dilakukan permintaan data IKK kepada seluruh OPD se Kab. Luwu Timur.	
					Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase ASN yang mendapat penilaian dan evaluasi kinerja	90	100,00	111%			
						Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	persentase jumlah pegawai yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	100%	100%	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	persentase jumlah piagam penghargaan pegawai yang terbit	100	94,46	94,4%	Terdapat beberapa usulan yang tidak mendapat persetujuan Teknis dari BKN karena kelengkapan dokumen yang belum dipenuhi oleh pegawai yang mengusulkan	Untuk pengusulan Satya Lencana berikutnya akan diupayakan untuk memaksimalkan verifikasi kelengkapan dokumen usulan Satya Lencana	
						Pembinaan Disiplin ASN	Persentase jumlah kasus yang tertangani (persen)	95%	94,67%	99,6%	terdapat 4 orang yang belum dapat dilakukan pembinaan karena yang bersangkutan sedang berada di luar wilayah Luwu Timur pada saat dilakukan kegiatan pembinaan disiplin.	Akan tetap dilakukan pembinaan disiplin kepada yang bersangkutan	
						pelayanan proses izin perceraian pegawai	persentase jumlah permohonan proses izin perceraian pegawai yang terlayani	50	51,85	103%	Terproses sebanyak 14 orang yang layak untuk diproses perceraiannya karena telah memenuhi syarat	Diupayakan untuk melakukan mediasi antara pihak penggugat dan tergugat.	
						Evaluasi disiplin ASN	Persentase pelanggaran disipln ASN yang terselesaikan	80	90,67	113%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Pendidikan dan Pelatihan												
		BPKSDM	Pengembangan Kompetensi ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan bersertifikasi berdasarkan Prioritas dan Hasil Analisis Kebutuhan Diklat	Program pengembangan sumber daya manusia			Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun (%)	20	21	109%			
					pengelolaan dana darurat dan mendesak	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Jumlah ASN yang lulus pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis melalui BKPSDM.	100	100	100%			
			Pengembangan Kompetensi ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan bersertifikasi didasarkan Prioritas dan Hasil Analisis Kebutuhan Diklat Manajerial dan Fungsional.			Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Jumlah ASN yang mengikut diklat kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan yang diselengarakan melalui BKPSDM (Orang)	174	174	100%			
						Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Diklat kompetensi umum, inti, dan pilihan yang dilaksanakan oleh BKPSDM (Jenis)	4	4	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum							
					Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase ASN yang tersertifikasi, dan dikembangkan Kompetensi, Manajerial dan Fungsional	95	20,13	21%	Realiasi kegiatan ini rendah dikarenakan masih terdapat beberapa OPD yang belum menyampaikan data sertifikat kompetensinya ke BKPSDM	Akan dilakukan persuratan kembali kepada OPD terkait permintaan data kepemilikan sertifikat kompetensi yang dimiliki pegawai yang ada pada OPD.	
						Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta jabatan Fungsional	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang dilaksanakan melalui BKPSDM Kab. Luwu Timur	3	3	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (persen)	75	70,85	94,4%	Terdapat penambahan jumlah pejabat struktural dari 378 pejabat menjadi 398 pejabat dikarenakan pada akhir bulan desember diselenggarakan pelantikan pejabat eselon III dan IV	Diupayakan untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran pelaksanaan Diklat	
6	Kepegawaian	BKPSDM	Penerapan Proses Kegiatan dan Program terencana dari tahap proses awal penyusunan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi sesuai dnegan peraturan yang berlaku	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	96	95,90	99%			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, pengangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100	100	100%			
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (Dokumen)	7	7	100%			
						Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat	2	2	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Waktu (Dokumen)						
						Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu (Dokumen)	2	2	100%			
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat Waktu (Dokumen)	10	10	100%			
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	95	96,43	101%			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan (Orang)	28	26	92%			
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (Dokumen)	13	13	100%			
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat		Persentase Laporan Barang Milik Daerah pada	100	100	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Daerah		Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan						
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	4	4	100%			
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang diadministrasikan	100	92,31	92%	terdapat sub kegiatan yang realiasinya masih rendah		
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahiran	4	4	100%			
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang lulus Diklat berdasarkan TUSI (orang)	9	9	100%			
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	13	10	76%	Untuk anggaran Bimtek Pada APBD Perubahan sifatnya disediakan	untuk tahun anggaran selanjutnya akan dilakukan perencanaan anggaran yang lebih efisien	

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							(Orang)						
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	95	100	105%			
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Jenis)	7	7	100%			
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Jenis)	19	19	100%			
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Jenis)	21	21	100%			
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (Jenis)	3	3	100%			
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Examplar)	48	48	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	1041	1041	100%			
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (Kali)	341	341	100%			
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (dokumen)	1	1	100%			
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100	100	100%			
						Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang diadakan (unit)	18	18	100%			
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	31	31	100%			
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100	90,96	90%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	2000	1902	95%			
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	36	28	77%	Rekening telepon yang terbayarkan hanya 4 rekening karena belum dipergunakan dengan maksimal	Akan dilakukan peninjauan kembali kepada pihak penyedia jasa komunikasi (Telkom)	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (orang)	8	8	100%			
					,-		Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100	100	100%			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	4	4	100%			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(10/9 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	4	4	100%			
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	45	45	100%			
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi (Unit)	1	1	100%			

3.2.6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

Unsur pengawasa urusan pemerintahan terdiri dari unsur Pengawsan. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Target RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 Tahun Pelaksanaan 2022, untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.7
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Kab. Luwu Timur Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan													
	Penunjang	Inspektorat	Meningkatkan efektifitas sistem pengawasan di tingkat SKPD dan desa	Penyelenggaraan Pengawasan			Presentase pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT	95	72,99	76,8%	Beberapa pengawasan tidak berjalan sesuai dengan perencanaan pada PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) hal tersebut disebabkan karena : - Pemeriksaan yang jadwalnya bergeser - Pemeriksaan yang batal di laksanakan - Pemeriksaan yang sifatnya disediakan	Pemeriksaan diupayakan dilaksanakan sesuai jadwal sehingga semua program pemeriksaan yang dijadwalkan pada PKPT dapat dilaksanakan	
						Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah obrik pengawasan kinerja (OPD)	40	40	100%			
			Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggataan			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah obrik pengawasan keuangan (Opname kas/Obrik)	68	68	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan asset daerah dan desa serta kepatuhan terhadap perarturan perundang-undangan										
			Menjadi mitra SKPD, pemerintah desa, provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka asistensi, konsultasi dan reviu			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah reviu laporan kinerja yang dilaksanakan (kali)	3	3	100%			
			Menjadi mitra SKPD, pemerintah desa, provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka asistensi, konsultasi dan reviu			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah reviu laporan keuangan yang dilaksanakan (kali)	6	14	233%			
			Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggataan pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan asset daerah dan			Pengawasan Desa	Jumlah Pengawasan desa yang dilaksanakan (desa)	124	40	32%	Pengawasan desa yang rencananya akan dilaksanakan di triwulan II, baru dapat dilaksanakan di triwulan III dan IV, karena desa belum selesai melakukan penginputan	- Melakukan koordinasi dengan stakehoders terkait agar menginstruksikan kepada desa untuk melakukan penginputan pada aplikasi	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			desa serta kepatuhan terhadap perarturan perundang-undangan								realisasi dana desa pada aplikasi siskeudes, sehingga pemeriksaan difokuskan hanya pada desa yang tingkat resikonya tinggi berdasarkan pembobotan pada aplikasi siswaskeudes	siswaskeudes sesuai jadwal yang telah ditentukan agar pemeriksaan desa dapat berjalan sesuai perencanaan. - Menyiapkan anggaran untuk melakukan monev dana desa (BKK) per triwulan - Melakukan kerjasama dengan BPKP terkait pemeriksaan desa	
				Meningkatkan efektifitas sistem pengawasan di tingkat SKPD dan desa		Kerjasama Pengawasan Internal	Presentase obrik pengawasan yang tersangkut kasus korupsi	3%	16,04%	-434%	Diperkirakan hanya ada 6 obrik yang tersangkut kasus korupsi, namun pada tahun 2022 terdapat 12 obrik yang tersangkut kasus korupsi	Melakukan pembinaan kepada obrik terkait pendidikan anti korupsi	
			Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggataan pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan asset daerah dan			Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan APIP	Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP internal dan eksternal	88,00	91,76	100%			
							Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	95,00	86,90	91%	Dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK RI, terdapat 4 rekomendasi yang	Mendorong kepada OPD untuk mempercepat tindak lanjut atas	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			desa serta kepatuhan terhadap perarturan perundang-undangan								sudah tidak mungkin untuk ditindak lanjuti sesuai rekomendasi BPK RI	rekomendasi BPK RI dan mngupayakan penghapusan tekomendasi yang sudah tidak mungkin unyul si tindak lanjuti	
			Meningkatkan pengawasan intern SKPD terhadap pelaksanaan perencanaan, pengadaan B/J, belanja hibah, belanja bansos dan bantuan lainnya		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Presentase Kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi	95	100	105%	Target kinerja tidak dapat di tetapkan 100%, karena pada saat melakukan pemeriksaan khusus, terdapat kasus yang sulit untuk diselesaikan sampai terbit rekomendasi contohnya pemeriksaan khusus terkait perceraian, dimana salah satu pasangan yang akan percerai tidak dapat dihubungi, atau menolak untuk di periksa		
			Meningkatkan pengawasan intern SKPD terhadap pelaksanaan perencanaan, pengadaan B/J, belanja hibah, belanja bansos dan bantuan lainnya			Pengawasan dengan tujuan Tertentu	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu	61	53	86%	Sifatnya disediakan untuk pemeriksaan kasus dengan tujuan tertentu, contohnya perceraian PNS		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Menjadi mitra SKPD, pemerintah desa, provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka asistensi, konsultasi dan reviu	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi			Presentase obrik pemeriksaan yang dibina	95	100	100%			
			Menjadi mitra SKPD, pemerintah desa, provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka asistensi, konsultasi dan reviu		Pendampingan dan Asistensi		presentase obrik binaan yang didampingi	95	100	105%	Kegiatan ini targetnya tidak dapat di tetapkan 100% karena pendampingan yang dilakukan sifatnya disediakan, dan menunggu permohonan dari OPD binaan untuk di dampingi		
			Menjadi mitra SKPD, pemerintah desa, provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka asistensi, konsultasi dan reviu			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan (kali)	121	91	75%	Sebagian besar OPD tidak mengajukan permintaan pendampingan PHO kepada Inspektorat.	Menyarankan kepada OPD agar melibatkan Inspektorat dalam proses PHO.	
			Menjadi mitra SKPD, pemerintah desa, provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka asistensi, konsultasi dan reviu			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah pendampingan, asistensi verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi yang dilakukan (OPD)	39	39	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Menjadi mitra SKPD, pemerintah desa, provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka asistensi, konsultasi dan reviu			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah obrik pencegahan dan pemberantasan korupsi (OPD/Obrik)	10	10	100%			
			Meningkatkan dan mengefektifkan sistem pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota			Presentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100	100	100%			
			Meningkatkan dan mengefektifkan sistem pelayanan administrasi perkantoran		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		Presentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi yang disusun tepat waktu	100	100	100%			
			Meningkatkan dan mengefektifkan sistem pelayanan administrasi perkantoran			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (dokumen)	4	4	100%			
			Meningkatkan dan mengefektifkan sistem pelayanan administrasi perkantoran			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2	100%			
			Meningkatkan dan mengefektifkan sistem pelayanan administrasi			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			perkantoran										
			Meningkatkan dan mengefektifkan sistem pelayanan administrasi perkantoran			Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	10	10	100%			
			Meningkatkan dan mengefektifkan sistem pelayanan administrasi perkantoran		Administrasi Keuangan Perangkat daerah		Presentase administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100	100	100%			
			Meningkatkan dan mengefektifkan sistem pelayanan administrasi perkantoran			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya (orang)	45	45	100%			
			Meningkatkan dan mengefektifkan sistem pelayanan administrasi perkantoran			Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	17	17	100%			
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur pengawasan		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah		Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100	100%			
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur pengawasan			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Presentase kelengkapan data administrasi kepegawaian	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur pengawasan			Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	53	49	92%			
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur pengawasan			Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	41	37	90%			
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur pengawasan			Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan perundang-undangan (orang)	10	9	90%			
			Meningkatkan dan mengefektifkan sistem pelayanan administrasi perkantoran		Administrasi Umum Perangkat daerah		Presentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	100	95	95,97%			
			Meningkatkan dan mengefektifkan sistem pelayanan administrasi perkantoran			Penyediaan Komponen Instalasi Lsitrik/ Penerangan Bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (unit)	13	13	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan			Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (unit)	2	2	100%			
			Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia (jenis)	16	16	100%			
			Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (lembar)	15.123	13.400	88%			
			Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (eks)	60	60	100%			
			Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya (orang)	475	448	94%			
			Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan			Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti (kali)	90	84	93%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	100	50	50%			
			Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (unit)	2	1	50%	Pengadaan kendaraan dinas roda dua dibatalkan oleh rekanan	Pengadaan kendaraan dianggarkan di awal tahun	
			Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100	96	96%			
			Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan			Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan (surat)	13.000	1.143	87%			
			Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telpon, listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	24	24	100%			
			Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan (orang)	50	5	100%			
			Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (9/8*100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	8	8	100%			
			Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	44	31	70%	Ada beberapa laptop yang batal dilakukan perbaikan disebabkan tidak tersedianya sparepart dan harus di pesan di makassar		
			Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan			Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1	1	100%			

3.2.7 UNSUR KEWILAYAHAN

Unsur kewilayahan terdiri dari seluruh kecamatan yang ada dikabupaten Luwu Timur yang berjumlah sebelas (11) Kecamatan. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Target RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 Tahun Pelaksanaan 2022, untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut ini :

Tabel 3.8
Unsur Kewilayahan
Kab. Luwu Timur Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Unsur Kewilayahan													
1	Kecamatan	Tomoni Timur	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pelayanan Publik (%)	100	0	0%	Penyelenggaraan perizinan tidak lagi menjadi kewenangan kecamatan (menunggu peraturan baru terkait perizinan) dan untuk sementara pelaksanaan perizinan diambil alih langsung oleh kabupaten.		
			Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan (%)	100	0	0%	Tidak terlaksananya kegiatan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan mempengaruhi pencapaian kinerja		
					- pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan		Jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan(%)	100	0	0%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				Persentase capaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan(%)	100	100	100%			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dikoordinasikan(%)	100	175	175%			
					- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Rasio persentase keterwakilan perempuan dan dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan (%)	100	100	100%			
					- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Persentase PKK desa/kelurahan yang dibina(%)	85	85	100%			
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan Ketertiban (%)	100	100	100%			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Persentase Penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							ketentuan perundangan yang berlaku (%)						
					Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (kasus)	14	97	692%			
					Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (kali)	12	11	91,6%			
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada (%)	100	100	100%			
					- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah koordinasi/ sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan(kali)	2	10	500%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan (%)	100	100	100%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan Yang Dilaksanakan (%)	100	95	95%			
					- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti (%)	100	95	95%			
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman Dan Ketertiban (%)	100	100	100%			
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			Persentase Penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang beraku(%)	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					-Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Cakupan desa yang terpasilitasi rancangan perdes APBDesnya (desa)	24	22	91,6%			
					- Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kawasan Pedesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya (kali)	8	8	100%			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan (%)	100	98,26	98,2%			
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dibuat tepat waktu (%)	100	91,6	91,6%			
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu (dok)	2	2	100%			
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu (dok)	2	2	100%			
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu (dok)	2	2	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (dok)	10	10	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan (%)	100	99,17	99,1%			
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan		Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu (orang)	16	15	93,7%			
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan (orang)	18	18	100%			
				Admnistrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			Persentase laporan barang Milik daerah pada perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan (%)	100	98,6	98,6%			
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	4	4	100%			
				Administrasi Pendapatan			persentase realisasi	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			pendapatan daerah/kewenangan Perangkat daerah (%)						
					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi yang disusun(dokumen)	100	100	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			persentase data dan informasi pegawa perangkat daerah yang diadministrasikan (%)	100	92,85	92,85			
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (laporan)	12	12	100%			
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-Perundang undangan		Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan (orang)	4	4	100%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (%)	100	99	99%			
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	15	15	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							(unit)						
					Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (jenis)	3	3	100%			
					Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan(lbr)	2700	2700	100%			
					Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang disediakan(eks)	48	46	96%			
					Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya(ktk)	2100	2100	100%			
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang iselenggarakan (kali)	472	472	100%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan (%)	100	100	100%			
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah peralan/ mesin lainnya yang diadakan (unit)	1	1	100%			
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau	1	1	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					atau Bangunan Lainnya		bangunan lainnya yang diadakan (unit)						
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		jumlah kendaraan dinas yang diadakan (unit)	1	1	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi (%)	100	94,77	94,7%			
					Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah Surat masuk dan Keluar yang diadministrasikan (lbr)	900	900	100%			
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrikt		Jumlah rekening telepon/internet, listrik dan air yang terbayarkan (rek)	36	36	100%			
					Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	2	2	100%			
					Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah tenaga jasa pelayanan yang terbayarkan (orang)	9	9	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah			persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara (%)	100	94,46	94,4%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		jumlah kendaraan dinas operasional atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	4	1	25%			
					Pemeiharaan peralatan dan mesin lainnya		jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (unit)	9	8	88,8%			
					Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	5	5	100%			
2	Kecamatan	Tomoni	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pelayanan Publik (%)	100	0	0%	Penyelenggaraan perizinantidak lagi menjadi kewenangan kecamatan (menunggu peraturan baru terkait perizinan) dan untuk sementara pelaksanaan perizinan diambil alih langsung oleh kabupaten.		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan (%)	100	0	0%	Tidak terlaksananya sub kegiatan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan memberikan dampak pada pencapaian		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											kinerja		
					- pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan	150	0	0%	Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan dengan target 150 (Seratus lima puluh) lembar. Realisasi s/d TW 4 yakni : 0 lembar. Penyelenggaraan perizinantidak lagi menjadi kewenangan kecamatan (menunggu peraturan baru terkait perizinan) dan untuk sementara pelaksanaan perizinan diambil alih langsung oleh kabupaten.		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				Persentase capaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan(%)	100	100	99,5%			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dikoordinasikan(%)	100	96,05	96%			
					- Peningkatan Partisipasi		Rasio persentase keterwakilan	100	93	93%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		perempuan dan dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan(%)						
					- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Persentase PKK desa/kelurahan yang dibina(%)	13	13	100%			
					- Pembangunan Sarana dan Pra sarana		Jumlah sarana dan prasarana yang dilaksanakan	100	100	100%			
					Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		Jumlah Kegiatan yang Memberdayakan masyarakat (keg)	1	1	100%			
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan Ketertiban(%)	100	67,78	67,7%	Realisasi indicator kinerja kegiatan yang tidak mencapai target memberikan dampak pada pencapaian kinerja program secara keseluruhan	Melalukan perhitungan target indikator yang cermat sesuai dengan peletakan anggaran kas dan melakukan penyesuaian terhadap target pada anggaran perubahan	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Persentase Penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku(%)	100	64,17	64%	Realisasi indicator kinerja sub kegiatan yang tidak mencapai target memberikan dampak pada pencapaian kinerja kegiatan secara keseluruhan		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					- Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Persentase upaya penyelesaian kasus penyelenggaraan kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persoalan sosial yang difasilitasi(%)	100	100	100%			
					- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan (rapat)	12	7	58,3%	Penyelenggaran rapat koordinasi dipadatkan	Direalisasikan sesuai kebutuhan rapat	
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada	100	75	75%	Penyelenggaran rapat koordinasi dipadatkan	Direalisasikan sesuai kebutuhan rapat	
					- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah koordinasi/sinergitas dengan polri dan/atau perangkat daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	12	9	75%	Penyelenggaran rapat koordinasi dipadatkan	Direalisasikan sesuai kebutuhan rapat	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan	100	100	100%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan Yang Dilaksanakan	100	100	100%			
					- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti	100	100	100%			
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman Dan Ketertiban	100	73,53	73,5%	Tidak tercapainya indicator kinerja pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah mempengaruhi pencapaian kinerja program		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah			Persentase Penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan	100	73,53	73,5%	Tidak tercapainya indicator kinerja pada sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Daerah			perundangan yang beraku				Ketertiban Umum dan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya mempengaruhi pencapaian kinerja program		
					-Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Cakupan desa yang terpasilitasi rancangan perdes APBDesnya (desa)	36	36	100%			
					- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100%			
					- Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi dan pelaporan tersusun (laporan)	13	0	0%	Tidak terselenggaranya pelaksanaan monev desa	Lebih mengoptimalkan konsultasi	
					- Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kawasan Pedesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya (kawasan)	13	12	92,3%			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				Persentase Penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standard (%)	100	109	109%			
				Perencanaan penganggaran dan evaluasi			Persentase penyusunan dokumen	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				kinerja perangkat daerah			perencanaan , Pengenggaran dan evaluasi yang tepat waktu (%)						
					Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (dokumen)	2	2	100%			
					Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA/SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2	100%			
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA/SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2	100%			
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Kinerja yang disusun (dokumen)	1	1	100%			
				Administrasi keuangan perangkat daerah			Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100	103	103%			
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan		Jumlah ASN yang di gaji dan tunjangannya terbayarkan (orang)	28	29	103%			
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	12	12	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah			persentase BMD yang diadministrasikan	100	100	100%			
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun (dokumen)	4	4	100%			
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan PD	100	100	100%			
					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah dokumen pengelolaan retribusi daerah yang disusun	12	12	100%			
				Administrasi kepegawaian perangkat daerah			Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah(%)	100	82,77	82,7%			
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian(%)	12	12	100%			
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi perundang-undangan (orang)	5	4	80%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Administrasi umum perangkat daerah			persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah(%)	100	85,44	85,4%			
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		jumlah komponen instalasi listrik penerangan/bangunan kantor yang disediakan(jenis)	15	17	113%			
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		jumlah peralatan rumah tangga yang didakan (unit)	3	3	100%			
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor		jumlah bahan logistik kantor yang diadakan(jenis)	3	3	100%			
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		jumlah barang cetakan dan atau penggandaan yang disediakan(jenis)	31099	28965	93,1%			
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		jumlah penyediaan abhan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eks)	120	58	48,3%			
					Fasilitas kunjungan tamu		jumlah tamu yang difaslilitasi(kotak)	8500	3887	45,7%	Anggaran bersifat disediakan		
					Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD		jumlah rapat koordinasi dan koordinasi yang diikuti(kali)	800	452	56,5%	Penyelenggaraan rapat kordinasi yang diikuti tidak sesuai target yang disediakan	Menjadikan evaluasi penganggaran selanjutnya	
				Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan			persentase BMB perangkat darah yang terpenuhi(%)	100	187	187%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				pemerintah daerah									
					Pengadaan kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		jumlah kendaraan dinas yang diadakan (unit)	1	2	200%			
					Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan (unit)	140	35	25%			
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			persentase rata-rata capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	94,78	94,7%			
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (surat)	1500	1620	108%			
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening telepon/internet, listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	132	57	43,1%	Tagihan rekening lebih rendah dari anggaran yang disediakan	Pembayaran sesuai pemakaian	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan (jenis)	2	2	100%			
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga jasa pelayanan yang terbayarkan)orang)	24	24	100%			
				Pemeliharaan barang milik			persentase barang milik daerah	100	128	128%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				daerah penunjang urusan pemerintahan			penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik(%)						
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit	12	10	83%			
					pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dipelihara (unit)	5	4	80%			
					Pemeliharaan peralatan Dan mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	44	24	54%	Persediaan lebih besar dari kebutuhan pemeliharaan	Direalisasikan sesuai kebutuhan pemeliharaan	
					Pemeliharaan /Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi (unit)	4	8	200%			
3	Kecamatan	Mangkutana	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ('%)	100	0	0%	Penyelenggaraan perizinan tidak lagi menjadi kewenangan kecamatan (menunggu peraturan baru terkait perizinan) dan untuk sementara pelaksanaan perizinan diambil alih langsung oleh kabupaten.		
				Pelaksanaan Urusan			Persentase urusan pemerintahan yang	100	0	0%	Tidak terlaksananya Pelaksanaan Urusan		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan ('%)				Pemeritahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha mempengaruhi pencapaian kinerja		
					Pelaksanaan Urusan Pemeritahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah administrasi perizinan yang dkeluarkan	20	0	0%			
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan ('%)	100	100	100%			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan ('%)	100	100	100%			
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah pertisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (Orang)	174	174	100%			
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah PKK Desa yang di Berdayakan (Orang)	66	66	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	50	50%	Realisasi indicator kinerja kegiatan yang tidak mencapai target memberikan dampak pada pencapaian kinerja program secara keseluruhan	Melalukan perhitungan target indikator yang cermat sesuai dengan peletakan anggaran kas dan melakukan penyesuaian terhadap target pada anggaran perubahan	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan ('%)	100	50	50%	Tidak melalukan penyesuain target pada anggaran perubahan		
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Kasus)	4	2	50%	Sesuai jumlah kasus yang dilaporkan	Difaslitasi sesuai kasus yang dilaporkan	
					Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (Kali)	3	2	66%	Penyelenggaraan koordinasi dipadatkan	Penyelenggaraan rapat sesuai kebutuhan	
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan		Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda	100	66,66	66%	Penyelenggaraan rapat koordinasi dipadatkan	Penyelenggaraan rapat sesuai kebutuhan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Kepala Daerah		dan Perkada ('%)						
					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan (Kali)	3	2	66%	Penyelenggaraan rapat koordinasi dipadatkan	Penyelenggaraan rapat sesuai kebutuhan	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ('%)	100	100	100%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti ('%)	100	100	100%			
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Rapat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dilaksanakan (kali)	12	12	100%			
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku ('%)	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembiaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentse fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100	100	100%			
					Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Peraturan Desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya (Dokumen)	22	22	100%			
					Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kawasan Perdesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya (Desa)	11	11	100%			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	100	100	100%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu ('%)	100	100	100%			
					Penyusunan Dokumen		Jumlah dokumen Perencanaan yang	2	2	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Perencanaan Perangkat Daerah		disusun tepat waktu Dokumen						
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu Dokumen	2	2	100%			
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		umlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu Dokumen	2	2	100%			
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Dokumen	10	10	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah(%)	100	100	100%			
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan (orang)	18	18	100%			
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu)dokumen)	18	17	94,4%			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang ditatausahakan(%)	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu (dok)	4	4	100%			
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD(%0	100	100	100%			
					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun tepat waktu (dok)	3	3	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100	100%			
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan(dok)	12	12	100%			
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan(orang)	3	3	100%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah(%)	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan(unit)	12	12	100%			
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan(unit)	18	18	100%			
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (jenis)	7	7	100%			
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan(eks)	36	36	100%			
					Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	8630	8630	100%			
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	877	877	100%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi(%)	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah mebel yang diadakan(unit)	1	1	100%			
					Pengadaan Mebel		Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan(unit)	10	10	100%			
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan(unit)	1	1	100%			
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan(unit)	13	13	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(%)	100	105,4	105%			
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan(lbr)	1396	1396 l	100%			
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan(rek)	96	96	100%			
					Penyediaan Jasa Peralatan dan		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	1	1	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Perlengkapan Kantor		Kantor yang disediakan(jenis)						
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan(rang)	5	5	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik ('%)	100	100	100%			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan Dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya(jenis)	3	3	100%			
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Mebel yang di Pelihara(jenis)	14	14	100%			
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara(jenis)	3	3	100%			
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi(jenis)	9	9	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Kecamatan	Angkona	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	0	0%	Penyelenggaraan perizinan tidak lagi menjadi kewenangan kecamatan (menunggu peraturan baru terkait perizinan) dan untuk sementara pelaksanaan perizinan diambil alih langsung oleh kabupaten.		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan						
					Pelaksanaan Urusan Pemeritahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah IMB yang diterbitkan (IMB) (Lembar)	6	2	33,3%			
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	100	99,75	99%			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan						
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah		Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Forum Musyawarah	34	33,33	97%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Perencanaan Pembangunan di Desa		Pembangunan di desa (%)						
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah kader PKK Desa yang dibina (Orang)	70	70	100%			
			Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100	50	50%	Realisasi indicator kinerja kegiatan yang tidak mencapai target memberikan dampak pada pencapaian kinerja program secara keseluruhan	Melalukan perhitungan target indikator yang cermat sesuai dengan peletakan anggaran kas dan melakukan penyesuaian terhadap target pada anggaran perubahan	
				Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum			Persentase upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselenggarakan	100	50	50%	Tidak terlaksananya sub kegiatan harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat mempengaruhi pencapaian kinerja kegiatan		
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan (%)	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah rapat upaya pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (kali)	0	0	0%	Anggaran dilakukan rasionalisasi		
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Persentase pelaksanaankoordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	100	100	100%			
					Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah koordinasi/sinergi dengan Polri dan atau perangkat daerah yang tupoksinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan (kali)	4	4	100%			
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan	100	100	100%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Persentase urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerahyang diselenggaakan	100	100	100%			
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di		Persentase rekomendasi Forum Koordinasi	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Kecamatan		Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)						
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa				Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100	95	95%			
				Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembiaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100	95	95%			
					Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya (Dokumen)	20	20	100%			
					Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Persentase desa yang tertib administrasinya (%)	100	95	95%			
					Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Jumlah desa yang terkoordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya (desa)	10	10	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	100	100	100%			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusuntepat waktu (%)	100	100	100%			
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (dokumen)	2	2	100%			
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	2	2	100%			
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	2	2	100%			
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen	7	7	100%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100	100	100%			
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan dibayarkan (orang)	20	20	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah laporan kkeuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (laporan)	19	19	100%			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Persentase laporan BMD pada perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100	100	100%			
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan BMD yang disusun (laporan)	12	12	100%			
				Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			Persentase Realisasi PAD perangkat daerah	100	100	100%			
					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (Dokumen)	1	1	100%			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daaerah			Persentase rata-rata capaian kinerja admnistrasi Kepegawaian perangkat daerah	100	83,02	83%			
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah laporan adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	4	4	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							(laporan)						
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti bimtek, diklat, workshop implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	5	4	80%			
				Kegiatan Administrasi UmumPerangkat Daaerah			Persentase rata rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	98,6	98,6%			
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (Jenis)	9	9	100%			
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (Jenis)	25	25	100%			
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (Jenis)	4	4	100%			
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Preundang-Undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60	60	100%			
					Fasilitasi Kunjungan Tamu		'Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	2000	200	100%			
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi		Jumlah rapat koordinasi dan	575	575	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					dan Konsultasi SKPD		konsultasi SKPD yang diikuti (Kali)						
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100	100	100%			
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan		Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (unit)	1	1	100%			
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	3	3	100%			
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	1	1	100%			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			persentase rata rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	99,8	99,8%			
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	1000	986	98,6%			
					Penyediaan Jasa Komunikasi,		Jumlah rekening telepon, listrik dan	84	84	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Sumber Daya Air dan Listrik		air yang terbayarkan (Rekening)						
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Jenis)	2	2	100%			
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	4	4	100%			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100	100	100%			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (Unit)	2	2	100%			
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	20	20	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Kecamatan	Kalaena	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	0	0%	Penyelenggaraan perizinan tidak lagi menjadi kewenangan kecamatan (menunggu peraturan baru terkait perizinan) dan untuk sementara pelaksanaan perizinan diambil alih langsung oleh kabupaten.		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100	0	0%	Tingkat capaian di pengaruhi oleh realisasai kinerja sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemeritahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang tidak tercapai		
					Pelaksanaan Urusan Pemeritahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah IMB yang diterbitkan (IMB) (Lembar)	6	0	0%	Wewenang IMB dialihkan ke kabupaten		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan (%)	100	97	97%			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa	100	97	97%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							dan Kelurahan (%)						
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah partisipasi masyarakat pada pelaksnaan musrenbang kecamatan (orang)	140	137	97%			
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan (Orang)	49	49	100%			
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	100	100	100%			
				Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum			Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100	100	100			
					sinergitas dengan kepolisian negra republik indonesia tentara republik indonesia dan isntansi vertikal di wilayah kecamatan		jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	4	4	100%			
					harmonisasi hubungan dngan tokoh agam tokoh masyarakat		jumlah rapat dalam upaya himbauan atatu pencegahan ketentraman dan ketertiban yang dilaksnakan	4	4	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					koordinasi penerpan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan enegakan perda dan perkada	100	100	100%			
					koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau kepolisian republik indonesia		jumlah kegaiatn sinergi yang dilaksanakan	4	4	100%			
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan	100	100	100%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang difasilitasi	100	100	100%			
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100%			
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa				Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan	100	95	95%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku						
				Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembiaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan	100	95	95%			
					Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya (Dokumen)	14	14	100%			
					Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100%			
					Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Persentase desa yang tertib administrasinya (%)	100	82,25	82%			
					koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan		jumlah desa yang melakukan pembangunan kawasan perdesaan(desa)	7	7	100%			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan				Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Daerah Kab/Kota				standard (%)						
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100	100	100%			
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu(dokumen)	2	2	100%			
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA –SKPD yang disusun(dokumen)	2	2	100%			
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPASKPD yang disusun (dokumen)	2	2	100%			
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (dokumen)	10	10	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100	100	100%			
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang digaji dan tunjangan yang terbayarkan (orang)	17	17	100%			
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana		Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD	18	18	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					n/Semesteran SKPD		yang disusun (dokumen)						
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100	100	100%			
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (dokumen)	4	4	100%			
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah(%)	100	100	100%			
					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi daerah perangkat daerah	12	12	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan (dokumen)	100	100	100%			
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah pakaian dinas pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	12	12	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							(laporan)						
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (orang)	5	5	100%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan (%)	100	93,31	93%			
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (jenis)	10	10	100%			
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah kompenen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	14	14	100%			
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan yang disedikan dan digandakan (jenis)	6	5	83%			
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (eks)	48	48	100%			
					Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya (orang)	2379	2379	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah yang diselenggarakan (kali)	885	885	100%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi(%)	100	100	100%			
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan (unit)	1	1	100%			
					Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	1	1	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			persentase rata rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah(%)	100	100	100%			
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	1542	1542	100%			
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	60	60	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							(Rekening)						
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Jenis	2	2	100%			
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	10	10	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100	96.4	96,4%			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (Unit)	7	5	71%			
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	26	26	100%			
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	2	2	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Kecamatan	Burau	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	0	0%	Penyelenggaraan perizinan tidak lagi menjadi kewenangan kecamatan (menunggu peraturan baru terkait perizinan) dan untuk sementara pelaksanaan perizinan diambil alih langsung oleh kabupaten.		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100	0	0%	Tingkat capaian dipengaruhi oleh kinerja sub keg Pelaksanaan Urusan Pemeritahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha ang tidak tercapai		
					Pelaksanaan Urusan Pemeritahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan (Lembar)	0	0	0%	Wewenang IMB dialihkan ke kabupaten		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	100	100	100%			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan(%)	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah partisipasi masyarakat pada pelaksanaan musrembang kecamatan (orang)	170	170	100%			
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Pembinaan PKK Desa (kali)	12	12	100%			
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum(%)	100	100	100%			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan (%)	100	100	100%			
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (kasus)	4	4	100%			
					Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan	4	4	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (kali)						
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada (%)	100	100	100%			
					Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan (kali)	12	12	100%			
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan(%)	100	100	100%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti(%)	100	100	100%			
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah rapat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang	12	12	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							dilaksanakan (Kali)						
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa				Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	98,99	98.9%			
				Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembiaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan (%)	100	98,99	98%			
					Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya (Dokumen)	36	36	100%			
					Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti (persen)	100	400	400%			
					Koordinasi pendampingan desa diwilahnya		Jumlah Desa yang tertib administrasinya(desa)	18	72	400%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kawasan Perdesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya (Desa)	18	18	100%			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	99,77	99%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100	100	100%			
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	3	3	100%			
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	2	2	100%			
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	2	2	100%			
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	10	10	100%			
				Administrasi			Persentase	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Keuangan Perangkat Daerah			administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)						
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (orang)	25	23	92%			
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	12	12	100%			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)	100	100	100%			
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	4	4	100%			
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD (%)	100	100	100%			
					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (Dokumen)	4	4	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase rata-rata capaian kinerja admnistrasi Kepegawaian PD (%)	100	76,47	76,9%			
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Dokumen)	12	12	100%			
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	5	1	20%	Bimtek yang direncanakan tidak dikuti	Perlu pengkoordinasian pengusulan kebutuhan Bimtek	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah			persentase rata rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah(%)	100	88,88	88,8%			
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (Jenis)	9	36	400%			
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (jenis)	2	4	200%			
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (Jenis)	17	17	100%			
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang	4	16	400%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							disediakan (Jenis)						
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)	60	46	76,6%			
					Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	2000	2000	100%			
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (Kali)	1000	1000	100%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100	100	100%			
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	1	1	100%			
					Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan mesin lainnya yang diadakan (unit)	3	3	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			persentase rata rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	132,5	132%			
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat masuk dan keluar	600 l	818	138%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							yang diadministrasikan (Surat)						
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	60	60	100%			
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	9	9	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100	100	100%			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	5	20	400%			
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	24	22	91,6%			
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1	1	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Kecamatan	Malili	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	100	100%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan			Presentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan(%)	100	100	100%			
					- Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan		Jumlah efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan(%)	100	100	100%			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan (%)	200	65	32,5%	Capaian dipengaruhi oleh target sub kegiatan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang tidak tercapai		
					- pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan	100	65	65%	Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah perizinan IMB yang dikeluarkan, sedangkan untuk		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											kecamatan tidak lagi mengeluarkan izin IMB, adapun realisasi kinerja hanya mengambil data di perizinan		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan(%)	100	95	95%			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan(%)	100	95	95%			
					- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Rasio persentase keterwakilan perempuan dan dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan(%)	100	95	95%			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				100	100	100%			
					- Pemberdayaan masyarakat di Keluarahan		Jumlah Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	100	100	100%			
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan(%)	100	100	100%			
					- Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (kasus)	100	100	100%			
					- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (kali)	12	12	100%			
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada (%)	12	11	91,6%			
					- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang Penegakan Peraturan		Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan perundang-	12	11	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		undangan yang dilaksanakan (kali)						
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	100%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti	12	12	100%			
					- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti (%)	12	12	100%			
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	100	100%			
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah			Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan	15	15	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					- Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kawasan Pedesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya (kawasan)	15	15	100%			
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	72	72%	Tingkat capaian dipengaruhi oleh volume izin IMB yang diterbitkan dimana wewenang tersebut telah dilimpahkan ke kabupaten		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan (%)	100	72	72%			
					Pelaksanaan Urusan Pemeritahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan (Lembar)	500	36	7,2%			
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan (%)	100	121	121%			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (%)	100	95,51	95%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah partisipasi masyarakat pada pelaksanaan musrembang kecamatan (orang)	108	190	100%			
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan (Orang)	90	89	98,8%			
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100%			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan (%)	100	100	100%			
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (kasus)	72	14	180%			
					Harmonisasi Hubungan Dengan		Jumlah rapat dalam upaya	4	4	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (kali)						
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada (%)	100	100	100%			
					Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan (kali)	4	4	100%			
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	91,66	91,6%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	91,66	91,6%			
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi		Jumlah rapat forum koordinasi	12	12	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pimpinan di Kecamatan		pimpinan kecamatan yang dilaksanakan (Kali)						
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa				Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	100	100%			
				Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembiaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan (%)	100	100	100%			
					Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya (Dokumen)	36	36	100%			
					Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kawasan Perdesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya (Desa)	18	18	100%			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan				Presentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai	100	91	91%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Daerah Kabupaten/Kota				standar (%)						
				Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu(%)	100	100	100%			
					Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (dokumen)	3	3	100%			
					Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA/SKPD yang disusun (dokumen)	2	2	100%			
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA/SKPD yang disusun (dokumen)	2	2	100%			
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Kinerja yang disusun (dokumen)	10	10	100%			
				Administrasi keuangan perangkat daerah			Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100	95,31	95,3%			
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan		Jumlah ASN yang di gaji dan tunjangannya dibayarkan	21	20	95,2%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	12	12	100%			
				Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah			Persentase Rata-rata capaian kinerja administrasi BMD (%)	100	100	100%			
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun (dokumen)	2	2	100%			
				Administrasi kepegawaian perangkat daerah			Persentase Rata-rata capaian kinerja administrasi Kepegawaian PD (%)	100	100	100%			
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mutakhirkan (dokumen)	4	4	100%			
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan tehnis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	5	5	100%			
				Administrasi umum perangkat daerah			Persentase Rata-rata capaian kinerja administrasi	100	93,82	93%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							umum (%)						
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen instalasi listrk/penerangann bangunan kantor yang disediakan (jenis)	15	15	100%			
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor		Jumlahperalatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (jenis)	3	3	100%			
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik yang disediakan (jenis)	15	15	100%			
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (eksemplar)	2000	2000	100%			
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (jenis)	8 jenis	8 jenis	100%			
					Fasilitas kunjungan tamu		Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya (orang)	3540	3535	99%			
					Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan (kali)	350	350	100%			
				Pengadaan barang milik			Persentase Rata-rata capaian	100	66,67	66,6%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				daerah penunjang urusan pemerintah daerah			kinerja administrasi Pengadaan BMD (%)						
					- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	3	2	66,6%			
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			Persentase Rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	94,06	94,0%			
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (lembar)	850	850 r	100%			
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening telepon/internet, listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	36	36	100%			
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga jasa pelayanan yang terbayarkan (jenis)	37	34	91,8%			
				Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan			Persentase Rata-rata capaian kinerja pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	95,87	95,8%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraam dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	4	4	100%			
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	17	17	100%			
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi (unit)	5	5	100%			
8	Kecamatan	Nuha	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan dan pelayanan publik	100	0	0%	Penyelenggaraan perizinan tidak lagi menjadi kewenangan kecamatan (menunggu peraturan baru terkait perizinan) dan untuk sementara pelaksanaan perizinan diambil alih langsung oleh kabupaten.		
				Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat			Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100	0	0%	Capaian kinerja dipengaruhi oleh target kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan yang tidak tercapai		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan		Jumlah IMB yang di terbitkan	40	0	0%			
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				Persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan mendukung pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan(%)						
				Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa			Persentase koordinasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat Desa yang termanfaatkan(%)						
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa		Persentase partisipasi perempuan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	100%			
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan		Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan	20	80	400%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Kegiatan pemberdayaan kelurahan			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dllaksanakan	100	100	100%			
					Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan		Jumlah pemberdayaan masyarakat kelurahan	2	2	100%			
					penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan		berkurangnya angka penyebaran covid-19 di wilayah kecamata nuha	100	100	100%			
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100%			
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Persentase Penyelesaian Kasus Ketentraman dan ketertiban umum yang dimediasi (%)	100	100	100%			
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah rapa dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan	5	5	100%			
					Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang	5	5	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							dilaksanakan						
				Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada(%)	100	100	100%			
					Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	5	5	100%			
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan	100	100	100%			
				Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan	100	100	100%			
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan		Persentase koordinasi rekomendasi forum koordinasi pimpinan yang	100	400	400%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							ditindaklanjuti						
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100	100	100%			
				Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pebinaan dan pengawasan pemerintahan desa			Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100	100	100%			
					Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya	8	8	100%			
					Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Persentase kasus yang terselesaikan (kasus)	100	100	100%			
					Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya		Jumlah desa yang tertib administrasinya (desa)	8	8	100%			
					Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kawasan Perdesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya (kawasan)	4	4	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran(%)	100	100	100%			
				Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu(%)	100	100	100%			
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu(dokumen)	3	3	100%			
					Koordinasi Dan Penyususunan Dokumen Rka-Skpd		Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu(dokumen)	2	2	100%			
					Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd		Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu (dokumen)	2	2	100%			
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangka daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	10	10	100%			
				Administrasi keuangan perangkat daerah			Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya dibayarkan	23	23	100%			
					Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan		Jumlah dok laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	3	3	100%			
				Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah			Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang ditatausahakan (%)	100	100	100%			
					Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd		Jumlah dok laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun (dokumen)	4	4	100%			
				Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah			Jumlah realisasi pad perangkat daerah (%)	100	107	107%			
					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah dok Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun (dok)	4	4	100%			
				Administrasi kepegawaian perangkat daerah			Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pendataan Dan Pengelolahan Administrasi Kepegawaian		persentase rata - rata capaian kinerja administrasi kepegawaian PD	100	100	100%			
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	7	5	71,4%	Bimtek yang direncanakan tidak dikuti	Perlu pengkoordinasian pengusulan kebutuhan Bimtek	
				Administrasi umum perangkat daerah			Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (%)	100	100	100%			
					Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	9	9	100%			
					Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		Jumla Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2	2	100%			
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	15	15	100%			
					Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan(jenis)	5	5	100%			
					Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	48	48	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							undangan yang disediakan(eks)						
					Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya (orang)	8313	8313	100%			
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	806	806	100%			
				Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (%)	100	100	100%			
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan (unit)	2	2	100%			
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100%			
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (lembar)	1500	1500	100%			
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik		Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	48	48	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							(rekening)						
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (jenis)	32	32	100%			
				Pemeliharaan barang milik darah penunjang urusan pemerintahan daerah			Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara(%)	100	100	100%			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	9	9	100%			
					Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	20	20	100%			
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (unit)	5	5	100%			
9	Kecamatan	Wasuponda	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	0	0%	Penyelenggaraan perizinan tidak lagi menjadi kewenangan kecamatan (menunggu peraturan baru terkait perizinan) dan untuk sementara pelaksanaan perizinan diambil alih langsung oleh		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											kabupaten.		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan (%)	100	0	0%	Wewenang perizinan dilimpahkan ke kabupaten		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Administrasi Perizinan yang dikeluarkan (lembar)	28	0	0%	Wewenang perizinan dilimpahkan ke kabupaten		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	100	82,5	82,5%			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100	82,5	82,50 %			
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Angka Partisipasi perempuan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan(orang)	130	82	63,4%	Tingkat kehadiran perempuan masih kurang	Memberikan pembinaan	
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		jumlah kader PKK yang diberdayakan (orang)	42	100	238%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				Presentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100%			
				Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum			Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketetiban umum yang dilaksanakan	100	100	100%			
					Sinegitas dengan kepolisian negara republik indonesia, TNI dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan		Jumlah kegiatan sinergi dengan kepolisian, TNI dan instansi vertical (kali)	5	5	100%			
					Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat		Jumlah kegiatan harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat (kali)	12	12	100%			
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada	100	100	100%			
					Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yg tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundag undangan/ atau kepolisian negara		Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi yang dilaksanakan (kali)	12	12	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					RI								
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan	100	100	100%			
				Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			Persentase urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang di selenggarakan	100	100	100%			
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan		Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindak lanjuti (kali)	12	12	100%			
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	100	100%			
				Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan(%)	100	100	100%			
					Fasilitasi Penyusutan		Jumlah Peraturan Desa dan	12	12	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Peraturan desa dan peraturan Kepala Desa		Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya (dokumen)						
					Fasilitasi Penyelenggaran ketentraman dan ketertiban Umum		Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindak lanjuti (kali)	5	5	100%			
					Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan		Jumlah Desa yang melakukan pembangunan kawasan perdesaan (kali)	6	6	100%			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				Presentase capaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terpenuhi						
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100	100	100%			
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Kecamatan yang disusun tepat waktu (dokumen)	3	3	100%			
					Koordinasi dan Penyusunan		Jumlah dokumen RKA- SKPD yang	2	2	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Dokumen RKA-SKPD		disusun tepat waktu (dokumen)						
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2	100%			
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	10	10	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik(%)	100	94	94%			
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan dibayarkan (ASN)	17	16	94,1%			
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan (dokumen)	28	28	100%			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar(%)	100%	100%	100%			
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (unit)	4	3	75%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	0	0	0%			
					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun	0	0	0%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase rata-rata capaian kinerja admnistrasi Kepegawaian PD (%)	100	100	100%			
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (dokumen)	12	12	100%			
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (orang)	4	3	75%	Bimtek yang direncanakan tidak dikuti	Perlu pengkoordinasian pengusulan kebutuhan Bimtek	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase rata rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	100	100%			
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	6	6	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							(jenis)						
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	20	20	100%			
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	5	5	100%			
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Exp)	25	25	100%			
					Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	2500	2500	100%			
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	869	869	100%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuh						
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan (unit)	2 Unit					
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (unit)	1 Unit					
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan			Persentase rata rata capaian kinerja jasa						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Pemerintahan Daerah			penunjang urusan pemerintahan daerah						
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (lbr)	600	600	100%			
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	48	48	100%			
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (jenis)	2	2	100%			
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (orang)	7	7	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100	100	100%			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	8	8	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	21	21	100%			
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	1	1	100%			
10	Kecamatan	Towuti	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	72	72%	Tingkat capaian dipengaruhi oleh pencapaian penerbitan IMB		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan (%)	100	72	72%	Tingkat capaian dipengaruhi oleh pencapaian penerbitan IMB		
					Pelaksanaan Urusan Pemeritahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan (Lembar)	50	36	72%	Sub KegiatanPelaksanaan Urusan Pemeritahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, akan disesuaikan dengan regulasi terbarutentang Pemberhentian Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digantikan dengan peraturan daerah kab. Luwu Timur tentang PBG		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											(Persetujuan Bangunan Gedung)		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan (%)	100	121,5	121%			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (%)	100	121,5	121%			
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah partisipasi masyarakat pada pelaksanaan musrembang kecamatan (orang)	126	190	152%			
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan (Orang)	126	190	125%			
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum (%)	126	190	125%			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan (%)	126	190	125%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (kasus)	126	190	125%			
					Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (kali)	4	4	100%			
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada	4	4	100%			
					Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan (kali)	4	4	100%			
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							(%)						
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100%			
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah rapat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dilaksanakan (Kali)	12	12	100%			
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa				Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	100	100%			
				Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan (%)	100	100	100%			
					Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi	36	36	100%			
					Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Kawasan Perdesaan yang terpantau	36	36	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		perencanaan dan pelaksanaan programnya (Desa)						
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	109	109%			
				Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100	100	100%			
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	3	3	100%			
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	2	2	100%			
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	2	2	100%			
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	10	10	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat			Persentase administrasi keuangan yang	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Daerah			terselenggara dengan baik (%)						
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (orang)	25	100	400%			
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	16	16	100%			
				Admistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)	100	100	100%			
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	12	12	100%			
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD (%)	100	100	100%			
					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (Dokumen)	12	12	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat			Persentase rata-rata capaian kinerja admnistrasi	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Daerah			Kepegawaian PD (%)						
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Dokumen)	12	12	100%			
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	3	3	100%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah			persentase rata rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (%)	100	128,2	128%			
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (Jenis)	7	7	100%			
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (Jenis)	3	3	100%			
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (Jenis/eksemplar)	5	5	100%			
					Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	3200	3823	119%			
					Penyelenggaraan Rapat koordinasi		Jumlah rapat koordinasi dan	440	846	192%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					dan Konsultasi SKPD		konsultasi SKPD yang diikuti (Kali)						
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100	100	100%			
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	2	2	100%			
					Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan (Unit)	1	1	100%			
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	4	4	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			persentase rata rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	106	106%			
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	1350	1219	90,2%			
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	48	48	100%			
					Penyediaan Jasa Peralatan dan		Jumlah Jasa peralatan dan	2	1	50%	Belanja barang tidak sesuai perencanaan	Disesuaikan dengan kebutuhan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Perlengkapan Kantor		perlengkapan kantor yang disediakan (Jenis)						
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	11	11	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100	86,36	86%			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit/jenis)	11	11	100%			
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	30	25	83%			
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	3	3	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Kecamatan	Wotu	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pelayanan Umum(%)	100	0	0%	Penyelenggaraan perizinan tidak lagi menjadi kewenangan kecamatan (menunggu peraturan baru terkait perizinan) dan untuk sementara pelaksanaan perizinan diambil alih langsung oleh kabupaten.		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan (%)	100	0	0%	Capain dipengaruhi oleh regulasi penerbitan IMB		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan (lembar) (%)	75	0	0%	Capain dipengaruhi oleh regulasi penerbitan IMB		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan(%)	100	100	100%			
				Koordinasi Kegiatan			Jumlah kegiatan pemberdayaan	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Pemberdayaan Desa			desa yang dilaksanakan (%)						
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Angka partisipasi perempuan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (%)	0,38 persen	0,39 persen	102%			
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah PKK Desa yang diberdayakan (%)	90 persen	90 persen	90%			
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100%			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentaman dan Ketertiban Umum			Jumlah kegiatan sinergi dengan kepolisian, TNI, dan instansi vertical (%)	100	100 n	100%			
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah kegiatan harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat	12	12	100%			
					Harmonisasi hubungan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan(kali)	12	7	58,3%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah			Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi yang dilaksanakan (%)	100	100	100%			
					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi yang dilaksanakan(kali)	24	22	91,6%			
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan(%)	100	100	100%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100%			
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	12	12	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	98,99	98,9%			
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan (%)	100	98,99	98,9%			
					Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Peraturan Desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya (kali)	34	34	100%			
					Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Kasus Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindak lanjuti (Kasus)	7	7	100%			
					Koordinasi pendampingan desa diwilahnya		Jumlah Desa yang tertib administrasinya (kali)	16	16	100%			
					Koordinasi Pelaksanaan Pembanguan		Jumlah Desa yang melakukan pembangunan	16 kali	6 kali	37,5%	ketersdiaan anggaran belum optimal	Penyelenggaran koordinas dipadatkan sesuai	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		kawasan perdesaan					ketersdiaan anggaran	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standard (%)	100	100	100%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu ('%)	100	100	100%			
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun (dokumen)	2	2	100%			
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun(dokumen)	2	2	100%			
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (dokumen)	2	2	100%			
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	10	10	100%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100	100	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan (orang)	20	20	100%			
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/seme steran SKPD yang disusun	12	12	100%			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar ('%)	100	100	100%			
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	4	4	100%			
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD ('%)	100	100	100%			
					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	4	4	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian	100	76,47	74,4%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Perangkat Daerah ('%)						
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	4	4	100%			
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-Undangan-	2	2	100%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	100	88,88	88,8%			
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	9	9	100%			
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (%)	8	8	100%			
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (%)	3	3	100%			
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eks)	48	48	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang difasilitasi(kali)	48 kali	48 kali	100%			
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti)orang)	835	835	100%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi ('%)	100 persen	100 persen	100%			
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1 unit	1 unit	100%			
					Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	3 unit	3 unit	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ('%)	100 persen	100 persen	100%			
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	1500 lembar	1500 lembar	100%			
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening telepon/internet, listrik dan air yang terbayarkan	36 jenis	34 jenis	94,4%			
					Penyediaan Peralatan dan		Jumlah Jasa peralatan dan	3 jenis	3 jenis	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(9/10 *100)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Perlengkapan Kantor		perlengkapan kantor yang sewa						
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang terbayarkan	14 jenis	14 jenis	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100 persen	100 persen	100%			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	7 unit	7 unit	100%			
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	10 unit	100%			
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah bangunan yang termanfaatkan	1 unit	1 unit	100%			

3.3 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITERAPKAN

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, guna memperlancar dan keterpaduan pencapaian dan perwujudan sasaran, tujuan, misi dan visi satuan unit kerja pemerintah. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah mengeluarkan beberapa kebijakan strategis yang dimaksudkan untuk menyelesaikan beberapa masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan strategis tersebut diperkuat dengan dasar hukum sehingga penerapannya dapat dilaksanakan dengan baik.

Tabel 3.9
Kebijakan Strategis Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2022, Tgl 8 Februari 2022	Untuk melindungi masyarakat adat secara optimal melaksanakan hak pengelolaan hutan adat secara turun temurun melalui mekanisme yang sah menurut hukum adat. Pemrakarsa Dinas Lingkungan Hidup
2	Penetapan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2022 tgl 01 Maret 2022 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015	untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di pelabuhan, telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan wilayah pelabuhan serta pelayanan jasa kepelabuhanan di Daerah. Pemrakarsa Dinas Perhubungan
3	Penetapan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2022 tgl 01 Maret 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011	Penyesuaian nilai retribusi dan jenis menara yang dikenakan retribusi dalam rangka meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana penyediaan telekomunikasi. Pemrakarsa Dinas Kominfo
4	Penetapan Retribusi Penjualan Produksi Daerah	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2022 tgl 01 Maret 2022 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011	meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah, perubahan/penambahan objek Retribusi dan penyesuaian retribusi karena adanya perkembangan kebutuhan bibit ikan air tawar dan untuk mengakomodir jenis ikan dan kebun holtikultura, untuk memberikan kepastian dalam penarikan dan penambahan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Pemrakarsa Bapenda
6	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2022 tgl 17 Oktober 2022	Mencegah terjadinya Degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan. Pemrakarsa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7	Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2022 tgl 27 januari 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2020	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019. Pemrakarsa Satpol PP

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
8	Penentuan Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dan Jaringannya	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2022 tgl 6 Juni 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2017	Pemrakarsa Dinas Kesehatan
9	Layanan Konsultasi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2022 tgl 17 Juni 2022	memberikan layanan konsultasi sehingga permasalahan yang ada dapat dengan cepat diberikan rekomendasi atau jawabannya oleh inspektorat dalam mewujudkan kualitas pengawasan daerah dengan efektivitas *assurance activities* dan *consulting activities* serta membantu merealisikan visi Luwu Timur yang berkelanjutan dan lebih baik berlandaskan nilai agama dan budaya pada Misi Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik
10	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Matoto	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tgl 20 Juni 2022	berfungsi sebagai rencana rinci dalam mengimplementasikan tujuan, strategi dan kebijakan penataan ruang, rencana struktur dan rencana pola ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten Luwu Timur khususnya Kawasan kota Mangkutana Tomoni dan Tomoni Timur.
11	Pembentukan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD)	Peraturan Bupati (Perbup) Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2022 tgl 21 Oktober 2022	untuk menumbuh kembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, dan kejuangan setiap orang untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara. Pemrakarsa Dinas Sosial
12	Pembentukan Dan Operasional Public Safety Center	Peraturan Bupati (Perbup) Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2022. Tgl 28 Desember 2022	Pemrakarsa Dinas Kesehatan
13	Percepatan Penurunan Stunting	Peraturan Bupati (Perbup) Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2022. Tgl 30 Desember 2022	penanganan secara komprehensif dan terpadu oleh unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Pemrakarsa Dinas PMD
14	Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Industri Kabupaten Luwu Timur	SK Bupati Nomor : 248/D-06/VII/Tahun 2022, 27 juli 2022	Menertibkan dan menetapkan luas Kawasan Industri Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur
15	Pemberian bantuan sarana pendidikan ke sekolah swasta	Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 120/D - 03/III/2022	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan pada sekolah swasta melalui Pemberian Bantuan Hibah Berupa Barang dan uang
		Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 354/D - 03/II/2022	
16	Peningkatan deteksi dan kewaspadaan dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di bidang idiologi,	Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No : 26/I-01/I/TAHUN 2022	Untuk memperoleh informasi lebih cepat dan akurat terkait ancaman, hambatan dan gangguan di bidang idiologi, politik, ekonomi,

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	politik, ekonomi, social budaya dan pertahanan keamanan daerah		sosial budaya dan pertahanan keamanan daerah
17	Peta Jalan Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No : 228/F-05/V11/Tahun 2022	SK ini merupakan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam menentukan stategi dan arah kebijakan untuk pengembangan Percepatan dan Perluasan Digitalisai Daerah, menjadi rujukan dalam penyusunan program kerja dan rencana aksi Percepatan dan Perluasan Digitalisai Daerah termasuk waktu pelaksanaannya dan Membantu monitoring serta evaluasi pelaksanaan program Percepatan dan Perluasan Digitalisai Daerah. Pembuatan Peta Jalan Pelaksanaan ETPD ini merupakan bentuk dorongan dalam mengimplementasikan ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) serta Mendukung program Digitalisasi Pembayaran Transaksi Masyarakat.

3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Pada Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Luwu Timur Akhir Tahun Anggaran 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur telah memberikan beberapa rekomendasi dalam rangka menyelesaikan beberapa permasalahan yang terjadi. Rekomendasi tersebut kemudian telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui program dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2022. Rekomendasi dan tindak lanjut tersebut dapat dilihat pada table 3.10 dibawah ini :

Tabel 3.10
Rekomendasi DPRD dan Tindak Lanjut Yang Dilakukan Oleh
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD Penanggung Jawab
1.	Penyebab utama kontraksi pertumbuhan ekonomi di Tahun 2021 adalah penurunan nilai tambah produksi sektor pertambangan dan penggalian. Sektor ini dibawa kendali oleh Perusahaan PT. Vale Indonesia, Tbk yang produksinya sangat tergantung pada kondisi perekonomian global. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mencari sumber pertumbuhan alternatif agar struktur perekonomiannya tidak tergantung pada sektor pertambangan dan penggalian. Sektor-sektor yang perlu dioptimalkan adalah sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan sektor industri pengolahan serta sektor pariwisata.	- Pada Tahun 2022 Dinas Perikanan telah melakukan beberapa Program dan kegiatan terutama di Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada masyarakat antara lain - Pemberian Benih unggul serta sarana dan penunjangnya mengalami peningkatan dari 24 kelompok pada Tahun 2021,menjadi 49 kelompok di Tahun 2022 - Pemberian Sarana dan prasarana alat tangkap bagi nelayan mengalami peningkatan dari 23 kelompok menjadi 32 kelompok pada Tahun 2023 - Pada Sektor pertanian upaya yang telah dilakukan yaitu optimalisasi pengembangan sarana dan prasarana pertanian melalui pemberian bantuan benih, ternak, pengembangan tanaman hortikultura,pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan usaha tani,jaringan irigasi usaha tani,dan jaringan irigasi tersier,pengadaan alat dan mesin pertanian - Pada sektor industri pengolahan telah dioptimalkan melalui peningkatan pembinaan dan pendampingan	Untuk meningkatkan hasil produksi dan produktifitas usaha diluar sektor tambang dalam mendukung peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Tahun 2022.	

		kewirausahaan - Pada sektor pariwisata dioptimalkan pada penataan,pemeliharaan,dan pembukaan destinasi wisata baru		
2.	Sub lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan, konstruksi, dan industry pengolahan disamping memegang peran besar terhadap pembentukan PDRB, juga merupakan sumber mata pencaharian penduduk pada umumnya termasuk penduduk miskin dan rentan miskin. Optimalisasi potensi sub lapangan tersebut harus didukung oleh kebijakan penganggaran. Oleh karena itu, alokasi belanja termasuk belanja modal untuk sub lapangan usaha tersebut perlu lebih ditingkatkan di Tahun 2022. Dampak selanjutnya adalah dapat menarik sektor swasta untuk berinvestasi.	- Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja pada Tahun 2022 telah mengalokasikan anggaran untuk Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, melalui Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi sebanyak 146 orang dalam pelatihan pengelasan outomotif dan computer, pelatihan operator alat berat dan dump truck, pelatihan juru ukir surveyor - Dinas Perdagangan Koperasi Perindustrian dan UMKM Pelatihan manajemen kewirausahaan untuk 75 UMKM - Fasilitasi standarisasi sertifikasi produk usaha sebanyak 57 UMKM (PROGRAM Pengembangan UMKM) - Fasilitasi dalam bentuk sosialisasi terhadap 50 Usaha Mikro dan kecil untuk bermitra dengan retail - Jumlah usaha mikro yang telah terdata dalam Online Data Sistem(ODS) sebanyak 229 usaha mikro - Pada Program perencanaan dan Pembangunan Industri telah dilaksanakan pelatihan terhadap 26 IKM pangan dan handicraft	Untuk menyiapkan Tenaga Kerja dan pengelola UMKM yang mempunyai keterampilan dan kompetensi.	
3.	Belanja pemerintah daerah memegang peran besar dalam menstimulasi perekonomian termasuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Terkait dengan itu, di Tahun 2022, perlu peningkatan proporsi belanja khusus pada program-program yang mendukung sektor-sektor unggulan Kabupaten Luwu Timur. Peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Peningkatan proporsi belanja pada program-program yang mendukung sector unggulan telah tercermin dalam peningkatan alokasi anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, DISDAKOPUMKMRIN	Untuk meningkatkan dukungan terhadap pencapaian target produksi dan produktivitas sector pertanian dalam arti luas, peningkatan pembinaan UMKM, dan perindustrian yang diharapkan dapat mengatasi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan serta pengangguran	

	diharapkan akan menciptakan multiplier efek yang tinggi yang selanjutnya mengatasi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan serta pengangguran.			
4.	Kehadiran PT.Vale Indonesia, Tbk. di Luwu Timur merupakan potensi untuk mengatasi permasalahan pengangguran. Kerjasama antara pemda dan pihak PT Vale Indonesia, Tbk. perlu lebih diperkuat. Sebaiknya ada semacam MOU penetapan persentase tenaga kerja lokal yang terserap keseluruh setiap Perusahaan yang beroperasi di Luwu Timur	Dinas Transnaker telah menyiapkan rencana Kerjasama Pelaksanaan Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal (Staf dan Non Staf) dengan PT Vale Indonesia dan Sub Kontraktor PT. Vale Indonesia dan dilanjutkan dengan MoU antara Bupati Luwu Timur dan PT. Vale. Sebelum adanya MoU tersebut Dinas Transnaker tetap mempedomani Undang-undang dan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku menjadi acuan utama untuk mengutamakan Pekerja Lokal yang menjadi Kebijakan Daerah. Tahun 2022 sebanyak 1.474 orang tenaga kerja yang telah ditempatkan dari 9.469 orang pencari kerja yang terdaftar.	Untuk optimalisasi pencapaian penyerapan tenaga kerja lokal diharapkan proses terbitnya MOU dengan PT Vale Indonesia Tbk yang memuat tentang besaran persentase penyerapan tenaga kerja local dapat menjadi solusi penyelesaian masalah terkait ketenagakerjaan di Luwu Timur.	
5.	Sektor pariwisata meskipun belum signifikan berkontribusi terhadap pembentukan PDRB, namun pertumbuhannya memperlihatkan kemajuan yang memenuhi untuk ditunjukkan oleh sub lapangan usaha terkait langsung dengan sektor pariwisata seperti penyediaan makanan dan minuman, informasi, komunikasi, dan industri pengolahan. Sektor ini cukup besar perannya dalam menyerap tenaga kerja dan mengatasi ketimpangan pendapatan. Sebaiknya penting untuk disentuh kebijakan penganggarannya di Tahun 2022.	Melalui Kebijakan Anggaran di Tahun 2022 pada Dinas Pariwisata melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, telah dioptimalkan promosi wisata melalui event, penataan dan pemeliharaan terhadap obyek wisata yang telah ada serta pembukaan objek-obyek wisata baru baik yang dikelolah pemda ataupun Bumdes, memberikan multiplier effect atas peningkatan PDRB sector Pariwisata melalui kontribusi peningkatan PDRB atas penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11,01% pada Tahun 2022 di bandingkan realisasi PDRB sektor tersebut pada Tahun 2021 sebesar 2,34% (Data rilis BPS 28 Februari 2023 Kabupaten Luwu Timur dalam angka Tahun 2023).	Untuk meningkatkan kontribusi PDRB sektor pariwisata dan sector pendukung lainnya yang dapat berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	

6.	Untuk penyusunan LKPJ dimasa yang akan datang, sangat penting untuk dilakukan penyamaan persepsi setiap SKPD/OPD dalam mengisi formulir yang digunakan untuk penentuan indikator kinerja.	Telah dilaksanakan bimtek Penyusunan LPPD dan LKPJ yang diikuti semua OPD se Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 23-25 November 2022 di Makassar. Telah dilaksanakan desk bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan,pembahasan, penyempurnaan penyajian data LKPJ sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan Bapelitbangda pada Tahun 2022	Untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia(SDM) sehingga diharapkan Tim Penyusun LKPJ dan Tim review memiliki kesamaan persepsi terkait penyajian data LKPJ	
7.	Penyusunan APBD, khususnya anggaran pendapatan dimasa yang akan datang agar dilakukan secara cermat agar tidak terlalu timpang dengan realisasinya yang dapat menyebabkan besarnya SILPA.	Terkait penetapan SILPA dapat dijelaskan bahwa dalam penetapan SILPA atau selesih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 periode anggaran mengacu pada batas maksimal deficit sebesar 3% dari total target pendapatan	Untuk mengurangi ketimpangan target SILPA dan realisasinya,maka pemerintah daerah melalui tim TAPD telah mendorong optimalisasi serapan APBD dengan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan APBD sesuai rencana waktu dan rencana kas yang telah ditetapkan	
8.	Penerimaan APBD sebesar 20% dari total penerimaan pendapatan daerah perlu lebih diintensifkan dan diekstensifkan agar proporsi penerimaan PAD bisa lebih meningkat yang akan berdampak pada kemandirian keuangan daerah.	Pada Tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah telah mengalami peningkatan dengan proporsi sebesar 19,70% dari total realisasi penerimaan pendapatan. Pemerintah daerah khususnya perangkat pengelola pendapatan daerah akan lebih mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh daerah untuk mencapai proporsi penerimaan yang lebih baik .	Untuk mencapai kemandirian keuangan daerah,Pada APBD Tahun Anggaran 2023 target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target total pendapatan dalam APBD telah mencapai proporsi sebesar 22,40%	

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Tugas Pembantuan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Pusat adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pada tahun 2022 tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur sebanyak 9 Program yang berada pada 2 Perangkat daerah yaitu Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Tugas Pembantuan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Provinsi adalah penugasan dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/ kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Pada tahun 2022 tugas dari provinsi yang dilaksanakan di kabupaten Luwu Timur sebanyak 2 Program yang berada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun Capaian kinerja Pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan pusat dan provinsi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 4.1
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT
YANG DILAKSANAKAN OLEH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM ,KEGIATAN,OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKATCAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	**Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi**	**Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 067.07.4.350289/2022 Tgl 17 Nov 2021**	**Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan,Perdesaan Dan Transmigrasi**		**Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian**	**2,174,421,000**	**2,152,484,500**	**98,99**				
			Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	SKPC Koromalai, Desa Mahalona, Kec. Tiwuti	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	91,700,000	91,680,000	99,98	1 Lembaga	1 Lembaga yang difasilitasi di Satuan Permukiman dan Pusat SKP pada Kawasan Transmigrasi	100	
			Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	SKPC Koromalai, Desa Mahalona, Kec. Tiwuti	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	76,600,000	70,225,000	91,68	25 Orang	25 Orang yang difasilitasi memperoleh Layanan Sosial Budaya di Satuan Permukiman/ Pusat SKP di Kawasan Transmigrasi	100	
			Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	SKPC Koromalai, Desa Mahalona, Kec. Tiwuti	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	187,290,000	181,784,400	97,06	92 KK	92 KK difasilitasi Perpindahan dan Penempatan Warga Transmigrasi	100	
			Bantuan Keluarga	SKPC Koromalai,	Dinas Transmigrasi	242,700,000	239,620,400	98,73	115 Orang	115 Orang Transmigran	100	

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM ,KEGIATAN,OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKATCAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Desa Mahalona, Kec. Tiwuti	Tenaga Kerja dan Perindustrian					yang Mendapatkan Bantuan untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan		
			Bantuan Peralatan / Sarana	SKPC Koromalai, Desa Mahalona, Kec. Tiwuti	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	460,179,000	455,678,000	99,02	1 Unit	1 Unit Bantuan Sarana Produksi Pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	100	
			Sarana Pengembangan Kawasan	Desa Buangin dan Desa Mahalona, Kec. Tiwuti	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	439,474,000	438,761,000	99,84	2 Unit	2 Unit Fasilitas Umum yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	100	
			Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	SKPC Koromalai, Desa Mahalona, Kec. Tiwuti	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	676,478,000	674,735,700	99,74	50 meter	50 meter Panjang jembatan yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	100	
			Program Dukungan Manajemen		**Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur**	**108,851,000**	**108,345,000**	**99,54**				
			Layanan Dukungan Manajemen Internal	Kab. Luwu Timur	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	108,851,000	108,345,000	99,54	1 Layanan	1 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat	100	

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM ,KEGIATAN,OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKATCAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi		
2	**Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian**	**Surat pengesahan DIPA- NOMOR : SP DIPA-018.05.4.199572/2022 Tanggal 17 November 2022.**	**Program ketersediaan, akses dan komsumsi pangan berkualitas**		**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur**	**2.550.035.000**	**2.510.326.315**	**98.44**				
			Embun Pertanian	Kec. Tom-Tim, Kalaena,	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	240.000.000	240.000.000	100	2 Unit	2 Unit	100	
			Irigasi perpompaan besar wilayah tengah	Angkona	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	140.000.000	140.000.000	100	1 unit	1 unit	100	
			Jaringan irigasi tersier	Burau, TomTim, Tomoni, Mangkutana, kalaena, Angkona, Wasuponda	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	1.425.000.000	1.425.000.000	100	19 unit	19 unit	100	
			Rekomendasi perlindungan LP2B dan pengendalian alij fungsi lahan pertanian	Kab. Luwu Timur	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	500.000.000	469.621.315	93.92	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100	
			Bimtek, Monitoring dan evaluasi lingkup	Kab. Luwu Timur	Dinas Pertanian dan	10.000.000	5.980.000	59.80	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM ,KEGIATAN,OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKATCAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			alat dan mesin pertanian		Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur							
			e-RDKK mendukung pendataan penerima pupuk bersubsidi	Kab. Luwu Timur	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	130.675.000	126.175.000	96.56	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
			Layanan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi	Kab. Luwu Timur	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	104.360.000	103.550.000	99.22	1 Layanan	1 Layanan	100	
	Kementerian Pertanian Ditjen Perkebunan	**Surat pengesahan DIPA- NOMOR : SP DIPA-018.05.4.199572/2022 Tanggal 17 November 2022.**	**Program Dukungan manajemen**		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	**89.600.000**	**81.107.400**	**90.52**				
			Layanan Umum	Kab. Luwu Timur	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	89.600.000	81.107.400	90.52	1 Layanan	1 Layanan	100	
			Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	**3.652.207.000**	**3.628.782.000**	**99.36**				
			Sarana Pengembangan Kawasan	Burau, Malili, Mangkutana , Wasuponda, Wotu	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	3.628.782.000	3.628.782.000	100	250 Ha	250 Ha	100	
			Program Dukungan Manajemen		Dinas Pertanian dan	**424.168.000**	**401.573.285**	**94.67**				

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM ,KEGIATAN,OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKATCAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur							
			Layanan manjemen Satker daerah	Kab. Luwu Timur	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	424.168.000	401.573.285	94.67	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
	Kementerian Pertanian Ditjen Tanaman Pangan	**Surat pengesahan DIPA-Nomor : SP-DIPA-018.03.4.199125/2022 Tanggal 02 Maret 2022**	**Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri**		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	**229.000.000**	**218.550.000**	**95.44**				
			Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	Kab. Luwu Timur	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	229.000.000	218.550.000	95.44	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	
			Program Dukungan Manajemen		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	**9.500.000**	**9.500.000**	**100**				
			Layanan perencanaan satker daerah	Kab. Luwu Timur	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	9.500.000	9.500.000	100	1 Layanan	1 Layanan	100	
			Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	**313.120.000**	**313.120.000**	**100**				
			Koordinasi, bimtek, monev dan pelaporan		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.	313.120.000	313.120.000	100			100	

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM ,KEGIATAN,OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKATCAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Luwu Timur							
			Com Sheller Mobile	Mangkutana	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	46.000.000	46.000.000	100	1 unit	1 unit	100	
			Com Sheller Mobile	Nuha dan Wasuponda	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	54.600.000	54.600.000	100	2 unit	2 unit	100	
			Power Threster	Malili, Wasuponda	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	126.000.000	126.000.000	100	6 unit	6 unit	100	
			Power Threster multiguna	Towuti	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	86.520.000	86.520.000	100	3 unit	3 unit	100	

Sumber : Laporan Perangkat Daerah Setelah Diolah Tahun 2022

TABEL 4.2
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI
YANG DILAKSANAKAN OLEH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022

NO	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM ,KEGIATAN,OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/KOTA	SKPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	**Pekerjaan Umum**	**Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 889/IV/Tahun 2022 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022**	**Program Penyelenggaraan Jalan**	Luwu Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur	**9.157.432.040**	**9.157.432.040**	**100**				
			Kegaiatan Pembangunan Jalan	Luwu Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur	9.157.432.040	9.157.432.040	100				
			Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru - Mahalona (Ruas Pekaloa - Tole)	*Luwu Timur*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur*	*9.157.432.040*	*9.157.432.040*	*100*	*1 Kegiatan Pembangunan Jalan*	*1 Kegiatan Pembangunan Jalan*	*100*	
2	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 889/IV/Tahun 2022, Tanggal 6 April 2022 Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Luwu**	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	**175,000,000.00**	**174,746,600.00**	**99.9**				

NO	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM ,KEGIATAN,OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/KOTA	SKPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Timur Tahun Anggaran 2022										
		Surat Edaran Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 444.1/4462/DPMD, Tanggal 10 Mei 2022 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Penanganan dan Gizi Buruk yang Bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022	Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yan bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabuapten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	175,000,000.00	174,746,600.00	99.9				
			Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	175,000,000.00	174,746,600.00	99.9				
			Peningkatan Derajat Pendidikan Perempuan dan Keluarga	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
			- Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat							

NO	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM ,KEGIATAN,OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/KOTA	SKPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					dan Desa							
			Makan	*Luwu Timur*	*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*	*20,350,000.00*	*20,350,000.00*	*100*	*814 kotak*	*814 kotak*	*100*	
			Snack	*Luwu Timur*	*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*	*16,280,000.00*	*16,280,000.00*	*100*	*1628 kotak*	*1628 kotak*	*100*	
			- Belanja Persediaan untuk di jual/di serahkan ke masyarakat	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98,180,000.00	98,180,000.00	100				
			Pemberian Makanan Tambahan	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98,180,000.00	98,180,000.00	100				
			Balita	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	86,000,000.00	86,000,000.00	100				
			- Susu Bubuk 400 Gram	*Luwu Timur*	*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*	*65,360,000.00*	*65,360,000.00*	*100*	*688 dos*	*688 dos*	*100*	
			- Vitamin Becafort	*Luwu Timur*	*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*	*20,640,000.00*	*20,640,000.00*	*100*	*688 botol*	*688 botol*	*100*	
			Bumil	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12,180,000.00	12,180,000.00	100				
			- Susu Bumil	*Luwu Timur*	*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*	*3,990,000.00*	*3,990,000.00*	*100*	*42 dos*	*42 dos*	*100*	
			- Vitamin	*Luwu*	*Dinas*			*100*	*42 botol*	*42 botol*	*100*	

NO	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM ,KEGIATAN,OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/KOTA	SKPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Timur	*Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*	*8,190,000.00*	*8,190,000.00*					
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak dan Penggandaan	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21,000,000.00	21,000,000.00	100				
			Pengadaan Media Kampanye dan Media Pembelajaran	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21,000,000.00	21,000,000.00	100				
			Spanduk	*Luwu Timur*	*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*	*11,400,000.00*	*11,400,000.00*	*100*	*228 meter*	*228 meter*	*100*	
			Baliho	*Luwu Timur*	*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*	*9,600,000.00*	*9,600,000.00*	*100*	*192 meter*	*192 meter*	*100*	
			Belanja Sewa Alat Ukur Lain-Lain	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19,190,000.00	18,936,600.00	98,6				
			Alat ukur status gizzi buruk	*Luwu Timur*	*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*	*19,190,000.00*	*18,936,600.00*	*98,6*	*1 paket*	*1 paket*	*100*	

Sumber : Laporan Perangkat Daerah Setelah Diolah Tahun 2022

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

TABEL 4.3
URAIAN CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT DAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/ Permasalahan	Upaya Upaya Penyelesaian	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	**Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan,Perdesaan Dan Transmigrasi**				**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur**
1	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1 Lembaga yang difasilitasi di Satuan Permukiman dan Pusat SKP pada Kawasan Transmigrasi	Masih belum maksimalnya Monitoring dan Pembinaan terhadap Lembaga Satuan Pemukiman Kawasan Transmigrasi dan belum rampungnya Pemyusunan AD/ART Poktan	Peningkatan dukungan SDM dan anggaran dalam Pembinaan Lembaga Satuan Pemukiman Kawasan Transmigrasi serta pendampingan langsung ke Poktan bersama penyuluh setempat	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
2	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	25 Orang yang difasilitasi memperoleh Layanan Sosial Budaya di Satuan Permukiman/Pusat SKP di Kawasan Transmigrasi	1.Penyesuaian budaya warga transmigran setempat dengan transmigran asal 2.Masih kurangnya jumlah tenaga lintas sector (Pendidikan dan Kesehatan) pada UPT SKPC SP 1 Koromalai	1.Dilakukan sosialisasi mempertemukan warga baik setempat maupun asal 2.Penambahan jumlah tenaga lintas sector (Pendidikan dan Kesehatan) pada UPT SKPC SP 1 Koromalai	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
3	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	92 KK difasilitasi Perpindahan dan Penempatan Warga Transmigrasi	Sarana Transportasi yang belum maksimal untuk mencapai Lokasi Kawasan Transmigrasi pada UPT SKPC Koromalai	Peningkatan Fasilitasi Transportasi dan akses jalan ke Wilayah Kawasan Transmigrasi	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
4	Bantuan Keluarga	115 Orang Transmigran yang Mendapatkan Bantuan untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan (Jadup umtuk 92 KK penempatan tahun 2022 dan 23 KK tahun 2021)	Terbatasnya Tenaga/petugas pada bagian logistic dan Gudang	Memaksimalkan petugas yang tersedia dengan Menyusun jadwal pembagian jadup	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
5	Bantuan Peralatan / Sarana	1 Unit Bantuan Sarana Produksi Pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP (Bantuan Sarana ProduksiPertanian dan Bibit ternak sapi sebanyak 26 ekor untuk 2 Kelompok)	Bantuan sarana produksi pertanian dan bibit ternak yang masih terbatas	Bantuan sarana produksi pertanian dan bantuan bibit ternak diberikan berdasarkan skala prioritas. Diberikan kepadaPoktan yang telah siap secara teknis dan administrasi.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
6	Sarana Pengembangan Kawasan	2 Unit Fasilitas Umum yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	Distribusi Air bersih ke warga transmigrasi pada UPT SKPC SP 1 Koromalai belum merata dan	Meningkatkan Sarana Air Bersih (SAB) pada Kawasan Transmigrasi berupa Penambahan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/ Permasalahan	Upaya Upaya Penyelesaian	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			maksimal yang disebabkan kurangnya debit air	penampungan Air Bersih	
7	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	50 meter Panjang jembatan yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	Sarana Transportasi dan akses jalan yang belum maksimal untuk mencapai Lokasi Kawasan Transmigrasi pada UPT SKPC Koromalai	Mengusulkan peningkatan akses jalan ke Pemerintah Pusat melalui kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
II	**Program Dukungan Manajemen**				**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur**
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	-	-	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
III	**Program Ketersediaan, Akses dan Komsumsi Pangan Berkualitas**				**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur**
1	Embung Pertanian	2 Unit	Kendala di hibah lahan dari kelompok tani	Sedapatkan mungkin lokasi yang diusulkan sudah jelas hibah lahannya	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
2	Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Tengah	1 unit	Kurang efektif karena masih membutuhkan tambahan biaya dalam pengoperasiannya		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
3	Jaringan Irigasi Tersier	19 unit	Masih ada lokasi persawahan yang membutuhkan Jaringan Irigasi	Penambahan anggaran untuk pembangunan Jaringan Irigasi	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
4	Rekomendasi Perlindungan LP2B dan Pengendalian Ahli Fungsi Lahan Pertanian	1 Rekomendasi	Sulitnya mencari lokasi untuk pengganti lahan yang akan dialihfungsikan	Sedapat mungkin lahan yang telah dimasukkan dalam Rekomendasi LP2B untuk tidak dialihfungsikan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
5	Bimtek, monitoring dan evaluasi lingkup alat dan mesin pertanian	1 Kegiatan	Setiap anggaran belanja alsintan tidak diikutkan dengan biaya bimtek untuk petani penerima	Pada saat penyusunan belanja alsintan maka seharusnya biaya bimtek untuk petani penerima dianggarkan agar penggunaan dan pemanfaatan alsintan lebih maksimal	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
6	e-RDKK mendukung pendataan penerima pupuk bersubsidi	1 Dokumen	1.tidak semua petani yang terdaftar dalam kelompok tani aktif dalam memberikan datanya, sehingga menyulitkan dalam penyusunan e RDKK (E alokasi)	1. peran aktif pengrus kelompok dan PPL dalam melakukan pembinaan terhadap petani yang ada diwilayah binaannya 2. yang lahannya lebih dari 2 Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/ Permasalahan	Upaya Upaya Penyelesaian	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2.sebagian besar Petani memiliki luas lahan Garapan lebih dari 2 Ha 3. Sebagian besar petani masih banyak yang bermasalah disebabkan data petani diSimluhtan tidak terupdate (meninggal dan Pindah), data NIK tidak sinkron dengan data Dukcapil	untuk menggunakan pupuk Non subsidi 3. Perlu perbaikan data Simluhtan secara periodik dan untuk NIK yang tidak sinkron dengan data Dukcapil untuk segera dilakukan perbaikan ke dinas terkait	
7	Layanan verfikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi	1 Layanan	1. Data t pubers dan data verval yang tidak sinkron dengan data e alokasi karena data petani di simluhtan yang belum terupdate, NIK dengan Data Dukcapil yang tidak sesuai 2. Kelengkapan administarsi penyaluran kios pengecer terkadang lambat	1. Perlu perbaikan data Simluhtan secara periodik dan untuk NIK yang tidak sinkron dengan data Dukcapil untuk segera dilakukan perbaikan ke dinas terkait 2. Sebaiknya dibuatkan kesepakatan batas akhir pemasukan dokumen penyaluran antara kios pengecer dan petugas verval sebelum batas akhir penginputan laporan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
IV	**Program Dukungan Manajemen**				**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur**
1	Layanan Umum	1 Layanan	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
V	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**				**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur**
1	Sarana Pengembangan Kawasan	250 Ha	1. masih ada petani sebagai penerima manfaat belum menanam bibit yang diberikan 2. bibit yang diberikan kurang berkembang dengan baik	Meningkatkan pengawasan dan peran penyuluh pertanian terhadap kelompok tani penerima manfaat agar memanfaatkan bantuan sesuai dengan peruntukkannya	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
VI	**Program Dukungan Manajemen**				**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur**
1	Layanan manajemen satker daerah	1 Dokumen	-	-	Dinas Pertanian dan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/ Permasalahan	Upaya Upaya Penyelesaian	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
VII	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**				**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur**
1	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	1 Kegiatan	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
VIII	**Program Dukungan Manajemen**				**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur**
1	Layanan Perencanaan Satker Daerah	1 Layanan	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
IX	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**				**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur**
1	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
	Corn sheller Mobile	1 unit	Ketersediaan alsintan yang masih kiurang	Perlu penambahan jumlah alsintan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
	Corn sheller	2 unit	Ketersediaan alat masih kurang	Perlu penambahan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
	Power Thresher	6 unit	Masih dinbutuhkan di daerah tertentu	Perlu penambahan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
X	**Program Penyelenggaraan Jalan**				**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur**
	Kegaiatan Pembangunan Jalan				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur
	Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru - Mahalona (Ruas Pekaloa - Tole)	1 Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru - Mahalona (Ruas Pekaloa - Tole)	Dari 14,8km total seluruh ruas jalan, yang sudah dibeton 11,326km. Masih terdapat 3,5km yang belum dibeton hingga tahun 2021. Pada tahun 2022 melalui	Memaksimalkan pengalokasian anggaran setiap tahunnya untuk menuntaskan ruas tersebut-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/ Permasalahan	Upaya Upaya Penyelesaian	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			bantuan keuangan telah di beton sekitar 1,702 km dan melalu APBD 525 meter. Dibutuhkan anggaran yang besar untuk menuntaskan seluruh ruas jalan.		
XI	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**				**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
	Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yan bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabuapten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Peningkatan Derajat Pendidikan Perempuan dan Keluarga				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	- Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk	Terlaksananyan Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk pada 8 Kecamatan dan 30 desa sesuai SK Bupati Luwu Timur Nomor 209/F-02/VI/Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting terintegrasi tahun 2022			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Makan	814 kotak	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Snack	1628 kotak	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	- Belanja Persediaan untuk di jual/di serahkan ke masyarakat				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pemberian Makanan Tambahan				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Balita	688 dos	-	-	Dinas Pemberdayaan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/ Permasalahan	Upaya Upaya Penyelesaian	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Masyarakat dan Desa
	- Susu Bubuk 400 Gram	688 botol	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	- Vitamin Becafort				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Bumil				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	- Susu Bumil	42 dos	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	- Vitamin	42 botol	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak dan Penggandaan				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pengadaan Media Kampanye dan Media Pembelajaran				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Spanduk	228 meter	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Baliho	192 meter	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Belanja Sewa Alat Ukur Lain-Lain				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Alat ukur status gizi buruk	1 paket	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sumber : Laporan Perangkat Daerah Setelah Diolah Tahun 2022

BAB V
P E N U T U P

Hasil penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Luwu Timur, disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Luwu Timur Akhir Tahun Anggaran 2022. Harapan terbesar adalah bagaimana proses pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2022 memberi dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat Luwu Timur atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Urusan Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan, dapat dilihat capaian kinerja program dan kegiatan serta permasalahan dan alternatif solusi, permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2022 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2023.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholder pembangunan, segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dan seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, yang telah memberikan dukungan dan kerja kerasnya dalam melaksanakan urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai urusan masing-masing.

Dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kami menyadari masih ditemukan beberapa permasalahan yang belum terselesaikan secara tuntas, walaupun telah dengan sungguh-sungguh diupayakan langkah-langkah perbaikan, namun pemerintah akan terus melakukan upaya kongkrit untuk mencapai target yang lebih optimal, tentunya didukung oleh seluruh elemen pemerintahan baik ditingkat kabupaten, provinsi dan pusat. Dengan demikian, laporan ini menjadi bahan informasi lengkap bagi DPRD Kabupaten Luwu Timur untuk menilai sejauh mana proses pembangunan berjalan dan memberi masukan demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi segala langkah dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Luwu Timur yang kita cintai.

Sekian dan Terima kasih.

Malili, Maret 2023

BUPATI LUWU TIMUR,

Drs. H. Budiman, M.Pd